



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) KOTA JAMBI  
TAHUN 2024**



**Penguatan Stabilitas Ekonomi,  
Daya Saing Sumber Daya Manusia  
dan Daerah, Infrastruktur yang  
handal serta Lingkungan  
Hidup Berkelanjutan**





PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA JAMBI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
7. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi Tahun 2024 untuk menentukan kegiatan dan perkiraan besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Kota Jambi Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (3) RKPD Kota Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
  - a. pedoman bagi OPD dalam menyusun rencana kerja OPD Tahun 2024; dan
  - b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2024.
- (4) RKPD Kota Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

- keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

### Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2024, maka :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

### Pasal 4

Tujuan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 adalah :

- a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah; dan
- b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

## BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

### Pasal 5

- (1) RKPD Kota Jambi Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - g. BAB VII : Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

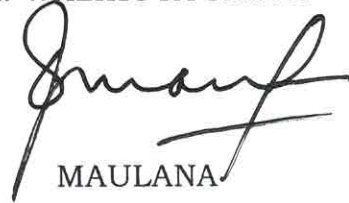
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 03 Juli 2023

Plt. WALIKOTA JAMBI



MAULANA

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4.1. Maksud .....	I-6
1.4.2. Tujuan .....	I-6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) .....	I-6
<b>BAB II       GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota .....	II-1
2.1.1.2. Topografi .....	II-3
2.1.1.3. Geologi .....	II-3
2.1.1.4. Klimatologi .....	II-4
2.1.1.5. Hidrologi dan Hidrogeologi .....	II-6
2.1.1.6. Penggunaan Lahan .....	II-8
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana .....	II-9
2.1.1.8. Kondisi Demografis .....	II-11
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-15
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-17
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-17
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial .....	II-32
2.1.2.2.1 Pendidikan .....	II-32
2.1.2.1.2 Kesehatan .....	II-37
2.1.2.1.3 Ketenagakerjaan .....	II-41

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-41
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-43
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar	II-43
2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan .....	II-43
2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan .....	II-47
2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-50
2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-56
2.1.3.1.5 Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	II-60
2.1.3.1.6 Urusan Sosial .....	II-62
2.1.3.2. Urusan Layanan Wajib Non Dasar ....	II-63
2.1.3.2.1 Tenaga Kerja .....	II-63
2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ....	II-67
2.1.3.2.3 Pangan .....	II-69
2.1.3.2.4 Pertanahan .....	II-71
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup .....	II-73
2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil .....	II-76
2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat	II-77
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana....	II-78
2.1.3.2.9 Perhubungan .....	II-79
2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika	II-82
2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .....	II-86
2.1.3.2.12 Penanaman Modal .....	II-88
2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga	II-90
2.1.3.2.14 Statistik .....	II-90
2.1.3.2.15 Persandian .....	II-91
2.1.3.2.16 Kebudayaan .....	II-92
2.1.3.2.17 Perpustakaan .....	II-92
2.1.3.2.18 Kearsipan .....	II-94
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-94
2.1.3.3.1 Pariwisata .....	II-94
2.1.3.3.2 Pertanian .....	II-95



2.1.3.3.3	Perdagangan .....	II-97
2.1.3.3.4	Perindustrian .....	II-98
2.1.3.3.5	Kelautan dan perikanan .....	II-100
2.1.3.4.	Fokus Layanan Penunjang Urusan ...	II-101
2.1.3.4.1	Perencanaan Pembangunan .....	II-101
2.1.3.4.2	Keuangan .....	II-103
2.1.3.4.3	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan .....	II-104
2.1.3.4.4	Penelitian dan Pengembangan.....	II-106
2.1.3.4.5	Pengawasan .....	II-106
2.1.3.4.6	Sekretariat Dewan .....	II-108
2.1.3.4.7	Sekretariat Daerah .....	II-108
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-109
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-110
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-113
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-116
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-118
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD .....	II-122
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-325
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	II-325
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	II-327

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Global .....	III-1
3.1.2.	Kondisi Perekonomian Nasional .....	III-2
3.1.3.	Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi .....	III-11
3.1.4.	Kondisi Perekonomian Kota Jambi .....	III-15
3.1.4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	III-18
3.1.4.2	Pendapatan Perkapita .....	III-23
3.1.4.3	Inflasi .....	III-24
3.1.4.4	Koefisien Gini.....	III-26
3.1.5.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	III-18

3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-28
3.2.1.	Capaian APBD Kota .....	III-29
3.2.1.1.	Pendapatan Daerah .....	III-31
3.2.1.2.	Belanja Daerah .....	III-40
3.2.1.3.	Pembiayaan Daerah .....	III-50
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2.	Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV-7
4.2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.....	IV-8
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024 .....	IV-12
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024 .....	IV-13
4.2.4.	Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024 ....	IV-14
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	
5.1.	Rencana Program Pembangunan.....	V-1
5.2.	Telaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	V-27
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan .....	II-2
2.2	Penggunaan Lahan di Kota Jambi .....	II-8
2.3	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018–2022 (Juta Rupiah) .....	II-21
2.4.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (Juta Rupiah) .....	II-22
2.5.	Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018–2022 .....	II-23
2.6	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 .....	II-26
2.7.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2018–2022 .....	II-27
2.8.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2018–2022 .....	II-28
2.9.	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2018–2022 .....	II-29
2.10.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018–2022 .....	II-30
2.11.	Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018–2022.....	II-37
2.12.	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018–2022 ...	II-41
2.13.	Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya .....	II-42
2.14.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi	

Tahun 2018–2022.....	II-43
2.15. Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018–2022 .....	II-44
2.16. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-46
2.17. Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	II-46
2.18. Angka KelulusanSD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-47
2.19. Rasio IPM per Satuan Balita Tahun 2018-2022 .....	II-47
2.20. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022.....	II-48
2.21. Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022 .....	II-48
2.22. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022 .....	II-48
2.23. Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota.....	II-58
2.24. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022 .....	II-60
2.25. Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum Di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-61
2.26. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-67
2.27. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-67
2.28. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-68
2.29. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022 .....	II-71
2.30. Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2018-2022 .....	II-72
2.31. Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi .....	II-73
2.32. Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-74
2.33. Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2018-2022	II-75

2.34.	Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-77
2.35.	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat .....	II-77
2.36.	Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-78
2.37.	Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-79
2.38.	Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022 .....	II-81
2.39.	Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022 .....	II-84
2.40.	Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-88
2.41.	Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) Kota Jambi 2018-2022 .....	II-89
2.42.	Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2018-2022 .....	II-89
2.43.	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	II-90
2.44.	Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-91
2.45.	Capaian Urusan Kebudayaan .....	II-92
2.46.	Capaian Urusan Perpustakaan .....	II-93
2.47.	Capaian Urusan Kearsipan .....	II-94
2.48.	Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-95
2.49.	Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-96
2.50.	Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2018-2022...	II-98
2.51.	Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-99
2.52.	Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2018-2022...	II-102
2.53.	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-103
2.54.	Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-104
2.55.	Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-105
2.56.	Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2018-2022....	II-107
2.57.	Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi	

	Tahun 2018-2022 .....	II-108
2.58.	Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-109
2.59.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-111
2.60.	Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Persen) .....	II-112
2.61.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-114
2.62.	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-115
2.63.	Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022 .....	II-116
2.64.	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-117
2.65.	Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-118
2.66.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-120
2.67.	Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-120
3.1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah) .....	III-4
3.2.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah) .....	III-5
3.3.	Sasaran Ekonomi RKP 2023 .....	III-7
3.4.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen) .....	III-11
3.5.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen) .....	III-12
3.6.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 .....	III-19
3.7.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022 .....	III-20

3.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) .....	III-21
3.9.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022 .....	III-24
3.10.	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Kota Jambi Bulan Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) .....	III-25
3.11.	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2021 s.d Tahun 2025 .....	III-30
3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2021 dengan TA 2022 .....	III-33
3.13.	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dengan TA 2022 .....	III-35
3.14.	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 dengan TA 2021 .....	III-37
3.15.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2022 ....	III-37
3.16.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2021 s.d Tahun 2025 .....	III-44
3.17.	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 .....	III-46
3.18.	Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 .....	III-47
3.19.	Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 .....	III-49
3.20.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 s.d Tahun 2025 .....	III-51
4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi .....	IV-5
4.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan .....	IV-12
4.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan .....	IV-13

4.4.	Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi.....	IV-14
5.1.	Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2024 .....	V-2
6.1.	Indikator Kinerja Utama Kota Jambi .....	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 .....	VI-2



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Diagram Alur Penyusunan Rancangan Akhir RKPD .....	I-2
2.1.	Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi .....	II-2
2.2.	Peta Topografi Kota Jambi.....	II-3
2.3.	Formasi Geologi Kota Jambi .....	II-4
2.4.	Suhu/Temperatur Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Menurut Bulan Tahun 2022 .....	II-5
2.5.	Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Menurut Bulan Tahun 2022 .....	II-5
2.6.	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2022 .....	II-6
2.7.	Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi .....	II-9
2.8.	Peta Rawan Bencana Kota Jambi .....	II-10
2.9.	Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-11
2.10.	Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-12
2.11.	Distribusi Penduduk Kota Jambi Tahun 2022 per Kecamatan....	II-13
2.12.	Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2022 per Kecamatan..	II-14
2.13.	Persentase Penduduk Kota Jambi Tahun 2022 berdasarkan kelompok umur .....	II-15
2.14.	Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-17
2.15.	Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi 2018-2022 .....	II-18
2.16.	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	II-25
2.17.	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-31
2.18.	Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2018-2022	II-32
2.19.	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-33
2.20.	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-34

2.21.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-34
2.22.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat dan SMP/MTS/Sederajat di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-35
2.23.	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-36
2.24.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat dan SMP/MTS/Sederajat di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-37
2.25.	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022 (dalam tahun) .....	II-38
2.26.	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-39
2.27.	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-40
2.28.	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022	II-41
2.29.	Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga .....	II-42
2.30.	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022	II-44
2.31.	Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2022 .....	II-45
2.32.	Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2022 .....	II-45
2.33.	Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-51
2.34.	Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2018-2021 .....	II-53
2.35.	Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-54
2.36.	Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-55
2.37.	Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal .....	II-56
2.38.	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022 .....	II-57
2.39.	Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022 .....	II-57
2.40.	Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi .....	II-59
2.41.	Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-63

2.42.	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022	II-64
2.43.	Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-64
2.44.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-65
2.45.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	II-66
2.46.	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022.....	II-66
2.47.	Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-69
2.48.	Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-75
2.49.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-85
2.50.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Jambi.	II-85
2.51.	Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-86
2.52.	Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi Tahun 2018-2022 .....	II-101
2.53.	Sumber Air Bersih .....	II-115
2.54.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-116
2.55.	Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2018-2022	II-119
2.55.	TPAK dan TPT Di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	II-120
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2019-2022.....	III-18
3.2.	Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022 .....	III-27
3.3.	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022 .....	III-34
3.4.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2022 .....	III-34
3.5.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022...	III-36

3.6.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022 .....	III-36
3.7.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022 .	III-38
3.8.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2022.....	III-38
3.9.	Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2022 .....	III-45
3.10.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022 .....	III-45
3.11.	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022 .....	III-47
3.12.	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022 .....	III-48
3.13.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022 .....	III-49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

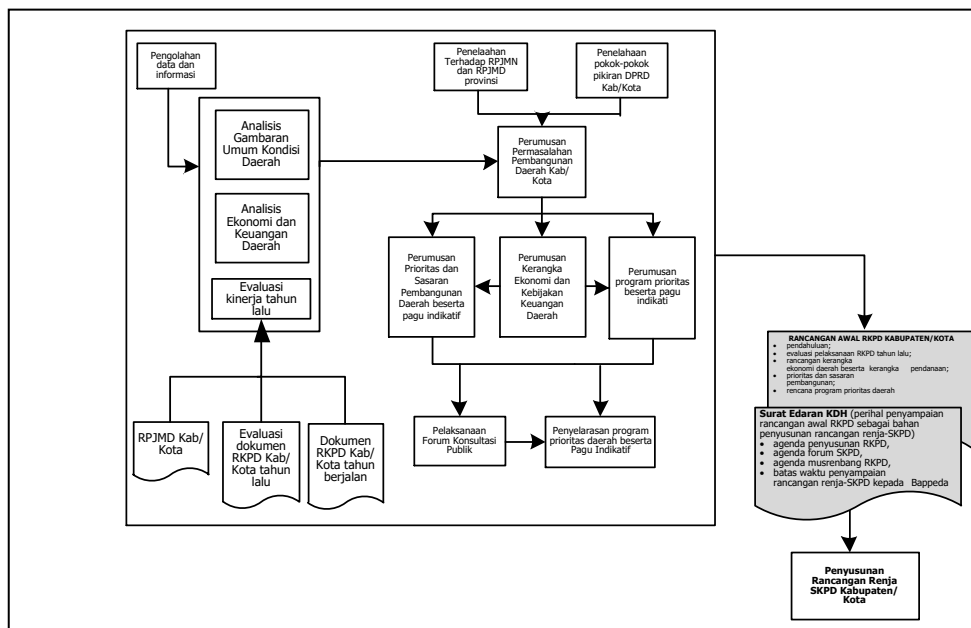
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu *Sistem Perencanaan* guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir atau Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian tiga pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa Rancangan Akhir RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah, untuk itu dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 ini berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Diagram alur penyusunan Rancangan Akhir RKPD

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  14. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388)
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);



17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033. (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kota Jambi 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rankhir RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

## **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.4.1 Maksud**

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### **1.4.2 Tujuan**

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program/kegiatan yang didasarkan pada Prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah.

## **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

### **BABI PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, RKP/program strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Jambi untuk penyusunan RKPD Kota Jambi.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

#### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan Tahun 2024 tahunan yang diambil dari dokumen Rancangan RPD Kota Jambi.

#### **4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jambi dan RPJMN Republik Indonesia.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **5.1. Rencana Program Prioritas**

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2024, rekapitulasi belanja setiap Perangkat Daerah.

### **5.2. Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2023. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

### **5.3. Analisis dan arahan Kawasan Pengembangan Wilayah Terpadu**

Berisi arahan pengembangan kawasan di Kota Jambi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Jambi.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Daerah**

Kota Jambi adalah Ibukota sekaligus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Provinsi Jambi, Kota Jambi mempunyai jumlah penduduk pada siang hari mencapai  $\pm$  1 juta jiwa sedangkan pada malam hari  $\pm$  750 jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jambi berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Jambi. Kondisi umum daerah Kota Jambi dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

###### **2.1.1.1 Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota**

Kota Jambi secara geografis terletak pada koordinat 01°32'48" sampai dengan 01°41'46,07" Lintang Selatan dan 103°31'27,19" sampai dengan 103°40'51,80" Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Luas keseluruhan wilayah administrasi Kota Jambi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 seluas 205,38 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 39 Tahun 2013 seluas 175,53 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kota Jambi terbagi atas 11 Kecamatan

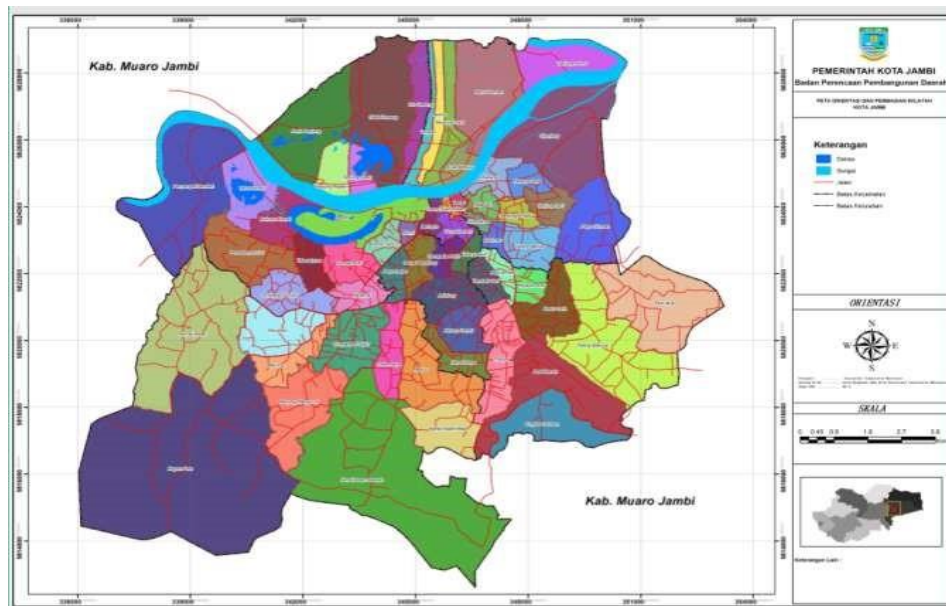
sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan 6 kelurahan di kota Jambi sehingga yang sebelumnya berjumlah 62 Kelurahan menjadi 68 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)	JUMLAH KELURAHAN
1.	Telanaipura	19,20	10,93	7
2.	Kotabaru	26,26	14,96	7
3.	Jambi Timur	14,32	8,15	9
4.	Jambi Selatan	7,51	4,27	5
5.	Jelutung	7,63	4,34	7
6.	Pasar Jambi	1,67	0,95	4
7.	Danau Sipin	7,27	4,14	5
8.	Danau Teluk	15,20	8,65	5
9.	Pelayangan	12,77	7,27	6
10.	Alam Barajo	39,87	22,71	7
11.	Paal Merah	23,77	13,54	6
Jumlah		175,53	100	68

Sumber : RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2023 (data diolah)

Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.

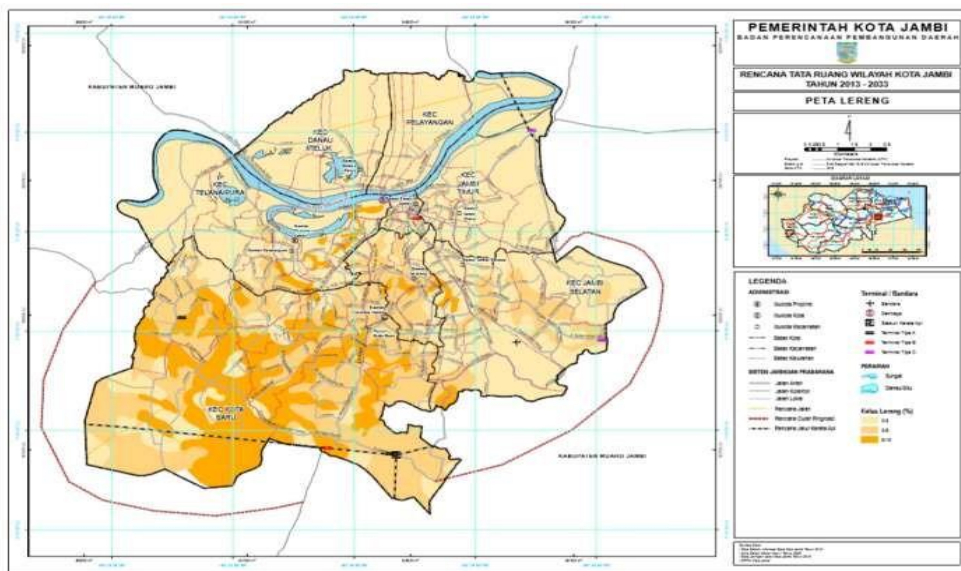


Sumber : RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2023 (data diolah)

Gambar 2.1.  
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah Kota Jambi

### 2.1.1.2 Topografi

Secara umum berdasarkan bentang alamnya, Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti : Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 - 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 - 40 meter dari permukaan laut.



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2021 (data diolah)

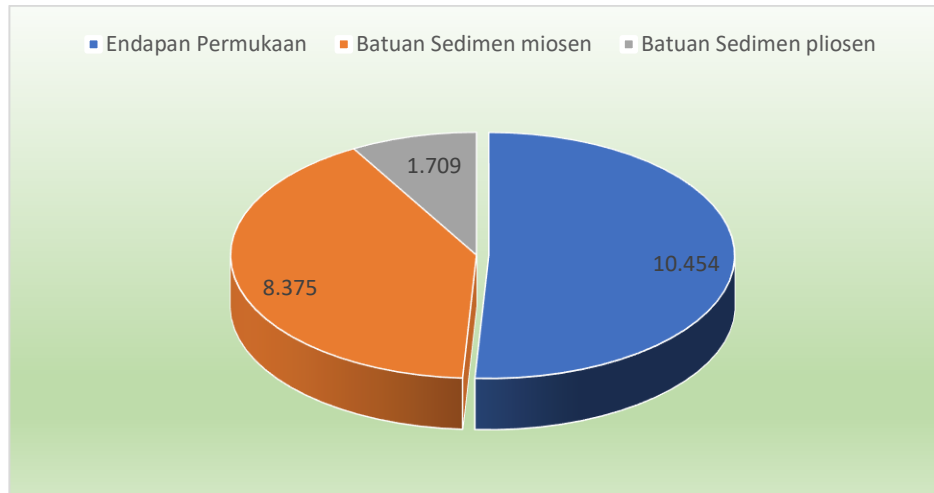
Gambar 2.2.  
Peta Topografi Kota Jambi

### 2.1.1.3 Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. berikut.





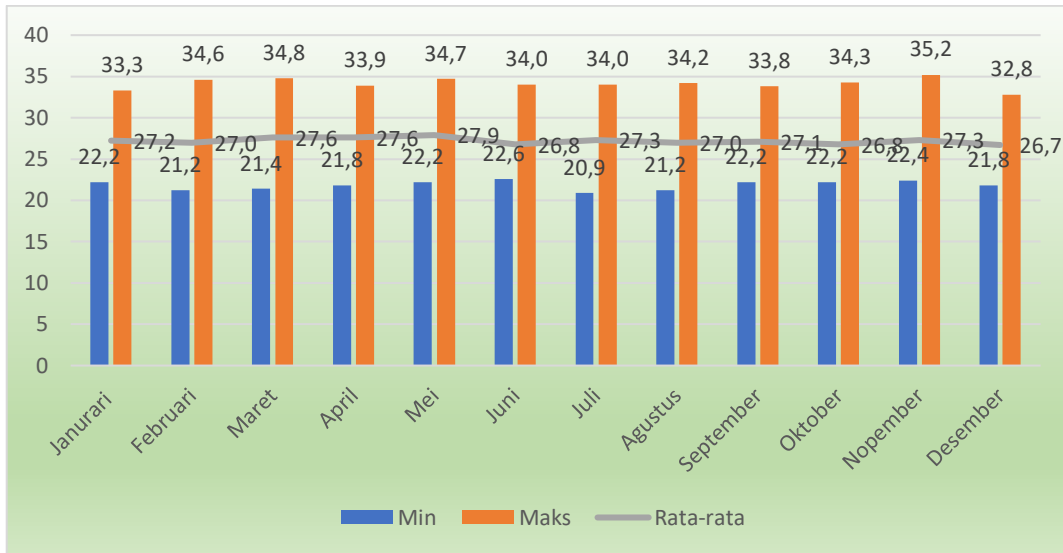
Sumber: Data Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2013

Gambar 2.3.  
Formasi Geologi Kota Jambi

#### 2.1.1.4 Klimatologi

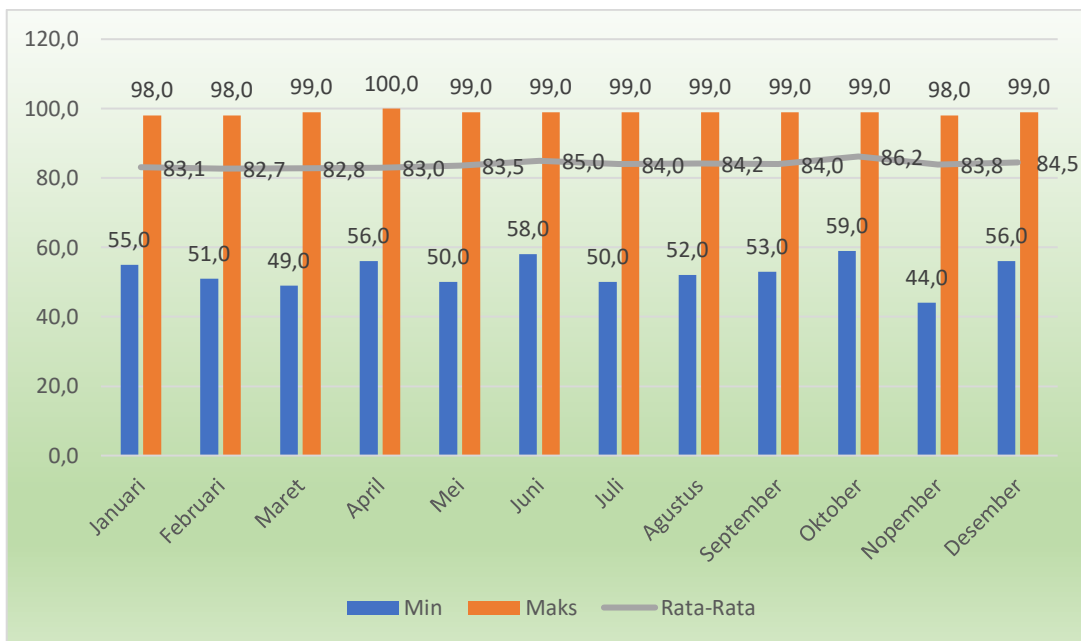
Pada tahun 2022 umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat musim barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April-bulan Oktober, sementara musim timur angin bertiup ke arah timur dan selatan yang berlangsung pada bulan Oktober-bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2022 kelembaban udara terendah 44,0% pada bulan November, sedangkan tertinggi sebesar 100,0% pada bulan April. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober yaitu 435,2 mm<sup>3</sup> dan paling rendah terjadi pada bulan April yaitu 126,6 mm<sup>3</sup>. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 23 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 12 hari terjadi pada bulan September. Suhu, kelembaban udara, curah hujan dan hari hujan menurut bulan pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut



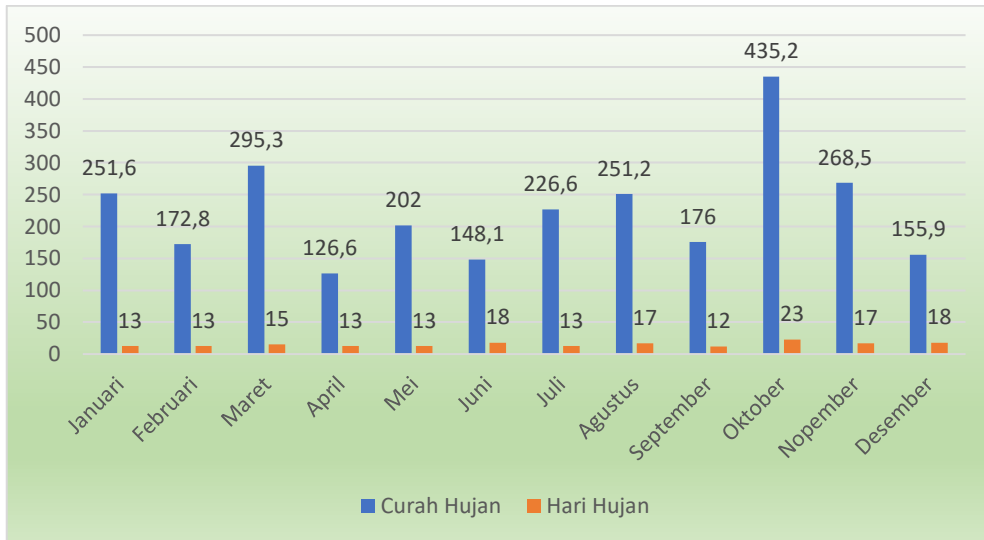
Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.4.  
Suhu/Temperatur Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Menurut Bulan Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.5.  
Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata  
Menurut Bulan Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.6.  
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Tahun 2022

### 2.1.1.5 Hidrologi dan Hidrogeologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari sehingga membentuk morfologi kota terbelah dengan 2 (dua) bagian besar yaitu bagian Selatan dan bagian Utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah Kota Jambi. Pada wilayah ini sedikit nya terdapat 7 (tujuh) buah anak Sungai Batanghari, yaitu :

1. Sungai Kenali Besar

DAS Kenali Besar memiliki panjang sungai 13,79 Km dan luas 3.623 Ha (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga hektar) melewati Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Alam Barajo Kecamatan Telanaipura, kemudian masuk kedalam Danau Teluk Kenali menuju ke Danau Sipin dan akhirnya akan bermuara ke Sungai Batanghari.

2. Sungai Kenali kecil

DAS Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh Sembilan hektar), melewati Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Telanaipura kemudian masuk ke danau teluk kenali menuju ke danau sipin dan bermuara ke Sungai Batanghari.

3. Sungai Kambang

DAS Kambang dengan panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hektar) Daerah pengaliran Sungai Kambang melewati Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Telanaipura dan bermuara di danau sipin dan berakhir di sungai Batanghari.

4. Sungai Asam

DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar) Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pasar Jambi dan berakhir di sungai Batanghari.

5. Sungai Tembuku

DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar). Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Kecamatan Jambi Selatan, sebagian antara Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Timur dan berakhir di sungai Batanghari.

6. Sungai Selincah

DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km dan luas 1.887 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar) Daerah pengaliran Sungai Selincah meliputi Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur dan Berakhir di Sungai Batanghari.

7. Sungai Danau Teluk

DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh Sembilan hektar). Daerah pengaliran Sungai Danau teluk Mengalir dari sungai Batanghari menuju danau teluk di Kecamatan Danau teluk.

Disamping itu, selain berfungsi hidrologis juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

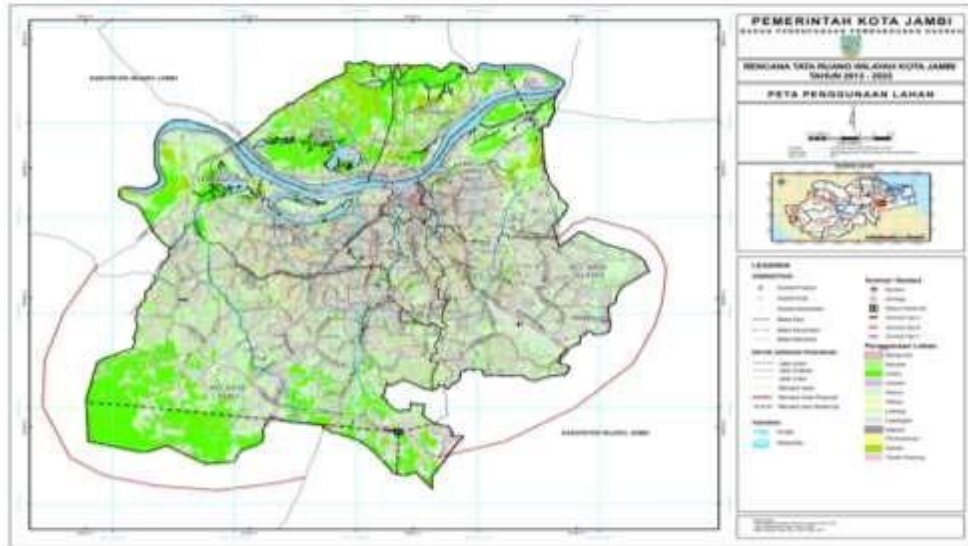
### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Dari Citra satelit Kota Jambi tahun 2022 dengan memperhatikan kemajuan pembangunan tahun 2022 dengan skala 1:5.000 dengan persentase tertinggi pada penggunaan tanah campuran sebesar 26,62%, Pekarangan sebesar 23,73% dan Bangunan 17,39%. Secara rinci penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2  
Penggunaan Lahan di Kota Jambi

PENGUNAAN LAHAN	LUAS	
	HEKTAR	%
Badan Air	1.108,59	6,53
Bangunan	2.952,50	17,39
Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota	4,92	0,03
Hutan Rawa/Gambut	129,11	0,76
Hutan Rimba	21,46	0,13
Jalan	686,45	4,04
Padang Golf	12,79	0,08
Pasir/Bukit Pasir Darat	9,58	0,06
Pekarangan	4.030,24	23,73
Perkebunan/Kebun	568,50	3,35
Permukaan/Lapangan diperkeras	91,49	0,54
Rumput	575,14	3,39
Sawah	333,46	1,96
Semak Belukar	674,34	3,97
Tanah Kosong	616,47	3,63
Tanah Campuran	4.521,72	26,62
Tegalan/Ladang	646,07	3,80
Ututilitas	1,32	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>16.984,15</b>	<b>100</b>

Sumber: Interpretasi Citra Worldview Liputan Tahun 2018 (data diolah)



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2033, 2022

Gambar 2.7.  
Peta Penggunaan Lahan di Kota Jambi

#### 2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013 membagi kawasan rawan bencana di Kota Jambi menjadi kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran.

Kawasan rawan bencana banjir adalah meliputi Kecamatan Telanaipura; Kecamatan Pasar Jambi; Kecamatan Jambi Timur; Kecamatan Danau Teluk; dan Kecamatan Pelayangan. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui:

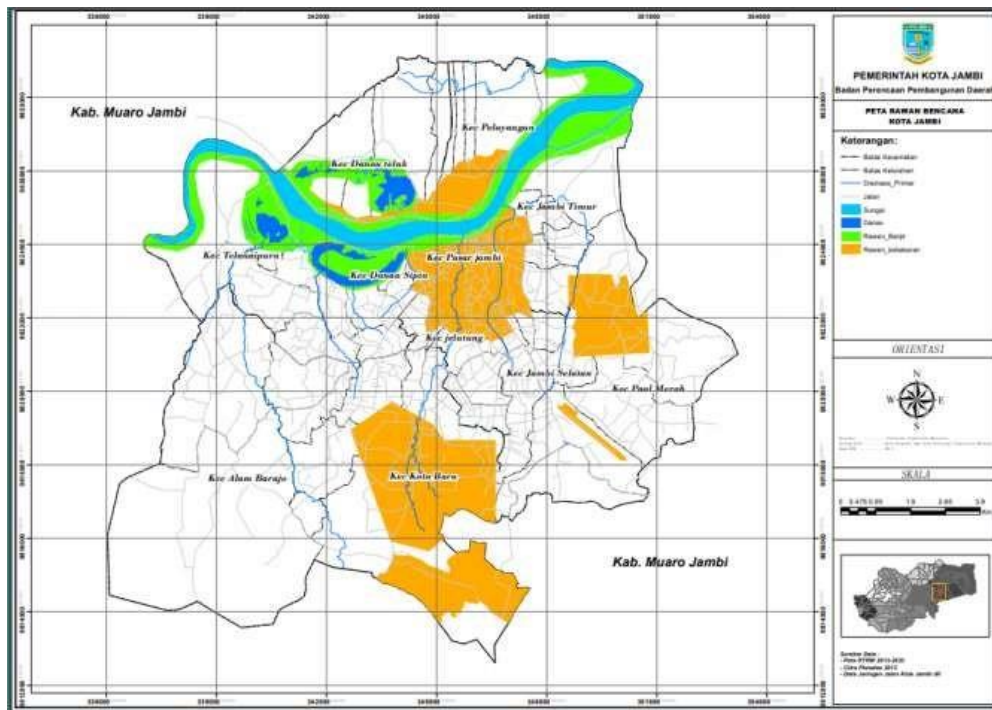
- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
- c. Melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan-kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Sedangkan Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Jambi, meliputi:

- a. Kecamatan Danau Teluk
- b. Kecamatan Pelayangan
- c. Kecamatan Telanaipura
- d. Kecamatan Pasar Jambi
- e. Kecamatan Jambi Timur
- f. Kecamatan Jelutung

Adapun rencana pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui:

- a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan;
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi-lokasi rawan bencana;
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.



Sumber: RTRW Kota Jambi 2013-2013

Gambar 2.8.  
Peta Rawan Bencana Kota Jambi

### 2.1.1.8 Kondisi Demografis

#### 1. Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kota Jambi pada kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 598.103 jiwa, dan terus meningkat menjadi 619.553 jiwa pada tahun 2022.

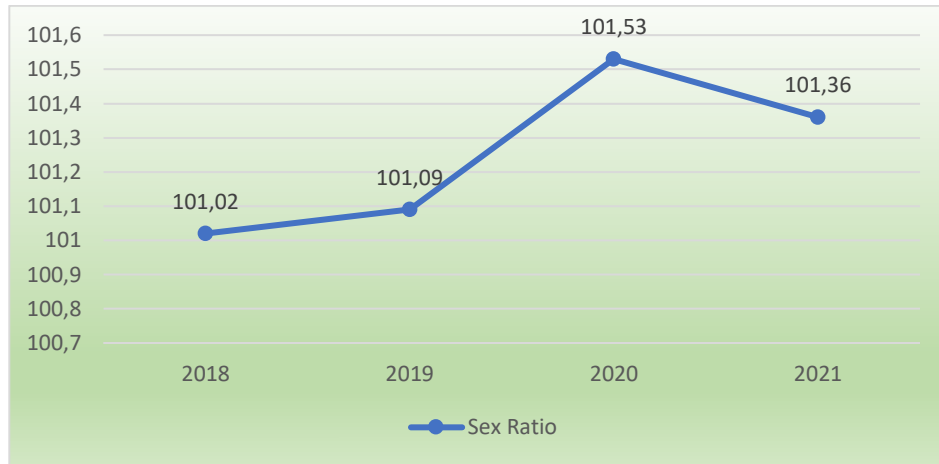


Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

Gambar 2.9.  
Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2018-2022

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,02 sampai dengan 101,53 untuk kurun waktu tahun 2018-2022. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Seperti dilihat pada gambar berikut.





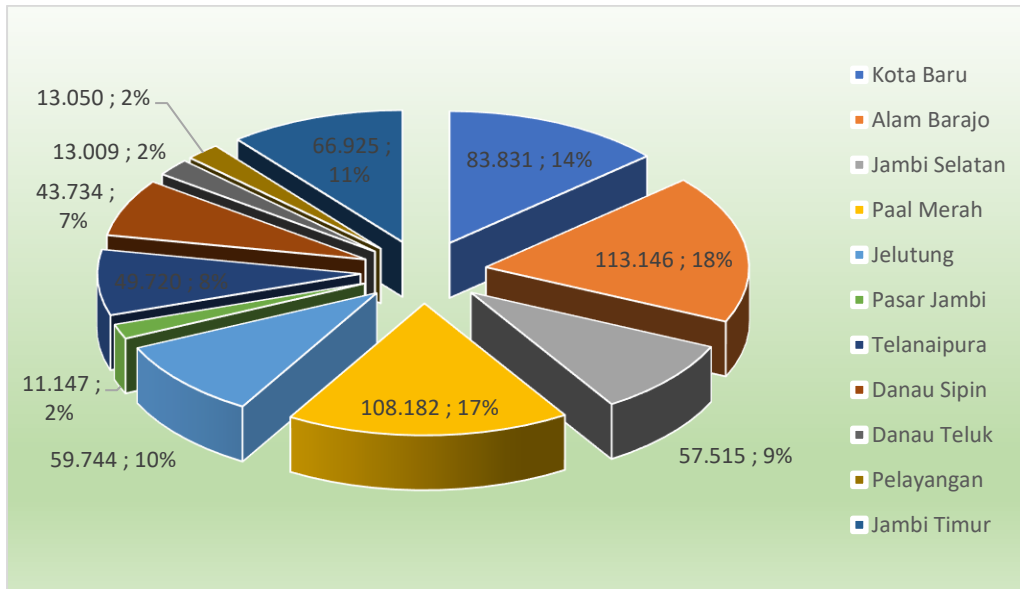
Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

Gambar 2.10.  
Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2018-2022

## 2. Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Distribusi atau sebaran penduduk tertinggi pada tahun 2022 berada di Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah. Jumlah penduduk tertinggi bukan berarti kepadatan penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah juga tinggi. Dari distribusi atau sebaran penduduknya di 11 kecamatan di Kota Jambi, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan penduduk sebanyak 113.146 jiwa pada tahun 2022 atau sekitar 18,03 persen dari total penduduk Kota Jambi Sementara itu kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Pasar Jambi yaitu sebanyak 11.147 jiwa, atau 1,83 persen dari total penduduk Kota Jambi.

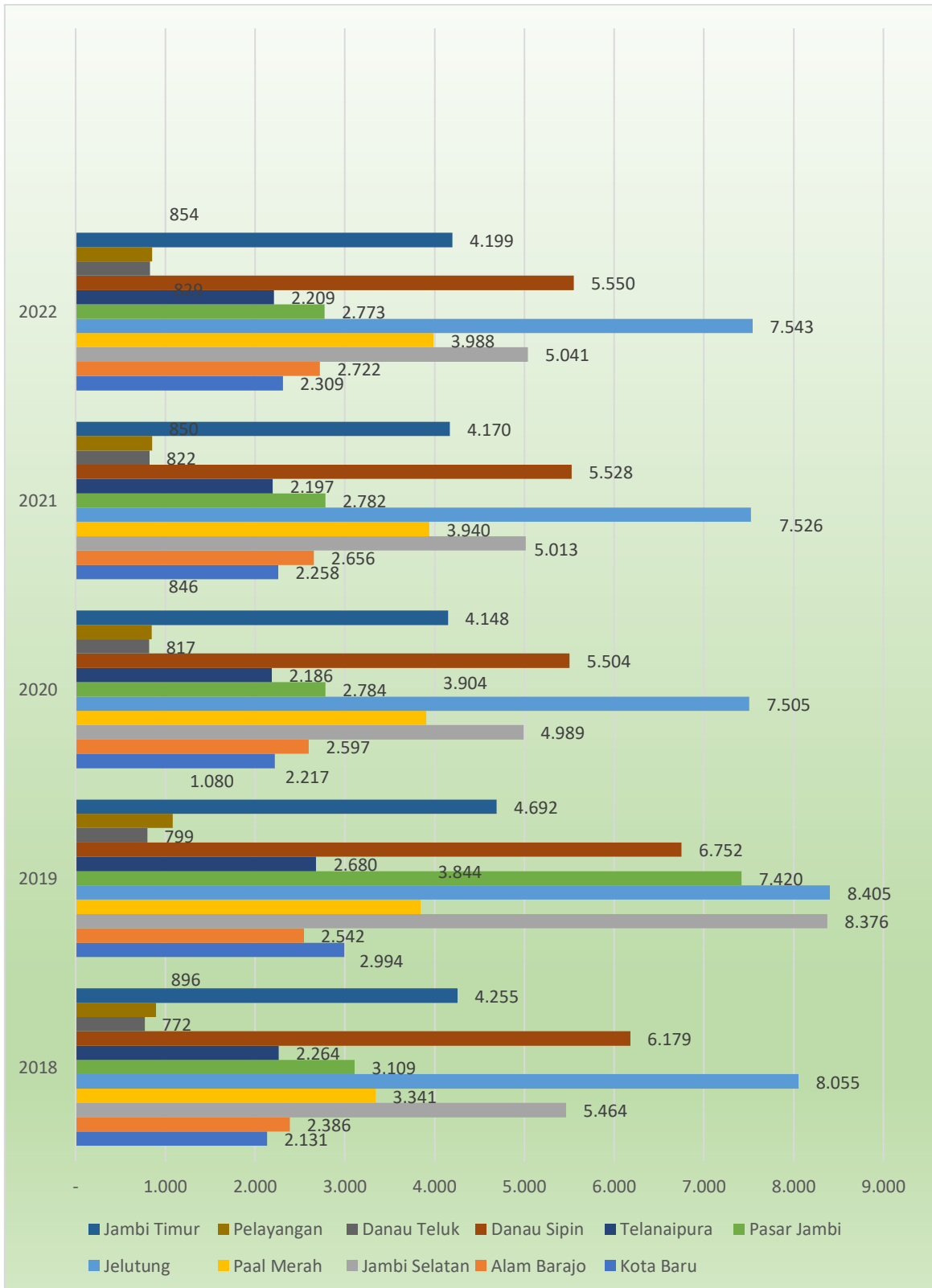
Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Alam Barajo dikarenakan kecamatan ini mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Distribusi penduduk Kota Jambi Tahun 2022 terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

Gambar 2.11.  
Distribusi Penduduk Kota Jambi Tahun 2022 per Kecamatan

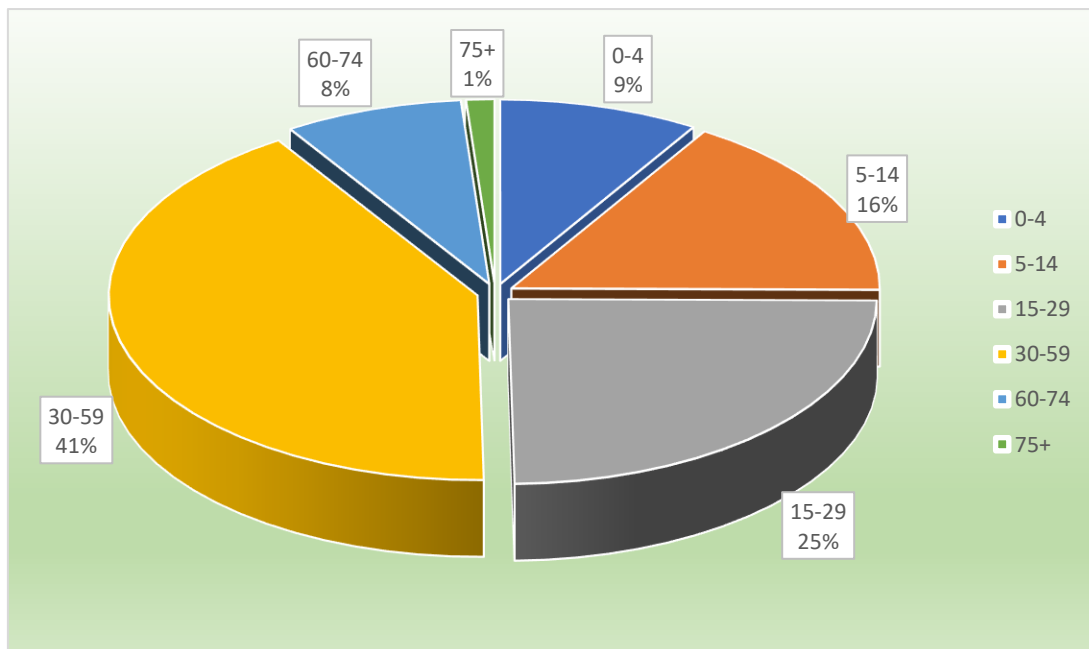
Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di dekat pusat kota, yaitu Kecamatan Jelutung 7.543 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2022, Kecamatan Danau Sipin 5.500 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Jambi Selatan 5.041 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 854 Jiwa/Km<sup>2</sup> hingga 4.199 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan yang berada di kawasan dekat pusat kota dan 8 kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.12.  
Kepadatan Penduduk Kota Jambi Tahun 2022 per Kecamatan

### 3. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Dalam konteks struktur usia, penduduk Kota Jambi tahun 2022 paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 52.195 jiwa atau sekitar 8,42% dari jumlah penduduk, diikuti rentang usia 20-24 tahun sebanyak 50.919 jiwa atau sekitar 8,22% dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 56.266 jiwa atau sekitar 9,08% dari jumlah penduduk. Secara lengkap komposisi penduduk Kota Jambi Tahun 2022 menurut kelompok umur (jiwa) disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2022 (data diolah)

Gambar 2.13.  
Persentase Penduduk Kota Jambi Tahun 2022  
berdasarkan kelompok umur

#### 2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah Kota Jambi, teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 pengembangan struktur ruang Kota Jambi memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- a) Perwujudan pusat - pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- b) Peningkatan aksesibilitas perkotaan; dan
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
  - Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
  - Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional diseluruh wilayah kota; dan
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
  - Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
  - Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
  - Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
  - Pengembangan kawasan strategis cagar budaya

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut:

- a) Kawasan strategis dari perspektif ekonomi, pada kawasan perdagangan dan jasa di BWK I Kecamatan Pasar Jambi, sebagian Kecamatan Jambi Timur dan sebagian Kecamatan Jelutung;
- b) Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya, pada kawasan Jambi Kota Seberang, Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

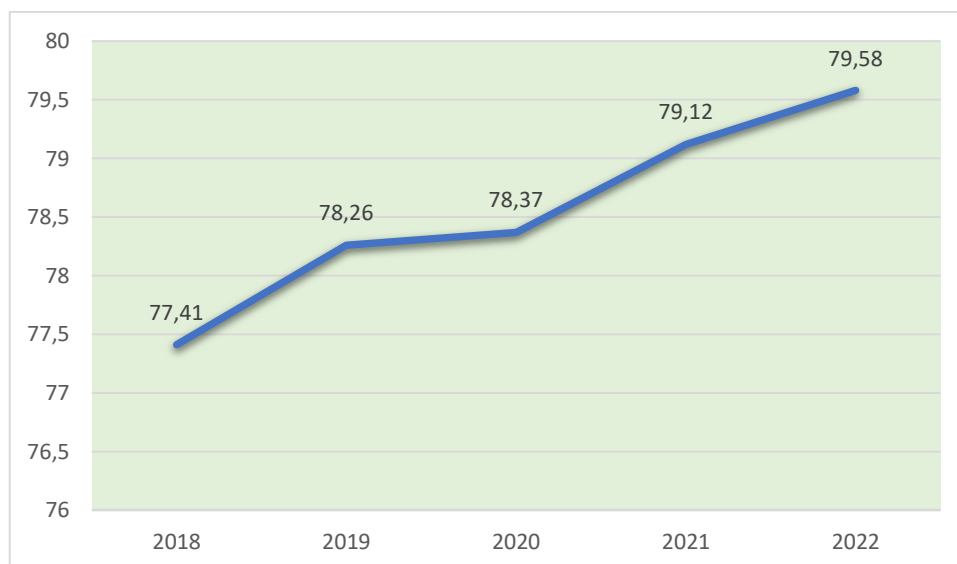
### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Jambi Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

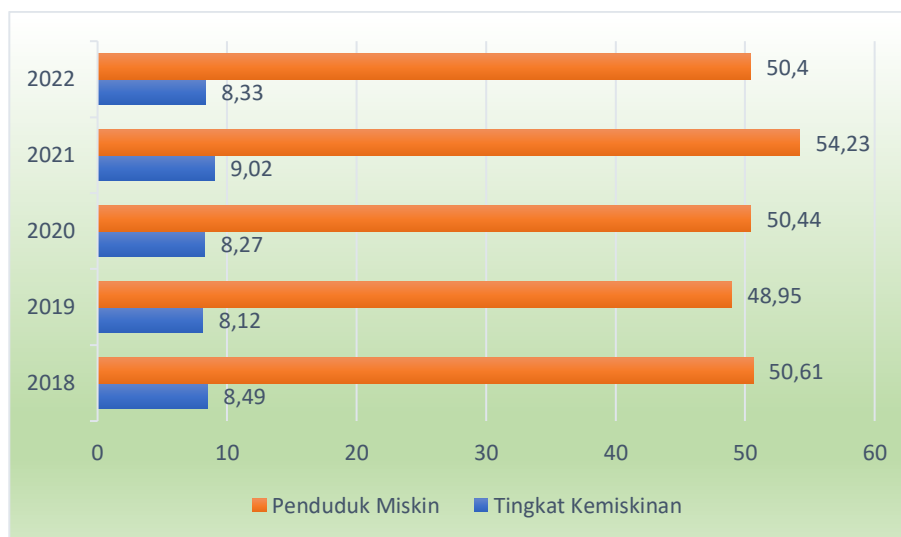
Gambar 2.14.  
Perkembangan IPM Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi terus mengalami kenaikan, pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,41 poin meningkat menjadi 79,58 poin pada tahun 2022 atau mengalami kenaikan 2,317 poin. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

menandakan bahwa angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah serta pendapatan perkapita masyarakat semakin baik.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.15.  
Perkembangan Kemiskinan Kota Jambi 2018-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana tingkat kemiskinan pada tahun 2022 menurun menjadi 8,33% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,02. Hal ini dikarenakan perekonomian yang semakin membaik setelah pandemi Covid yang melanda Indonesia sehingga masyarakat miskin menjadi berkurang dari 54,23 di tahun 2021 menjadi 50,4.

### 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

#### *a. Pendekatan Produksi*

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan satu tahun). Unit-unit produksi



dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu : (1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) Pengadaan listrik, (5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) Transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) Informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) Real estate, (13) Jasa perusahaan, (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) Jasa pendidikan, (16) Jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) Jasa lainnya.

#### ***b. Pendekatan Pengeluaran***

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) Konsumsi pemerintah, (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) Perubahan inventori & diskrepani statistik, (6) Ekspor barang dan jasa, dan (7) Impor barang dan jasa.

#### ***c. Pendekatan Pendapatan***

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan dan tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Nilai PDRB menurut lapangan usaha bisa disajikan atas dasar harga berlaku yang digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dan juga dapat disajikan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018–2022 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	342,17	341,08	344,91	312,08	331,28
B Pertambangan dan Penggalian	579,55	548,01	368,32	477,45	654,55
C Industri Pengolahan	2.944,76	3.055,64	3.195,60	3.515,91	3 954,62
D Pengadaan Listrik dan Gas	61,40	67,83	70,19	75,26	85,70
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,41	83,91	81,73	84,21	92,81
F Konstruksi	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3.028,75	3 148,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.877,83	9.541,02	9.226,38	10.437,11	11 999,96
H Transportasi dan Pergudangan	3.549,56	3.685,95	2.530,46	2.545,57	3 523,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	682,67	735,07	683,77	707,96	883,71
J Informasi dan Komunikasi	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75	1 740,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.596,56	1.686,37	1.838,52	2.020,52	2 184,70
L Real Estate	715,29	785,76	792,09	835,79	923,53
M Jasa Perusahaan	860,37	922,46	894,50	974,47	1 290,30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.503,89	2.632,520	2.696,63	2.684,85	2 617,75
P Jasa Pendidikan	1.289,00	1.398,84	1.458,19	1.485,20	1 567,50
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,72	703,37	767,50	898,32	902,61
R Jasa Lainnya	199,92	210,60	206,54	208,94	239,89
<b>PDRB</b>	<b>28.797,41</b>	<b>30.636,93</b>	<b>29.511,69</b>	<b>31.918,13</b>	<b>36 141,96</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 masih didominasi oleh 5 (lima)

sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Industri; sektor Transportasi dan Pergudangan Pengolahan; sektor Konstruksi; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2022 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Tabel 2.4  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195,98	190,88	189,62	166,65	168,69
B Pertambangan dan Penggalian	432,13	425,97	441,94	453,18	452,49
C Industri Pengolahan	2.189,77	2.249,76	2.214,91	2.263,00	2.343,69
D Pengadaan Listrik dan Gas	33,60	35,80	36,86	39,24	43,32
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,13	46,50	45,05	46,16	49,29
F Konstruksi	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40	1.999,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.109,83	5.412,71	5.102,40	5.454,19	5.751,44
H Transportasi dan Pergudangan	2.512,09	2.557,30	1.965,95	1.970,64	2.319,64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447,02	476,26	444,85	458,85	565,96
J Informasi dan Komunikasi	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88	1.282,19
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.076,09	1.104,82	1.213,55	1.270,63	1.260,13
L Real Estate	474,67	510,07	508,42	524,67	547,62
M Jasa Perusahaan	531,25	542,68	512,41	534,68	619,41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1.374,43	1.315,30
P Jasa Pendidikan	858,39	924,88	955,42	956,96	984,99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486,05	534,36	571,30	656,73	659,87
R Jasa Lainnya	148,78	155,35	149,94	151,21	166,12
<b>PDRB</b>	<b>18.667,87</b>	<b>19.550,81</b>	<b>18.775,82</b>	<b>19.515,49</b>	<b>20.529,73</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2022 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan

Eceran 5.751,44 milyar; Industri Pengolahan sebesar 2.343,69 milyar; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.319,64 milyar; sektor Konstruksi sebesar 1.999,56 milyar; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.315,30 milyar dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1.282,19 milyar

#### 4. Struktur Perekonomian

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya.

Tabel 2.5  
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,19	1,11	1,17	0,98	0,92
B Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,79	1,25	1,50	1,81
C Industri Pengolahan	10,23	9,97	10,83	11,02	10,94
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,24	0,24	0,24
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,27	0,28	0,26	0,26
F Konstruksi	8,87	9,15	9,48	9,49	8,71
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,83	31,14	31,26	32,70	33,20
H Transportasi dan Pergudangan	12,33	12,03	8,57	7,98	9,75
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,40	2,32	2,22	2,45
J Informasi dan Komunikasi	4,63	4,69	5,28	5,09	4,82
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	5,50	6,23	6,33	6,04
L Real Estate	2,48	2,56	2,68	2,62	2,56
M Jasa Perusahaan	2,99	3,01	3,03	3,05	3,57
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,69	8,59	9,14	8,41	7,24
P Jasa Pendidikan	4,48	4,57	4,94	4,65	4,34
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,30	2,60	2,81	2,50
R Jasa Lainnya	0,69	0,68	0,70	0,65	0,66
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

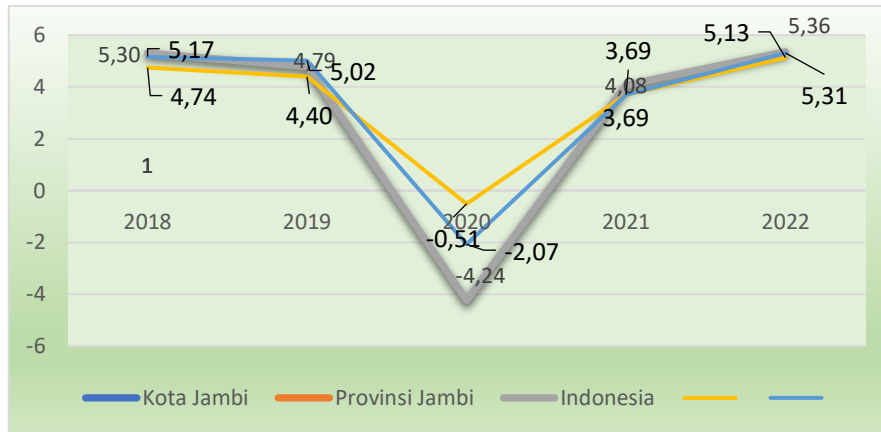
\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 33,20%; sektor Industri Pengolahan sebesar 10,94%; sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,75%; sektor Konstruksi sebesar 8,71% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,24%. Berdasarkan kelompok kategori, maka kategori-kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, disusul kategori-kategori yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder). Sedangkan kategori-kategori yang tidak mengolah bahan baku, yang hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil. Pergeseran kontribusi kategorial mengindikasikan dominasi perekonomian Kota Jambi akan menuju pada struktur ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa skala regional, sehingga pembangunan sektor ekonomi mesti diarahkan untuk memfasilitasi terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

## **5. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2018-2022, LPE Kota Jambi tertinggi pada tahun 2022 tercatat 5,36% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,28. LPE Kota Jambi tahun 2022 berada di atas LPE Provinsi Jambi, yaitu 5,13% dan LPE Nasional yang tercatat sebesar 3,69%.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.16.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2018-2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh sentimen ekonomi global maupun nasional.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 mendapat tekanan cukup kuat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mengalami deapresiasi sebesar -2,07%. Tekanan pada pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antar tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II 2020 dengan stabilitas yang terjaga. Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan membaik. Tahun 2021 didorong berlanjutnya sinergi kebijakan antarotoritas, perekonomian Kota Jambi kembali pada lintasan yang tepat dan mengalami peningkatan dalam jangka menengah. Optimisme pemulihan ekonomi tersebut didukung berbagai upaya untuk mendorong percepatan transformasi struktural,

termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, reformasi pasar uang, serta penguatan UMKM, dalam mendukung upaya menuju Indonesia Maju.

**Tabel 2.6**  
**Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022**

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,42	-2,61	-0,66	-12,12	1,23
B Pertambangan dan Penggalian	3,31	-1,43	3,75	2,54	-0,15
C Industri Pengolahan	3,08	2,74	-1,14	1,76	3,55
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	7,43	2,10	6,48	10,40
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	0,80	-3,10	4,95	4,25
F Konstruksi	6,22	7,39	-1,12	5,04	-0,93
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	5,93	-5,73	6,89	5,45
H Transportasi dan Pergudangan	4,75	1,80	-23,12	1,02	16,80
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	6,54	-6,59	3,15	23,34
J Informasi dan Komunikasi	8,27	6,45	8,98	3,99	9,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,91	2,67	9,84	4,70	-0,83
L Real Estate	6,67	7,46	-0,32	3,19	4,38
M Jasa Perusahaan	5,30	2,15	-5,58	1,48	19,12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,50	-6,80	1,23	-0,58
P Jasa Pendidikan	6,55	7,75	3,30	0,16	2,93
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,24	9,94	6,91	18,16	-2,24
R,S Jasa Lainnya	6,85	4,41	-3,48	0,85	9,86
<b>PDRB</b>	<b>5,30</b>	<b>4,73</b>	<b>-4,24</b>	<b>4,08</b>	<b>5,36</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

## 6. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai

tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.7

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96
2.	Atas Dasar Harga Konstan	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.860,43	20.730,26
2.	Atas Dasar Harga Konstan	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50	13.068,18
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	57,00	57,40	60,00	59,13	57,36
2.	Atas Dasar Harga Konstan	61,51	61,69	64,26	64,34	63,65

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu



barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berfluktuasi dan memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 6.165,09 miliar rupiah serta 6.933,65 pada tahun 2022. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Tabel 2.8.  
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020*	2021	2022
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96
2.	Atas Dasar Harga Konstan	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	6.165,09	6.626,44	6.495,21	6.686,56	6.933,65
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.915,40	4.210,23	4.054,06	4.080,01	4.154,86
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (%)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21,41	21,54	22,04	20,97	19,18
2.	Atas Dasar Harga Konstan	20,97	21,53	21,65	20,94	20,24

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.9, PMTB atas

dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 6.292,60 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 7.867,74 milyar pada tahun 2022. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.9.  
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Jambi  
Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020*	2021**	
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96
2.	Atas Dasar Harga Konstan	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	6.292,62	6.855,91	6.862,88	7.425,25	7.867,74
2.	Atas Dasar Harga Konstan	4.522,82	4.797,22	4.781,20	5.029,69	5.018,63
Persentase PMTB thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21,85	22,38	23,29	23,28	21,79
2.	Atas Dasar Harga Konstan	24,23	24,54	25,53	25,81	24,45

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023 (data diolah)

## 7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 48.15 juta rupiah naik menjadi 58,34 juta rupiah pada tahun 2022. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2018 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp. 34.480 juta rupiah menjadi sebesar Rp. 41.410 juta rupiah pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.  
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
PDRB (miliar rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96
2.	Atas Dasar Harga Konstan	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	48.15	51.50	48.73	52.10	58,34
2.	Atas Dasar Harga Konstan	34.80	35.60	36.95	40,40	41,41
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Berlaku	31,21	32,86	30,96	31,83	33,14

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

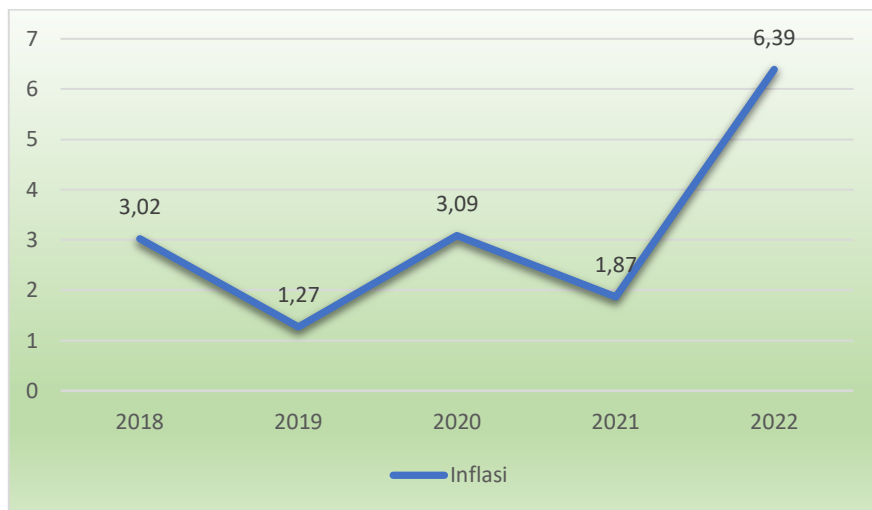
## 8. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana laju inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% dan laju inflasi

terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2022, inflasi Kota Jambi sebesar 6,39% berada di atas inflasi nasional 2020 sebesar 5,51%.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.17.  
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen.

## 9. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara

kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil data BPS Kota Jambi terus meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 0,33 meningkat menjadi 0,362 di Tahun 2022. Keadaan ini mengindikasikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Jambi belum dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat karena angka gini ratio yang terus mendekati 1.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.18  
Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2018-2022

## 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

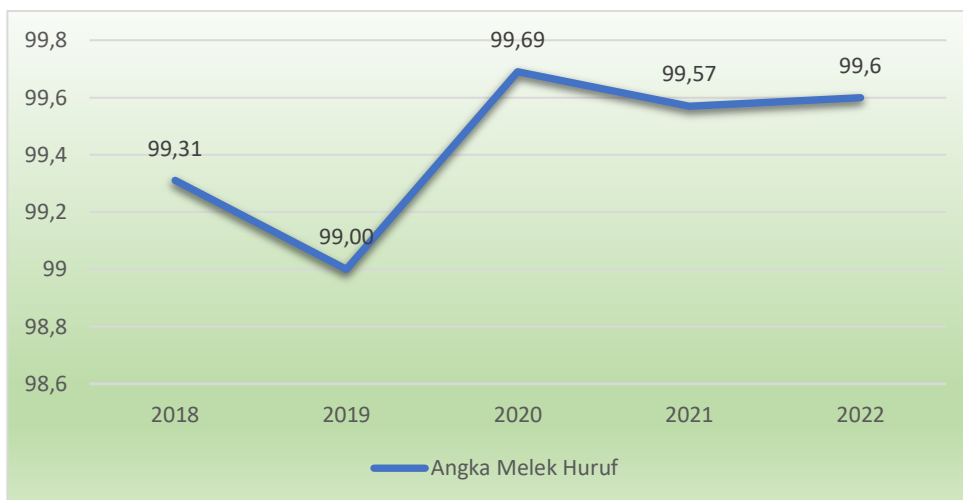
### 2.1.2.2.1 Pendidikan

#### 1. Angka Melek Huruf

Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antara lain tingginya Angka Melek Huruf (AMH) dan tingginya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang

mengajar telah mencukupi untuk semua murid serta kualitas gurupun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Adapun perkembangan angka melek huruf di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.19  
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Melek huruf dapat disebut juga dengan melek aksara yaitu kemampuan membaca dan menulis, jadi angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Komponen yang diperhitungkan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan angka RLS dari 10,67 Tahun 2018 menjadi 11,21 pada Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi periode pembangunan lima Tahun yang lalu. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

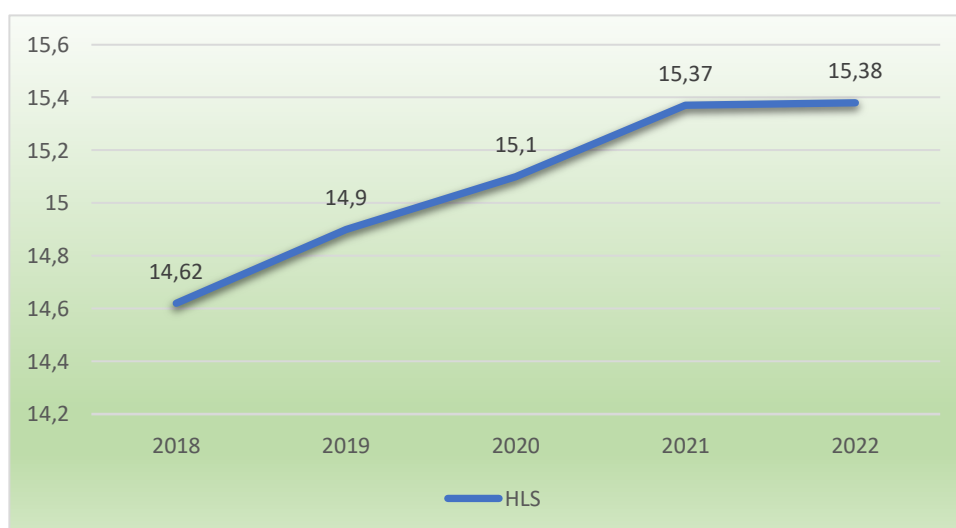


Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.20  
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

### 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kota Jambi dari 14,63 poin pada tahun 2017 menjadi 15,37 poin pada Tahun 2021 menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan cenderung akan terus meningkat seiring dengan perkembangan angka harapan lama sekolah. Gambaran perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Jambi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

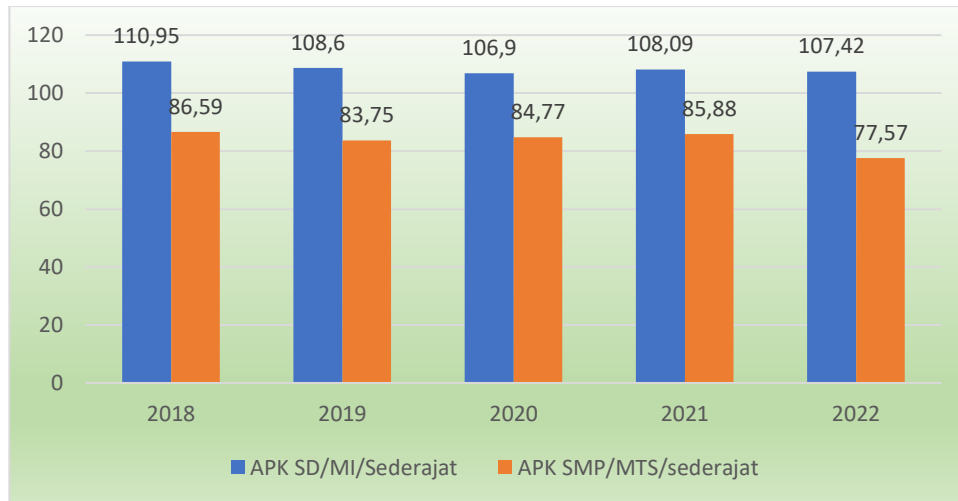


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2022

Gambar 2.21  
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)  
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

#### 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK adalah jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Persentase APK di Kota Jambi terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.22

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat dan SMP/MTS/Sederajat di Kota Jambi Tahun 2018-2022

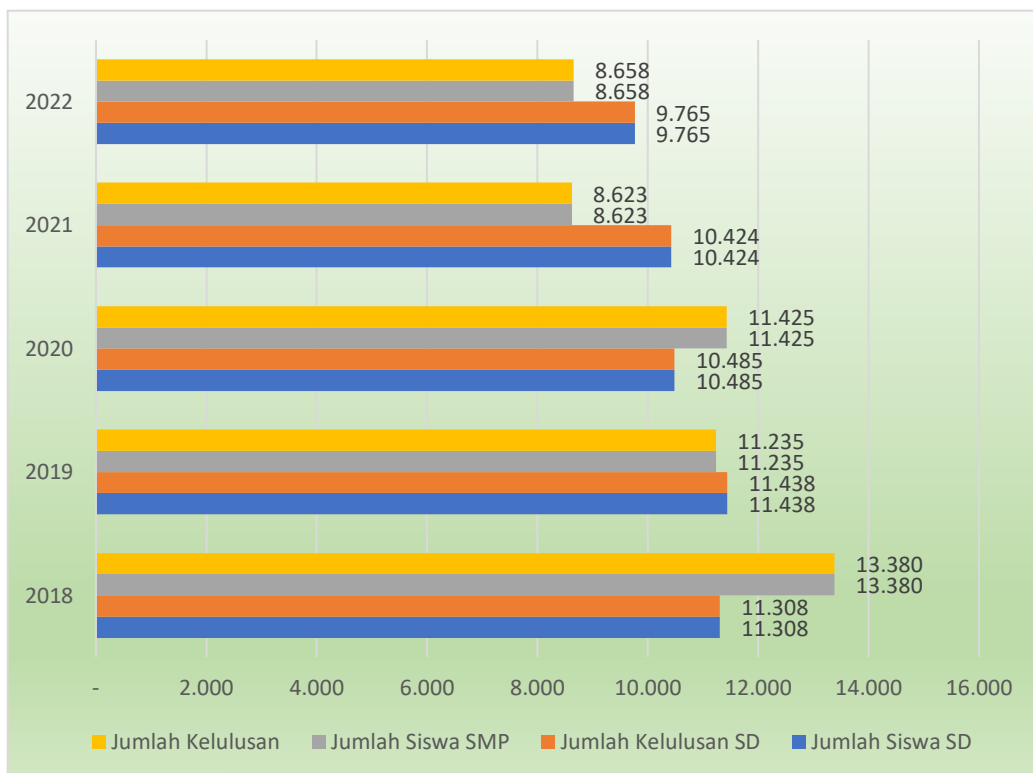
Secara umum, pada tingkat SD/MI capaian APK dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi dan berada pada angka di atas 100%. Di tahun 2018 APK Kota Jambi mencapai 110,95% namun tahun 2022 menurun menjadi 107,42%. Melihat angka capaian APK SD/MI Kota Jambi melebihi angka 100%, berarti tingkat partisipasi penduduk usia sekolah tingkat SD/MI di Kota Jambi termasuk tinggi. Pada tingkat SMP, APK belum mencapai lebih 100% pada kurun waktu 2018-2022 dan mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 APK sebesar 86,59% dan tahun 2022 menurun menjadi 77,57%.

#### 5. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Persentase pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM di suatu wilayah. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jumlah pendidikan tingkat



tertentu pada tahun bersangkutan dengan total jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Adapun angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

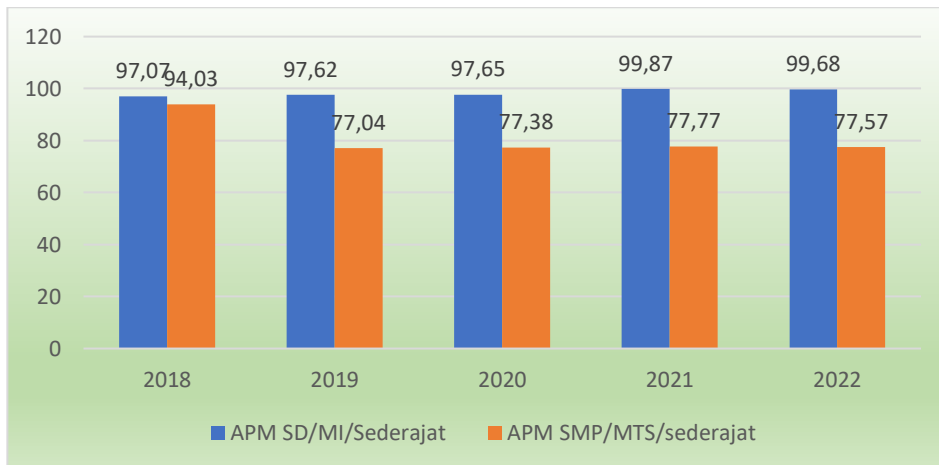
Gambar 2.23  
Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Persentase tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTS di Kota Jambi cenderung stabil. Hal ini dikarenakan minat belajar penduduk di Kota Jambi mulai tingkat SD/MI hingga tingkat SMP/MTS terbilang tinggi. Sehingga setiap tahun siswa lulus 100%.

#### 6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daya serap partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.24  
Angka Partisipasi Murni  
SD/MI/Sederajat dan SMP/MTS/Sederajat di Kota Jambi Tahun 2018-2022

APM Kota Jambi untuk tingkat SD/MI, pada tahun 2018-2022 cenderung meningkat yang berarti hampir seluruh anak usia sekolah di kota Jambi bersekolah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya APM tingkat SD/MI yang berada pada 99,68% di tahun 2022. Anak usia sekolah tingkat SMP/MTs, angka APM yang dicapai mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 94,03% menurun menjadi 77,57 pada tahun 2022.

#### 2.1.2.1.2 Kesehatan

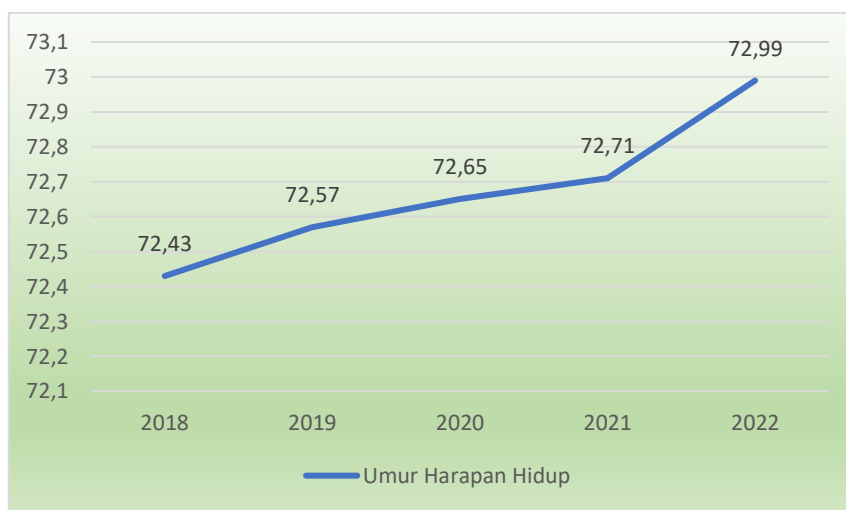
Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2018 - 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.11  
Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	72,43	72,57	72,65	72,71	72,71
2	Angka Kematian Ibu	2	5	3	6	4
3	Angka Kematian Bayi	7	7	11	4	2
4	Jumlah Kelahiran Hidup	10.205	10.104	10.489	10.211	9.734

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya Umur Harapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

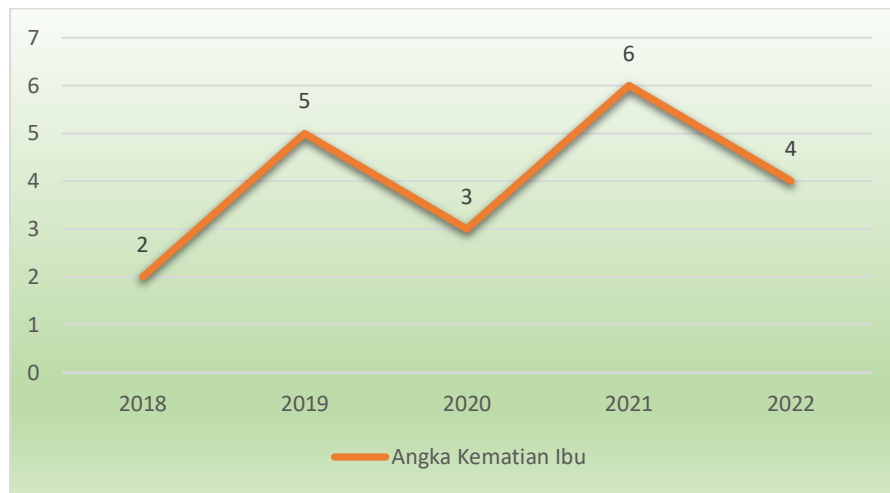
Gambar 2.25  
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi  
Tahun 2018-2022 (dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2018-2022, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,43 meningkat menjadi 72,99 pada tahun 2022, Hal ini berarti bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

#### A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran

hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.26  
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi  
Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan AKI terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 2 orang dan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6 orang.

#### B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.27  
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi  
Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan AKB terendah pada tahun 2022, sebesar 2 jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11 jiwa. AKB Kota Jambi menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya AKB di Kota Jambi hingga tahun 2022, diantara 1.000 kelahiran hidup ada 2 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Dengan menurunnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2018-2022.

Indikasi penurunan angka kematian berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka stunting (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2021 sebanyak 43 orang menjadi 25 di tahun 2022. Sedangkan Angka Stunting juga mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 14 di tahun 2022.

Tabel 2.12

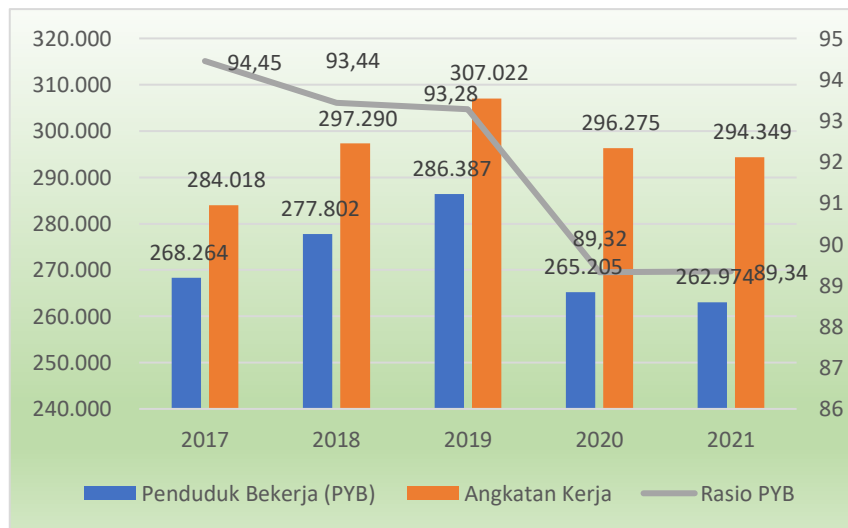
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	43	25
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio PBGB (%)	0,01	0,01	0,01	0,16	0,06
4	Angka Stunting	26,2	18,62	17,4	17,4	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

### 2.1.2.1.3 Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Adapun rasio penduduk yang bekerja di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.28  
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan

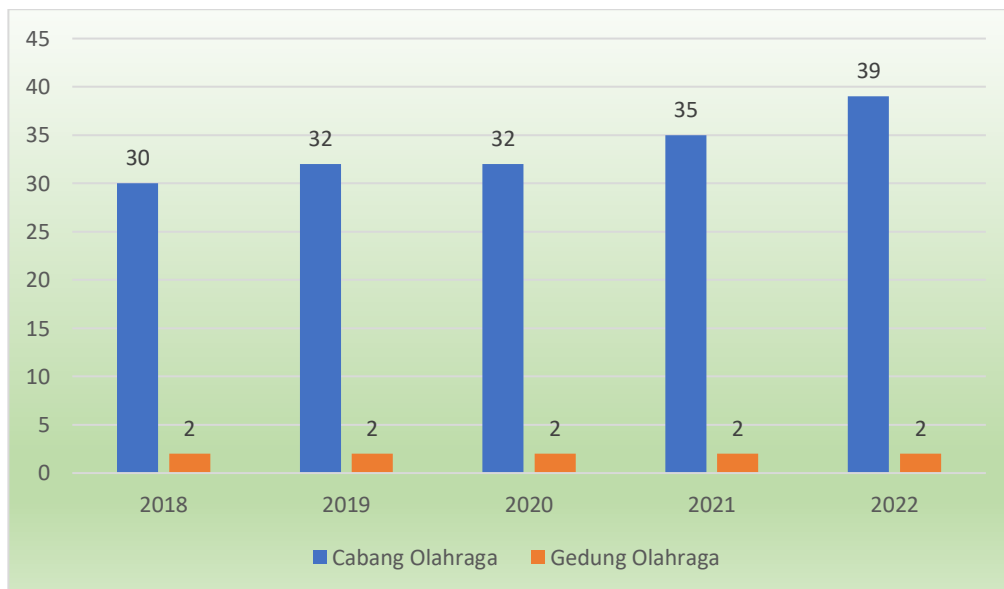
lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.13  
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

URAIAN	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Grup Kesenian (unit)	185	185	185	185	185	185
Jumlah Gedung Kesenian (unit)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2018 jumlah cabang olahraga sebanyak 30 menjadi 39 pada tahun 2022, Namun 39 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.



Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kota Jambi, 2023

Gambar 2.29  
Jumlah Cabang Olahraga dan Gedung Olahraga

**2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**  
**2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar**  
**2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan**

**1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12) dan usia SMP (13–15). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2022 untuk usia SD/MI sebesar 99,70 %, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,70 persen. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 98,87 %. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2018 mengalami fluktuasi, walaupun mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

Tabel 2.14  
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk  
 Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	66.212	61.106	57.383	56.088	67.937
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	66.234	58.300	58.097	56.675	68.133
3	APS SD/MI, Paket A	99.99	100.48	98.77	100,48	99.70
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	29.698	26.651	26.900	25.478	31.427
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.236	30.795	30.754	29.097	31.786
3	APS SMP/MTS, Paket B	95.07	83.00	87,46	98,48	98.87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

**2. Ketersediaan Sekolah**

Pada Tabel 2.18. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2018-2022. Secara umum, sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.



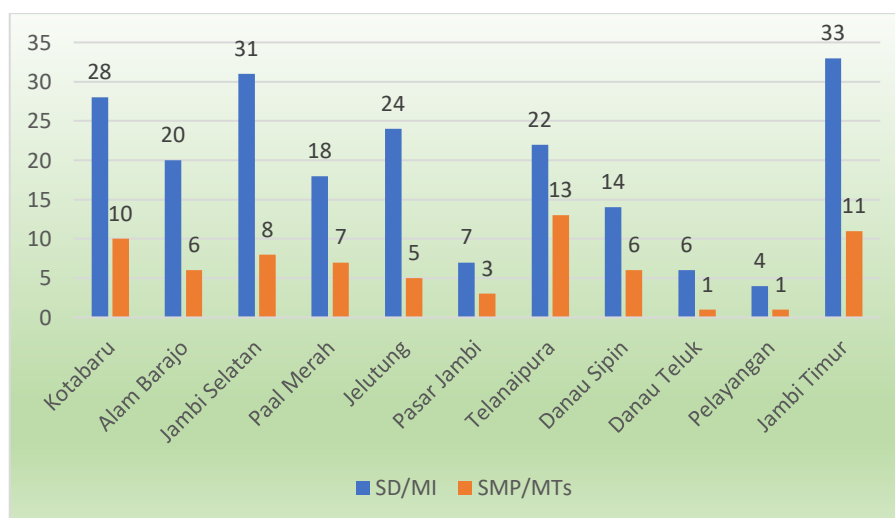
Tabel 2.15

## Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI					
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	2.602	2.625	2.632	2.635	2.388
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	58.300	58.097	57.799	56.675	56.799
1.3.	Rasio	0,044	0,045	0,045	0,047	0.042
2.	SMP/MTS					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	1.131	1.135	1.236	1.237	1.239
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.795	26.900	30.737	29.097	22.482
2.3.	Rasio	0,037	0.042	0.040	0,045	0.055

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

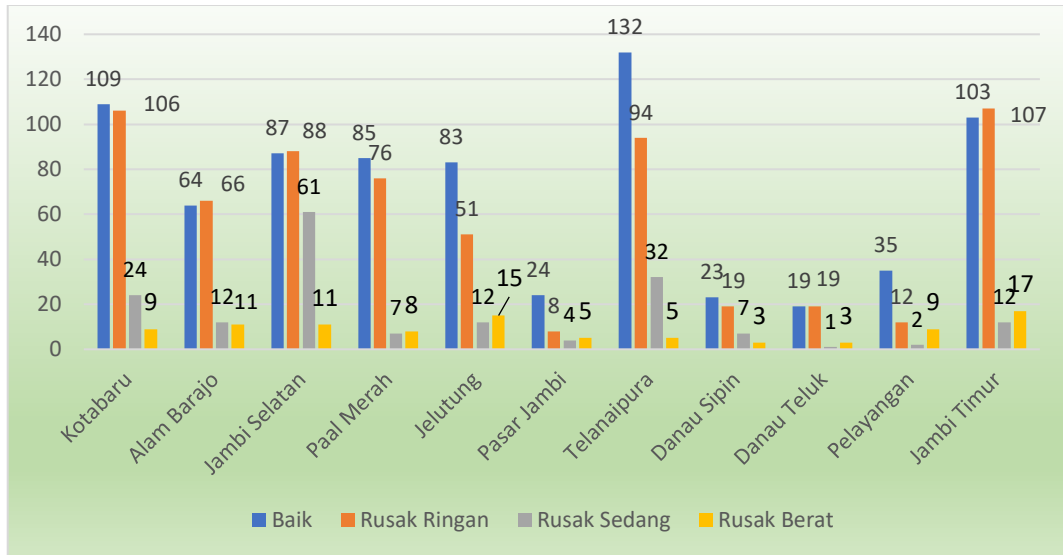
Untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid. Untuk tingkat SD/MI sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur sebanyak 33 sekolah, sedangkan sekolah yang paling sedikit ada di kecamatan Pelayangan sebanyak 4 sekolah. Untuk tingkat SMP/MTs sekolah paling banyak di kecamatan Telanaipura, sedangkan yang sedikit ada di kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan sebanyak 1 sekolah. Sebaran gedung sekolah perkecamatan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.30  
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022

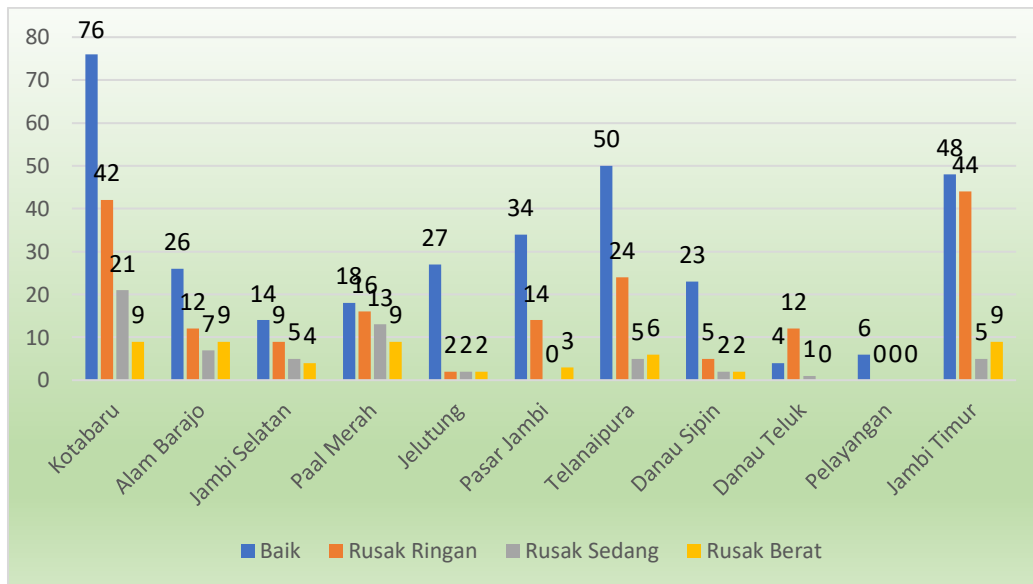
Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.31  
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2022

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTS adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.32  
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2023

### 3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah

sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.16  
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.206	3.184	3.232	3.116	3.105
1.2.	Jumlah Murid	62.336	60.976	59.616	60.594	57.293
1.3.	Rasio	0,051	0,052	0,067	0,051	0,054
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.557	1.558	1.621	1.741	1.634
2.2.	Jumlah Murid	26.350	26.442	29.817	27.204	26.403
2.3.	Rasio	0,059	0,058	0,061	0,064	0,062

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2021 di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17  
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi  
Menurut Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	385	7,539	0.051	157	2,697	0.058
2	Kec. Danau Sipin	233	3,577	0.065	132	1,902	0.069
3	Kec. Danau Teluk	63	1,056	0.060	22	262	0.084
4	Kec. Jambi Selatan	443	8,218	0.054	122	2,437	0.050
5	Kec. Jambi Timur	447	7,525	0.059	281	4,049	0.069
6	Kec. Jelutung	326	5,703	0.057	119	1,925	0.062
7	Kec. Kota Baru	399	8,092	0.049	287	4,298	0.067
8	Kec. Paal Merah	264	6,103	0.043	131	2,190	0.060
9	Kec. Pasar Jambi	69	969	0.071	112	1,718	0.065
10	Kec. Pelayangan	63	1,061	0.059	8	65	0.123
11	Kec. Telanai Pura	413	7,417	0.056	263	4,160	0.063
<b>Jumlah</b>		<b>3.105</b>	<b>57.260</b>	<b>0.054</b>	<b>1.634</b>	<b>25.703</b>	<b>0.064</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

#### 4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18  
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi  
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
2	Jumlah Siswa SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
3	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.1.2 Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19  
Rasio IPM per Satuan Balita Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	460	460	467	468	469
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio RPPB (%)	0,962	1,003	1,337	1,653	1,229

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

Tabel 2.20  
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio RSPP (%)	0,0028	0,0028	0,0027	0,0028	0,0027

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023*

Tabel 2.21  
Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	58	58
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,009	0,009	0,0094	0,0093

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023*

Tabel 2.22  
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	326	868	398	399	506
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio DPP (%)	0,053	0,014	0,064	0,065	0,081

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023*

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain : (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti : dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas sebanyak 20 unit terdiri dari puskesmas perawatan 4 unit, puskesmas pembantu 38 unit dan puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 20 puskesmas.

Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 265 orang, dokter spesialis 195 orang, dokter gigi 46 orang, bidan 437 orang, dan perawat sebanyak 391 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu-dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum, pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjabtim.

Selain itu, Upaya pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dan RSUD juga memfokuskan pada pelayanan terhadap penderita Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), bekerja sama dengan lintas sektor yaitu masyarakat dan swasta. Saat ini jumlah suspek malaria di Kota Jambi mengalami penurunan dari 6.619 pada tahun 2020 menjadi 1942 pada tahun 2022. Sedangkan Kasus TB paru mengalami peningkatan sebanyak 921 kasus sejak tahun 2020, dari jumlah 1.021 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.942 kasus pada tahun 2022, begitu pula pada kasus kumulatif penderita AIDS yang mengalami peningkatan dari 683 kasus pada tahun 2020 menjadi 730 kasus pada tahun 2022.

Untuk menanggulangi penyakit Aids Tuberkulosis Malaria (ATM) ini diperlukan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelayanan Fasilitas Kesehatan pemerintah dalam melayani masyarakat.

#### **2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

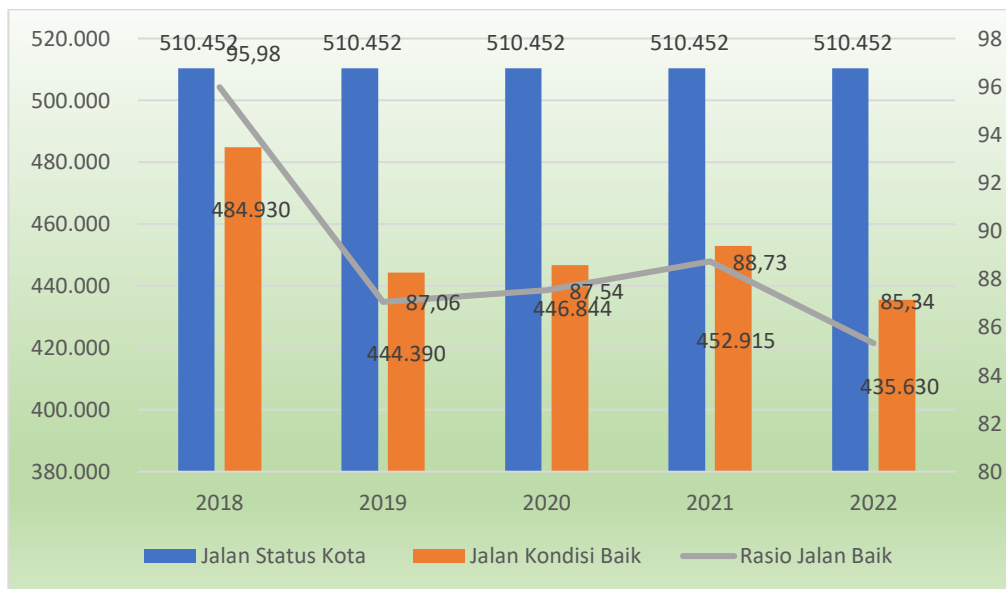
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan berikut: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur wilayah yang menjadi fokus kegiatan pekerjaan umum pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Dimana infrastruktur diharapkan menjadi trigger bagi tumbuh kembangnya pusat-pusat kegiatan baru yang bersinergi dan lebih lanjut berimplikasi pada akselerasi pembangunan dan perekonomian daerah dalam kerangka rencana pembangunan yang mengedepankan aspek *thematic, holistic, integrative* dan *spatial*.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Pada kawasan perkotaan seperti Kota Jambi, ketersediaan infrastruktur jalan menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tentunya tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan perkotaan yang mengakibatkan daya tampung jalan semakin berkurang dan membutuhkan operasional cost yang mumpuni untuk

memastikan kualitasnya dalam kondisi baik. Kondisi status jalan kota dalam kondisi baik dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2022

Gambar 2.33  
Rasio Panjang Jalan yang Baik di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam lima Tahun terakhir rasio jaringan panjang jalan kondisi baik di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Kondisi awal panjang jalan di Kota Jambi relatif baik dan setiap tahunnya ditargetkan terus mengalami perbaikan. Namun demikian, guna menjawab persoalan perkotaan khususnya dalam mengurai titik kemacetan, kondisi panjang jalan yang baik saja tidaklah cukup, untuk itu Pemerintah Kota Jambi juga dituntut terus melakukan peningkatan lebar ruas jalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan yang beredar di Kota Jambi

Sebagai wujud nyata dalam perencanaan berbasis spasial, Pemerintah Kota Jambi telah melakukan inventarisir jalan kota berbasis GIS dan berdasarkan tata ruang. Disamping upaya peningkatan status jalan lingkungan menuju kawasan pemukiman yang diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat khususnya terkait pengembangan kawasan perkotaan.



Sedangkan untuk transportasi udara di Kota Jambi dilayani oleh Bandar Udara Sultan Thaha Saifudin dan transportasi sungai di Kota Jambi terbatas bagi kapal motor yang tidak terlalu besar, mengingat kondisi sedimentasi yang berpengaruh pada kedalaman Sungai Batanghari. Untuk memasok kebutuhan bahan pangan untuk Kota Jambi di lakukan bongkar muat di Dermaga Angso Duo baru. Untuk keperluan Bongkar Muat kapal yang besar pelayanannya dilakukan melalui Pelabuhan Talang Duku yang berada di Kabupaten Muaro Jambi.

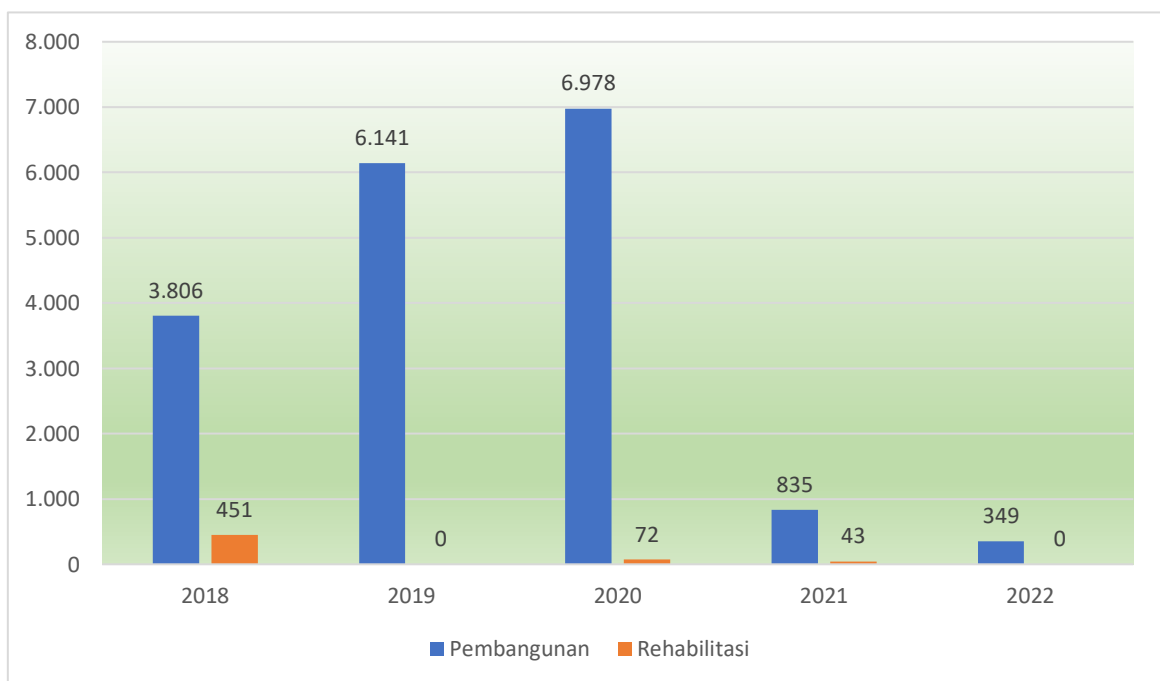
Pada aspek infrastruktur sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kota Jambi yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Sedangkan pada aspek pengelolaan sumber daya air, dimulai dari Sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi merupakan bagian dari Sub DAS Batanghari hilir yang masih berada dalam kesatuan DAS Batanghari. Sub DAS Batanghari daerah hilir memiliki luas 861.904 Ha, panjang sungai 2.287,33 Km, dan keliling Sub DAS 630.693,80 Km. Sedangkan panjang sungai Batanghari yang melintasi Kota Jambi yaitu  $\pm$  18 Km. Posisinya yang termasuk bagian hilir dari DAS Batanghari membuat sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi juga mendapatkan imbas dari kondisi lingkungan di hulunya. Sedimentasi DAS Batanghari saat ini semakin parah, penyebabnya diduga adalah usaha pertambangan, penebangan liar, perkebunan (sawit), dan adanya industri pengolahan kayu (*sawmill*/penggergajian kayu) di sepanjang DAS Batanghari baik legal maupun illegal, serta kegiatan permukiman yang berada di sepanjang sungai.

Berdasarkan analisis status mutunya pada stasiun pemantauan kualitas air Sungai Batanghari telah tercemar berat dan untuk beberapa parameter tidak memenuhi kriteria mutu air kelas I dan II. Penggunaan air sungai Batanghari sebagai sumber Baku Air Minum perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya sehingga memenuhi syarat untuk baku mutu air minum. Namun demikian Pemerintah Kota Jambi juga terus berupaya menggali potensi sumber air

baku yang baru seperti halnya rencana pembangunan embung pada lokasi yang memungkinkan.

Untuk meminimalisir akses negatif seperti banjir dan peningkatan tingkat pencemaran, dinilai perlu dilakukan peningkatan jaringan drainase Kota Jambi. Dimana sesuai SK Walikota Jambi Nomor 464 Tahun 2016 total panjang drainase Kota Jambi adalah 127,2 Km Adapun pembangunan jaringan drainase mengalami fluktuasi, mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020 dari sebesar 3.806 M menjadi 6.978 M dan menurun dari tahun 2020 dari 835 M menjadi 349 M pada tahun 2021 yang bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, 2023

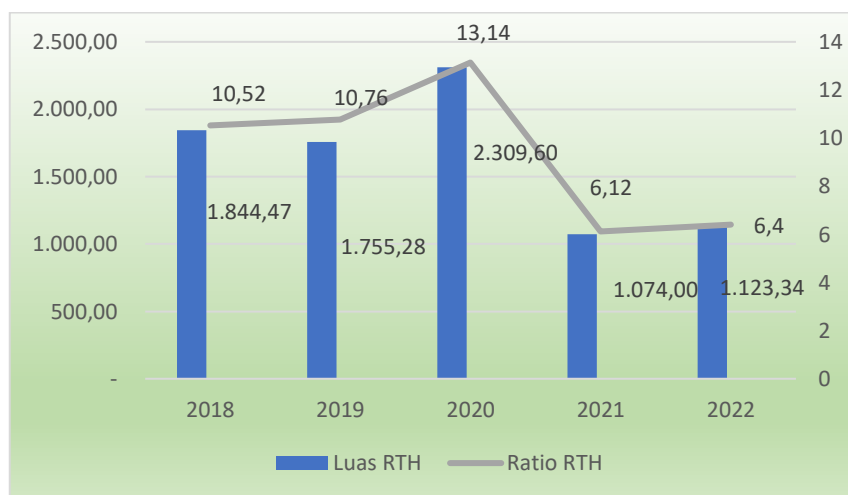
Gambar 2.34

#### Rasio Panjang Drainase yang Baik di Kota Jambi Tahun 2018-2021

Terkait dengan urusan penataan ruang dimana rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini diwujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Untuk indikator rasio ketaatan terhadap RTRW ditargetkan mencapai angka 100% setiap Tahunnya belum mencapai target yang

telah ditetapkan, hal ini terlihat masih adanya pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam RTRW, sebagai contoh pembuatan bangunan yang menyalahi ketentuan GSB (Garis Sepadan Bangunan), kemudian pemasangan papan merek reklame yang tidak memenuhi standar pemasangan yang telah ditetapkan.

Fakta dari adanya beberapa pelanggaran yang masih ditemukan tersebut, ketaatan terhadap tata ruang juga menuntut lebih optimalnya fungsi pengawasan dari instansi teknis, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi diminta untuk lebih profesional dan proaktif terkait ketertiban administrasi rekomendasi perizinan serta pengawasan. Selain terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang tersebut, pemenuhan rasio RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Capaian target tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut.



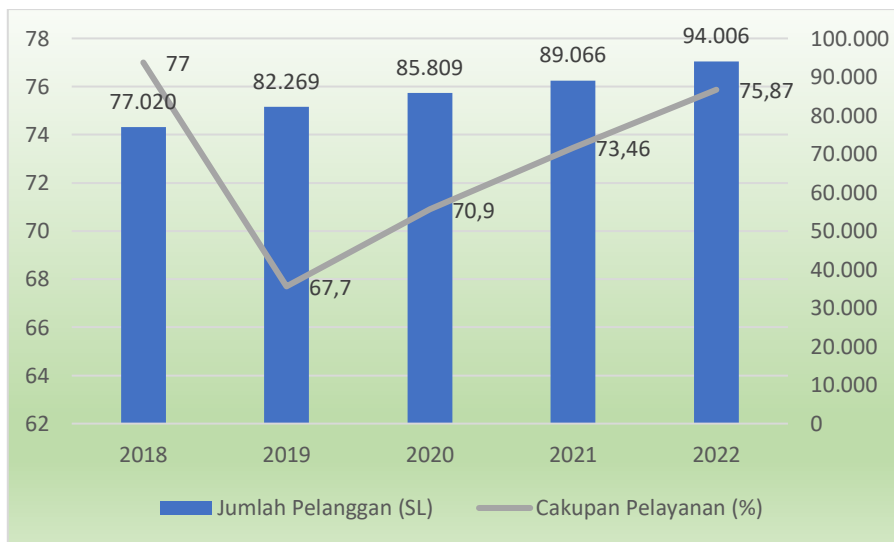
Sumber : DPUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

Gambar 2.35  
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingginya harga dan terbatasnya lahan merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target RTH tersebut. Sebagaimana tergambar pada tabel diatas rasio RTH di Kota Jambi pada Tahun 2018 mencapai 10,52% atau seluas 1.844,47 ha. Hal ini tentunya masih jauh dari yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan Kota Jambi adalah dengan melakukan pendataan lebih valid dan terdigitasi dengan baik dan terus melaksanakan “land banking”

setiap Tahunnya. Namun setelah dilakukan pendataan aset dan ruang hijau dengan digitasi, perbaikan data luasan rasio RTH Kota Jambi di Tahun 2022 justru menurun menjadi 6,40% atau seluas 1.123,34 Ha. Penurunan luasan RTH ini dikarenakan pengalihan fungsi lahan dan serta berkurangnya luasan pekarangan rumah hunian dan gedung non hunian.

Peningkatan pelayanan dasar khususnya yang terkait dengan cakupan pelayanan jaringan air minum terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, hal ini dapat terlihat dari data saat ini cakupan pelayanan sebesar 75,87% yang artinya masih ada 24,13% lagi yang belum terlayani fasilitas air bersih khususnya dengan jaringan perpipaan.



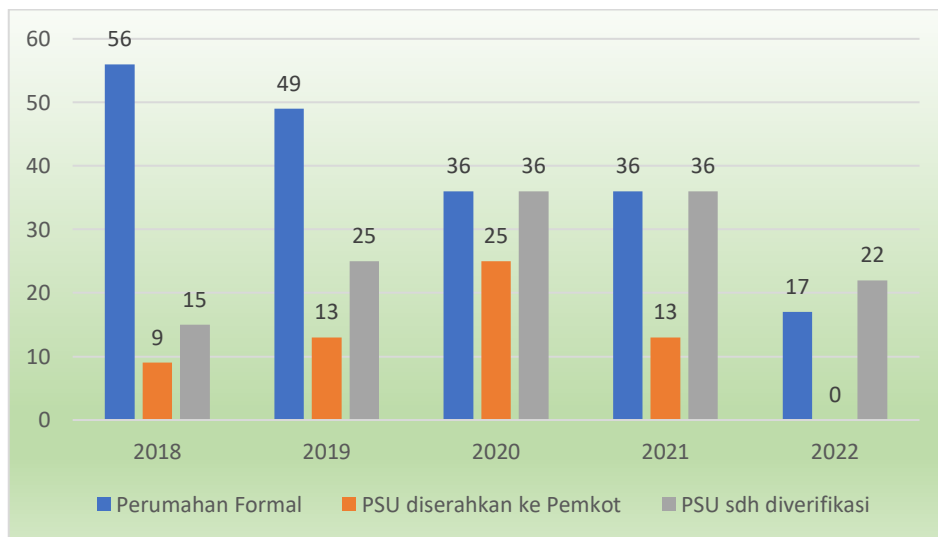
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jambi, 2023

Gambar 2.36  
Jumlah Pelanggan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kota Jambi  
Tahun 2018-2022

#### 2.1.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut : 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

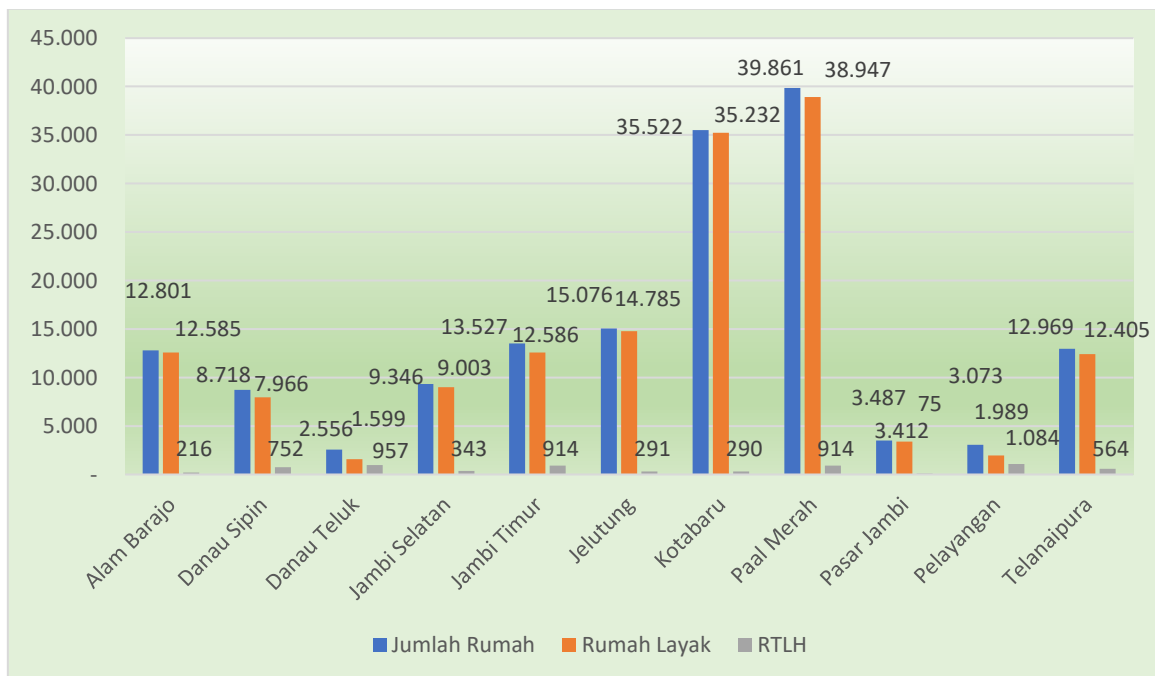
Gambar 2.37  
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Gambar 2.38.  
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Gambar 2.39.  
Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan yang disampaikan pada tahun 2022 jumlah RTLH sebanyak 6.427 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar. Dan pada tahun 2022 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 147,7 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23

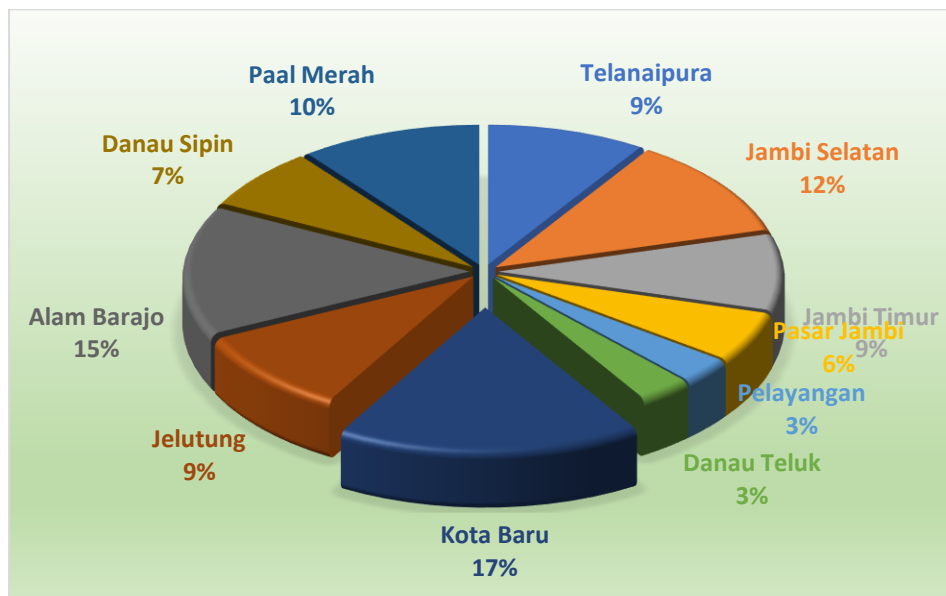
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0,00
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih – Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0,00
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0,00
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0,00
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0,00
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0,00
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0,00
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0,00
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0,00
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,60	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	57,49
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0,00
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0,00
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	Kumuh Ringan	64,19	0,00
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0,00
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0,00
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0,00
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0,00
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	Kumuh Ringan	36,16	0,00
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0,00

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0,00
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,10	0,00
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0,00
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,80	0,00
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0,00
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0,00
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>986,57</b>	<b>147,7</b>

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini persentase titik lampu jalan yang telah terpasang pada tahun 2022 di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

Gambar 2.40  
Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi



Dari total sebanyak 22.375 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 120 watt sebanyak 274 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.350 titik. Untuk jumlah Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kota Jambi yang merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2022 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 87.544 M<sup>2</sup>.

#### 2.1.3.1.5 Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2022, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2022 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3.

Tabel 2.24

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	$\frac{350 \text{ orang}}{606.200 \text{ jiwa}}$
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.25  
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum  
Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran Perda	20	25	31		
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	20	25	31		
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100		
Jumlah Pelanggaran K3	621	579	109		
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	621	579	109		
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100		

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023*

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

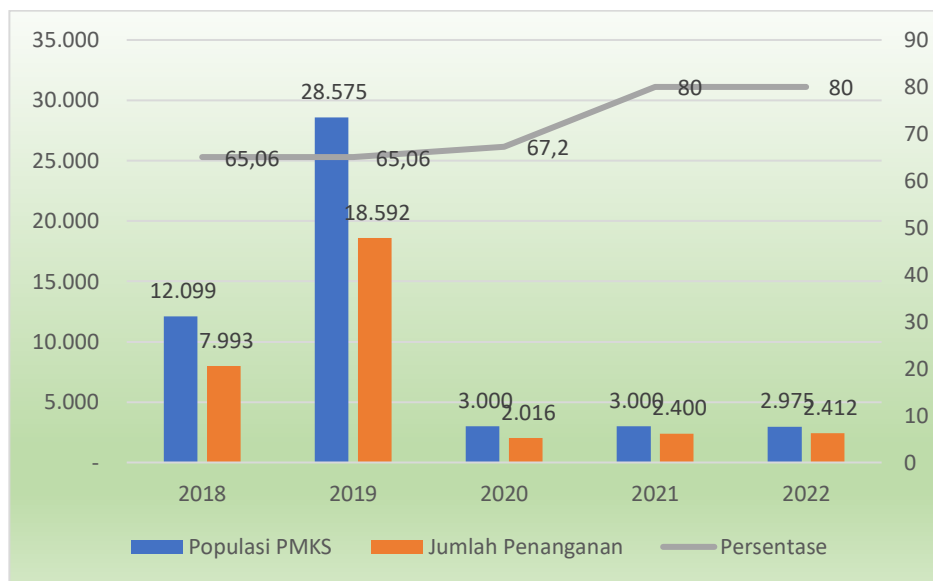
#### 2.1.3.1.6 Urusan Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2022 sebanyak 1.699 orang lansia terlantar dan 1.489 lansia miskin, untuk tahun 2022 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 181 orang lansia mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.412 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang di dalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2018-2022 berfluktuasi cenderung menurun dimana tahun 2018 sebanyak 12.099 orang menurun menjadi 2.975 orang pada tahun 2022,

sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 2.412 orang atau sekitar 80%.



Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

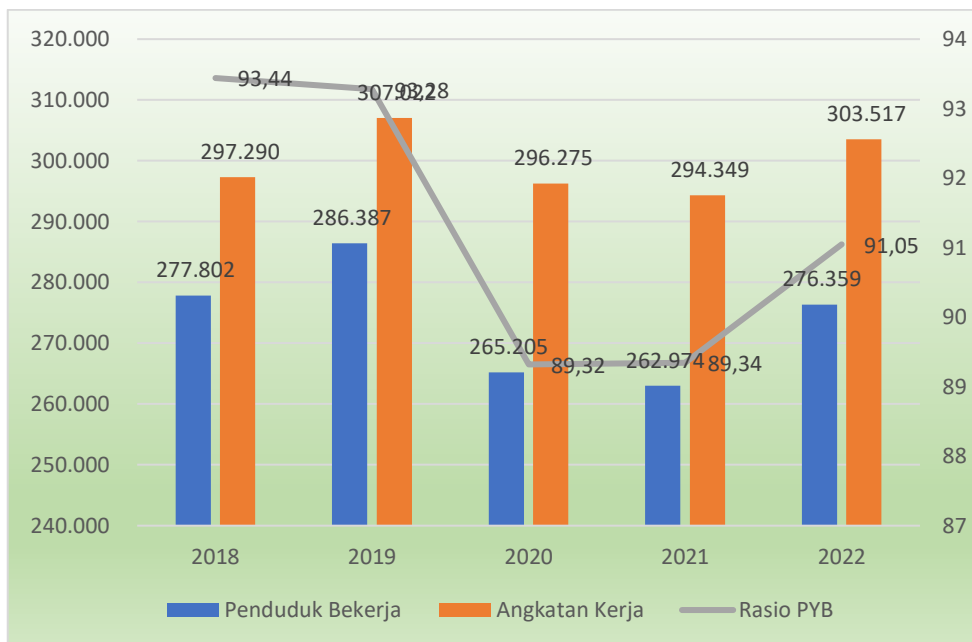
Gambar 2.41  
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

### 2.1.3.2 Urusan Layanan Wajib Non Dasar

#### 2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

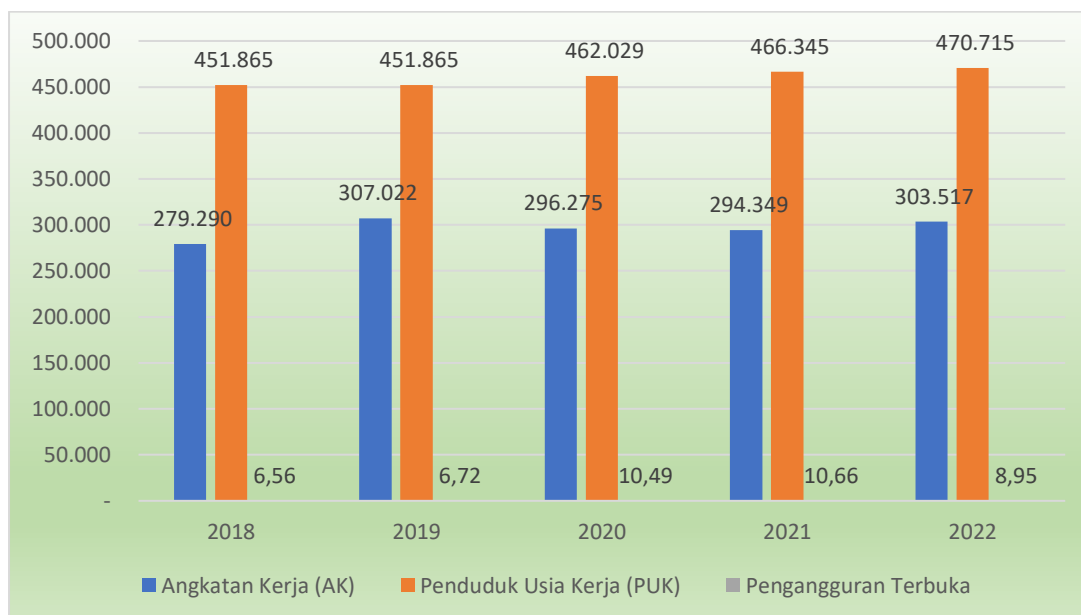
Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2014-2016 dan pada tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023

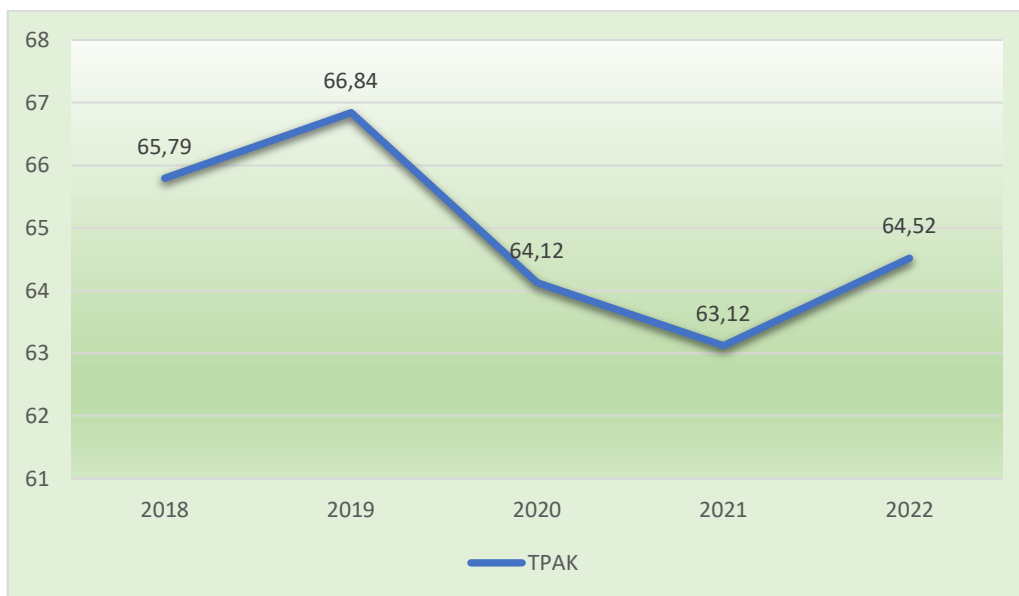
Gambar 2.42  
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar berikut :



Gambar 2.43.  
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah seperti terlihat pada gambar berikut.



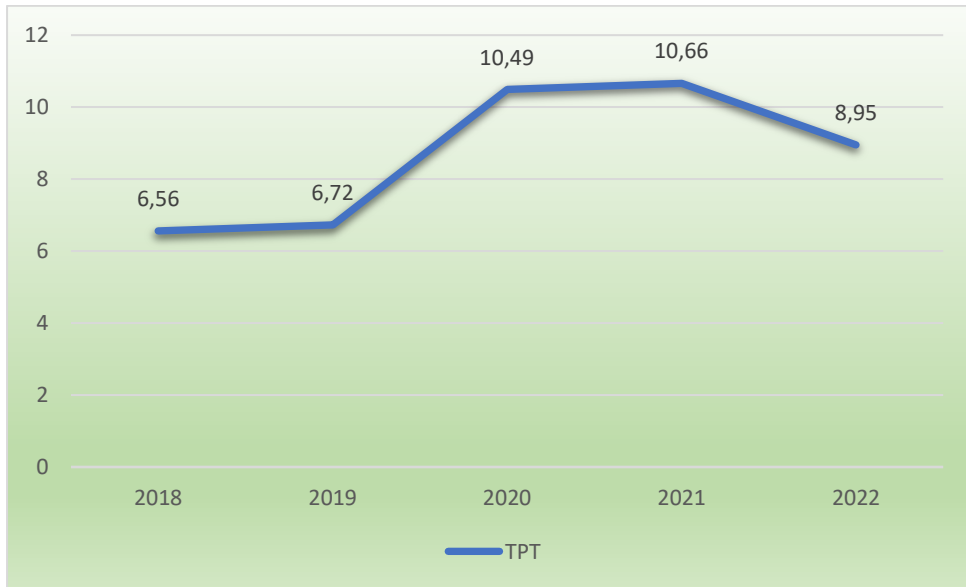
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Gambar 2.44

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2022 TPAK di Kota Jambi sebesar 64,52% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 63,12%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2022.

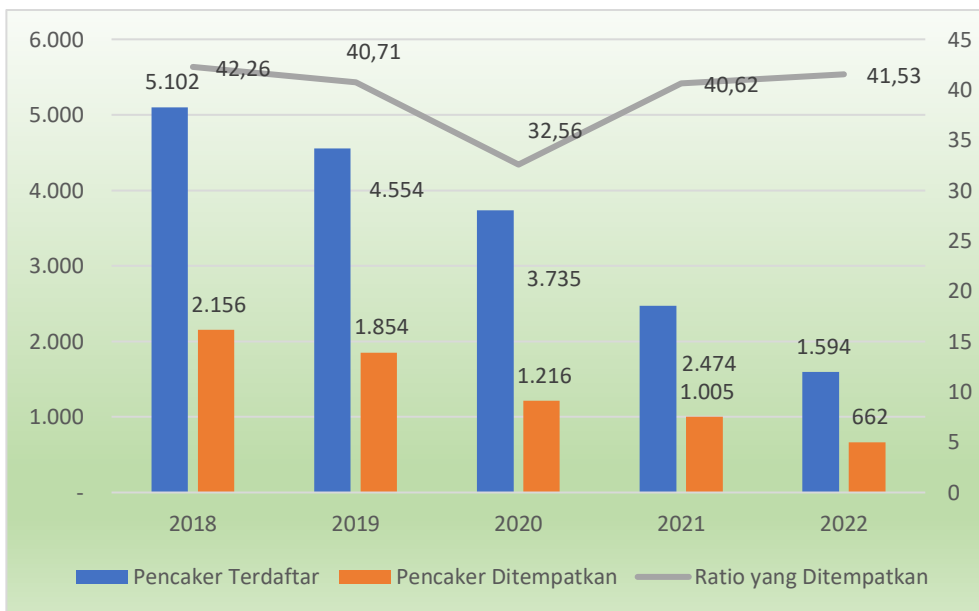
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2022 sekitar 8,95 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan aktifitas ekonomi kembali membaik pasca pandemi Covid sehingga tenaga kerja bisa diserap.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023

Gambar 2.45  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.46  
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022

Dari data tersebut tahun 2022 di Kota Jambi ratio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 41,53 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 40,62, Membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid sehingga terbukanya kembali lapangan pekerjaan.

### 2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2018-2022 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan setiap tahunnya bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relatif kecil terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.315	4.376	4.020	3.893	3.643
3	Persentase	3,80 %	-	4,03%	3,86%	3,73%

Sumber : BKPSDMD Kota Jambi, 2023 - BPS Kota Jambi 2023

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.27

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	53.065	Dta	49.521	8.045	7.183
3	Persentase	46.77 %	Dta	49,74	8,34	7,35

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023



Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2018-2022, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan.

Tabel 2.28

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

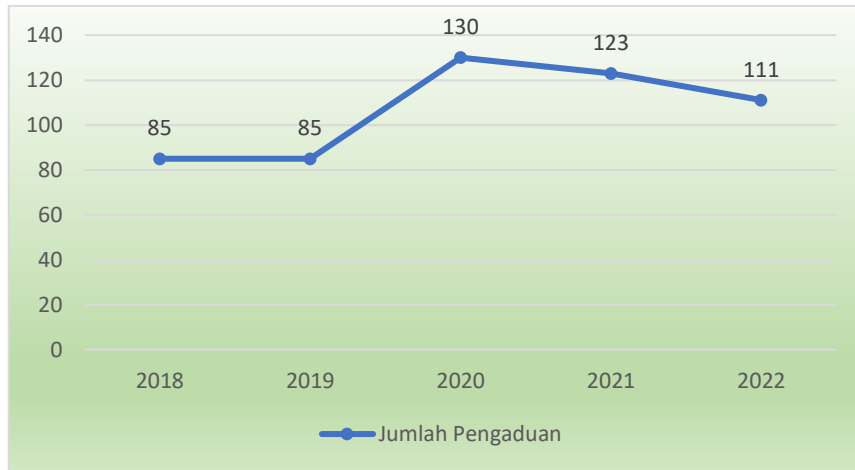
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	Dta	Dta	112.475	111.801	108.671
2	Jumlah Pekerja perempuan	Dta	Dta	99.556	100.767	97.667
3	Persentase	-	-	88,51%	90,13%	89,87%

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, dimana tahun 2018 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 85 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi 111 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat kemudian menurun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.



Sumber : DPMPPA Kota Jambi, 2023

Gambar 2.47  
Pengaduan Perlindungan Perempuan  
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

### 2.1.3.2.3 Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan

strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian, situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2022 adalah : dari segi ketersediaan Energi Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari (101,3% AKE) dari angka kecukupan energi yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari; dari segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari; dari segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar defiasi eror yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil estimasi dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Susenas. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan menggunakan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut di asumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka over supplay diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi

indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.29

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	264,3	1.046	52,2	49,8	0,5	26,01	24,9	25,0	24,9
Umbi-umbian	53,3	54	2,7	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,2
Pangan Hewani	169,6	321	16,0	15,3	2,0	32,0	30,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	31,3	281	14,0	13,4	0,5	7,0	6,7	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	1,9	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
Kacang-kacangan	25,2	65	3,3	3,3	2,0	6,5	6,2	10,0	6,2
Gula	18,5	68	3,4	3,4	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
Sayur dan Buah	249,8	125	6,2	6,2	5,0	31,2	29,8	30,0	29,8
Lain-lain	61,1	34	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.005	100,0	95,5	11,5	106,1	101,3	100	93,1

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2022, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90, hal ini berarti telah beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2.

#### 2.1.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu : 1) Pemberian izin lokasi; 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6)

Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) Pemberian izin membuka tanah dan 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.30  
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2023

Selain dari itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31  
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hak Milik	1.401	2.365	2.180	4.409	7.727
2.	Hak Guna Bangunan	341	720	1.560	1.656	1.533
3.	Hak Pakai	4	4	51	128	100

*Sumber: BPS Kota Jambi, 2023*

#### 2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-DAS dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sampel air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang. Hasil pemantauan Tahun 2022 Faktor pembatas (tekanan) ditunjukkan oleh parameter yang melampaui Baku Mutu, meliputi : DO, Sulfida sbg (H<sub>2</sub>S) dan Detergent (MBAS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

(UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2022 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 100. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2022 mencapai 100%.

Tabel 2.32

Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	24	24	29	41	38
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	5	9	9	4	4
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jlh Dok	2	7	2	1	2
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jlh Dok	36	18	59	60	100
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

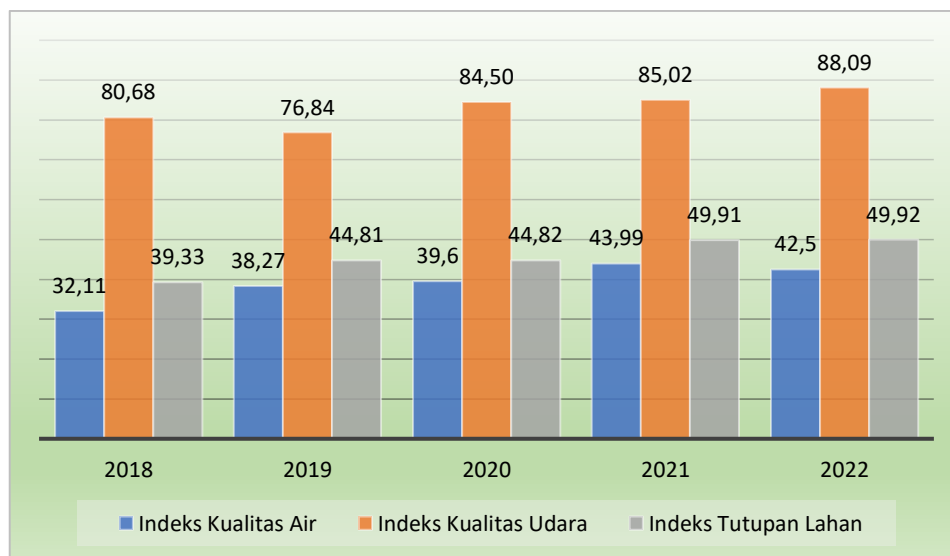
Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2018 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 438.520 ton menurun menjadi 119.723 ton pada tahun 2022. Volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulo dibandingkan dengan volume produksi sampah terangkut, rata-rata penanganan sampah pada tahun 2022 sebesar 74,97 persen.

Tabel 2.33  
Persentase Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	438.520	121.755,21	117.445,26	118.999,31	119.723,96
2.	Volume Produksi Sampah	566.594	154.558	156.103,40	158.106,98	159.688,01
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	77,35	78,78	79,24	75,27	74,97
4.	Jumlah TPS	445	445	445	445	455
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m <sup>3</sup> /hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
6.	Jumlah Penduduk	597.043	604.923	611.353	618.814	618.814
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,17	0,17	0,17	0,17	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah E.Choli yang berasal dari limbah domestik. Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 88,09.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2023

Gambar 2.48  
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2018-2022



Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 49,92, sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2018 dan 2022 adalah sebagai berikut :

IKLH	=	(IKAx30%)	+	(IKUx30%)	+	(ITLX40%)	
IKLH 2018	=	(32,11x30%)	+	(80,68x30%)	+	(39,33x40%)	= 49,57
IKLH 2022	=	(42,50x30%)	+	(88,09x30%)	+	(49,92x40%)	= 59,15

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2018 ke tahun 2022 yaitu 49,57 menjadi 58,67.

#### **2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil**

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, perangkat daerah yang membidangi urusan ini menjalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 442.317 orang. Jika disandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk ber KTP-el telah mencapai 99,03%. Kondisi ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 95,68%

Tahun 2022 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 5.805 bayi dengan jumlah bayi lahir 7.080. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.34  
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	229.944	254.387	7.998	5.900	5.805
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	614.329	616.359	8.286	6.131	7.080
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	446.304	437.164	444.205	450.989	446.641
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	427.041	218.832	443.049	450.376	442.317
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	95,68%	50,06%	98,74%	99,86%	99,03%
6.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	281.998	286.265	287.910	290.067	293.268
7.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	90.755	123.449	152.370	184.130	216.112

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.35  
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	73	73	73	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	73	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
7.	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	310	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: DPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2023

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2022 telah

tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

#### 2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salah satunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36

#### Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,3	2,4	2,01	2,08
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	0,41 : 0,59
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73.50	61.06	61.06	55,20	59,52
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	67.513	66.948	66.833	4.295	7,780*
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	69.99	59.31	59.31	42,50	55,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2023

### 2.1.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarananya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37

Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	2	2	2	2	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	2	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	746	796	151	63	220
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	138	21	140	63	157
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	700	60	140	100	200
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	76%	80%	85%	90%	92%

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%))	61%	-	69,69%	90%	92%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	25	25	25	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	2.292	2.218	10.000	2.794	2.627
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)		--	24	17	16
7.	Jumlah ATCS (unit)	5	3	6	7	1
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	1.243	841	658	369	509
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	455	457	202	364	560
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	53	45	31	44	51
	b. Luka Berat	1	1	0	1	2
	c. Luka Ringan	723	661	291	502	666
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	534	815	464	498	654

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya cenderung menurun dari tahun 2018 dimana jumlah 1.241 kasus hingga 2021 sebanyak 369 kasus namun meningkat di tahun 2022 menjadi 509 kasus. Rendahnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi telah tinggi.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 20 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung

jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.38  
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	34,14	22,43	10,70	9,30	12,59
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100
4.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	504.657	248.445	77.048	55.800	64.200
5.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	0,34	0,17	0,10	0,10	0,10
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	0,99	0,97	0,90	0,91	0,94
7.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	81	113	60	28	22
	b. Mobil Bus	Unit	813	617	458	354	293
	c. Mobil Barang	Unit	28.700	25.664	30.438	33.510	22.717
	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	62	70	60	25	22
	b. Mobil Bus	Unit	489	498	395	287	158
	c. Mobil Barang	Unit	18.928	20.707	23.838	20.660	24.210
8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	20	30	30	20
9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	10.000	10.000	10.000	-	-
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah			-	-	-
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (*publik*). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus sesuai kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integritas system sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini di dilakukan untuk memperoleh nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti:

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 - 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.
- Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Dan 35 Indikator, Merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Penilaian SPBE yang belum terpenuhi sehingga Kota Jambi pada Tahun 2022 memperoleh Indeks SPBE dari Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 35 Indikator penilaian untuk Kota Jambi mendapat nilai 2,85 (Baik). Sedangkan Provinsi Jambi mendapat nilai indeks SPBE 1,61 (Kurang).

Sedangkan untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (media online); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

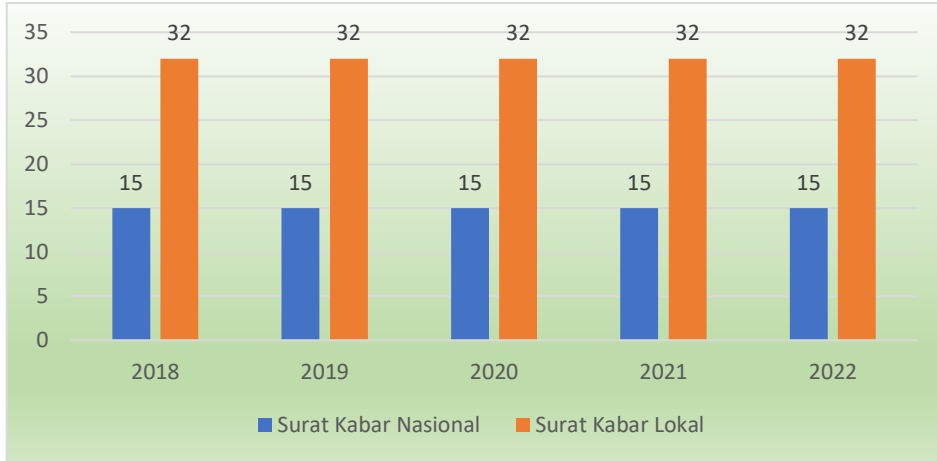
Tabel 2.39  
Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Website milik Pemerintah Daerah	28	40	40	43	43
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	51,85	74,07	74,07	79,63	79,63
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (media online).	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah

memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

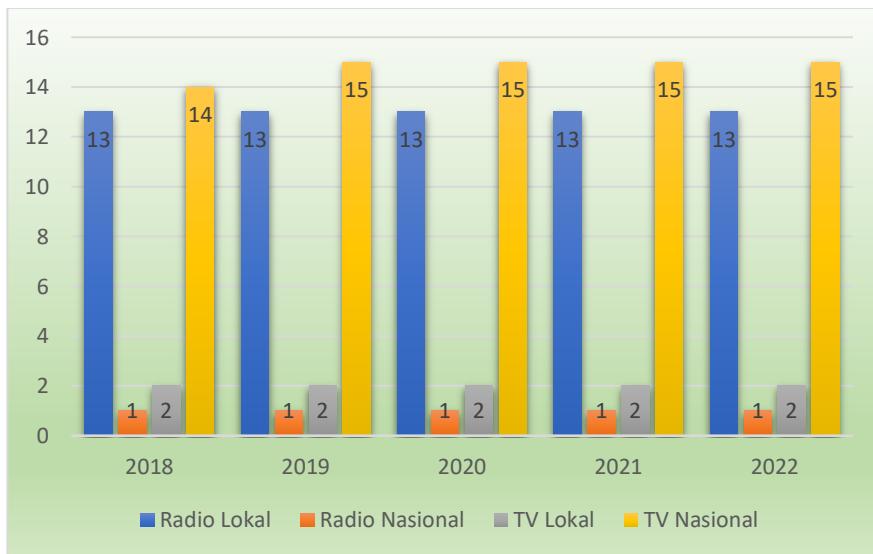


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023

Gambar 2.49

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan. Dikarenakan tidak bertambahnya siaran TV baik nasional maupun lokal. Dikarenakan untuk masa kini lebih didominasi dengan adanya internet sehingga perkembangan TV/Radio mengalami stagnasi.



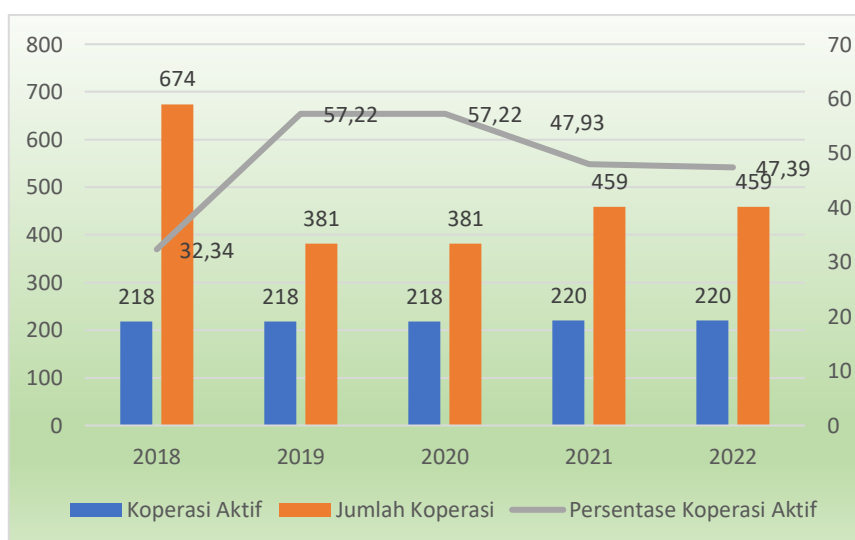
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023

Gambar 2.50

Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Jambi

### 2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2022 koperasi aktif berjumlah 220 unit, jumlahnya tetap sama dengan tahun lalu. Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasanya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023

Gambar 2.51  
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, dimana pada tahun 2018 terdapat 10.763 unit meningkat menjadi 60.000 unit tahun 2022. Hal ini membuktikan kalau UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukti tetap bisa bertahan saat pandemi.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan dimana hingga tahun 2022 UMKM yang telah memiliki perizinan/sertifikat sebanyak 10.763 unit, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9.887 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan tahun 2022 sebanyak 225 atau 0,0209% pelaku UMKM telah mendapatkan kesempatan mengikuti pameran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 105 UMKM.

Tabel 2.40  
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang dibina)	Unit	10.763	10.763	10.763	10.763	10.763
2.	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	10.763	12.847	35.145	48.496	60.000
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0078	0,0088	0,0088	0,0097	0,0209
		Unit	95	95	95	105	225
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	5 kel	102 kel
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	539	1.200	6.517	9.887	10.763
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	77,61	49,00	50,39	50,39	52,51

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023*

#### 2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Iklim investasi di Kota Jambi saat ini cukup kondusif, selama jenis investasinya tidak bertentangan dengan norma sosial di masyarakat dan cenderung pro rakyat seperti tidak mematikan usaha lokal, mengutamakan dan memberdayakan tenaga kerja lokal, serta jenis usahanya tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan.

Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa termasuk investasi di bidang perdagangan, namun potensi dan peluang penanaman modal di bidang industri besar relatif terbatas karena keterbatasan lahan.

Perkembangan penanaman modal di Kota Jambi setiap tahunnya menunjukkan variasi dan juga semakin menjanjikan. Total realisasi investasi berskala nasional di Kota Jambi tahun 2022 sebesar Rp 2.041 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total realisasi Investasi tahun 2021 sebesar Rp 5.869 milyar.

Tabel 2.41  
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)  
Kota Jambi 2018-2022

NO	URAIAN	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (unit)	17	14	37	-	81
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Milyar)	317,73	1.055,27	249.446	5.869	2.041
3.	Jenis Izin yang Dilayani	73	82	82	82	74
4.	Izin yang Diterbitkan	9.835	2.542	3.001	9.905	23.582
5.	Izin yang Diterbitkan (baru & perpanjangan (data MONEV))	14.424	6.214	9.685	9.905	1.415

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2023

Saat ini salah satu kendala penanaman modal di Kota Jambi adalah masih belum selesainya Rancangan Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Jambi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proses maupun waktu dalam menerbitkan rekomendasi perizinan. Untuk meningkatkan investasi di Kota Jambi, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Jambi dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Kegiatan promosi dan pameran-pameran potensi dan peluang investasi di Kota Jambi perlu lebih ditingkatkan, terutama di event-event besar.

Tabel 2.42  
Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Jambi 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN	2.909	8.731	11.172	29.296	64.466
2.	Jumlah seluruh PMDN	17	432	3.574	7.872	18.668
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	171,1	20,2	3,1	3,7	3,5

Sumber: DPMPTSP Kota Jambi, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rasio daya serap tenaga kerja di Kota Jambi, tahun 2022 sebesar 3,5%, terjadi penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

### 2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43  
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah klub olahraga (buah)	30	218	218	218	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	30	32	2	1	4
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	30	35	40	46	62
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	6	6	4	8	7

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2023

### 2.1.3.2.14 Statistik

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Statistik sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota.

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para

stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Sejak tahun 2017 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah kewenangan urusan statistik daerah menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.

#### 2.1.3.2.15 Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Jambi adalah a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya di Kota Jambi, Urusan Persandian dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana permasalahannya dihadapkan pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Di sisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan persandian berkaitan dengan ketersediaan Tempat Kegiatan Sandi (TKS), sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang persandian, dan informasi persandian.

Tabel 2.44  
Capaian Urusan Persandian Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah SDM sandi yang memiliki kualifikasi atau kompetensi persandian	Orang	2	3	3	3	3
2.	Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	142	113	122	111	132

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023



### 2.1.3.2.16 Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, dan sejarah serta dan pengembangan seni dan kebudayaan. Pelestarian dengan cara pembinaan sanggar-sanggar seni, pementasan seni budaya, lomba seni dan festival budaya serta pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya di dalam maupun di luar daerah. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Jambi. Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45  
Capaian Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	5	5	5	2	7
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	-	8	8	0	0
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	3	3	3	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2022

### 2.1.3.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup :
  - ✓ Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan lingkup :
  - ✓ Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
  - ✓ Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Rasio kinerja urusan perpustakaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah koleksi judul buku yang terdapat di perpustakaan, dimana pada tahun 2018 hanya sebanyak 23.142 judul mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 62.043 judul, perbandingan jumlah buku dengan jumlah penduduk juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara detil pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46  
Capaian Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perpustakaan	Buah	1	370	301	310	359
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	30.274	32.423	14.087	14.329	55.876
3.	Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	23.142	24.479	25.996	26.703	28.065
4.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	50.021	55.352	58.178	59.397	62.043
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	614.329	615.675	606.200	614.329	621.635
6.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Jambi	Persen	8,14	8,99	9,59	9,66	9,98

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2023

### 2.1.3.2.18 Kearsipan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47  
Capaian Urusan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah OPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Buah	6	5	5	5	5
2.	Jumlah OPD	Buah	50	39	39	39	39
3.	Persentase Pengolahan Arsip secara Baku	Persen	15	28	41	54	67

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, 2023

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.3.1 Pariwisata

Peran pariwisata di Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan peran yang berbasis potensi daerah dan memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan-peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata baik tingkat nasional maupun internasional.

Namun dalam hal peningkatan-peningkatan ini masih dihadapi berbagai masalah, diantaranya belum dimilikinya dokumen perencanaan yang terintegrasi di bidang pariwisata, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah dan belum optimalnya pembinaan, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder bidang kepariwisataan. Saat ini di Kota Jambi telah terbentuk lembaga kepariwisataan

antara lain PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiasi Indonesia Tours dan Travel). Permasalahan yang paling utama adalah Kota Jambi tidak memiliki objek wisata yang dapat dijual kepada daerah lainnya, namun Kota Jambi terus berbenah dalam meningkatkan daya guna potensi destinasi pariwisata, seperti pembangunan tugu keris, pedestrian, Hutan Kota, taman-taman Kota hingga Danau Sipin. Jumlah restoran dan hotel berbintang maupun non bintang terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini menandakan geliat ekonomi Kota Jambi terus tumbuh.

Tabel 2.48  
Indikator Urusan Pariwisata Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,36	2,38	-6,59	3,15	23,34
2.	Dokumen RIPPDA Kota Jambi	Dokumen	-	1	-	-	-
3.	Tersusunnya sistem informasi kepariwisataan	sistem	-	4	3	1	1
4.	Jumlah Restoran	Unit	672	710	872	131	Dta
5.	Jumlah Hotel						
	a. Berbintang	unit	30	30	24	29	29
	b. Non Bintang	unit	69	69	54	69	69

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, 2023

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi selama 5 tahun terakhir peningkatannya belum signifikan bahkan tahun 2021 terkontraksi sebesar 6,59 akibat pandemi Covid namun meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 3,15 seiring dengan mulai membaiknya perekonomian dan Pandemi yang mulai menurun. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Jambi pada tahun 2018-2022 berada pada kisaran 2-23%, dimana kontribusi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 23,34%.

#### 2.1.3.3.2 Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian dan Perizinan Usaha Pertanian.

Tabel 2.49  
Indikator Urusan Pertanian Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Padi	Ton	6.243	3.920	4.872	2.214	2.773
2.	Produksi Palawija	Ton	2.250,00	2.807,73	2.080,81	3.915,39	3.639,58
3.	Produksi Sayur-sayuran	Ton	5.138,90	5.485,21	858,00	1.285,00	3.800,04
4.	Produksi Tanaman Buah-buahan	Kwintal	510.771	496,52	755,00	762,00	490,23
5.	Produksi Daging	Kg	657.701	510.819	476.303	463.804	517.423
6.	Produksi Telur	Kg	168.859	189.300	540.374	558.359	334.180

*Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023*

Hasil padi sawah yang dipanen dalam Kota Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 2.773 ton. Jika dibandingkan tahun 2018 dimana produksi padi sebesar 6.243 ton berarti terjadi penurunan produksi sebesar 3.470 ton. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan.

Untuk Palawija, produksi palawija tahun 2022 adalah : jagung sebesar 557,04 ton, ubi kayu sebesar 2.543,14 ton dan ubi jalar sebesar 485,45 ton. Data produksi tanaman buah-buahan di Kota Jambi seperti jeruk siam 1,10 ton, alpukat 31,52 ton, pepaya 96,39 ton, pisang 34,21 ton, mangga 26,34 ton dan rambutan sebesar 30,60 ton

Sarana prasarana milik Pemerintah Kota Jambi yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH). Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Jambi belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pemotongan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

### 2.1.3.3.3 Perdagangan

Perdagangan secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional). Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan dalam ruang lingkup dalam negeri saja atau nasional. Penjual, pembeli, dan tempat transaksinya juga hanya bersifat domestik atau dilakukan di dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan luar negeri/internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan perdagangan dalam negeri, pemerintah telah memiliki arah kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi;
- 2) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- 3) Pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
- 4) Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Perlindungan konsumen.

Sedangkan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan perdagangan luar negeri meliputi :

- 1) Peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- 2) Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- 3) Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan yang dimiliki Kota Jambi antara lain adalah tersedianya pasar. Tahun 2022 tercatat ada 19 pasar daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi dan hanya 7 unit termasuk kategori sebagai pasar tradisional/rakyat. Dari total seluruh pasar tersebut hanya 3 unit yang memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.

Selain penyediaan pasar, untuk mendukung sektor perdagangan dalam negeri juga dilakukan penataan terhadap kawasan perdagangan kaki lima dan pembinaan terhadap para pedagang. Jumlah kawasan perdagangan kaki lima yang ditata sebanyak 3 lokasi, tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 3 lokasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kondusifitas sektor perdagangan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pasar; pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; Pemantuan ketersediaan harga, pasokan, akses pangan dikumpulkan secara rutin/periodik dan upaya perlindungan terhadap konsumen.

Tabel 2.50  
Indikator Urusan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pasar yang diawasi						
	a. Pasar Tradisional	Unit	7	6	6	7	7
	b. Pasar Modern	Unit	-	-	-	-	-
2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.	frekuensi	365 hari	365 hari	366 hari	365 hari	365 hari
3.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	%	30,83	31,14	31,31	32,72	33,20
4.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	8.877,83	9.541,02	9226,38	10.437,11	11.999,96
5.	Jumlah pasar daerah	Unit	21	20	20	19	19
6.	Jumlah pasar daerah kategori sehat	Unit	1	1	1	3	3
7.	Lokasi PKL yang tertata	Lokasi	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.3.4 Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Namun demikian, IKM saat ini dihadapkan pada persaingan pasar

yang lebih ketat lagi ketika telah berlakunya Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), yang berlaku sejak Tahun 2015. Produk dari luar negeri terutama negara-negara ASEAN semakin deras masuk ke pasar Indonesia dengan harga dan kualitas yang cukup bersaing. Apabila kondisi ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan produk IKM kita akan kalah bersaing dan tersingkir.

Untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, perlu dilakukan langkah antisipatif dengan cara meningkatkan kemampuan daya saing para IKM, yaitu dengan melakukan peningkatan desain, standardisasi mutu, peningkatan kualitas produk dan inovasi desain produk baik aspek sumber daya manusia, teknologi maupun peluang pasar.

Gambaran kinerja urusan perindustrian di Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat dari capaian indikator bidang perindustrian seperti Jumlah dan pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah) serta kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.

Tabel 2.51  
Indikator Pertumbuhan IKM Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah IKM	Unit	3.120	3.562	4.162	4.346	4.335
2.	Jumlah IKM yang mendapat binaan atau bantuan	Unit	390	407	45 IKM, 3 KUB	47 IKM	70 IKM
3.	Jumlah sentra industri yang berkembang	Sentra	3	3	3	3	3
4.	Jumlah IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	34	52	4	5	-
5.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi HaKI	Unit	10	-	15	20	39
6.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	%	10,23	9,97	10,84	10,97	10,94
7.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)*	Milyar Rupiah	2.944,76	3.055,64	3.195,32	3499,97	3954,62

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa secara kuantitatif jumlah IKM mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2018 hingga 2022, yaitu dari 3.120



unit menjadi 4.345 unit. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 11 unit. Untuk IKM yang mendapat binaan/bantuan, mengikuti promosi/pameran serta mendapatkan fasilitas HAKI terjadi peningkatan dari 10 IKM di tahun 2018 menjadi 39 IKM di tahun 2022.

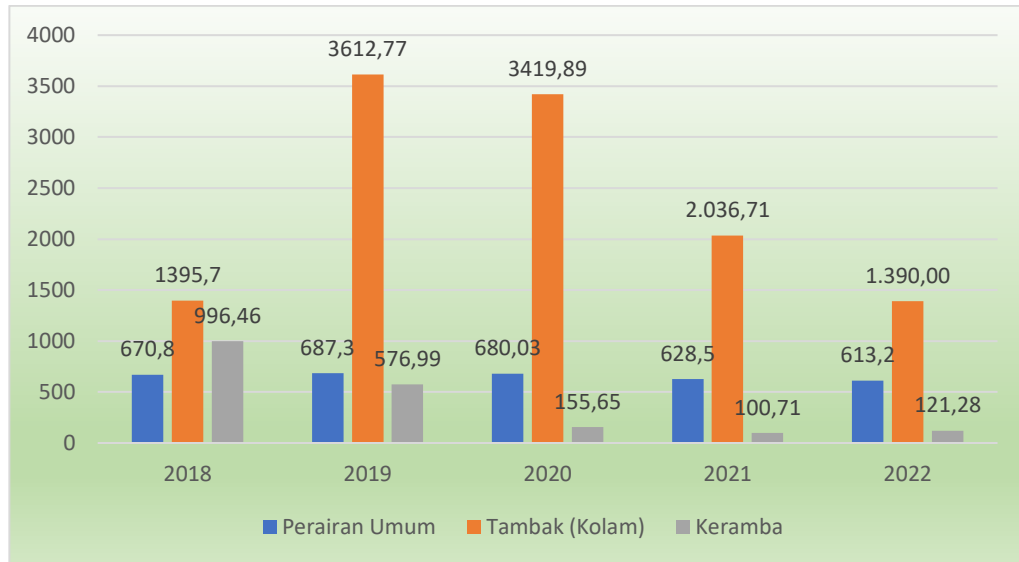
Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Jambi mengalami fluktuasi dan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB selama tahun 2018-2022.

#### **2.1.3.3.5 Kelautan dan perikanan**

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kota Jambi sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kontribusi sektor perikanan selama beberapa tahun terakhir relatif kecil akan tetapi terus menunjukkan tren naik terhadap PDRB di Kota Jambi dari sisi nilai tetapi dilihat dari persentasenya tren tiap tahun menurun.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan hasil yang berfluktuasi. Produksi ikan pada tahun 2018 sebesar 3.062,96 ton menurun menjadi 2.124,48 ton pada tahun 2022 yang terdiri dari perairan umum 613,2 ton, tambak 1.390,00 ton dan keramba sebanyak 121,28 ton.



Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.52  
Produksi Perikanan di Kota Jambi Menurut Sumber Produksi  
Tahun 2018-2022

#### 2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

##### 2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, Top-down dan Bottom-up. Di Kota Jambi dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD yang disusun setiap 5 tahun sekali, dan RKPD yang disusun setiap tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan

menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Penyusunan dokumen perencanaan multisektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multisektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG's. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Jumlah dokumen perencanaan per tahun yang telah disusun terus meningkat selama periode tahun 2018-2022, yaitu dari 6 dokumen menjadi 7 dokumen. Dari beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun, sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100% yang diimplementasikan, yaitu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau dasar penyusunan dokumen/rencana kegiatan oleh PD lainnya.

Tabel 2.52  
Indikator Urusan Perencanaan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah dokumen perencanaan	Dok/th	6	7	7	7	7
2.	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang tersusun	Dok/th	3	4	4	4	4
3.	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan, social dan budaya yang tersusun	Dok/th	3	4	4	4	4
4.	Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi yang tersusun	Dok/th	5	4	4	4	4

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2023

Selain dari jumlah dokumen dan implementasi perencanaan dalam pembangunan, tidak kalah penting dilihat dari sisi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.53  
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah program RKPD	59	59	67	134	
2.	Jumlah program RPJMD	59	59	67	134	
3.	Ratio penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	

Sumber: *Bappeda Kota Jambi, 2023*

#### 2.1.3.4.2 Keuangan

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 20,85% pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 26,18% pada tahun 2022. Selama ini ada dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Kota Jambi yaitu Sektor Pajak Daerah : PPJU, Parkir dan PBB, serta lain-lain PAD yang sah. Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri masih rendah sehingga perlu peran aktif petugas pajak daerah untuk melakukan pengawasan dan penagihan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun demikian penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis accrual dirasa belum optimal. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu menindaklanjuti temuan pengecualian atas LKPD, penyusunan Peraturan Walikota dan Surat Edaran Walikota sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dan rekonsiliasi angka dalam laporan.

Tabel 2.54  
Indikator Urusan Keuangan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belanja Langsung terhadap total APBD (%)	58,37	41,89	53,20	-	-
2.	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi) (%)	20,85	23,15	21,93	23,17	26,18
3.	Rasio SILPA terhadap total belanja tahun sebelumnya (%)	11,55	13,37	9,94	9,42	10,80
4.	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja (%)	89,95	89,86	91,20	88,69	89,52
5.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD (%)	100,89	103,06	96,24	84,25	91,18
6.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	28,24	26,01	26,64	28,50	22,71
8.	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah (%)	38,94	40,60	37,68	-	-
9.	Persentase penyusunan APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.4.3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi maka peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan “merrit system” semakin penting. Kewenangan pemerintah Kota Jambi dalam manajemen kepegawaian daerah yaitu: (1) melaksanakan pembinaan teknis dan (2) pelayanan administratif kepegawaian sesuai peraturan yang baru yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Roadmap Reformasi Birokrasi secara Nasional. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik (public servant). Indikator kinerja dalam rangka mendorong pada peningkatan disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparaturnya kepada masyarakat dan dunia usaha secara professional.

Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepegawaian, pembinaan karir dengan mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam diklatpim dalam penyesuaian jabatan, menerapkan diklat pra-jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis dan diklat fungsional.

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2018-2022 yang tersebar di 40 perangkat daerah.

Tabel 2.55  
Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah ASN	Orang	6326	6.213	5.816	5.624	5.233
2.	Jumlah ASN berpendidikan S-3	Orang	6	5	7	6	8
3.	Jumlah ASN berpendidikan S-2	Orang	333	327	347	370	384
4.	Jumlah ASN berpendidikan S-1	Orang	3.640	3.689	3.516	3.413	3.267
5.	Jumlah ASN berpendidikan SLTA/Sederajat	Orang	1.184	1.087	937	850	693
6.	Jumlah ASN berpendidikan SLTP/Sederajat	Orang	79	70	91	41	37
7.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim II	Orang	10	5	0	0	4
8.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III	Orang	15	5	0	7	27
9.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim IV	Orang	29	30	30	0	60
10.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	Orang	190	120	252	170	244
11.	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	1	239	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
12.	Jumlah ASN pensiun setiap tahun	Orang	317	442	329	414	438
13.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang ditangani	Kasus	36	35	26	14	15
14.	Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	95	97	97	97	96

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Salah satu urusan penunjang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah penelitian dan pengembangan. Jumlah kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi Hal ini juga disebabkan masih minimnya produk penelitian yang mendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kota Jambi.

#### 2.1.3.4.5 Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jambi, obyek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan di Kota Jambi pada tahun 2021 mencapai 410 laporan dengan kinerja laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun sangat baik yaitu mencapai 100%.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Temuan-temuan tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Sampai tahun 2022, rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Jambi telah mencapai 52,97%.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kota Jambi telah mampu menunjukkan kecenderungan perbaikan dan/atau sebagian besar target yang relevan terpenuhi.

Tabel 2.56  
Indikator Urusan Pengawasan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	60,07	60	66	66,45	52,97
2.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	322	430	401	410	371
3.	Persentase laporan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	%	40	40	88,23	77,19	80%
5.	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat Kota	level	N/A	Level II	Level III	Level III	Level III
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	55,74	71,28	N/A	N/A	63,23

Sumber: Inspektorat Kota Jambi, 2023



#### 2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jumlah anggota DPRD Kota Jambi tahun 2022 sebanyak 45 orang yang berasal dari 7 fraksi di DPRD, dengan perincian berdasarkan jumlah anggota berdasarkan fraksi, sebagai berikut, 8 anggota dewan dari Fraksi Demokrat, 6 anggota dewan dari Fraksi PDI-P, 7 anggota dari fraksi Gerindra, 4 anggota dari fraksi PAN, 5 anggota dewan dari fraksi Nasdem, 5 anggota dewan dari fraksi PKS, 4 anggota dari fraksi Golkar dan 6 anggota dewan dari fraksi PBRB.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi a) Memfasilitasi rapat anggota DPRD; b) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; c) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pembukuan keuangan DPRD; d) Pengelolaan kehumasan, keprotokolan, perpustakaan dan dokumentasi; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.57  
Indikator Urusan Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	PERDA yang ditetapkan	Perda	12	11	3	6	9
2.	RAPERDA yang disetujui dalam Prolegda	Ranperda	18	17	16	16	36
3.	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Kep	30	41	18	5	25
4.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Jambi Kota Jambi, 2023

#### 2.1.3.4.7 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan salah satu perangkat daerah yang termasuk pada kelompok urusan penunjang pemerintahan. Sekretariat daerah memiliki fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Jambi didukung oleh 9 bagian, yang meliputi: 1) Bagian Tata Pemerintahan, 2) Bagian Hukum, 3) Bagian Pembangunan, 4) Bagian Perekonomian, 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, 6) Bagian Organisasi, 7) Bagian Umum, 8) Bagian Kerjasama Daerah, dan 9) Bagian Protokol.

Tabel 2.58  
Indikator Urusan Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai LPPD	2,9893 (Tinggi)	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar
2.	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	7	10	10	6	7
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang diterbitkan	88	66	78	39	46
4.	Jumlah Produk Hukum daerah yang tersosialisasikan	4 Perda 1 Perwal	4 Perda 3 Perwal	1 Perda 3 Perwal	2 Perda 2 Perwal	1 Perda 4 Perwal
5.	Persentase paket pengadaan B/J yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Nilai LKjIP	B	B	A	A	Hasil Belum Keluar
7.	Jumlah kerjasama daerah	29	52	37	53	13
8.	Persentase publikasi kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase pemenuhan pelayanan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Organisasi Setda-Kota Jambi Kota Jambi, 2023

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan oleh Centre for Regional and Urban Studies (CURDS), Inggris sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. Daya saing daerah menilai kemampuan

suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya.

Daya saing daerah menjadi salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi, kekhasan, dan unggulan dari daerah itu sendiri. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk melihat tingkat daya saing daerah diantaranya dapat dilihat melalui indikator makro ekonomi seperti LPE dan PDRB per kapita.

#### **2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

##### **a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi, bahan minuman dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk

memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 total konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.59  
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah  
Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.860,43	20.730,26
ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50	13.068,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,00	57,40	60,00	59,14	57,36
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	27,45	29,08	28,92	30,81	33,46
ADHK 2010 (JutaRp)	19,20	19,95	19,66	20,48	21,09
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	1,05	2,43	-2,75	1,83	1,83
Perkapita	2,51	3,89	-1,42	4,16	3,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi perkapita cenderung meningkat, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 yaitu 27,45 persen pada tahun 2018 menjadi 33,46 persen pada tahun 2022 menurut Atas dasar Harga Berlaku. Sedangkan menurut Atas Dasar Harga Konstan yaitu 19,20 pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,09 di tahun 2022.

Pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah.

Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 16.145 milyar Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 20.730 milyar Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010).

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan konsumsi rumahtangga berkisar antara 2 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,16 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada pengeluaran perkapita di Kota Jambi, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60

Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Makanan, Minuman, dan Rokok	44,20	44,62	43,68	43,99	44,64
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,08	25,81	28,83	29,77	30,11
Aneka Barang dan Jasa	12,15	12,64	13,75	13,17	13,99
Pakaian, Alas Kaki dan tutup kepala	3,33	3,27	2,94	2,49	2,80
Barang Tahan Lama	-	-	5,49	5,23	3,41
Pajak, pungutan dan asuransi	-	-	3,58	4,51	4,65
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	-	-	1,73	0,84	0,39
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Secara rata-rata dari tahun 2018 s.d 2022, nampak pada pengeluaran perkapita perkomoditas di Kota Jambi, dimana konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan

cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,20 pada tahun 2018 dan 44,64 Pada tahun 2022.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, barang tahan lama dan sebagainya.

#### **2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

##### **a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Sampai dengan tahun 2022 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

### b. Akseibilitas Daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61

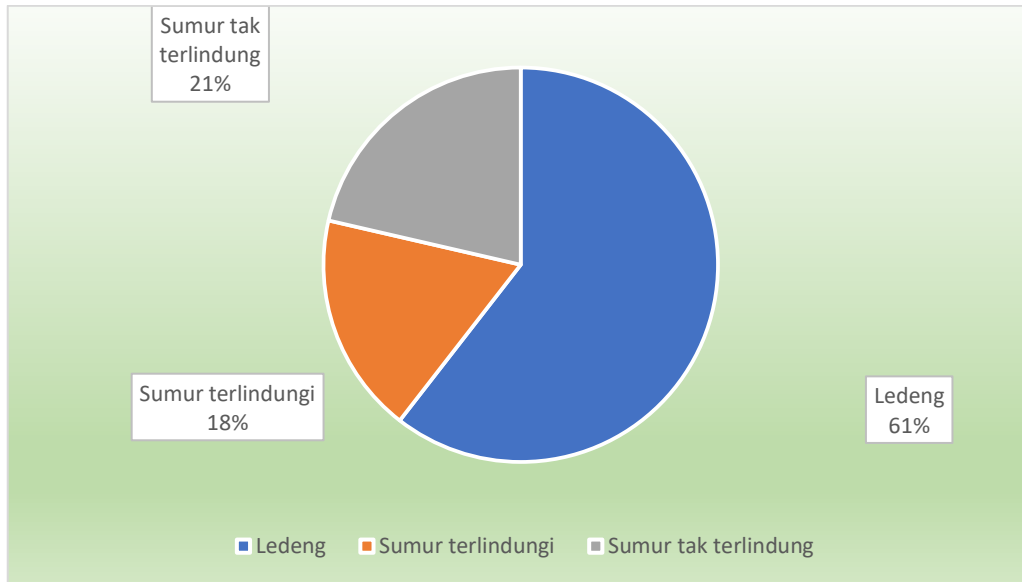
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (KM)	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023

### c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.



Gambar 2.53  
Sumber air bersih

Tabel 2.62  
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022

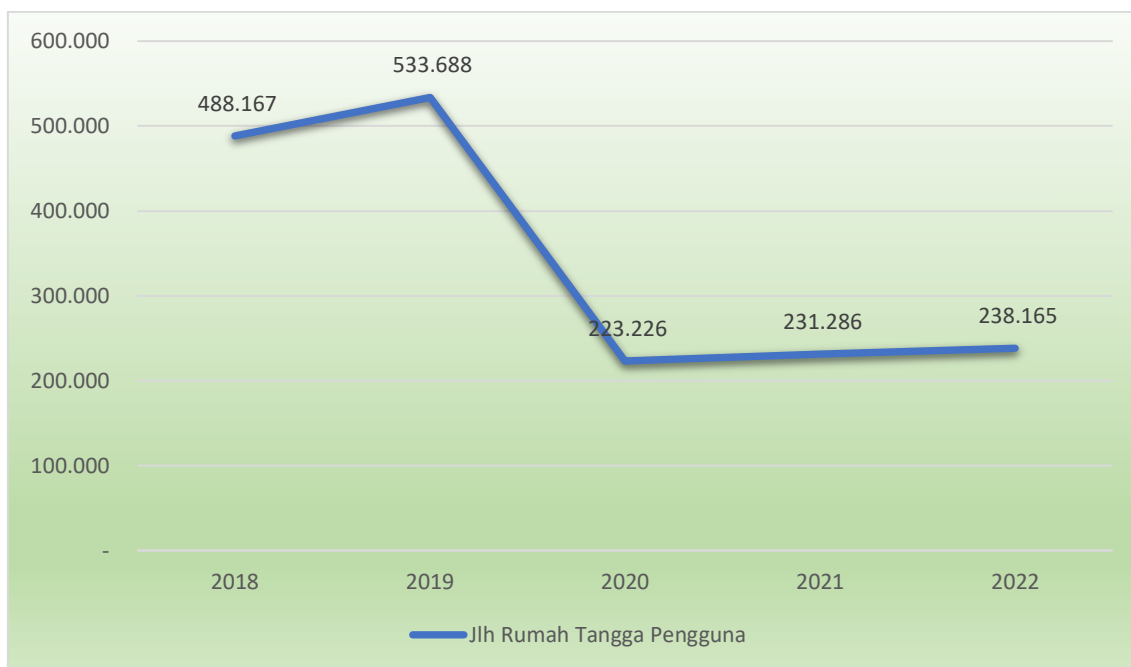
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ledeng (Perpipaan)	164.489	237.858	85.820	86.982	86.990
2.	Sumur Lindung	40299	60.734	23.183	25.132	26.012
3.	Sumur Tidak Terlindungi	34144	37.385	29.506	30.756	31.820
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	337.604	459.993	138.509	142.870	142.917
5..	Jumlah Rumah Tangga	557.435	688.113	144.281	145.786	145.824
6..	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	60,56	66,85	96	98	99

Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023

#### d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 488.187 pelanggan. Adapun pada tahun 2022, rumah tangga pengguna listrik menurun menjadi 238.165. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut.





Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.54  
Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi  
Tahun 2018-2022

#### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

##### a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63.  
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	OSS	-	-
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	OSS	-	-
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	OSS	-	-

4.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	-	-
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	28 Hari Kerja	22	Tergantung Ukuran Luas Bangunan
6.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (MBR)	28 Hari Kerja	11	Tergantung Ukuran Reklame
7.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	12	Tergantung jenis usaha
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	OSS	-	-

Sumber : DPMPSTSP Kota Jambi, 2023

### b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 320.380.000.000 atau tercapai sebesar 92,20% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 301.796.809.124 selain pajak daerah terdapat retribusi dimana pada tahun 2022 sebesar Rp. 50.544.550 atau tercapai target sebesar 79,57% atau sebesar Rp. 40.216.623.270. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

Tabel 2.64.

Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Pajak Daerah</b>					
	Target	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000	297.860.000.000	320.380.000.000
	Realisasi	215.444.433.999	256.028.625.688	216.815.393.479	244.726.978.039	301.796.809.124
	Persentase	105,87%	105,76%	93,43%	82,16%	94,20%
2	<b>Junlah Retribusi</b>					
	Target	44.012.000.000	45.066.647.000	36.618.000.000	55.312.900.000	50.544.550.000
	Realisasi	40.389.059.087	38.541.261.596	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270
	Persentase	91,77%	85,22%	110,55%	93,73%	79,57%

Sumber: BPPRD, BPKAD Kota Jambi, 2023

### c. Angka Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya

dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi pada tahun 2022 hanya 1 yaitu demonstrasi ekonomi. Berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.65.  
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Demonstrasi Politik	6	-	-	1	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	-	5	2	2	1
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	1	-	-	-
Jumlah		6	6	2	3	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi, 2023

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

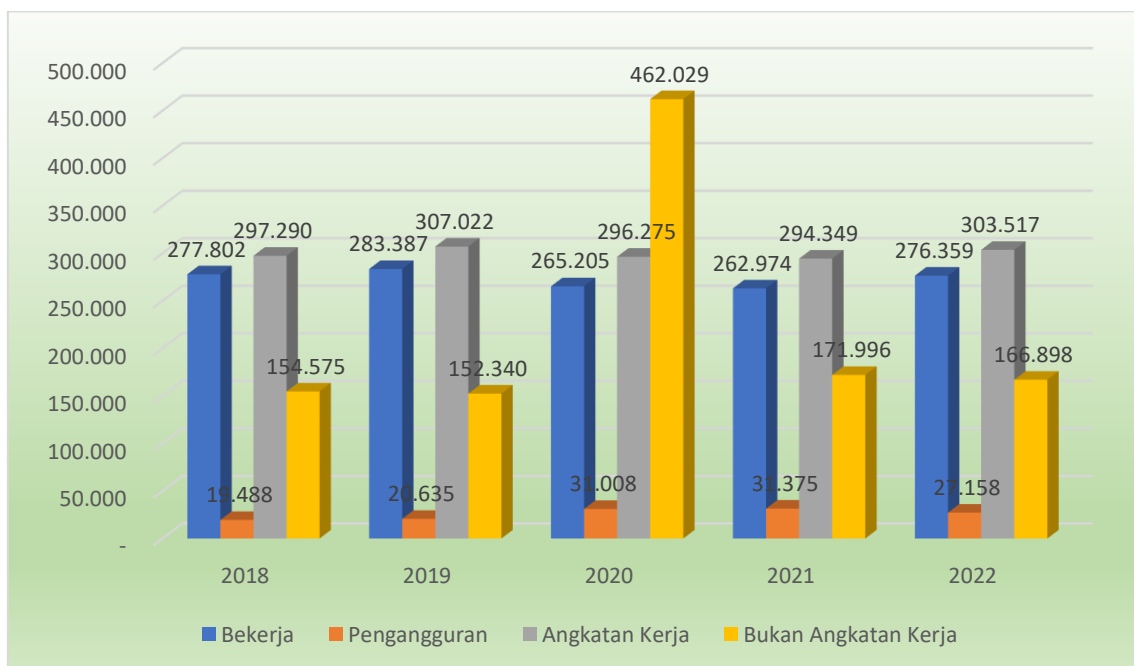
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kota Jambi diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

##### a. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi

internal tenaga kerja itu sendiri seperti : motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja sebanyak 297.290 meningkat menjadi 303.517 pada tahun 2022. Perkembangan tenaga kerja di kota Jambi terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.55  
Perkembangan Ketenagakerjaan Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari sisi jenjang pendidikan, angkatan kerja Kota Jambi juga memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang terus meningkat disesuaikan dengan perkembangan harga serta kemampuan pemberi kerja. Nilai UMK Kota Jambi tahun 2018 sebesar Rp. 2.234.000 per pekerja per bulan dan meningkat menjadi Rp. 2.972.192 per pekerja per bulan pada tahun 2022. Peningkatan UMK ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2.56  
TPAK dan TPT Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 mencapai 6,56% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,66%. Hal ini dikarenakan membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid sehingga lapangan kerja kembali tersedia sehingga tingkat pengangguran menurun..

Setiap tahun angkatan kerja mengalami peningkatan dengan tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan dijawab pemerintah dengan membuat kebijakan - kebijakan pembangunan yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat menyerap surplus tenaga kerja cukup banyak (labour intensive).

Tabel 2.66.  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Jambi Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lulusan S1	45.329	47.839	24.257	25.758
2.	Jumlah lulusan S2	3.892	4.135	2.664	2.879
3.	Jumlah lulusan S3	269	279	249	274
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	49.490	52.253	27.170	28.911
5.	Jumlah penduduk	614.329	616.355	620.703	621.365
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 ((4/5)x10000)	805,59	847,77		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Jambi, 2022

## b. Tingkat Ketergantungan

Selain itu, salah satu fokus dalam aspek sumber daya manusia adalah angka dependency ratio/rasio ketergantungan, yang menunjukkan tingkat ketergantungan SDM produktif (15-64) tahun terhadap usia nonproduktif (0-15 dan 65+). Per tahun 2022, rasio ketergantungan Kota Jambi berada pada angka 43,87 dimana angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 sebesar 43,86. Hal ini menunjukkan perkembangan yang kurang baik, dimana masyarakat dengan usia produktif tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi masyarakat yang kurang produktif.

Tabel 2.67.  
Rasio Ketergantungan Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	147.302	147.827	155.255	155.558	155.626
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	24.189	25.014	29.040	31.078	33.296
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	171.491	172.841	184.295	186.636	188.922
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	426.612	431.897	421.905	425.526	430.631
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	40,20	40,02	43,68	43,86	43,87

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

## **2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Jambi secara umum dapat terpilah dalam Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; serta Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

### **2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan di Kota Jambi diidentifikasi melalui analisa data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Jambi, bahwa tidak semua data mencerminkan peningkatan atau penurunan capaian sasaran. Namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Jambi dengan dasar bahwa Kota Jambi sebagai Ibukota dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Jambi.

Berdasarkan presentase jumlah penduduk miskin Kota Jambi dari tahun ketahun mengalami penurunan tetapi apabila dilihat dari jumlah penduduk mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah warga miskin berdasarkan data BPS Kota Jambi penduduk miskin pada tahun 2022 yaitu sebesar 8,33%. Data menunjukkan tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Jambi disebabkan oleh masih rendahnya pemberdayaan penduduk miskin, untuk itu diperlukan penyediaan akses kebutuhan dasar (misalnya: pendidikan, kesehatan, air bersih) dan pemberdayaan warga miskin; serta peningkatan perlindungan masalah sosial dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya dengan target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi dengan akar permasalahan yaitu: Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan (Rendahnya kualitas daya saing siswa,

Rendahnya daya tampung sekolah, Rendahnya kualitas lulusan yang dapat diterima di SMA favorit, Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, Rendahnya kompetensi tenaga pendidik, Tidak optimalnya penerapan Kurikulum K13, Distribusi tenaga pendidik tidak merata), layanan kesehatan yang belum optimal, disebabkan oleh Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, Tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular, Rendahnya supras pelayanan kesehatan dasar, Rendahnya kualitas tenaga kesehatan, Masih kurangnya Alat kesehatan, Tingginya Masyarakat dengan pola hidup tidak sehat. Serta masih rendahnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal dan belum optimalnya penyelesaian Konflik terhadap ketenagakerjaan.

2. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: Rendahnya ketersediaan produk lokal di pasaran, Rendahnya Kualitas Produk dan daya saing UMKM/IKM, Rendahnya kualitas pengelolaan sarana prasarana perdagangan, Rendahnya kreativitas dalam pengelolaan kepariwisataan, Rendahnya pembinaan, koordinasi dan sinergi antar stakeholders kepariwisataan, dan masih minimnya penyelenggaraan event berskala Nasional/Internasional.
3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi e-government pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.
4. Pelayanan infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya jaringan drainase dan belum optimalnya pelayanan parkir.



### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Dari permasalahan pembangunan daerah di Kota Jambi dan dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Jambi tahun 2024 sebagai berikut:

#### **1. Rencana Induk Kelitbangan**

Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan perlu didukung dengan kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat, terutama dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi daerah (BRIDA) maupun perangkat-perangkat kelembagaan kelitbangan yang meliputi Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Sekretariat Tim Pengendali Mutu, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada Tim Kelitbangan. Kemudian urusan kelitbangan harus melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya berupa Forum kelitbangan. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan kerjasama eksisting dengan empat pihak lainnya yaitu K/L kelitbangan, lembaga kelitbangan provinsi/pemerintah daerah lain, lembaga kelitbangan non pemerintah serta komunitas dan masyarakat. Diharapkan dengan kerjasama ini, dapat tercipta optimalisasi kualitas dan kuantitas kelitbangan.

#### **2. Indeks Pembangunan Pemuda Kota Jambi**

Dalam rangka peningkatan indkes Pembangunan Pemuda dikota Jambi perlu dilakukan pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kota Jambi yang bertugas untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Selain itu dalam pelaksanaan program kegiatan perlu dilakukan penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan dan juga Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan stakeholder kunci pengampu pembangunan bidang pemuda.

**3. Model Hunian Vertikal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Kota Jambi**

Perlu kolaborasi semua pihak baik mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan beroperasinya hunian vertikal, karena diharapkan hunian vertikal ini dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Kota Jambi . Untuk tindak lanjut dari rekomendasi ini perlu disusun serangkaian dokumen pendukung seperti Dokumen Studi Kelayakan, Masterplan, DED dan Dokumen Lingkungan agar dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan seperti yang diharapkan. Dari hasil kajian Perumahan Guru Mayang Mangurai bisa dijadikan Pilot Project bagi Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan Hunian Vertikal di Kota Jambi dengan memperhatikan kriteria lokasi serta tanah dan lahan yang ada.

**4. Strategi Penataan dan Pengembangan UMKM melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi**

Dalam penataan dan pengembangan koperasi dan UMKM Kota Jambi diperlukan kolaborasi dari berbagai OPD untuk implementasi pelaksanaan kegiatannya termasuk dalam memberikan kemudahan dalam perizinan seperti (pendirian koperasi, SKU, PIRT, BPOM, Label Halal untuk produk serta penggunaan sistem perizinan dengan cara online). Untuk pengembangan UMKM disarankan agar UMKM dibawah naungan DTKK Kota Jambi bergabung menjadi anggota koperasi. Sedangkan untuk pengembangan UMKM, dinas terkait dapat menyediakan gerai atau stand oleh-oleh sebagai pilot project di tempat strategi wisata alam Danau Sipin bagi UMKM yang mempunyai produk unggulan.

**5. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan:**

menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah sosial dan meningkatkan

kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan.

6. **Upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dengan:**
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi distribusi guru.
  - b. Meningkatkan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, optimalisasi tindakan preventif, promotif, dan kuratif.
  - c. Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
7. **Upaya untuk meningkatkan Daya saing daerah** dalam bidang ekonomi melalui penyediaan kualitas produk lokal yang berdaya saing, penyediaan sarana prasarana perdagangan, meningkatkan sinergisitas antar *stakeholders* kepariwisataan, dan penyelenggaraan job fair.
8. **Optimalisasi Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)** melalui penyediaan sarana dan prasarana TIK.
9. **Peningkatan Pelayanan infrastruktur publik**, permukiman dan lingkungan hidup melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, bedah rumah, peningkatan SR air bersih, mengurangi genangan air melalui pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi dan penyediaan pelayanan Sarana dan prasarana perhubungan darat.

## 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2022

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														Dinas Pendidikan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi</b>	B NILAI	273.044.370.804	B NILAI	299.694.808.380	B NILAI	313.490.031.893		263.151.956.266	562.846.764.646		206,14%	Dinas Pendidikan	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI</b>	NILAI AKIP (A)	417.053.065	NILAI AKIP (A)	533.728.120	NILAI AKIP (A)	411.710.620		369.100.022	902.828.142		216,48%	Dinas Pendidikan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat disusun	12 Dokumen	295.208.982	4 dokumen	419.942.620,00	12 Dokumen	308.306.322		266.413.072	686.355.692		232,50%	Dinas Pendidikan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	121.844.083	4 Laporan	113.785.500,00	4 Laporan	103.404.298		102.686.950	216.472.450		177,66%	Dinas Pendidikan	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	100%	269.057.754.151	100%	295.543.539.395	100%	309.397.375.180		259.558.184.469	555.101.723.864		206,31%	Dinas Pendidikan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2126 orang	268.098.922.943	2699 orang	294.902.472.995,00	2207 orang	308.432.319.780		258.785.963.669	553.688.436.664		206,52%	Dinas Pendidikan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134 Dokumen	947.250.400	85 dokumen	638.489.400,00	85 Dokumen	943.120.400		761.765.800	1.400.255.200		147,82%	Dinas Pendidikan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	11.580.808	1 dokumen	2.577.000,00	1 Dokumen	21.935.000		10.455.000	13.032.000		112,53%	Dinas Pendidikan	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH</b>	100%	978.851.316	100%	966.106.100	100%	915.076.440		799.671.800	1.765.777.900		180,39%	Dinas Pendidikan	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	48.750.000	767 Unit Rumah Dinas	79.474.600,00	1 Dokumen	40.238.040		32.508.000	111.982.600		229,71%	Dinas Pendidikan	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Daerah	1 Laporan	28.500.000	189 Satuan Pendidikan	11.625.000,00	1 Laporan	21.900.000		14.400.000	26.025.000		91,32%	Dinas Pendidikan	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	901.601.316	12 Dokumen	875.006.500,00	12 Laporan	852.938.400		752.763.800	1.627.770.300		180,54%	Dinas Pendidikan	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Kepegawaian</b>	100%	195.550.000	100%	176.599.400	100%	205.450.000		182.719.647	359.319.047		183,75%	Dinas Pendidikan	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	175 Paket	122.500.000	161 stel	117.364.500,00	169 Paket	125.250.000		109.246.200	109.246.200		89,18%	Dinas Pendidikan	

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang Undangan	5 Orang	73.050.000	1 kali	59.234.900,00	8 Orang	80.200.000		73.473.447		132.708.347		181,67%	Dinas Pendidikan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	1.040.199.072	100%	609.107.628	100%	1.236.410.072		1.180.216.012		1.789.323.640		172,02%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	11.848.368	50 buah/pcs	6.960.000,00	50 Paket	11.595.000		11.375.000		18.335.000		154,75%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	37.485.407	-	-	15 Unit	190.948.898							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57 Paket	119.015.997	1 tahun	185.425.806,50	57 Paket	119.644.188		119.170.000		304.595.807		255,93%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	94.659.300	112.000 lembar	17.754.177,00	5 Paket	73.521.986		53.938.550		71.692.727		75,74%	Dinas Pendidikan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	1 tahun	16.350.000,00	1 Laporan	17.250.000		7.237.500		23.587.500		78,63%	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	747.190.000	80 kali	382.617.644,00	3 Laporan	823.450.000		811.314.962		1.193.932.606		159,79%	Dinas Pendidikan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	100%	589.025.200	100%	480.245.467	100%	552.945.400		500.973.045		981.218.512		166,58%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi	3 Laporan	248.000.000	8 rekening	197.487.367,00	3 Laporan	232.000.000		196.797.845		394.285.212		158,99%	Dinas Pendidikan
	Jumlah Penyediaan Jasa Air			8 rekening					0		197.487.367		79,63%	Dinas Pendidikan
	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik			8 rekening					0		197.487.367		79,63%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	1 Laporan	341.025.200	11 orang	282.758.100,00	3 Laporan	320.945.400		304.175.200		586.933.300		172,11%	Dinas Pendidikan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH</b>	100%	765.938.000	100%	1.385.482.270	100%	771.064.181		561.091.271		1.946.573.541		254,14%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	48.000.000	1 unit	46.139.600,00	1 Unit	48.000.000		23.238.128		69.377.728		144,54%	Dinas Pendidikan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, B/Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan iaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107 Unit	663.990.000	107 unit	589.582.034,00	107 Unit	664.808.181		505.833.143		1.095.415.177		164,97%	Dinas Pendidikan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	52 Unit	53.948.000	30 unit	17.539.636,00	41 Unit	41.756.000		15.620.000		33.159.636		61,47%	Dinas Pendidikan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	1 unit	732.221.000,00	1 Unit	16.500.000		16.400.000		748.621.000		#DIV/0!	Dinas Pendidikan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD</b>	99.49 persen	147.882.370.651	99.49 persen	133.281.816.950	99.49 persen	158.763.917.938		151.471.237.190		284.753.054.140		192,55%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<b>MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)</b>	90%	91.397.384.947	90%	88.648.209.540	90%	97.494.772.552		95.583.597.846		184.231.807.386		201,57%	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan UKS	5 Ruang	640.378.534	11 SD	908.174.814,00	5 Ruang	533.824.712		532.686.883		1.440.861.697		225,00%	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	"Jumlah SD yang mendapat pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah "	14 Unit	3.633.758.932	7 SD	2.409.934.402,00	12 Unit	1.659.326.594		1.580.941.134		3.990.875.536		109,83%	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	"Jumlah SD yang mendapatkan rehab sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah "	9 Unit	2.053.398.985	-	-	33 Unit	6.188.974.106		6.118.473.855		6.118.473.855		297,97%	Dinas Pendidikan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan meubelair sekolah	42 Paket	1.790.564.000	64 SD	2.644.965.200,00	54 Paket	2.925.400.023		2.921.039.000		5.566.004.200		310,85%	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan pengadaan perlengkapan siswa	1000 Unit	107.341.578	-	-	6 Unit	107.341.700		106.947.000		106.947.000		99,63%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	jumlah peserta didik SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	726 Peserta Didik	1.137.715.810	550 peserta didik SD	727.027.490,00	886 Peserta Didik	1.123.253.900		838.231.000		1.565.258.490		137,58%	Dinas Pendidikan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa	9 Paket	1.199.600.000	67 SD	16.897.729.803,00	48 Paket	6.103.268.839		6.082.941.799		22.980.671.602		1915,69%	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas KBM kurikulum 2013	204 Satuan Pendidikan	87.988.480	100 SD	60.124.594,00	204 Satuan Pendidikan	48.782.000		45.282.000		105.406.594		119,80%	Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah Peserta Didik SD yang berprestasi akademik dan non akademik	525 Peserta Didik	2.333.971.564	489 Orang	305.413.110,00	389 Peserta Didik	792.196.084		741.904.290		1.047.317.400		44,87%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SD	1678 Orang	25.247.886.274	1674 Orang	24.150.241.100,00	1678 Orang	25.235.589.700		24.659.341.500		48.809.582.600		193,32%	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Bersertifikat Kepala Sekolah (NUKS)	75 Orang	132.526.750	-	-	150 Orang	388.862.220		343.090.528		343.090.528		258,88%	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	204 Satuan Pendidikan	86.857.240	250 orang	13.623.600,00	204 Satuan Pendidikan	217.170.600		209.712.000		223.335.600		257,13%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan pengelolaan dana BOS sekolah dasar	164 SD	100.016.221.800	164 SD	40.474.980.427	204 SD	90.923.838.000		0		40.474.980.427		40,47%	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	204 Orang	94.496.800	164 SD	55.995.000,00	204 Orang	35.746.800		35.705.000		91.700.000		97,04%	Dinas Pendidikan
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)</b>	85%	44.038.328.753	85%	36.097.972.555	85%	49.853.966.012		45.415.001.444		81.512.973.999		185,10%	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang mendapatkan pembangunan Sarana prasarana utilitas sekolah	1 Unit	179.008.028	5 SMP	0,00	5 Unit	429.349.619		428.143.350		428.143.350		239,18%	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5 Ruang	-	2 SMP	2.735.534.681,59	5 Ruang	1.900.044.543		1.887.784.307		4.623.318.989		#DIV/0!	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	2.061.893.972	-	-	8 Unit	3.062.950.440		3.033.700.987		3.033.700.987		147,13%	Dinas Pendidikan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang mendapatkan pengadaan mebel sekolah	20 Paket	1.316.246.337	5 SMP	561.935.350,00	10 Paket	1.240.963.029		1.220.965.000		1.782.900.350		135,45%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah peserta didik SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan	885 Peserta Didik	1.649.010.013	650 Peserta Didik SMP	1.118.438.010,00	762 Peserta Didik	1.446.234.900		1.334.338.400		2.452.776.410		148,74%	Dinas Pendidikan
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah SMP yang mendapatkan Belajar Peserta Didik	5 Paket	107.378.748	-	-	5 Paket	98.568.000		97.550.000		97.550.000		90,85%	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah SMP yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	2 Paket	75.000.000	6 SMP	1.632.993.153,00	10 Paket	950.116.446		853.446.446		2.486.439.599		3315,25%	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Peserta Didik SMP dan penyusunan soal US	8810 Peserta Didik	54.817.473	5 Mapel	77.865.400,00	18898 Peserta Didik	59.650.400		56.746.700		134.612.100		245,56%	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan SMP Negeri	26 Satuan Pendidikan	214.329.061	25 SMP	200.817.700,00	26 Satuan Pendidikan	207.729.100		207.059.500		407.877.200		190,30%	Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SMP yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	727.585.899	165 Peserta Didik SMP	243.912.300,00	669 Peserta Didik	450.333.300		376.729.800		620.642.100		85,30%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP"	469 Orang	7.744.083.200	469 Orang	7.572.392.510,00	469 Orang	7.743.153.800		7.556.357.800		15.128.750.310		195,36%	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Guru/Pendidik SMP yang mendapatkan Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru dan Penguatan MGMP"	66 Orang	117.317.850	185 orang	100.355.500,00	66 Orang	103.665.750		84.502.050		184.857.550		157,57%	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	71 Satuan Pendidikan	191.074.109	-	-	72 Satuan Pendidikan	113.022.109		96.132.108		96.132.108		50,31%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah SMP yang mendapatkan pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	71 Satuan Pendidikan	29.382.900.000	25 SMP	21.739.085.530,00	72 Satuan Pendidikan	31.950.764.726		28.094.959.296		49.834.044.826		169,60%	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah SMP yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	71 Orang	217.684.063	25 SMP	114.642.420,00	72 Orang	97.419.850		86.585.700		201.228.120		92,44%	Dinas Pendidikan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)	65%	9.557.273.185	65%	6.884.066.195	65%	8.448.173.527		7.702.588.530		14.586.654.725		152,62%	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD Yang Memperoleh Perlengkapan Siswa	1000 Paket	607.834.727	1000 peserta didik PAUD	16.714.800,00	1000 Paket	120.001.134		119.819.670		136.534.470		22,46%	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	20 Paket	-	-	-	20 Paket	518.991.000		452.658.680		452.658.680		#DIV/0!	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pelaksanaan Monev dan Pembinaan Proses Belajar PAUD dengan kurikulum sesuai Standar Nasional I	8951 Peserta Didik	50.855.094	55 Guru PAUD	66.766.340,00	8152 Peserta Didik	46.722.400		46.236.500		113.002.840		222,21%	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Akreditasi	40 Satuan Pendidikan	25.140.462	-	-	40 Satuan Pendidikan	22.107.250		21.847.500		21.847.500		86,90%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	"Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD "	300 Orang	810.015.020	300 Orang	783.861.100,00	300 Orang	794.992.400		788.748.000		1.572.609.100		194,15%	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang mendapatkan Diklat Peningkatan Kompetensi dan Apresiasi Penghargaan Berprestasi Akademik dan Non Akademik	57 Orang	245.672.220	-	-	227 Orang	220.598.681		217.482.845		217.482.845		88,53%	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	345 Satuan Pendidikan	306.407.961	345 PAUD	272.412.200,00	345 Satuan Pendidikan	124.096.900		117.341.500		389.753.700		127,20%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan pengelolaan dana BOP PAUD	345 Satuan Pendidikan	7.423.800.000	345 PAUD	5.744.311.755,00	345 Satuan Pendidikan	6.537.000.000		5.877.527.735		11.621.839.490		156,55%	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD	345 Orang	87.547.701	-	-	345 Orang	63.663.762		60.926.100		60.926.100		69,59%	Dinas Pendidikan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)	30%	2.889.383.766	30%	1.651.568.660	72,90%	2.967.005.847		2.770.049.370		4.421.618.030		153,03%	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan perlengkapan pendidikan	100 Paket	41.654.970	-	-	100 Paket	34.390.947		34.252.970		34.252.970		82,23%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta didik yang mendapatkan Biaya Personil	2200 Peserta Didik	18.540.900	140 Peserta Didik PKH	32.464.800,00	1609 Peserta Didik	17.040.830		16.855.300		49.320.100		266,01%	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Ujian Paket A, Paket B dan Paket C	140 Peserta Didik PKH	18.744.913	140 Peserta Didik PKH	32.464.800	14 PNF	17.040.830		10.429.000		42.893.800		228,83%	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	50 Satuan Pendidikan	84.575.000	10 PNF	85.412.540,00	10 Satuan Pendidikan	56.251.410		54.123.100		139.535.640		164,98%	Dinas Pendidikan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	87.643.116	-	-	16 Orang	87.591.460		83.726.600		83.726.600		95,53%	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan menerima Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	11 Satuan Pendidikan	2.562.100.000	14 PNF/Kesetaraan	1.533.691.320,00	14 Satuan Pendidikan	2.672.100.000		2.487.700.000		4.021.391.320		156,96%	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal	28 Orang	94.869.780	-	-	14 Orang	99.631.200		93.391.400		93.391.400		98,44%	Dinas Pendidikan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL</b>	75%	29.179.572	75%	22.207.500	75%	28.919.870		24.031.750		46.239.250		158,46%	Dinas Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR	86%	15.932.700	86%	22.207.500	86%	15.940.750		11.367.050		33.574.550		210,73%	Dinas Pendidikan
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	"tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan dasar"	1 Dokumen	15.932.700	1 Buku	22.207.500,00	1 Dokumen	15.940.750		11.367.050		33.574.550		210,73%	Dinas Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	Meningkatnya Implementasi	70%	13.246.872	-	-	70%	12.979.120		12.664.700		12.664.700		95,61%	Dinas Pendidikan
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Silabus Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	13.246.872	-	-	1 Dokumen	12.979.120		12.664.700		12.664.700		95,61%	Dinas Pendidikan
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	100%	79.923.280	-	-	100%	79.392.800		49.588.000		49.588.000		62,04%	Dinas Pendidikan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP	56%	79.923.280	-	-	56%	79.392.800		49.588.000		49.588.000		62,04%	Dinas Pendidikan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	49.402.680	-	-	1 Dokumen	48.851.800		45.088.000		45.088.000		91,27%	Dinas Pendidikan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	30.520.600	-	-	1 Dokumen	30.541.000		4.500.000		4.500.000		14,74%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1 persen	158.476.693	1 persen	33.862.900	5 persen	132.326.207		120.044.515		153.907.415		97,12%	Dinas Pendidikan
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU	100%	72.476.893	100%	-	100%	66.577.687		64.069.315		64.069.315		88,40%	Dinas Pendidikan
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pendidikan Dasar yang dilakukan verifikasi perizinan dan sosialisasi aplikasi OSS (jenjang SD dan SMP swasta)	20 Dokumen	72.476.893	-	-	25 Dokumen	66.577.687		64.069.315		64.069.315		88,40%	Dinas Pendidikan
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMALYANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU	100%	85.999.800	100%	33.862.900	100%	65.748.520		55.975.200		89.838.100		104,46%	Dinas Pendidikan
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PNF yang dilakukan verifikasi perizinan dan sosialisasi aplikasi OSS	60 Dokumen	85.999.800	40 PAUD dan PNF	33.862.900,00	70 Dokumen	65.748.520		55.975.200		89.838.100		104,46%	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Renstra dan Renja Kerja tahunan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024														

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Tersediannya Dokumen RKA								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Tersediannya dokumen RKA Perubahan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	tersedianya Dokumen DPA perubahan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	tersedianya dokumen DPA SKPD								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	tersedianya dokumen evaluasi Perangkat daerah								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	tersedianya laporan LAKIP								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Resntra dan Renja Kerja Tahunan						6.640.720		13.281.440		13.281.440		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA						5.749.575		11.499.150		11.499.150		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan						5.749.575		11.499.150		11.499.150		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD						5.749.575		11.499.150		11.499.150		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA perubahan						5.749.575		11.499.150		11.499.150		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LAKIP						4.657.461		9.314.922		9.314.922		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Prangkat Daerah ( LPPD,PK,SAKIP)						10.349.692		10.223.192		10.223.192		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Jumlah hasil tanggapan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan,aset dan penggandaan barang jasa								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Jumlah pelaporan keuangan bulanan / semesteran								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						112.368.649.198		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa tenaga Administrasi keuangan, ASET, dan pengadaan barang/Jasa						1.827.382.400		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan						19.977.079		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Hasil tanggapan						3.445.761		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran						36.955.720		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelaporan Prognosis Realisasi anggaran</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran						23.055.722		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan mesin / kartu absensi</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							15.000.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal						36.000.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan						36.218.462		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						20.670.736		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumkah cetakan dan penggandaan</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	<b>Jumlah komponen / instalasi komunikasi ,sumberdaya dan listrik</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	<b>Jumlah makanan dan minuman</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	<b>Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik						29.993.025		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							115.024.965		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu						80.010.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						300.000.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>alat alat perkantoran</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor						301.100.800		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen /instalasi komunikasi ,sumberdaya Idan listrik						1.097.365.810		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor						778.672.900		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	jumlah pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	jumlah rehab sedang /berat mobil jabatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	jumlah STNK dan KIR								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK dan KIR						219.545.454		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						538.383.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							809.681.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional BLUD RS HAM						71.914.961.700		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Promotif dan Preventif oleh Masyarakat dibidang Kesehatan</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	<b>Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai SPM								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							4.182.690.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas						1.930.000.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan						3.649.911.348		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah, pemasangan Instalasi air bersih dan instalasi penagkal petir						370.237.289		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PTersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						7.196.656.829		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas						3.124.696.606		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai						3.471.095.835		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, Bahan Medis Habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas dan Fasilitas kesehatan lainnya						113.053.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi SIKOMO untuk Forum KEPO						725.905.306		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi P4K bagi Pengelola Program Ibu dan Anak								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi Yankes SNP KPR dan Kespro Caten								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengkajian dan Pembelajaran Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk BPM dan Puskesmas								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dalam Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dalam Persalinan di Tolong Oleh Tenaga Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Keluarga Berencana/ MKJP								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Tentang Manajemen Asfiksia BBL (Standarisasi) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Standar Asuhan Kebidanan Bagi Bidan Praktek Mandiri/ Rumah Bersalin/ Klinik								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya pelayanan kesehatan bulin						323.871.220		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Orientasi kohort (ibu, bayi, balita terintegrasi dengan triple eliminasi)						89.700.366		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi pelayanan kesehatan neonatal essensial								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Orientasi Pelaksanaan MTBS dan MTBM di Puskesmas Kota Jambi						937.286.488		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Orientasi Pemanfaatan kohort bayi/balita di puskesmas dalam Survelans kesehatan anak								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pembinaan Program Kesehatan Balita								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Pelaksanaan Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang Balita								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penerapan Kelas Ibu Balita di masa pandemi covid 19								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Lainnya Tentang SDIDTK								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Petugas Anak								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota Jambi						602.422.456		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Deteksi Dini Penyakit Kanker Leher Rahim Melalui IVA Test						115.223.200		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Orientasi pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status kesehatan lansia						264.899.308		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya pelayanan pasien hipertensi sesuai standar						40.239.612		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya pelayanan pasien diabetes mellitus sesuai standar						29.999.803		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya pelayanan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						129.383.136		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya pelayanan pasien TB sesuai standar						439.581.047		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya pengendalian HIV AIDs						262.669.278		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar						2.892.373.381		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Dessiminasi informasi tentang gizi seimbang, ASI eksklusif dan PMBA						1.950.336.617		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penerapan dan pelaksanaan pemanfaatan Tablet Tambah Darah pada remaja putri								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penguatan kapasitas tenaga gizi dalam pelaksanaan surveilans gizi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penguatan Pemberian TTD pada remaja putri								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas dalam pelaporan indikator indikator gizi berbasis Sigizi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Orientasi proses asuhan gizi buruk puskesmas								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya PMT Pemulihan Anak Balita di Posyandu								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Suplementasi Gizi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Sosialisasi dan koordinasi pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya kebugaran pegawai dinas kesehatan kota jambi						320.916.303		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan GP2SP								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pasca pengukuran kebugaran jemaah haji dipuskesmas								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan TFU								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pengukuran jasmani calon jemaah haji								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pengukuran kebugaran karyawan perusahaan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya persiapan pengukuran kebugaran jemaah haji dipuskesmas								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi pengukuran kebugaran jasmani melalui aplikasi SIPGAR								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya advokasi 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat						503.049.838		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan kualitas air IPA PDAM								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan protokol kesehatan di sekolah								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penyuluhan terhadap pengolah tempat pengelolaan makanan ( TPP )								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Sosialisasi limbah medis di fanyankes								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksannaya pengawasan limbah medis covid - 19								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pembinaan pengolah depot air minum								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							231.507.180		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional						167.499.986		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan						244.895.560		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pertemuan pertemuan Kesehatan Penyakit jiwa dan NAFZA						125.636.020		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal, Pengobatan Masal						185.348.059		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Haji dan Pemeriksaan Haji								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan kapasitas SDM						2.218.928.369		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya upaya pengendalian Penyakit Menular dan tidak Menular pada kelompok orang yang berisiko								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Tersedianya BHP untuk skrining PTN								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Bantuan Iuran untuk Peserta Mandiri Aktif Kelas 3						16.254.708.260		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Premi Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan jaminan kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							5.520.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya pembinaan forum kecamatan sehat						205.360.089		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pembinaan forum kelurahan sehat								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pengumpulan dana SKPD								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							203.430.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit							6.883.224.500		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen poperasional pelayanan puskesmas						1.757.715.066		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Labkesda Lainnya						6.298.403.675		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							253.832.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							6.840.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya pembinaan Pelaksanaan sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						438.369.698		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pembinaan Pelaksanaan sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							699.653.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pengelolaan SIK</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sistem informasi kesehatan						103.441.677		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pertemuan Aplikasi RS Online Bagi Rumah Sakit Se-Kota Jambi						73.098.528		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Rumah Sakit Se-Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Rumah Sakit Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Manajemen Rawat Jalan Rumah Sakit Se-Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Manajemen Mutu Pelayanan Rumah sakit Se kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi IKM, EKP, Evaluasi Laboratorium, Pelayanan Darah, Evaluasi ASPAK, Sistrute Puskesmas Workshop Kesgimul						728.721.609		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Klinik								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya dana Operasional Public Safety Center (PSC) 119 Jambi Emergency Services (JES)						370.627.800		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) Bagi Tim PSC 119 JES								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Rumah sakit Se-Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Kompetensi Tenaga Kesehatan</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pertemuan Perizinan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di Fasyankes								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan Perizinan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan						19.999.808		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di Fasyankes								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendeteksi Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pertemuan Rencana Kebutuhan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Sistem Informasi SDMK								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terperuhnya Terlaksananya Workshop Aplikasi SIBANGJANGKRI								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan dan Dokumen SDMK								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pertemuan rencana kebutuhan					74.999.692			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya workshop aplikasi SIBANGJANGKRI								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	terlaksanya pertemuan sistem informasi SDMK								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Dokumen rencana kebutuhan dan dokumen SDMK								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Insentif Tenaga Kesehatan Non ASN dalam Penangan Covid-19					1.157.179.304			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pertemuan Organisasi Profesi					49.999.656			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Petemuan Implementasi Uraian Tugas Tenaga Kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Workshop Uji Kompetensi Jabfungkes berdasarkan KEPMENPAN								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan dan Uji Kompetensi 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pelatihan dan uji kompetensi Jenis tenaga kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan Tenaga Kesehatan					349.999.786			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya uji kompetensi 9 jenis tenaga kesehatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi Alkes dan PKRT kelas I tertentu</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Pemberian izin Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal.usaha mikro obat								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksana pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksana penyediaan dan pengelolaan data perizinan serta tindak lanjut pengawasan perizinan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	terlaksanya fasilitas pemenuhan komitmen izin								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksana pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek,toko obat ,toko alat kesehatan Optical dan usaha mikro obat tradisional ( UMOT)					68.581.847			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya penyediaan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek,toko obat ,toko Alkes,Usaha mikro obat tradisoional ( UMOT)					65.930.592			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya fasilitas pemenuhan komitmen inin Apotek ,toko obat ,Alkes dan Usaha Mikro Tradisional ( UMOT)					6.506.000			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	terlaksananya pembinaan dan pengawasan PIKRT kelas I PRT								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut sertifikat produksi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan



4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut Sertifikat Produksi Alkes/PKRT kelas I tertentu PRT						15.472.063		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksanaan pembinaan dan pengawasan PKRT Kelas I Tertentu PRT						10.241.932		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Terlaksananya bimbingan teknis bagi industri rumah tangga pangan (IPRT)</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor IPRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga						287.862.853		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Melaksanakan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi TPM								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya penerbitan sertifikat Laik Higiene sanitasi TPM								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)						6.214.824		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					19.932.561			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan post market pada produk makanan minuman IRT yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data serta tindak lanjut pengawasan perizinan IRT								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah Produk dan sarana produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut pengawasan					183.581.517			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga					20.264.720			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Promotif dan Preventif oleh Masyarakat di bidang</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						133.475.350			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pembinaan pendampingan pembudayaan GERMAS								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya penyuluhan GERMAS								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya pertemuan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Tersedianya media informasi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Germas, Aktifitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala dan Edukasi Gizi Seimbang					240.461.127			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan covid-19								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program ke puskesmas								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	terlaksananya pembinaan dan pendampingan pembudayaan germas								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penggerakan Masyarakat								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penyuluhan Germas Dalam Rangka Pencegahan Covid-19								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya penyuluhan PHBS pencegahan covid-19								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlaksananya pertemuan evaluasi program lintas sektor								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Media Informasi								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Bimtek dan Supervisi UKBM</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat					348.462.887			0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penguatan Kader Posyandu								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penguatan Poskestren								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Penguatan Saka Bakti Husada								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Stakeholder Kelurahan Siaga Aktif								0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks reformasi Birokrasi Perangkat daerah</b>	83%	14.318.574.260	97%	13.633.430.219	82%			34.656.070.756		48.289.500.975		337,25%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	83%	175.864.000	77%	53.207.260	82%			224.172.290		277.379.550		157,72%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen					129.616.720		135.047.610		162,38%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen					0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen					0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	83.169.000	1 Dokumen	5.430.890				0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen					0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Disusun								94.555.570		98.928.070		106,72%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	92.695.000		4.372.500		55.512.700		0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan							0		0		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan penyelesaian LK sesuai dengan aturan penatausahaan keuangan</b>	100%	12.025.846.260	100%	10.309.365.825	100%			27.287.150.854		37.596.516.679		312,63%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	102 orang/bulan	9.618.490.160	101 Orang	8.789.935.775	102 Orang	8.708.414.310		22.162.104.244		30.952.040.019		321,80%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.260.522.000		1.469.331.440	1 Dokumen	2.242.202.300		4.774.138.000		6.243.469.440		276,20%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	146.834.100			1 Dokumen	143.367.500		350.908.610		350.908.610		238,98%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dokumen	9.067.120				0		9.067.120		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan aset sesuai peraturan	100%	56.777.000	100%		100%	41.757.000		47.157.300		47.157.300		83,06%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	56.777.000			1 Laporan	41.757.000		47.157.300		47.157.300		83,06%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	292.450.000	100%	111.550.000	100%	345.300.000		774.870.500		886.420.500		303,10%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Batik Tradisional	0 Paket 1 Paket	182.450.000	220 potong	108.900.000	1 Paket	195.300.000		492.370.500		601.270.500		329,55%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	110.000.000	1 Kali/ Tahun	2.650.000	22 Orang	150.000.000		282.500.000		285.150.000		259,23%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	370.272.000	100%	237.221.815	100%	367.324.800		852.457.288		1.089.679.103		294,29%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu dan alat-alat Listrik	1 Paket	12.936.000	20 Item	5.296.000	1 Paket	12.988.800		25.331.000		30.627.000		236,76%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	107.882.000	510 Lembar 5 Item 1 Item 235 Rim	135.553.300	2 Paket	107.882.000		202.632.900		338.186.200		313,48%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	31.454.000	12 Dus 24 Dus 175 Kotak	20.991.500	10 Laporan	31.454.000		43.949.000		64.940.500		206,46%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	218.000.000	100 Kali/ Tahun 5 Kali/ Tahun	75.381.015	20 Laporan	215.000.000		580.544.388		655.925.403		300,88%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	127.050.000	100%	707.506.900	100%	601.925.000		1.284.606.699		1.992.113.599		1567,98%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	14.850.000	30 Unit	53.367.500	54 Unit	86.850.000		111.566.000		164.933.500		1110,66%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	68.200.000	31 Unit	335.759.400	43 Unit	515.075.000		679.526.699		1.015.286.099		1488,69%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	384.600.000	100%	495.274.219	100%	384.600.000		843.946.521		1.339.220.740		348,21%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	384.600.000	3600 M3 118000 Kwh 30 Mbps	282.685.619	1 Laporan	384.600.000		843.946.521		1.126.632.140		292,94%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	885.715.000	100%	1.719.304.200	100%	1.373.215.000		3.341.709.304		5.061.013.504		571,40%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	614.650.000	25 Unit 1 Unit	579.905.900	45 Unit	614.650.000		1.334.333.254		1.914.239.154		311,44%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	53.565.000	7 Unit 37 Unit 10 Unit	27.982.000	21 Unit	53.565.000		100.004.600		127.986.600		238,94%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	217.500.000	3 Paket 2 Paket 6 Paket	1.111.416.300	4 unit	705.000.000		1.907.371.450		3.018.787.750		1387,95%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>	69%	31.076.226.500	55%	48.423.398.480	60%	28.191.108.890		48.988.821.150		97.412.219.630		313,46%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)</b>	7%	30.676.226.500	2%	48.274.398.480	2%	27.791.108.890		47.986.903.730		96.261.302.210		313,80%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1.73 KM	5.203.199.200	8,842 Km	28.453.890.060	2,105 Km	11.390.925.200		22.865.876.443		51.319.766.503		986,31%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.14 KM	2.100.000.000			0,430 Km	2.425.000.000		3.390.711.200		3.390.711.200		161,46%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	5.67 KM	16.997.843.610	0,745 Km		1,120 Km	7.000.000.000		9.300.092.440		9.300.092.440		54,71%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.17 KM	2.600.000.000			0,597 Km	3.550.000.000		4.846.850.250		4.846.850.250		186,42%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	3.2 KM	1.600.000.000	6,055 Km		0,1 Km	1.250.000.000		1.641.810.960		1.641.810.960		102,61%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Panjang Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai yang dikerjakan	0.73 KM	2.175.183.690	7,400 Km		0,676 Km	2.175.183.690		5.941.562.437		5.941.562.437		273,15%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Kota			2 kali	87.270.520				1.001.917.420		1.089.187.940		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Luasan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa yang dikerjakan	8%	400.000.000	5%	149.000.000	6%	400.000.000		1.001.917.420		1.150.917.420		287,73%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	76,39%	5.207.397.740	73,46%	36.546.444.547	74,39%	9.959.233.620		15.267.594.355		51.814.038.902		995,01%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	76,39%	5.207.397.740	73,46%	36.546.444.547	74,39%	9.959.233.620		15.267.594.355		51.814.038.902		995,01%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100 SR	5.207.397.740	570 SR 22.648 M	36.025.614.547	300 SR	9.959.233.620		15.267.594.355		51.293.208.902		985,01%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	88,72%	778.349.276	83,43%	2.351.737.350	84,49%	1.776.792.025		2.296.013.975		4.647.751.325		597,13%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	88,72%	778.349.276	83,43%	2.351.737.350	84,49%	1.776.792.025		14.759.600		2.366.496.950		304,04%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Rumah Tangga	720.650.000	4 Unit TPS 1 Unit TPS-3R	1.448.139.200	10 Rumah Tangga	1.645.097.225		2.078.794.775		3.526.933.975		489,41%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	1 unit	57.699.276	4 Unit TPS	465.426.900	1 Unit	131.694.800		217.219.200		682.646.100		1183,11%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6,01%	26.716.464.834	3,15%	6.306.458.719	4,05%	9.947.696.967		14.325.053.539		20.631.512.258		77,22%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Air Limbah	6,01%	26.716.464.834	1,00%	6.306.458.719	4,05%	9.947.696.967		14.325.053.539		20.631.512.258		77,22%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dokumen	995.823.834			1 Dokumen	370.759.180		805.251.973		805.251.973		80,86%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibangun	2600 Rumah Tangga	19.571.000.000	610 SR	3.994.379.694	330 Rumah	7.287.159.600		8.894.747.738		12.889.127.432		65,86%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang ditangani	1 unit	4.166.957.000	1 Unit	1.311.640.075	1 Unit	1.551.538.820		3.767.488.718		5.079.128.793		121,89%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	760 Rumah Tangga	1.982.684.000	1 Unit	894.729.050	2 Rumah Tangga	738.239.367		857.565.110		1.752.294.160		88,38%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang terbangun</b>	56,39%	1.429.435.875	5,03%	2.391.570.900	51,26%	1.358.967.500		1.772.376.900		4.163.947.800		291,30%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang terbangun</b>	56,39%	1.429.435.875	5,03%	2.391.570.900	51,26%	1.358.967.500		1.772.376.900		4.163.947.800		291,30%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang terpelihara	280 M	1.126.000.000	877.86 M1	2.082.365.200	500 M	1.070.495.000		1.282.162.200		3.364.527.400		298,80%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	1 Unit	303.435.875	193 M1	237.405.700	1 Unit	288.472.500		490.214.700		727.620.400		239,79%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik</b>	16,00%	52.140.618.028	13,73%	65.232.525.050	15,50%	40.356.447.267		64.752.899.730		129.985.424.780		249,30%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Panjang Jalan Lingkungan/Permukiman yang dibangun</b>	16,00%	52.140.618.028	13,73%	65.232.525.050	0,155	40.356.447.267		64.752.899.730		129.985.424.780		249,30%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Panjang Jalan Lingkungan/Permukiman yang dibangun</b>	275 Sistem Jaringan	52.140.618.028	50.227 KM	63.265.725.550	216 Sistem Jaringan	40.356.447.267		64.752.899.730		128.018.625.280		245,53%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik</b>	73,89%	78.820.595.923	71,28%	115.721.427.225	72,58%	141.058.526.400		283.185.924.768		398.907.351.993		506,10%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan</b>	73,89%	78.820.595.923	71,28%	115.721.427.225	72,58%	141.058.526.400		283.185.924.768		398.907.351.993		506,10%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</b>	<b>Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan</b>	10 Dokumen	277.446.923	5 Rekomendasi IMB 1 Aplikasi 1 Data 5 SLF 1 TABG	370.967.100	10 Dokumen	378.726.100		518.740.100		889.707.200		320,68%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung	5 Dokumen	71.835.800.000	26 Dokumen 24 Unit 10 Unit	115.324.715.075	10 Dokumen	131.523.550.300		265.137.762.168		380.462.477.243		529,63%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Gedung	12 Unit	6.341.079.000			15 Unit	8.656.250.000		17.013.330.500		17.013.330.500		268,30%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	10 Unit	366.270.000			15 Unit	500.000.000		516.092.000		516.092.000		140,90%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	34,63%	6.300.124.778	33,80%	41.562.411.600	34,21%	5.748.207.221		8.992.786.725		50.555.198.325		802,45%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Sistem Penataan Bangunan yang disusun	34,63%	6.300.124.778	33,80%	41.562.411.600	34,21%	5.748.207.221		8.992.786.725		50.555.198.325		802,45%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Dilaksanakan	1 Kawasan	6.121.276.000	6 Unit	38.037.507.100	1 Kawasan	5.188.728.500		8.733.308.725		46.770.815.825		764,07%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Kawasan	178.848.778	1 Unit	2.710.534.200	1 Kawasan	559.478.721		259.478.000		2.970.012.200		1660,63%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Baik</b>	88,31%	89.022.000.000	88,73%	63.611.297.222	84,47%	53.707.969.400		81.568.619.278		145.179.916.500		163,08%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik	88,31%	89.022.000.000	88,73%	63.611.297.222	84,47%	53.707.969.400		81.568.619.278		145.179.916.500		163,08%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun	10 Dokumen	980.518.688	13 Dokumen	1.354.821.320	8 Dokumen	873.331.540		1.020.393.086		2.375.214.406		242,24%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Leger	7 Dokumen	1.916.983.396			7 Dokumen	2.603.783.230		2.674.697.228		2.674.697.228		139,53%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah ruas jalan/jembatan yang disurvey	2 Dokumen	316.983.396	1,034 Ruas Jalan	290.324.811	2 Dokumen	296.015.170		297.070.740		587.395.551		185,31%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rekonstruksi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Status Kota Yang Direkonstruksi	6,4 Km	57.744.634.438	23 Ruas Jalan	34.493.751.123	5,8 Km	20.539.044.810		33.511.803.889		68.005.555.012		117,77%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang Direhabilitasi	4,9 Km	19.654.492.438	42 Ruas Jalan	20.463.932.270	9,15 Km	23.101.556.698		31.986.894.708		52.450.826.978		266,86%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Ruas Jalan Status Kota Yang Dipelihara Secara Rutin	1,5 Km	3.529.361.810	4000 m2	4.501.432.638	1,35 Km	3.191.361.642		6.894.666.459		11.396.099.097		322,89%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan Status Kota yang Diganti	30 M	4.662.042.438	1 Unit	2.302.910.460	30 M	2.896.939.460		4.762.774.528		7.065.684.988		151,56%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan Status Kota Yang Dipelihara Secara Rutin	30 M	216.983.396	5 Unit	204.124.600	30 M	205.936.850		420.318.640		624.443.240		287,78%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	41,31%	3.800.000.000	13,02%	1.758.056.145	24,46%	1.949.998.949		3.912.910.223		5.670.966.368		149,24%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Meningkatnya Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat	40%	1.845.497.297	12,37%	937.992.300	23%	1.137.097.297		2.249.032.280		3.187.024.580		172,69%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	550 Orang	1.330.562.557	138 Orang 139 Orang	663.534.460	350 Orang	850.512.557		2.002.450.920		2.665.985.380		200,37%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikasi yang diterbitkan	250 Orang	454.002.550	182 Sertifikat	241.562.640	150 Orang	273.202.550		203.732.360		445.295.000		98,08%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan	11 Dokumen	60.932.190			1 Dokumen	13.382.190		42.849.000		42.849.000		70,32%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Persentase Layanan Infomasi Jasa Konstruksi	16,85%	686.161.310	12%	334.152.365	1	433.371.050		939.756.183		1.273.908.548		185,66%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Sistem Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	1 Laporan	446.161.310	12%	315.867.965	1 Laporan	416.160.810		908.712.123		1.224.580.088		274,47%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen Database Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	45.000.000			1 Dokumen	17.210.240		31.044.060		31.044.060		68,99%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	Meningkatnya Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi	16,85%	330.473.304	18%	230.219.650	40%	169.843.582		261.264.390		491.484.040		148,72%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi IUJK yang dikeluarkan			119 rekomendasi	32.318.200	200 Dokumen	36.761.530		19.939.390		52.257.590		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Badan Usaha yang bersertifikat	160 Orang	330.473.304	97 BUJK	145.370.150	80 Orang	117.736.652		218.861.600		364.231.750		110,22%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan								22.463.400		22.463.400		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	Meningkatnya Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke-PU an	16,85%	937.868.089	7%	255.691.830	8%	209.687.020		462.857.370		718.549.200		76,62%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP yang diterbitkan atau disusun					1 Dokumen	26.265.130		28.748.020		28.748.020		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tentang Tertib usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200 Orang	867.868.089	2 Kali	205.039.340	100 Orang	167.940.610		405.436.850		610.476.190		70,34%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi yang dilaksanakan	1 Laporan	70.000.000	30 Kali	50.652.490	1 Laporan	15.481.280		28.672.500		79.324.990		113,32%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang</b>	85%	3.401.239.800	75%	3.772.591.624	80%	1.947.563.300		2.289.504.570		6.062.096.194		178,23%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi	95%	1.011.239.800	80%	170.054.744	90%	358.657.100		452.534.540		622.589.284		61,57%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW Kota Jambi yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku	1 dokumen	60.000.000	1 draft	91.838.225	1 dokumen	40.000.000		72.000.000		163.838.225		273,06%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen RDTR Kota Jambi yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku	1 dokumen	600.000.000	1 draft	78.216.519	1 dokumen	172.226.100		211.165.000		289.381.519		48,23%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen untuk pelaksanaan penataan ruang	1 dokumen	300.000.000			1 dokumen	107.603.440		122.157.760		122.157.760		40,72%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang Penataan Ruang	2 dokumen	51.239.800			2 Dokumen	38.827.560		47.211.780		47.211.780		92,14%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi</b>	85%	1.130.000.000	80%	3.181.577.250	88%	734.457.185		542.826.355		3.724.403.605		329,59%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	480.000.000	14 kali	159.169.540	12 Dokumen	200.250.000		232.649.495		391.819.035		81,63%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Jambi yang informatif dan berjalan baik	2 Dokumen	650.000.000	0,25	3.022.407.710	1 Dokumen	534.207.185		310.176.860		3.332.584.570		512,71%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi	0,73	1.260.000.000	0,7	420.959.630	0,76	854.449.015		1.294.143.675		1.715.103.305		136,12%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	6 Dokumen	200.000.000	2 Kali	3.742.600	4 Dokumen	59.903.716		57.000.000		60.742.600		30,37%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan penegakan Hukum di bidang penataan ruang	12 Dokumen	900.000.000	12 kali	362.391.640	12 Dokumen	740.045.299		1.189.812.375		1.552.204.015		172,47%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Penataan Ruang Kota Jambi	2 Dokumen	160.000.000	2 Kali	54.825.390	2 Dokumen	54.500.000		47.331.300		102.156.690		63,85%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	BB	19.942.566.354	BB	5.334.938.412	BB	7.470.995.868		6.463.880.747		11.798.819.159		59,16%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	85	341.199.720	75	89.834.012	80	118.405.810		114.894.638		204.728.650		60,00%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	17	197.838.267	3	29.764.524	7	80.243.410		77.013.410		106.777.934		53,97%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1	112.160.082	1	29.788.874	1	38.162.400		37.881.228		67.670.102		60,33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	100%	14.740.760.132	100%	4.291.981.040	100%	5.243.654.608		4.449.009.001		8.740.990.041		59,30%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	40	13.483.106.254	35	3.916.396.152	39	4.824.466.108		4.091.001.660		8.007.397.812		59,39%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan	12500	1.133.773.574	7500	341.470.894	2500	378.128.800		323.518.790		664.989.684		58,65%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	60	116.237.965	36	27.125.504	12	41.059.700		34.488.551		61.614.055		53,01%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah</b>	100%	258.490.800	100%	81.620.154	100%	100.335.000		71.500.000		153.120.154		59,24%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian	240	183.172.000	120	26.334.000	78	80.335.000		58.000.000		84.334.000		46,04%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek	10	75.318.800	0	55.286.154	4	20.000.000		13.500.000		68.786.154		91,33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	1.245.376.845	100%	240.077.531	100%	417.217.436		404.390.749		644.468.280		51,75%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Pengadaan alat listrik	5	20.158.768	3	3.873.000	1	9.686.683		9.684.138		13.557.138		67,25%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Pengadaan Alat Tulis Kantor	5	539.309.327	3	151.944.075	1	193.735.250		184.846.351		336.790.426		62,45%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	5	87.436.250	3	16.249.838	1	37.878.753		37.106.676		53.356.514		61,02%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan kemasan bungkus	20	50.697.925	5	33.044.554	10	5.775.000		4.872.200		37.916.754		74,79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50	547.774.575	9	34.966.064	35	170.141.750		167.881.384		202.847.448		37,03%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	984.449.046	100%	43.239.900	100%	848.156.072		840.700.000		883.939.900		89,79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	665.727.273	0	-	1	665.727.273		664.500.000		664.500.000		99,82%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	23	228.878.959	1	14.991.900	22	182.428.799		176.200.000		191.191.900		83,53%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	702.950.769	100%	191.972.221	100%	261.402.200		169.535.342		361.507.563		51,43%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	8100	88.947.200	2700	3.000.000	2700	43.417.600		43.417.600		46.417.600		52,19%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi	60	614.003.569	36	188.972.221	12	217.984.600		126.117.742		315.089.963		51,32%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Jumlah jasa listrik								0		0		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Jumlah sumber daya air								0		0		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	1.669.339.042	100%	396.213.554	100%	481.824.742		413.851.017		810.064.571		48,53%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33	1.107.652.400	33	355.324.616	33	362.104.000		324.071.317		679.395.933		61,34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Jumlah STNK/KIR								0		0		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	139	178.996.900	56	40.888.938	89	64.031.000		63.742.000		104.630.938		58,45%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1	382.689.742	0	-	1	55.689.742		26.037.700		26.037.700		6,80%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Penurunan Backlog Perumahan</b>	76,02%	2.405.847.351	78,54%	545.688.152	76,02%	1.470.703.191		938.427.933		1.484.116.086		61,69%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana</b>	100%	533.521.254	0	-	100%	533.621.254		514.099.950		514.099.950		96,36%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1	255.908.002	0	-	1	255.958.002		247.914.550		247.914.550		96,88%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1	277.613.252	0	-	1	277.663.252		266.185.400		266.185.400		95,88%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Rumah Susun yang difasilitasi</b>	100%	881.796.320	100%	309.975.131	100%	157.145.818		88.882.466		398.857.597		45,23%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusun yang dimanfaatkan	1	322.132.891	1	242.981.403	0	-		88.882.466		331.863.869		103,02%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	1	559.663.429	1	66.993.728	1	157.145.818		335.445.517		402.439.245		71,91%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemberian rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan	1	322.132.891	1	242.981.403	0	-		60.978.600		303.960.003		94,36%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan perumahan	1	559.663.429	1	66.993.728	1	157.145.818		274.466.917		341.460.645		61,01%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</b>	69,51%	13.844.029.182	59,92%	5.697.617.874	61,30%	5.812.315.558		2.506.496.528		8.204.114.402		59,26%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Pembangunan Permukiman yang memiliki Izin</b>	100%	1.266.036.584	100%	375.259.558	100%	629.196.712		605.123.850		980.383.408		77,44%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi Permohonan Teknis dan SKRK yang masuk	1000	184.788.112	592	78.982.308	350	104.079.875		101.383.150		180.365.458		97,61%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman	3	1.025.229.210	2	293.510.000	2	505.784.000		491.695.700		785.205.700		76,59%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	9	56.019.262	3	2.767.250	2	19.332.837		12.045.000		14.812.250		26,44%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata dengan Luas dibawah 10 ha	100,00%	246.439.978	100,00%	47.022.600	100,00%	114.139.946		70.586.600		117.609.200		47,72%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4	46.201.349	2	15.098.600	2	30.909.680		29.809.600		44.908.200		97,20%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	12	147.795.979	6	31.924.000	6	50.787.616		24.251.000		56.175.000		38,01%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Perda yang direvisi	1	52.442.650	0	-	1	32.442.650		26.512.500		26.512.500		50,56%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100,00%	12.331.552.620	100,00%	5.275.335.716	100,00%	5.068.978.900		1.830.786.078		7.106.121.794		57,63%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1904	12.331.552.620	212	5.275.335.716	28	5.068.978.900		1.830.786.078		7.106.121.794		57,63%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>peningkatan kawasan permukiman yang di layani utilitas umum</b>	84,87%	80.807.247.489	75,72%	29.199.582.142	80,09%	29.389.501.042		28.582.514.776		57.782.096.918		71,51%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	peningkatan kawasan permukiman yang di layani utilitas umum	84,87%	80.807.247.489	75,72%	29.199.582.142	80,09%	29.389.501.042		28.577.782.776		57.777.364.918		71,50%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2	695.472.300	2	324.191.277	2	221.522.310		214.981.900		539.173.177		77,53%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah LPJU yang terpasang	2500	77.644.203.597	1500	28.225.388.684	500	28.343.181.346		27.946.293.264		56.171.681.948		72,34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
	Jumlah Makam yang ditangani	50	2.449.642.726	8	650.002.181	30	824.797.386		0		650.002.181		26,53%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	40	17.928.866	0	-	0	-		416.507.612		416.507.612		2323,11%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan</b>	20%	22.619.495	0	-	20%	22.619.495		4.987.000		4.987.000		22,05%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang Tersertifikasi	20%	22.619.495	0	-	20%	22.619.495		4.987.000		4.987.000		22,05%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi	2	22.619.495	0	-	2	22.619.495		4.987.000		4.987.000		22,05%	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	BB	8.060.143.796	BB	12.128.481.666	BB	9.140.851.793		21.005.207.960		33.133.689.626		411,08%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	BB	148.616.267	BB	17.449.100	BB	272.241.700		605.052.400		622.501.500		418,86%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65.495.787	4 Dokumen	9.079.400	8 Dokumen	155.872.800		344.342.400		353.421.800		539,61%	Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	83.120.480	2 Dokumen	704.000	4 Dokumen	116.368.900		260.710.000		261.414.000		314,50%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	100%	5.566.506.674	100%	5.185.095.571	100%	5.455.571.996		12.838.404.077		18.023.499.648		323,78%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/Bulan	5.207.018.460	49 Orang	4.929.075.571	612 Orang/Bulan	5.145.377.496		12.179.216.027		17.108.291.598		328,56%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	186.240.000	37 Orang	256.020.000	2 Dokumen	215.160.000		436.860.000		692.880.000		372,04%	Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	173.248.214	37 Orang	0	1 Dokumen	95.034.500		222.328.050		222.328.050		128,33%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	32.238.960	100%	0	100%	44.509.000		72.664.000		72.664.000		225,39%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	32.238.960		0	1 Dokumen	44.509.000		72.664.000		72.664.000		225,39%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	249.715.000	100%	281.788.000	100%	359.760.000		1.055.069.201		1.336.857.201		535,35%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	172.015.000	251 Stel	193.010.000	2 Paket	249.760.000		748.619.400		941.629.400		547,41%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Paket	77.700.000	4 Orang	88.778.000	20 Orang	110.000.000		306.449.801		395.227.801		508,66%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Umum</b>	100%	421.052.155	100%	328.317.896	100%	420.029.807		1.049.245.842		1.377.563.738		327,17%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9.636.616	12 Jenis	39.236.550	1 Paket	16.928.500		46.730.280		85.966.830		892,09%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	62.154.405	40 Jenis	153.621.620	5 Paket	152.620.620		152.653.492		203.787.542		327,87%	Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	10.319.670	7 Jenis	23.612.823	1 Paket	23.939.300		72.582.950		96.195.773		932,16%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0		1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.559.887		13.108.000		13.108.000		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.890.000	803 Kotak	36.570.000	2 Laporan	16.540.000		31.491.500		68.061.500		380,44%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	251.000.000	17 Kali	151.364.773	2 Laporan	224.300.000		576.306.250		727.671.023		289,91%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.251.464	1 Orang	6.000.000	1 Dokumen	37.785.500		80.773.370		86.773.370		428,48%	Satuan Polisi Pamong Praja
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	49.800.000	4 Orang	20.399.700	8 Orang	33.600.000		75.600.000		95.999.700		192,77%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	166.165.890	100%	251.683.799	100%	1.079.074.090		2.539.709.945		2.791.393.744		1679,88%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah atau Lapangan	0			0	6 Unit	770.000.000		1.806.492.000		1.806.492.000		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6 Unit	19.649.220	79 Unit	105.534.400	29 Unit	128.852.955		411.929.510		517.463.910		2633,51%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	146.516.670	20 Unit	110.149.399	25 Unit	170.221.145		292.938.435		403.087.834		275,11%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana Prasarana Pendukung Urusan Trantibum Linmas	0		2 Paket	36.000.000	25 Unit	9.999.990		28.350.000		64.350.000		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	813.069.200	100%	5.416.148.800	100%	703.525.200		1.097.062.097		6.513.210.897		801,06%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	19.950.000	3 Surat	27.768.600	3 Laporan	29.450.000		39.400.000		67.168.600		336,68%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Jasa Listrik	3 Laporan	231.000.000	1 Tahun	155.200.000	2 Laporan	192.500.000		323.121.497		478.321.497		207,07%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	562.119.200	229 Orang	5.233.180.200	4 Laporan	481.575.200		734.540.600		5.967.720.800		1061,65%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	662.779.650	100%	647.998.500	100%	806.140.000		1.748.000.398		2.395.998.898		361,51%	Satuan Polisi Pamong Praja

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Unit	583.166.850	23 Unit	335.250.200	35 Unit	679.337.500		1.518.065.398		1.853.315.598		317,80%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	30.217.800	9 Unit	7.227.000	38 Unit	27.962.000		60.449.000		67.676.000		223,96%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	49.395.000	1 Paket	86.190.000	1 Unit	27.500.000		26.990.000		113.180.000		229,13%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1 Paket	71.340.500	1 Unit	71.340.500		142.496.000		213.836.500		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota</b>	79%	6.310.856.204	75%	1.098.751.529	76%	7.202.807.820		15.192.283.077		16.291.034.606		258,14%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	65%	5.690.779.857	100%	810.893.675	70%	6.338.571.620		13.651.361.787		14.462.255.462		254,13%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pencegahan Gangguan Trantibum dan Pelaksanaan Pengamanan serta Pengawalan	240 Kasus	2.265.854.500		0	200 Kasus	2.447.505.000		5.545.894.396		5.545.894.396		244,76%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Gangguan Trantibum dan Penanganan Unras	20 Kasus	2.313.381.340	64 Kali	402.741.613	120 Kasus	2.932.223.640		6.185.865.191		6.588.606.804		284,80%	Satuan Polisi Pamong Praja
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen	213.517.500		0	10 Dokumen	185.086.950		387.541.238		387.541.238		181,50%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	387.999.225	24 Kali	109.562.600	4 Dokumen	416.019.130		749.283.702		858.846.302		221,35%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Latsar Satgas Linmas dan Satlinmas Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
	Pembinaan Gugus Tugas Linmas Rukun Tetangga Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Rakor Satgas Linmas dan Satlinmas Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sosialisasi Pencegahan dan Pendataan Potensi Penyakit Masyarakat di Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jambore /Giat Bersama Trantibum Linmas dan Kamtibmas	120 Orang	510.027.292	5 Kali	196.098.476	229 Orang	357.736.900		782.777.260		978.875.736		191,93%	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terselenggaranya FMD, LATSAR, dan Korsik								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terselenggaranya Patroli PTI terhadap Anggota Piket Jaga Aset Daerah oleh Tim Pengawasan Internal								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
	Terselenggaranya Workshop								0		0		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perwal</b>	56%	383.711.809	100%	269.668.854	54%	417.788.000		798.077.926		1.067.746.780		278,27%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wasmat Penegakan PERDA dan PERWAL	24 Laporan	100.939.340	16 Kali	26.315.200	24 Laporan	116.755.500		254.748.000		281.063.200		278,45%	Satuan Polisi Pamong Praja
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Yustisi dan non Yustisi	36 Laporan	282.772.469	29 Kali	226.205.553	36 Laporan	301.032.500		543.329.926		769.535.479		272,14%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bersama PPNS</b>	13 Orang	236.364.538	100%	18.189.000	11 Orang	446.448.200		742.843.364		761.032.364		321,97%	Satuan Polisi Pamong Praja
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Ditegakan	1 Laporan	236.364.538	1 Tahun	18.189.000	1 Laporan	446.448.200		742.843.364		761.032.364		321,97%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9.038.075.881	37,82%	6.848.963.219	100%	7.931.015.360		7.515.272.434		14.364.235.653		158,93%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	100%	2.000.000	75%	1.499.927	100%	15.525.410		9.871.090		11.371.017		568,55%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra, renja, RKA, DPA, LPPD, Laporan Kinerja perangkat daerah	100%	2.000.000	75%	1.499.927	100%	15.525.410		9.871.090		11.371.017		568,55%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan</b>	100%	7.140.160.624	61%	6.210.183.576	100%	6.550.671.681		6.325.057.679		12.535.241.255		175,56%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN (72 ASN)	100%	6.770.560.624	88%	5.975.720.518	100%	6.288.357.691		6.092.790.489		12.068.511.007		178,25%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang/Jasa (25 Orang/Bulan)	100%	364.600.000	64%	232.963.230	100%	259.814.108		229.767.308		462.730.538		126,91%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	5.000.000	30%	1.499.828	100%	2.499.882		2.499.882		3.999.710		79,99%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya</b>	100%	0	0%	0	100%	357.122.700		317.237.550		317.237.550		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	100%	607.749.975	0%	0	100%	343.282.500		304.337.550		304.337.550		50,08%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL)								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pakaian Dinas Upacara (PDU)								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pakaian Non PNS								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Sepatu Dinas Lapangan (PDL)								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan	100%	7.469.000	0%	0	100%	13.840.200		12.900.000		12.900.000		172,71%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Umum</b>	100%	760.565.832	45%	284.211.788	100%	534.102.936		493.545.760		777.757.548		102,26%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Baterai	100%	28.629.470	93%	26.629.470	100%	19.999.265		19.997.066		46.626.536		162,86%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan	100%	320.000.000	54%	173.528.660	100%	239.211.080		231.719.190		405.247.850		126,64%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Jasa Kebersihan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Jenis ATK								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Dapur	100%	15.136.362	0%	0	100%	14.994.100		6.977.500		6.977.500		46,10%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Alat Rumah Tangga Lainnya								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Perabot Kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	100%	30.000.000	72%	21.575.602	100%	19.999.991		18.138.991		39.714.593		132,38%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman	100%	16.800.000	32%	5.369.000	100%	14.998.500		8.820.500		14.189.500		84,46%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	350.000.000	16%	57.109.056	100%	224.900.000		207.892.513		265.001.569		75,71%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Mebeleur</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Jaringan Internet</b>	100%	305.900.000	32%	132.017.717	100%	254.440.000		169.748.219		301.765.936		98,65%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10000	100%	5.900.000	20%	1.200.000	100%	3.000.000		3.000.000		4.200.000		71,19%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Jaringan Internet	100%	300.000.000	44%	130.817.717	100%	251.440.000		166.748.219		297.565.936		99,19%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Jasa Sumber Daya Air								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Jasa Sumber Daya Listrik								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Sumber Daya Telepon								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedng Kantor</b>	100%	829.449.425	52%	221.050.211	100%	219.152.633,00		199.812.136		420.862.347		50,74%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Asuransi	100%	100.849.425	57%	57.357.982	100%	126.624.453		119.706.493		177.064.475		175,57%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah BBM Kendaraan Dinas Roda 2								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah BBM Kendaraan Dinas Roda 4								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Perizinan HT								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	18.600.000	48%	8.940.000	100%	17.730.000		6.020.000		14.960.000		80,43%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor	100%	180.000.000	39%	70.293.800	100%	74.798.180		74.085.643		144.379.443		80,21%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Penurunan Angka Kejadian Bencana</b>	100%	530.000.000	9%	84.458.429	100%	696.420.693		542.308.414		626.766.843		118,26%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	100%	530.000.000	9%	84.458.429	100%	644.458.783		510.930.414		595.388.843		112,34%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Apel Siaga Bencana	100%	460.000.000	18%	84.458.429	100%	127.300.421		71.876.100		156.334.529		33,99%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pelatihan Pembinaan Personil								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pelatihan Redkar								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya BBM dan Pelumas Kendaraan Operasional dan Peralatan Mesinnya	100%	70.000.000	0%	0	100%	517.158.362		439.054.314		439.054.314		627,22%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Jumlah Informasi dan profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	100%	51.961.910	0%	0	100%	51.961.910		31.378.000		31.378.000		60,39%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Informasi	100%	51.961.910	0%	0	100%	51.961.910		31.378.000		31.378.000		60,39%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Penurunan Angka Kejadian Kebakaran</b>	100%	4.245.000.000	46%	4.107.340.570	100%	4.587.076.469		4.427.389.045		8.534.729.615		201,05%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	4.210.000.000	76%	4.101.849.910	100%	4.448.662.699		4.320.811.945		8.422.661.855		200,06%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	100%	110.000.000	53%	58.754.900	100%	57.990.304		45.099.400		103.854.300		94,41%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Asuransi	100%	4.100.000.000	99%	4.043.095.010	100%	3.859.325.077		3.815.909.797		7.859.004.807		191,68%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Tersedianya Sembako								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat perlindungan diri	0%	0	0%	0	100%	531.347.318		459.802.748		459.802.748		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi</b>	100%	35.000.000	16%	5.490.660	100%	30.761.970,00		23.771.100		29.261.760		83,61%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	100%	35.000.000	16%	5.490.660	100%	30.761.970		23.771.100		29.261.760		83,61%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Manusia	100%	107.651.800	0%	0	100%	107.651.800,00		85.803.000		85.803.000		79,70%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Pengadaan Sarana Evakuasi dan SAR	100%	107.651.800	0%	0	100%	107.651.800		85.803.000		85.803.000		79,70%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	6.804.000.000	100%	6.386.187.264	1			6.625.353.048		13.011.540.312		191,23%	Dinas Sosial
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	95.340.800	100%	75.958.970				56.114.800		132.073.770		138,53%	Dinas Sosial
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	39.861.800	100%	3.996.450				36.614.800		40.611.250		101,88%	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100%	11.533.000	100%	35.918.150				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100%	2.640.000	100%	0				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	100%	11.533.000	100%	19.496.625				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100%	2.640.000	100%	0				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100%	15.372.000	100%	16.547.745				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100%	11.761.000	100%	0				8.746.000		8.746.000		74,36%	Dinas Sosial
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	4.359.345.268	100%	4.186.675.683				4.386.853.626		8.573.529.309		196,67%	Dinas Sosial
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.148.365.768	100%	3.863.202.143				4.184.999.376		8.048.201.519		194,01%	Dinas Sosial
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	194.820.000	100%	307.823.600				181.581.000		489.404.600		251,21%	Dinas Sosial
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	16.159.500	100%	16.549.840				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	37.560.000	100%	0				32.160.000		32.160.000		85,62%	Dinas Sosial
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	100%	37.560.000	100%	0		34.560.000		32.160.000		32.160.000		85,62%	Dinas Sosial
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	100%	289.900.000	100%	55.608.000				280.255.583		335.863.583		115,85%	Dinas Sosial
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	59.900.000	100%	36.870.000		59.900.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah	100%	150.000.000	100%	18.738.000		50.700.000		126.149.551		144.887.551		96,59%	Dinas Sosial
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	80.000.000	100%	0		40.000.000		43.355.432		43.355.432		54,19%	Dinas Sosial
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	100%	136.978.477	100%	193.091.700				178.734.570		371.826.270		271,45%	Dinas Sosial
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instansi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	15.334.550	100%	11.630.300		15.333.560		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK dan Kebersihan	100%	83.169.108	100%	118.420.900		83.168.660		81.433.320		199.854.220		240,30%	Dinas Sosial
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	100%	38.474.819	100%	37.750.500		38.474.711		37.276.200		75.026.700		195,00%	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman	100%	30.000.000	100%	25.290.000		30.000.000		44.755.000		70.045.000		233,48%	Dinas Sosial
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	431.378.255	100%	1.043.979.250				238.477.400		1.282.456.650		297,29%	Dinas Sosial
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	72.000.000	100%	550.157.000		36.000.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	100%	100.227.100	100%	87.061.300		72.227.100		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	109.122.800	100%	145.807.250		159.122.800		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung	100%	150.028.355	100%	260.953.700		50.028.355		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang	100%	624.431.600	100%	181.879.521				490.745.767		672.625.288		107,72%	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	100%	10.000.000	100%	6.000.000		9.000.000		9.000.000		15.000.000		150,00%	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komponen/Instansi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	280.000.000	100%	175.879.521		271.500.000		171.192.767		347.072.288		123,95%	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Kontrak	100%	334.431.600	100%	0		334.431.600		310.553.000		310.553.000		92,86%	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	829.065.600	100%	648.994.140				962.011.302		1.611.005.442		194,32%	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK/KIR	100%	250.358.800	100%	17.834.400		234.358.800		228.032.242		245.866.642		98,21%	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	280.288.800	100%	371.245.540		226.288.800		202.768.960		574.014.500		204,79%	Dinas Sosial
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	15.000.000	100%	14.975.000		15.000.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	26.620.000	100%	9.175.000		23.050.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	6.798.000	100%	5.720.000		6.798.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	250.000.000	100%	230.044.200		212.810.400		487.522.600		717.566.800		287,03%	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS</b>	100%	1.900.000.000	100%	1.012.626.940				1.627.323.974		2.639.950.914		138,94%	Dinas Sosial
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan tentang Izin Pengumpulan Uang/Barang	100%	53.263.680	100%	36.828.180				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	100%	53.263.680	100%	36.828.180		46.111.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase Pengembangan PSKS</b>	100%	1.846.736.320	100%	975.798.760				1.582.123.174		2.557.921.934		138,51%	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang di berdayakan	100%	519.732.270	100%	15.207.000		463.873.800		417.193.800		432.400.800		83,20%	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang di berdayakan	100%	151.244.000	100%	143.031.000		154.558.000		150.978.400		294.009.400		194,39%	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KPM PKH yang di Berdayakan dan Jumlah SDM Pendamping PKH	100%	836.909.450	100%	569.062.450				640.733.524		1.209.795.974		144,56%	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang diberdayakan	100%	211.710.000	100%	129.080.080		284.754.870		296.367.350		425.447.430		200,96%	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang diberdayakan	100%	127.140.600	100%	119.418.230		83.128.700		76.850.100		196.268.330		154,37%	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	115.000.000	100%	28.669.020				43.515.593		72.184.613		62,77%	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Orang Terlantar yang di pulangkan	100%	115.000.000	100%	28.669.020				43.515.593		72.184.613		62,77%	Dinas Sosial
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di Fasilitasi	100%	115.000.000	100%	28.669.020		85.158.310		43.515.593		72.184.613		62,77%	Dinas Sosial
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani</b>	100%	16.565.277.600	100%	636.537.128				1.197.671.265		1.834.208.393		11,07%	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	100%	653.093.800	100%	309.079.828				531.443.225		840.523.053		128,70%	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Persediaan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	132.917.100	100%	97.274.910		116.490.130		140.767.725		238.042.635		179,09%	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Persediaan Sandang Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	144.989.600	100%	18.013.200		140.809.482		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	127.050.000	100%	122.505.822		127.047.000		124.008.600		246.514.422		194,03%	Dinas Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Rekomendasi Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Yang Telah diberikan	100%	248.137.100	100%	71.285.896		191.732.180		188.197.000		259.482.896		104,57%	Dinas Sosial
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Di Layani	100%	729.545.000	100%	327.457.300				666.228.040		993.685.340		136,21%	Dinas Sosial

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	100%	504.355.000	100%	166.864.000		489.315.100		458.306.690		625.170.690		123,95%	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantii	100%	225.190.000	100%	160.593.300		225.189.689		207.921.350		368.514.650		163,65%	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Jaminan Sosial PMKS yang Terlayani								0		0		#DIV/0!	Dinas Sosial
	Persentase Perlindungan dan Jaminasn Sosial PMKS Terlayani	100%	6.900.000.000	100%	685.802.642				1.600.487.191		2.286.289.833		33,13%	Dinas Sosial
Memeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dilayani	100%	50.000.000	100%	0				#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak Terlantar	100%	50.000.000	100%	0		39.704.680		36.719.480		36.719.480		73,44%	Dinas Sosial
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir miskin dan sistem informasi bagi fakir miskin di Kota Jambi	100%	500.000.000	100%	1.247.650.075				1.563.767.711		2.811.417.786		562,28%	Dinas Sosial
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverivai	100%	500.000.000	100%	374.090.925		499.999.850		476.555.268		850.646.193		170,13%	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi BAntuan Keluarga	100%	600.000.000	100%	421.087.400		435.249.910		962.534.293		1.383.621.693		230,60%	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bantuan yang diberikan kepada masyarakat	100%	600.000.000	100%	452.471.750		194.971.400		124.678.150		577.149.900		96,19%	Dinas Sosial
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat</b>	100%	2.300.000.000	100%	685.802.642				693.637.640		1.379.440.282		59,98%	Dinas Sosial
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	100%	640.995.400	100%	351.127.372				289.598.480		640.725.852		99,96%	Dinas Sosial
Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	201.220.200	100%	191.549.730		141.214.900		103.835.100		295.384.830		146,80%	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	168.584.500	100%	77.485.324		68.584.050		67.117.050		144.602.374		85,77%	Dinas Sosial

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	138.070.000	100%	55.019.718		38.069.650		38.040.650		93.060.368		67,40%	Dinas Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	46.957.400	100%	12.678.600		13.940.380		13.940.380		26.618.980		56,69%	Dinas Sosial
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	86.163.300	100%	14.394.000		66.906.570		66.665.300		81.059.300		94,08%	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial dan Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang telah Mengikuti Pemantapan	100%	509.004.600	100%	334.675.270				404.039.160		738.714.430		145,13%	Dinas Sosial
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan	100%	157.535.400	100%	31.249.370		107.524.960		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Sosial
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan	100%	351.469.200	100%	303.425.900		301.469.200		301.394.200		604.820.100		172,08%	Dinas Sosial
<b>PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	2.389.340.000	100%	4.970.423.044	100%	5.815.862.516		5.561.545.554		10.531.968.598		440,79%	DTKK UMKM
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen	15 dokumen	120.000.000	78 Nilai	53.168.165	78 Nilai	62.836.615		62.836.615		116.004.780		96,67%	DTKK UMKM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Dok. IKU, RENJA, RENJA P, RENSTRA, PK, RB, PROBIS, DAN MR )	10 dokumen	30.000.000	4 dokumen	5.249.500	8 dokumen	52.567.800		52.567.800		57.817.300		192,72%	DTKK UMKM
	Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan								0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD ( LKPD )	1 Dokumen	20.000.000	3 dokumen	5.486.365	1 Dokumen	10.268.815		10.268.815		15.755.180		78,78%	DTKK UMKM
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembayaran Gaji dan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan</b>	1 tahun	279.340.000	100%	3.842.798.502	100%	4.329.725.463		4.154.915.418		7.997.713.920		2863,08%	DTKK UMKM

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	33 orang	3.621.414.226	32 Orang	4.092.613.964		3.918.037.399		7.539.451.625		#DIV/0!	DTKK UMKM
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang / Jasa	32 orang	204.340.000	30 orang	177.321.776	27 Orang	194.007.920		193.774.440		371.096.216		181,61%	DTKK UMKM
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran ( RKA, DPA, CALK, LRA, LO, RFK )	15 laporan	75.000.000	9 dokumen	44.062.500	6 Dokumen	43.103.579		43.103.579		87.166.079		116,22%	DTKK UMKM
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah</b>	1 tahun	35.000.000	100 %	31.200.000	100 %	21.482.000		21.482.000		52.682.000		150,52%	DTKK UMKM
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah	3 orang	35.000.000	3 orang	31.200.000	3 Orang	21.482.000		21.482.000		52.682.000		150,52%	DTKK UMKM
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak Perangkat Daerah</b>		270.000.000	100 %	41.300.000	100 %	108.500.000		106.653.622		147.953.622		54,80%	DTKK UMKM
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	140 stel	120.000.000	61 stel	41.300.000	62 Stel	46.500.000		46.444.000		87.744.000		73,12%	DTKK UMKM
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	15 Kali	150.000.000	-	-	5 O/H	62.000.000		60.209.622		60.209.622		40,14%	DTKK UMKM
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum</b>	1 tahun	880.000.000	100 %	281.518.765	100 %	476.014.870		461.549.184		743.067.949		84,44%	DTKK UMKM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen / Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25 item	15.000.000	20 item	10.011.045	15 Item	13.620.750		13.620.750		23.631.795		157,55%	DTKK UMKM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 orang	120.000.000	2 Orang 30 item	108.842.156	2 Orang	102.157.010		94.709.858		203.552.014		169,63%	DTKK UMKM
	Jumlah Jenis ATK	40 item				37 Item			0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	25 item	50.000.000	10 item	43.597.700	7 Item	39.927.110		38.796.310		82.394.010		164,79%	DTKK UMKM
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat / Pertemuan	50 kali	95.000.000	24 kali	27.740.000	40 Kali	16.850.000		16.850.000		44.590.000		46,94%	DTKK UMKM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	50 OH	600.000.000	40 kali	91.327.864	100 O/K	303.460.000		297.572.266		388.900.130		64,82%	DTKK UMKM
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			6 kali		40 O/K			0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang</b>	1 tahun	150.000.000	100 %	116.716.100	100 %	315.290.308		291.943.530		408.659.630		272,44%	DTKK UMKM
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	15 unit meja kerja, 5 unit lemari arsip, 5 unit rak arsip, 5 unit filing kabinet	150.000.000	8 item	68.784.100	5 Item	38.545.750		38.005.400		106.789.500		71,19%	DTKK UMKM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	7 item	47.932.000	9 Item	276.744.558		253.938.130		301.870.130		#VALUE!	DTKK UMKM
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan</b>	100%	235.000.000	100 %	156.227.206	100 %	216.398.700		200.426.697		356.653.903		151,77%	DTKK UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Kantor	3.100 lembar	50.000.000	2173 lembar	39.509.600	3000 Lembar	71.940.500		71.690.500		111.200.100		222,40%	DTKK UMKM
	Jumlah Pengelola Surat Menyurat								0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik ( Listrik 2 Rek ( 25.000 KWH dan 95.000 KWH ), Air 9.000 m3, Internet 3 Rek ( 100 mbps, 60 mbps, 60 mbps )	1 tahun	185.000.000	3 rek	116.717.606	1 Tahun	144.458.200		128.736.197		245.453.803		132,68%	DTKK UMKM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang	1 tahun	420.000.000	100%	447.494.306	100 %	285.614.560		261.738.488		709.232.794		168,86%	DTKK UMKM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional ( 6 Unit Kendaraan Roda 4, 17 Unit Kendaraan Roda 2 )	24 unit	285.000.000	23 unit	254.811.557	23 Unit	236.900.800		214.394.028		469.205.585		164,63%	DTKK UMKM
	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ( 6 Unit Kendaraan Roda 4 , 17 Unit Kendaraan Roda 2 )								0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit	30.000.000	1 unit	29.153.449	1 Unit	27.800.000		26.860.700		56.014.149		186,71%	DTKK UMKM
	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional								0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	30.000.000	72 unit 1 tahun	22.514.500	6 Item	20.913.760		20.483.760		42.998.260		143,33%	DTKK UMKM
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	62%	2.825.000.000	56%	1.356.471.957	80 %	105.605.512		61.397.712		1.417.869.669		50,19%	DTKK UMKM
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen RTKD	62%	925.000.000	25,15%	443.375.704	80 %	105.605.512		61.397.712		504.773.416		54,57%	DTKK UMKM
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Jambi	160 Orang	925.000.000	80 Orang	443.375.704	1 Dokumen	105.605.512		61.397.712		504.773.416		54,57%	DTKK UMKM
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terafiliasi yang Dilatih untuk Menjadi TKM & Bekerja	62%	975.000.000	56%	469.720.549	62 %	1.424.947.159		419.867.093		889.587.642		91,24%	DTKK UMKM
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja yang Terafiliasi	62%	925.000.000	25,15%	443.375.704	62 %	1.388.023.459		383.019.093		826.394.797		89,34%	DTKK UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan	160 Orang	925.000.000	80 Orang	443.375.704	64 Orang	1.388.023.459		268.297.884		711.673.588		76,94%	DTKK UMKM
<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi LPKS Untuk Memiliki Perizinan</b>	26%	25.000.000	9,5%	15.776.600	24 %	16.348.850		16.310.850		32.087.450		128,35%	DTKK UMKM
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK Swasta yang Memiliki Perizinan	25 LPKS	25.000.000	25 LPKS	15.776.600	25 LPKS	16.348.850		16.310.850		32.087.450		128,35%	DTKK UMKM
<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Produktivitas Terhadap Perusahaan Kecil</b>	16%	25.000.000	8%	10.568.245	3 %	20.574.850		20.537.150		31.105.395		124,42%	DTKK UMKM
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Produktivitas	40 Perusahaan Kecil	25.000.000	25 perusahaan/ UKM	10.568.245	25 Perusahaan Kecil	20.574.850		20.537.150		31.105.395		124,42%	DTKK UMKM
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar</b>	45%	393.159.000	35,53%	200.564.306	50 persen	204.630.599		189.371.383		389.935.689		99,18%	DTKK UMKM
<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Bagi Pencaker Terdaftar</b>	95%	85.000.000	90,92%	61.116.906	92 %	96.084.080		86.979.185		148.096.091		174,23%	DTKK UMKM
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Dilayani Melalui Mekanisme Pelayanan Antar Kerja	6000 Pencari Kerja	85.000.000	5000 pencaker	61.116.906	3.500 Pencari Kerja	79.956.770		70.889.875		132.006.781		155,30%	DTKK UMKM
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Bursa Kerja Khusus yang Mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan	-	-	-	-	24 BKK	16.127.310		16.089.310		16.089.310		#DIV/0!	DTKK UMKM
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Tersedianya Informasi Pasar Kerja</b>	74%	308.159.000	93,75%	139.447.400	42 %	108.546.519		102.392.198		241.839.598		78,48%	DTKK UMKM
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Layanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Lap IPK 12 Bulan	98.159.000	6000 eks	129.547.400	12 Bulan	108.546.519		102.392.198		231.939.598		236,29%	DTKK UMKM
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang Layak</b>	60%	455.000.000	72%	324.129.741	21,5 %	376.189.361		367.979.512		692.109.253		152,11%	DTKK UMKM
<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan</b>	29 Perusahaan	135.000.000	110%	78.871.812	15 %	21.436.050		21.352.950		100.224.762		74,24%	DTKK UMKM
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan	30 Perusahaan	50.000.000	47 Perusahaan	21.679.072	25 Perusahaan	6.386.060		6.386.060		28.065.132		56,13%	DTKK UMKM
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Didata	225 Perusahaan	85.000.000	173 Perusahaan	57.192.740	200 Perusahaan	15.049.990		14.966.890		72.159.630		84,89%	DTKK UMKM



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	188 kasus	320.000.000	106%	245.257.929	59 %	354.753.311		346.626.562		591.884.491		184,96%	DTKK UMKM
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Sosialisasi	40 Perusahaan	75.000.000	104 Perusahaan	56.255.940	40 Perusahaan	128.775.781		121.019.832		177.275.772		236,37%	DTKK UMKM
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	80 Kasus	70.000.000	53 Kasus	46.312.268	50 Kasus	34.311.320		34.101.320		80.413.588		114,88%	DTKK UMKM
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Jambi	8 Kali Rapat	175.000.000	12 Kali	142.689.721	11 Kali Rapat	191.666.210		191.505.410		334.195.131		190,97%	DTKK UMKM
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									0		0		#DIV/0!	DTKK UMKM
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase KSP/USP yang Sehat</b>	35%	46.800.000	72,5 %	17.280.140	84,6 %	33.443.984		31.235.440		48.515.580		103,67%	DTKK UMKM
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	60 Koperasi	46.800.000	100%	17.280.140	23 %	33.443.984		31.235.440		48.515.580		103,67%	DTKK UMKM
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP / USP yang Dinilai Kesehatannya	78 Koperasi	46.800.000	29 koperasi	17.280.140	60 Koperasi	33.443.984		31.235.440		48.515.580		103,67%	DTKK UMKM
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi</b>	55%	388.654.914	9%	524.122.469	16,9 %	592.859.498		591.645.951		1.115.768.420		287,08%	DTKK UMKM
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	120 Koperasi	388.654.914	17%	379.556.701	3 %	442.859.441		441.841.181		821.397.882		211,34%	DTKK UMKM
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus / Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	140 Koperasi	388.654.914	60 orang	379.556.701	100 Koperasi	442.859.441		441.841.181		821.397.882		211,34%	DTKK UMKM
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelaku UMKM	-	-	28,95%	144.565.768	5 %	150.000.057		149.804.770		294.370.538		#DIV/0!	DTKK UMKM
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Mendapatkan Pelatihan	-	-	130 orang	144.565.768	175 Pelaku UMKM	150.000.057		149.804.770		294.370.538		#DIV/0!	DTKK UMKM
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Omset Koperasi</b>	29%	170.125.216	48%	121.007.480	5 %	148.033.430		140.771.530		261.779.010		153,87%	DTKK UMKM
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Perlindungan Koperasi	65 Koperasi	170.125.216	45%	121.007.480	9 %	148.033.430		140.771.530		261.779.010		153,87%	DTKK UMKM

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dibina	60 Koperasi	170.125.216	106 Koperasi	121.007.480	60 Koperasi	148.033.430		140.771.530		261.779.010		153,87%	DTKK UMKM
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas</b>	32%	766.480.000	22,27%	188.301.426	9,42 %	3.319.837.164		620.379.189		808.680.615		105,51%	DTKK UMKM
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku UMKM	1.750 Usaha Mikro	766.480.000	3,56%	188.301.426	17 %	3.319.837.164		620.379.189		808.680.615		105,51%	DTKK UMKM
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM di Kota Jambi yang Terdata	15.000 UMKM	130.000.000	13.343 data	92.631.520	18.000 UMKM	168.288.656		144.047.090		236.678.610		182,06%	DTKK UMKM
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang Dilatih	860 UMKM	636.480.000	50 UMKM	69.004.384	62 Kelompok UMKM Binaan	3.151.548.508		476.332.099		545.336.483		85,68%	DTKK UMKM
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>		4.513.632.133	100%	10.201.662.296	100%			11.161.845.463		21.363.507.759		473,31%	Dinas Lingkungan Hidup
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	0		81,92 Nilai	52.073.444	70 Nilai			54.969.500		107.042.944		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah			2 Dokumen	1.789.900	1 Dokumen	7.683.830		3.435.000		5.224.900		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah			1 Kali		1 Kali			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD			5 Dokumen	41.187.993	5 Dokumen	44.128.450		36.589.500		77.777.493		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	2.361.960		1.683.600		1.983.600		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	2.752.993	1 Dokumen	4.397.970		2.975.000		5.727.993		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.943.630	1 Dokumen	4.246.900		3.479.000		5.422.630		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3 Dokumen	2.523.928	3 Dokumen	4.651.640		2.892.400		5.416.328		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah			1 Dokumen	1.575.000	1 Dokumen	5.399.780		3.915.000		5.490.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi keuangan</b>			100%	8.402.137.911	100%			8.751.658.601		17.153.796.512		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jasa pembayaran asuransi kesehatan			249 orang	7.906.691.050	251 Orang	8.200.976.287		8.259.523.401		16.166.214.451		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN			80 orang		81 Orang			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan			46 orang	491.522.000	46 Orang	522.228.000		483.394.000		974.916.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan			12 Dokumen	1.050.000	12 Dokumen	4.364.732		4.335.200		5.385.200		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1 Dokumen	2.874.861	3 Dokumen	4.977.897		4.406.000		7.280.861		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah</b>			100%	47.760.000	100%			47.360.000		95.120.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelola aset dan pengadaan barang dan jasa			6 orang	47.760.000	6 Orang	47.760.000		47.360.000		95.120.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Index profesionalitas ASN perangkat daerah</b>				78.626.400	100%			272.767.169		351.393.569		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Baju Batik)			154 Pcs	66.027.000	161 Pcs	135.300.000		134.709.000		200.736.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal			14 kali	12.599.400	11 Kali	193.106.000		138.058.169		150.657.569		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>			100%	175.524.990	100%			560.327.638		735.852.628		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik			318 Pcs	25.108.300	460 Pcs	15.103.825		14.516.500		39.624.800		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan			18954 lembar	24.117.126	36304 Lembar	41.211.676		30.907.000		55.024.126		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman			750 kotak	9.075.000	1200 Kotak	24.000.000		12.060.000		21.135.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			33 kali	117.224.564	1 Tahun	368.355.000		502.844.138		620.068.702		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib pengelolaan administrasi umum</b>			100%	216.728.700	100%			206.005.000		422.733.700		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel			26 unit	99.013.100	25 Unit	113.370.400		106.220.000		205.233.100		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			16 unit	117.715.600	15 Unit	90.116.400		99.785.000		217.500.600		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah</b>			100%	683.790.385	100%			704.389.167		1.388.179.552		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat			5100 surat	7.500.000	5100 Surat	8.000.000		8.000.000		15.500.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi			1 Tahun		1 Tahun			376.880.517		729.174.402		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah jasa listrik			140000 Kwh	442.968.855	140000 Kwh	442.968.855		0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Jumlah jasa sumber daya air			2700 Kubik		2700 Kubik			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK			107 Pcs	64.032.900	48 Pcs	64.477.710		58.101.550		122.134.450		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kontrak			15 Orang	259.963.600	15 Orang	265.908.000		261.407.100		521.370.700		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah</b>			100%	545.020.466	100%	587.005.900		564.368.388		1.109.388.854		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			38 unit	228.476.316	15 Unit	282.799.100		213.455.888		441.932.204		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah STNK/KIR			92 unit		161 Unit			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			53 unit	61.112.150	36 Unit	63.456.800		60.709.500		121.821.650		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			2 Paket	255.432.000	3 Paket	240.750.000		290.203.000		545.635.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>		16.253.688	100%	290.515.000	100%	14.776.080		13.710.778		304.225.778		1871,73%	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>				100%	197.300.000	100%			13.710.778		211.010.778		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen naskah akademik kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RTTR			1 Dokumen	197.300.000	1 Dokumen	14.776.080		13.710.778		211.010.778		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi</b>		1.911.569.743	6 nilai	1.557.525.979	7 Nilai			1.755.960.427		3.313.486.406		173,34%	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi</b>			91,67%	1.194.436.443	100%			1.334.286.227		2.528.722.670		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan			1 Kali	24.430.000	1 Kali	126.243.320		151.240.000		175.670.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			4 kali	35.848.500	5 Kali	51.803.797		49.263.016		85.111.516		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji			332 Sampel	1.134.157.943	350 Sampel	1.065.625.174		1.133.783.211		2.267.941.154		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi</b>			100%	343.964.536	100%			364.641.800		708.606.336		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat			3 Dokumen	343.964.536	2 Dokumen	354.765.383		364.641.800		708.606.336		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah uji emisi kendaraan roda empat					1500 Kendaraan			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup			15%	19.125.000	22,5%			57.032.400		76.157.400		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar			1 kali	19.125.000	1 kali	74.430.013		57.032.400		76.157.400		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan</b>		11.995.596.000	49,91 Nilai	7.155.086.698	42,30 Nilai			7.654.792.957		14.809.879.655		123,46%	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan (persentase peningkatan)			11,36%	7.155.086.698	100%			1.197.892.260		8.352.978.958		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan taman hutan kota			3 Lokasi hutan kota	976.972.569	3 Lokasi hutan kota	1.209.087.527		6.038.893.830		7.015.866.399		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH taman hutan kota Jambi yang terkelola			969,18 Ha	5.861.626.886	969,18 Ha	5.828.599.920		418.006.867		6.279.633.753		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang di kelola			53 Taman	316.487.243	53 Taman	427.802.453		36.234.811		352.722.054		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>		541.759.141	84,33%	34.560.100	100%			85.004.250		119.564.350		22,07%	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Persentase penyimpanan sementara limbah B3			84,33%	34.560.100	100%			50.533.500		85.093.600		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin penyimpanan sementara limbah B3			11 kegiatan usaha	25.077.100	25 Kegiatan Usaha	36.512.087		38.858.500		63.935.600		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang terverifikasi			11 kegiatan usaha	9.483.000	25 Kegiatan usaha	11.997.936		11.675.000		21.158.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengelolaan limbah B3 Medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi di luar fasilitas pelayanan kesehatan			0,6	1.302.662.300	100%			34.470.750		1.337.133.050		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terkelolanya limbah B3 medis yang bersumber dari fasilitas isolasi di luar fasilitas pelayanan kesehatan				1.302.662.300	2000kg		128.871.946	34.470.750		1.337.133.050		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 medis			2 Bulan		12 Bulan			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>		710.000.000	100%	161.958.104	100%			342.301.142		504.259.246		71,02%	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			20%	161.958.104	100%			342.301.142		504.259.246		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah fasilitasi kegiatan usaha didalam memenuhi kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH			398 kegiatan usaha	22.382.104	500 Kegiatan usaha	122.412.051		117.545.092		139.927.196		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan bintek bagi petugas pengawas			2 Kali	9.500.000	8 Kali	129.530.000		97.420.000		106.920.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan			100 kegiatan usaha	130.076.000	100 kegiatan usaha	92.069.060		127.336.050		257.412.050		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah kegiatan pengawasan			60 kegiatan usaha		60 Kegiatan usaha			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>		183.194.000	100%	172.470.824	100%			166.338.500		338.809.324		184,95%	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			100%	172.470.824	100%			166.338.500		338.809.324		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			2 Paket	140.014.544	6 Kali	129.800.000		129.700.000		269.714.544		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan kegiatan saka kalpataru			48 Kali	32.456.280	48 Kali	36.740.000		36.638.500		69.094.780		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup</b>		160.000.000	100%	21.186.990	100%			116.336.360		137.523.350		85,95%	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup			100%	21.186.990	100%			116.336.360		137.523.350		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat			35 kali	17.918.690	30 Kali	34.126.651		26.810.210		44.728.900		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa			19 kali	3.268.300	12 Kali	88.933.550		89.526.150		92.794.450		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
	Penerapan sanksi administrasi			2 kegiatan usaha		6 kegiatan usaha			0		0		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Persampahan</b>		44.862.650.867	97%	33.286.593.146	91%			31.586.863.517		64.873.456.663		144,60%	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA</b>			22%	33.286.593.146	14%			31.586.863.517		64.873.456.663		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengurangan sampah di tingkat sumber			22%	753.853.312	41696,93 Ton/Tahun	884.989.593		874.326.668		1.628.179.980		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani			0,7527	32.524.489.834	117072,15 Ton/tahun	31.205.440.384		30.681.736.989		63.206.226.823		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelatihan pendaur ulangan sampah			0	4.500.000	2 Kali	41.300.000		18.049.860		22.549.860		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			7 kali	3.750.000	5 Kali	20.025.000		12.750.000		16.500.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	23.850.865.584	81	7.594.106.275	100%	6.922.565.812		4.091.477.999		11.685.584.274		48,99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	129.390.000	100%	20.860.959	100%	42.441.364		35.276.464		56.137.423		43,39%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100%	90.390.000	100%	12.061.630	100%	29.641.604		24.246.704		36.308.334		40,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100%	24.000.000	100%	7.999.541	100%	12.799.760		11.029.760		19.029.301		79,29%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan</b>	100%	16.863.508.281	100%	5.611.717.456	100%	4.778.400.240		2.133.541.228		7.745.258.684		45,93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	100%	16.048.708.281	100%	5.349.569.427	100%	4.502.754.308		1.887.980.358		7.237.549.785		45,10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan (PA, PPK, PPKom, PPTK)	100%	622.800.000	100%	207.600.000	100%	208.081.000		192.069.000		399.669.000		64,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan dan Pelaporan Keuangan	100%	192.000.000	100%	54.548.029	100%	67.564.932		53.491.870		108.039.899		56,27%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	100%	349.200.003		92.400.001	100%	106.500.000		85.474.500		177.874.501		50,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian PDH, PDL, PSL, KORPRI	100%	187.200.000	100%	62.400.000	100%	82.500.000		67.424.500		129.824.500		69,35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek implementasi peraturan per UU	100%	72.000.000	0%	-	100%	24.000.000		18.050.000		18.050.000		25,07%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	3.384.040.200	100%	857.552.159	100%	1.156.157.308		1.008.968.836		1.866.520.995		55,16%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	19.800.000	100%	6.600.000	100%	107.717.600		7.717.500		14.317.500		72,31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	100%	2.206.500.000	93%	598.666.129	100%	833.308.088		756.707.649		1.355.373.778		61,43%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perlitan Kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perlengkapan Kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	167.740.200	-	55.913.400	100%	55.503.100		63.101.300		119.014.700		70,95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100%	195.000.000	100%	56.103.630	100%	63.528.520		63.151.600		119.255.230		61,16%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu	100%	45.000.000	46%	15.000.000	100%	15.000.000		14.767.600		29.767.600		66,15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah	100%	750.000.000	48,85%	125.269.000	100%	81.100.000		103.523.187		228.792.187		30,51%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	90.000.000	-	-	100%	16.308.600		16.210.600		16.210.600		18,01%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan barang/mebel	100%	90.000.000	-	21.329.400	100%	16.308.600		16.210.600		37.540.000		41,71%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	985.183.200	94%	328.394.400	100%	354.159.200		314.557.339		642.951.739		65,26%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	100%	175.183.200	88%	58.394.400	100%	79.159.200		72.848.400		131.242.800		74,92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	810.000.000	100%	270.000.000	100%	275.000.000		241.708.939		511.708.939		63,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	2.049.543.900	100%	683.181.300	100,00%	468.599.100		497.449.032		1.180.630.332		57,60%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan STNK/KIR	100%	839.280.000	97%	279.760.000	100%	282.941.800		261.105.232		540.865.232		64,44%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100%	445.275.600	-	148.425.200	100%	135.661.200		187.197.700		335.622.900		75,37%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Bangunan	100%	149.988.300	100%	49.996.100	100%	49.996.100		49.146.100		99.142.200		66,10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>	100%	563.402.037	99,23%	172.588.002	99%	273.423.290		266.384.690		438.972.692		77,91%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%	287.852.037	99,23%	80.738.002	99%	181.573.290		175.029.690		255.767.692		88,85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga (KK)	100%	287.852.037	99,23%	80.738.002	99%	181.573.290		175.029.690		255.767.692		88,85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan</b>	100%	275.550.000	100,00%	91.850.000	100%	91.850.000							
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir Pendaftaran Penduduk	100%	275.550.000	100,00%	91.850.000	100%	91.850.000		91.355.000		183.205.000		66,49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	100%	1.004.942.922	93,28%	281.514.411	100%	339.207.215		327.648.319		609.162.730		60,62%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	100%	1.004.942.922	93,28%	281.514.411	93,25%	339.207.215		327.648.319		609.162.730		60,62%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	616.130.568	93,28%	199.050.460	100%	194.178.665		191.287.865		390.338.325		63,35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Jemput Bola	100%	103.214.754	100%	17.264.751	100%	73.308.550		64.860.454		82.125.205		79,57%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir Pendaftaran Pencatatan Sipil	100%	285.597.600	100%	65.199.200	100%	71.720.000		71.500.000		136.699.200		47,86%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Validitas Database Kependudukan</b>	95%	8.015.300.190	87,03%	2.260.646.626	91%	2.155.215.963		2.062.971.394		4.323.618.020		53,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	100%	445.273.467	53,6%	25.836.000	80,4%	127.422.438							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan Data dengan OPD	95%	2.172.128.817	91,77%	556.863.610	93%	675.560.303		608.052.844		1.164.916.454		53,63%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemuktahiran Data Kependudukan	95%	2.054.201.400	91,77%	552.150.000	93%	635.739.189		576.920.430		1.129.070.430		54,96%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melaksanakan PKS Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data	100%	117.927.417	45,00%	4.713.610	100%	39.821.114		31.132.414		35.846.024		30,40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Adminduk dan Pencatatan Sipil	100%	6.027.815.100	88,40%	1.729.719.016	95,10%	1.520.202.048		1.524.883.083		3.254.602.099		53,99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Adminduk dan Pencatatan Sipil	100%	345.645.000	100%	75.000.000	100%	39.733.200		39.643.200		114.643.200		33,17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan	100%	327.346.050	53,60%	21.222.390	80,4%	87.601.324		81.543.416		102.765.806		31,39%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk	100%	1.018.607.550	100%	188.090.826	100%	339.535.707		277.420.407		465.511.233		45,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah sarana Peralatan Pendukung Pencetakan KTP-el/KIA dan informasi Administrasi Kependudukan dan Layanan reaksi Cepat di 62 Kelurahan	100%	4.336.216.500	100%	1.445.405.800	100%	1.053.331.817		1.126.276.060		2.571.681.860		59,31%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tata Kelola Adminduk dan Kinerja Operator SIAK	100%	260.629.740	0%	86.876.050	100%	86.876.050		85.422.594		172.298.644		66,11%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Birtek SIAK	100%	260.629.740	0%	-	100%	86.876.050		42.711.297		42.711.297		16,39%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Penyajian Data Kependudukan</b>	100%	97.724.880	100%	32.574.960	100%	32.574.960		32.574.960		65.149.920		66,67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah Buku Profil Kependudukan</b>	100%	97.724.880		32.574.960	100%	32.574.960		32.574.960		65.149.920		66,67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan	100%	97.724.880	100%	32.574.960	100%	32.574.960		32.574.960		65.149.920		66,67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	BB	5.782.468.755	BB	21.679.001	BB	5.875.031.975		5.696.857.314		5.718.536.315		98,89%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	76,00	61.743.529	74	21.679.001	73	61.309.108		58.669.039		80.348.040		130,13%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	5	15.252.370	5	4.499.792	5	15.064.608		15.604.539		20.104.331		131,81%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	5	46.491.159	5	2.999.997	5	46.244.500		43.064.500		46.064.497		99,08%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	3.709.061.176	93,22%	2.279.082.264	95%	3.867.537.961		3.766.788.988		6.045.871.252		163,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30	3.324.600.888	30	3.314.926.973	30	3.483.004.351		3.390.254.178		6.705.181.151		201,68%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Alat Bahan Pendukung Kegiatan Kantor	37	373.491.823	37	295.478.950	37	373.533.940		365.535.140		661.014.090		176,98%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Pengelola Keuangan dan Operator								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Rapat Percepatan Realisasi Anggaran								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuan Bulanan/Triwulan/semesteran	12	10.968.465	12	9.999.000	12	10.999.670		10.999.670		20.998.670		191,45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	93.500.000	0	0	100%	94.000.000		84.429.500		84.429.500		90,30%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Sipil Harian	1	70.500.000	92	60.000.000	94	70.500.000		70.429.500		130.429.500		185,01%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - undangan	17	23.000.000	0	0	19	23.500.000		14.000.000		14.000.000		60,87%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	539.490.851	0	0	100%	388.503.878		378.853.871		378.853.871		70,22%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18	15.535.585	0	0	18	16.096.000		16.085.688		16.085.688		103,54%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat/Bahan Kebersihan	70	243.969.571	0	0	70	199.095.890		194.800.722		194.800.722		79,85%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Jumlah Jenis ATK, Kertas, Bahan Cetak								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Pengadaan	1	19.557.048	9	45.000.000	9	19.896.988		18.876.095		63.876.095		326,61%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah jilid								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Pengadaan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Air Minum Botol Kemasan	25	26.748.225	15	30.000.000	15	20.415.000		20.325.000		50.325.000		188,14%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersedianya Kue Snack								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tersedianya Nasi Kotak/Bungkus								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Kota	80	190.000.000	35	0	58	127.750.000		123.766.366		123.766.366		65,14%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	2000	43.680.422	0	-	1000	5.250.000		5.000.000		5.000.000		11,45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	580.355.789	0%	0		663.191.849							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	131.226.189	0	0	14	663.191.849							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	224.564.800	0%	0		205.779.600		201.053.874		201.053.874		89,53%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa TKK Administrasi	250	22.564.800	365	17.716.000	365	43.779.600		43.779.600		61.495.600		272,53%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Materai								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi (Air)	12	202.000.000	36	272.155.200	36	162.000.000		157.274.274		429.429.474		212,59%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Jasa Komunikasi (Internet)								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Jasa Komunikasi (Listrik)								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	573.752.610	0%	0		594.709.579							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Jasa TKK Administrasi	21	267.794.800	21	0	21	267.794.800		244.199.897		244.199.897		91,19%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Pajak Kendaraan Jabatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Rehabilitas Ringan/sedang/berat Kendaraan Jabatan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	90.739.999	5	0	5	110.804.799		92.793.377		92.793.377		102,26%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa TKK Keamanan	49	146.313.011	42	0	40	34.760.000		34.760.000		34.760.000		23,76%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jasa pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	68.904.800	16	0	4	181.349.980		178.695.600		178.695.600		259,34%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	94,50%	654.765.683	94,4%	556.033.935	94,45%	765.422.308		753.898.119		1.309.932.054		200,06%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		68,50%		68,3%		68,4%								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang telah memiliki Focal Point PG	50%	121.972.423	30,00%	79.888.750	40%	192.479.048		187.376.191		267.264.941		219,12%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Telah Memiliki Focal Point PUG	40	0	40	79.888.750	40	192.479.048		187.376.191		267.264.941		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	38%	532.793.260	40%	476.145.185	37%	572.943.260		566.521.928		1.042.667.113		195,70%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang Mengikuti Sosialisasi	1	0	1	476.145.185	1	572.943.260		566.521.928		1.042.667.113		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan Rasio KDRT	100%	146.305.300	100%	246.806.177	100%	365.119.900		274.858.684		521.664.861		356,56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana, Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan	100%	146.305.300	100%	159.618.777	100%	260.221.900		102.638.064		262.256.841		179,25%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan	-	-	2	87.187.400	2	104.898.000		102.638.064		189.825.464		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Selama 1 Tahun								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dilayani	100%	146.305.300	100%	159.618.777	100%	260.221.900		172.220.620		331.839.397		226,81%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilayani	47	146.305.300	45	110.963.897	46	135.296.900		123.310.620		234.274.517		160,13%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20	48.654.880	21	124.925.000		48.910.000		97.564.880		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Cakupan Keluarga Berkualitas								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	40%	191.508.280	30%	155.561.590	35%	173.310.200		168.585.200		324.146.790		169,26%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak</b>	80%	141.983.800	78.81%	129.962.090	79%	139.259.800		134.534.800		264.496.890		186,29%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Dasa Wisma	6	141.983.800	3	129.962.090	6	139.259.800		134.534.800		264.496.890		186,29%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Peningkatan Dasa Wisma								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga</b>	3.20%	49.524.480	2.90%	25.599.500	3%	34.050.400		34.050.400		59.649.900		120,45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (PUSPA)	180	49.524.480	180	25.599.500	180	34.050.400		34.050.400		59.649.900		120,45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Cakupan Data Gender dan Anak</b>	30%	267.409.952	20%	210.686.033	25%	262.520.254		253.079.639		463.765.672		173,43%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak</b>	30%	267.409.952	20%	210.686.033	25%	262.520.254		253.079.639		463.765.672		173,43%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di Kab/Kota ( Rencana Aksi Daerah ( RAD) Anak dan Gender, Gender Budget Sestim (GBS), Gender Analysis Pathway (GAP) dan Data-data Kesejahteraan Profil Gender dan Anak )	4	138.392.722	2	105.278.030	3	133.353.024		127.716.409		232.994.439		168,36%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang disajikan dan dimanfaatkan dalam kelembagaan data	4	129.017.230	2	105.408.003	3	129.167.230		125.363.230		230.771.233		178,87%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	80%	298.626.759	70%	260.521.242	80%	338.626.759		338.571.350		599.092.592		200,62%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Cakupan Kota Layak Anak	80%	298.626.759	70%	192.273.083	80,00%	338.626.759		338.571.350		530.844.433		177,76%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah anak ikut dalam organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	250		200		230			0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha selama setahun	22	298.626.759	22	79.680.756	22	338.626.759		338.571.350		418.252.106		140,06%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Penurunan Rasio Kekerasan Terhadap Anak</b>	100%	267.678.308	100%	748.491.799	100%	604.606.251		410.109.129		1.158.600.928		432,83%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	<b>Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang Dilayani</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	<b>Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sosialisasi GN AKSA, PATBM, dan Konfensi Hak anak</b>	8	99.450.088	11	131.625.160	11	292.775.582		288.558.579		420.183.739		422,51%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak selama setahun	23	99.500.088	23	99.366.110	23	99.500.088		99.500.088		198.866.198		199,87%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Selama Setahun	-	-	2	32.259.050	2	90.970.000		90.970.000		123.229.050		#VALUE!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang dilayani</b>	100%	168.228.220	100%	616.866.639	100%	311.830.669		193.063.607		809.930.246		481,45%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilayani	47	168.228.220	45	118.847.339	46	151.331.550		87.509.807		206.357.146		122,66%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Selama 1 Tahun	22	0	20	498.739.300	21	224.119.119		105.600.000		604.339.300		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Selama Setahun	-	-	0	0	1	102.305.494		98.088.491		98.088.491		#VALUE!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Selama Setahun	-	-	0	0	1	102.305.494		98.088.491		98.088.491		#VALUE!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat</b>	89%	4.082.157.267	85%	1.921.645.264	88%	4.655.201.552		4.634.244.621		6.555.889.885		160,60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	45%	4.082.157.267	41%	1.921.645.264	50%	4.655.201.552		4.634.244.621		6.555.889.885		160,60%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Buku Hukum Adat Sekota Jambi	1	0	1	100.890.348	1	24.918.734		24.900.254		125.790.602		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat aktif	6	405.934.570	4	488.027.070	5	554.111.214		552.428.431		1.040.455.501		256,31%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Monev dan Usulan Sarana dan Prasarana Kelembagaan yang dilaksanakan selama setahun		2.314.034.610		1.188.224.340	300	2.842.230.392		2.828.056.392		4.016.280.732		173,56%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah RT yang ikut Kampung Bantar								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UP2K) Kota Jambi	3	83.336.640	2	81.116.085	2	68.009.724		68.009.518		149.125.603		178,94%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Kerjasama yang Menjalin Kemitraan	3	100.000.000	3	63.387.421	3	92.109.800		87.072.688		150.460.109		150,46%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								0		0		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Kader kelembagaan yang aktif	1	105.329.699	0%	0	1	0		0		0		0,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Tim Penggerak PKK yang dibina	3	1.073.521.478	2	1.027.901.457	3	1.073.821.478		1.073.777.338		2.101.678.795		195,77%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	B	5.932.743.470	100 %	4.405.929.176	70 (B)	5.398.661.456		12.561.055.904		16.966.985.080		285,99%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen								0		0		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Nilai Sakip</b>	10 Dok	61.060.395	100%	49.484.450	75	56.407.100							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10 Dok	61.060.395	10 Dok	49.484.450	10 Dok	56.407.100		135.298.400		184.782.850		302,62%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	36 Orang	4.246.363.345	36 Orang	3.342.822.527	36 Orang	4.041.412.046		9.682.111.088		13.024.933.615		306,73%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	36 Orang	4.036.525.750	36 Orang	3.164.434.427	36 Orang	3.860.110.146		9.216.515.488		12.380.949.915		306,72%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Dokumen	5 Dok	197.759.760	5 Dok	171.885.600	5 Dok	167.384.800		434.377.200		606.262.800		306,57%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	10 Dok	12.077.835	10 Dok	6.502.500	10 Dok	13.917.100		31.218.400		37.720.900		312,32%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	5 Dok	76.240.395	5 Dok	62.225.550	5 Dok	75.877.100		183.888.400		246.113.950		322,81%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	5 Dok	76.240.395	5 Dok	62.225.550	5 Dok	75.877.100		183.888.400		246.113.950		322,81%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	137 Pegawai	155.783.350	137 Pegawai	149.470.400	137 Pegawai	155.783.350		423.903.450		573.373.850		368,06%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	137 Pegawai	102.750.000	137 Pegawai	102.750.000	137 Pegawai	102.750.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	137 Dok	44.542.550	36 Orang	38.229.600	36 Orang	44.542.550		109.692.650		147.922.250		332,09%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	137 Dok	8.490.800	137 Orang	8.490.800	137 Orang	8.490.800		16.589.800		25.080.600		295,39%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	1 Tahun	462.736.410	100%	57.721.849	100%	202.511.450		394.280.222		452.002.071		97,68%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	4.204.750	2 Paket	2.796.585	2 Paket	1.906.300		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	49.096.080	3 Paket	38.787.540	3 Paket	42.617.850		100.370.600		139.158.140		283,44%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	9.435.580	2 Oaket	7.137.724	2 Oaket	5.987.300		20.711.900		27.849.624		295,16%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	400.000.000	2 Laporan	9.000.000	2 Laporan	152.000.000		267.478.822		276.478.822		69,12%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhiya Peralatan Perkantoran Dinas</b>	1 Unit	22.000.000			100%	22.000.000		74.000.000		74.000.000		336,36%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran	1 Unit	22.000.000			1 Unit	22.000.000		74.000.000		74.000.000		336,36%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	1 Tahun	272.132.575	1 Tahun	252.194.400	100%	266.389.660		520.289.273		772.483.673		283,86%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	1 Tahun	23.814.560	1 Tahun	41.131.100	2 Laporan	19.880.000		48.565.000		89.696.100		376,64%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedia Jasa Sumber Daya Listrik, Air dan Telekomunikasi Kantor	1 Tahun	176.484.000	1 Tahun	148.200.000	4 Laporan	160.440.000		253.983.693		402.183.693		227,89%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	71.834.015	1 Tahun	62.863.300	4 Laporan	86.069.660		217.740.580		280.603.880		390,63%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhiya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dan Peralatan Kantor</b>	1 Tahun	636.427.000	1 Tahun	492.010.000	100%	578.280.750		1.147.285.071		1.639.295.071		257,58%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	188.100.000	1 Tahun	140.400.000	6 Unit Roda 4	171.342.750		340.212.492		480.612.492		255,51%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	1 Tahun	417.010.000	1 Tahun	344.100.000	6 Unit Roda 4, 50 Unit Roda 2	386.938.000		763.822.579		1.107.922.579		265,68%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	1 Tahun	31.317.000	1 Tahun	7.510.000	5 Unit AC, 5 Unit Lapto, 5 Printer	20.000.000		43.250.000		50.760.000		162,08%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor						0		0		0		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan</b>	1 Tahun	191.111.200	1 Tahun	71.031.599	100%	250.971.951		671.035.578		742.067.177		388,29%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk</b>	1 Tahun	131.111.200	1 Tahun	37.892.994	100%	120.756.539		382.378.716		420.271.710		320,55%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah kelompok sasaran	1 sekolah	65.964.000	1 sekolah	10.994.794	8 Satuan Pendidikan	76.905.120		223.378.040		234.372.834		355,30%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta	11 Laporan	65.147.200	11 Laporan	26.898.200	11 Laporan	43.851.419		159.000.676		185.898.876		285,35%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan</b>	1 Dok	60.000.000	1 Tahun	33.138.605		130.215.412		288.656.862		321.795.467		536,33%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen	1 Dok	60.000.000	1 Dok	33.138.605	1 Dok	130.215.412		288.656.862		321.795.467		536,33%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan</b>	100%	3.620.235.890	100%	4.546.560.972	100%	3.697.299.991		6.979.991.509		11.526.552.481		318,39%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan</b>	100%	1.323.877.785	100%	1.195.703.348	100%	2.249.426.280		4.801.204.323		5.996.907.671		452,98%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Dukungan Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Mensukseskan Program Banggakanencana	55 OPD KB	308.293.387	55 OPD KB	197.017.110	55 OPD KB	925.764.385		2.036.708.770		2.233.725.880		724,55%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dukungan Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Mensukseskan Program Banggakanencana	11 Kecamatan	34.212.960	11 Kec	19.264.800	11 Dok	641.600.000		1.553.816.000		1.573.080.800		4597,91%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Dukungan Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Mensukseskan Program Banggakanencana	11 Kecamatan	164.596.438	11 Kec	164.596.438	11 Unit	160.011.516		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dukungan Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Mensukseskan Program Banggakencana	11 Balai KB	11.550.000	11 Balai KB	9.600.000	11 Dok	23.750.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Dukungan Koordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Mensukseskan Program Banggakencana	11 Laporan	805.225.000	11 laporan	805.225.000	11 Laporan	498.300.379		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Jumlah Kader PKB/PLKB	745 Kader/ Orng	1.265.221.592	745 Kader/ Orng	1.265.221.592	745 Kader/ Orng	409.432.500		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	11 Balai Penyuluhan KB	11 sarana	967.221.592	11 sarana	967.221.592	3 Sarana	111.832.500		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP	745 Kader/ Orng	298.000.000	745 Kader/ Orng	298.000.000	745 Kader/ Orng	297.600.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun</b>	100%	355.547.918	100%	1.506.420.130	100%	831.441.211		1.282.879.686		2.789.299.816		784,51%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	penyedia sarana penunjang pelayanan KB	74 Laporan	74.438.600	110 Laporan	856.222.255	100 laporan	624.250.451		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah kesertaan penggunaan MKJP	80 Peserta	21.567.410	130 Peserta	485.961.081	50 Peserta	16.309.520		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Peserta Kesertaan Penggunaan MKJP								0		0		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Akseptor yang mendapatkan Ayoman Komplikasi Berat								0		0		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	220 Peserta	16.634.420	100%	142.977.000	100%	36.511.795		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mendapat Pembinaan	110 Faskes	142.977.000			20 Laporan	12.253.000		24.412.000		24.412.000		17,07%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50 orang	9.000.000	60 Orang	1.650.000	90 Tenaga Pelayanan	10.880.850		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB	104 faskes	14.096.126	46 Faskes	19.609.794	110 Laporan	123.686.595		285.771.235		305.381.029		2166,42%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Peserta Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	90 Orang	76.834.362	90 Orang		90 Orang	7.549.000		#VALUE!		#VALUE!			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerak Lini Lapangan	100%	675.588.595	100%	579.215.902	100%	207.000.000		265.500.000		844.715.902		125,03%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Tercapainya penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	12 Kampung KB	675.588.595	12 Kampung KB	579.215.902	12 Kampung KB	207.000.000		265.500.000		844.715.902		125,03%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri</b>	100%	1.631.059.794	1 Tahun	1.031.590.149	100%	2.825.447.106		2.130.740.832		3.162.330.981		193,88%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan PPKS	100%	1.431.059.794	1 Tahun	979.989.453	100%	1.608.952.850		960.545.700		1.940.535.153		135,60%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok	20 kelompok	391.000.000	20 kelompok	276.500.000	20 kelompok	443.175.000		779.125.000		1.055.625.000		269,98%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6790 orang	122.000.000	6790 orang	100.289.659	1 Laporan	28.377.850		89.980.150		190.269.809		155,96%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Kelompok BKL								0		0		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Pasca Persalinan di Desa	50 Orang	314.860.000			2 Laporan	1.137.400.000		132.840.000		132.840.000		42,19%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan Untuk Menambah Pengetahuan Kader Poktan	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	51.600.696	358 Kali	1.216.494.256		1.170.195.132		1.221.795.828		610,90%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Pelatihan	20 Kelompok	45.000.000			12 Organisasi	171.600.000		241.536.000		241.536.000		536,75%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024



4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	28.209.540	12 Bulan	39.045.000		32.047.446		60.256.986		80,34%	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Kali	700.000.000	130 Kali	75.247.781	130 Kali	184.200.000		240.661.416		315.909.197		45,13%	Dinas Perhubungan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	60.000.000	100%	58.158.500	100%	555.950.087		537.030.292		595.188.792		991,98%	Dinas Perhubungan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	418.800.000				418.800.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	87.428.000				79.600.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	60.000.000	3 Jenis	58.158.500	3 Jenis	49.722.087				38.630.292		161,31%	Dinas Perhubungan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	649.500.000	100%	454.284.510	100%			322.047.917		776.332.427		119,53%	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	9.500.000	1 Jenis	8.400.000	1 Jenis	8.500.000				8.500.000		16,900,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis	480.000.000	5 Jenis	296.427.510	5 Jenis	293.470.750				313.547.917		609,975,427	Dinas Perhubungan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	1.330.000.000	100%	1.202.788.630	100%					581.679.127		1.784,467,757	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4 Jenis	810.000.000	4 Jenis	577.026.430	4 Jenis	533.307.700				468.349.950		1.045,376,380	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	160.000.000	3 Unit	102.820.100	3 Unit	89.438.500				82.954.177		185,774,277	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Jenis	360.000.000	4 Jenis	522.942.100	4 Jenis	61.000.000				30.375.000		553,317,100	Dinas Perhubungan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan</b>	73,5%		73,5%		73,5%	9.995.525.885				11.607.362.119		11,607,362,119	Dinas Perhubungan
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota yang disusun</b>										854.914.666		854,914,666	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota yang disusun						999.999.162				854.914.666		854,914,666	Dinas Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	5%	11.918.380.000	5%	3.208.583.209	5%	2.068.730.276		2.641.473.029		5.850.056.238		49,08%	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	5 Jenis	9.436.380.000	5 Jenis	1.689.459.000	5 Jenis	1.300.634.860		1.875.656.759		3.565.115.759		37,78%	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11 Jenis	2.482.000.000	11 Jenis	1.519.124.209	11 Jenis	768.095.416		765.816.270		2.284.940.479		92,06%	Dinas Perhubungan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	50%	2.507.665.000	50%	975.036.449	50%			1.436.169.200		2.411.205.649		96,15%	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 Terminal	754.000.000	1 Terminal	975.036.449	1 Terminal	928.587.091		1.436.169.200		2.411.205.649		319,79%	Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	83,3%	4.376.962.000	83,3%	3.331.039.000	83,3%	2.852.564.290		2.893.501.160		6.224.540.160		142,21%	Dinas Perhubungan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	500 Berkas	970.900.000	500 Berkas	1.095.737.150	500 Berkas	626.881.850		713.053.600		1.808.790.750		186,30%	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran	50 Kali	3.406.062.000	25 Kali	2.235.301.850	25 Kali	2.225.682.440		2.180.447.560		4.415.749.410		129,64%	Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	7.664.675.000	100%	798.913.226	100%			1.171.991.645		1.970.904.871		25,71%	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Ketersediaan Bukti Lulus Uji Elektronik	15000 set	800.175.000	20000 set	635.269.936	20000 set	483.477.800		1.016.556.800		1.651.826.736		206,43%	Dinas Perhubungan
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Kali	50.000.000	2 Kali	12.190.000	2 Kali	4.847.500		4.830.345		17.020.345		34,04%	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Jenis	320.500.000	2 Jenis	151.453.290	2 Jenis	150.908.600		150.604.500		302.057.790		94,25%	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	100%	1.285.555.000	100%	1.078.242.522	100%			782.415.671		1.860.658.193		144,74%	Dinas Perhubungan
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Jenis	1.185.555.000	2 Jenis	560.112.176	2 Jenis	548.922.339		516.540.471		1.076.652.647		90,81%	Dinas Perhubungan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rapat Forum Lalu Lintas						45.197.760		265.875.200		265.875.200		#DIV/0!	Dinas Perhubungan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Andalalin untuk Jalan Kab/Kota	100%	105.000.000	67%		67%	32.530.200		662.000		662.000		0,63%	Dinas Perhubungan
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Rekomendasi Andalalin	10 Kali	52.000.000	10 Kali		10 Kali	32.530.200		662.000		662.000		1,27%	Dinas Perhubungan
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	8.665.988.000	67%	1.777.427.182	67%	1.879.760.867		1.826.234.748		3.603.661.930		41,58%	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	95 Kali	7.825.200.000	95 Kali	1.774.745.622	95 Kali	1.879.760.867		1.826.234.748		3.600.980.370		46,02%	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	85%	700.000.000	85%	104.103.000	85%	156.305.400		152.370.900		256.473.900		36,64%	Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Layanan Angkutan Sungai dan Danau	85%	700.000.000	85%	104.103.000	85%	156.305.400		152.370.900		256.473.900		36,64%	Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	200.000.000	1 Unit	104.103.000	1 Unit	156.305.400		152.370.900		256.473.900		128,24%	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.785.808.533	100%	4.678.476.526	100%	6.090.627.380		14.776.432.450		19.454.908.976		336,25%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	15.046.476	100%	10.039.554	100%	9.938.500		38.608.800		48.648.354		323,32%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	10.507.140	100%	10.507.140	100%	10.507.300		27.452.800		30.170.119		287,14%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.539.336	100%	3.049.915	100%	2.851.200		11.156.000		14.205.915		312,95%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan dan aset	100%	4.132.978.349	100%	3.600.695.211	100%	4.366.461.890		10.194.598.489		13.795.293.700		333,79%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3.802.950.359	100%	3.223.017.336	27 orang	3.957.057.291		9.252.036.893		12.475.054.229		328,04%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan dan aset	25 orang	324.517.600	100%	373.798.000	26 orang	403.182.000		918.192.000		1.291.990.000		398,13%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester	13 laporan	5.510.390	100%	3.879.875	13 laporan	6.222.799		24.369.596		28.249.471		512,66%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian dinas dan Bimtek	100%	217.925.000	100%	57.440.000	100%	244.800.000		588.398.578		645.838.578		296,36%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan PDH	110 orang	63.825.000	100%	44.990.000	65 stel	90.750.000		271.524.000		316.514.000		495,91%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	1 Tahun	154.100.000	100%	12.450.000	20 kali	154.050.000		316.874.578		329.324.578		213,71%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100%	326.698.900	100%	201.060.600	100%	326.698.900		1.183.327.398		1.384.387.998		423,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Pengadaan alat-alat listrik dan elektronik	1 Tahun	36.912.700	100%	33.901.000	21 item	36.912.700		73.824.570		107.725.570		291,84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	25.786.200	100%	24.464.000	4 Jenis	25.786.200		49.396.660		73.860.660		286,43%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Fasilitas Kunjungan Tamu	Kunjungan tamu ke Diskominfo	1 Tahun	15.000.000	100%	63.871.000	7 item	15.000.000		23.110.500		86.981.500		579,88%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	1 Tahun	249.000.000	100%	78.824.600	31 kali	249.000.000		694.000.125		772.824.725		310,37%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	54 Unit	178.332.128	100%	97.360.000	100%	191.985.401		437.476.120		534.836.120		299,91%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor	50 Unit	178.332.128	100%	14.960.000	2 paket	191.985.401		437.476.120		452.436.120		253,70%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya surat menyurat, pembayaran rekening listrik dan air serta Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	412.635.280	100%	372.938.661	100%	390.046.200		1.083.674.337		1.456.612.998		353,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	1 Tahun	78.619.200	100%	126.690.400	1200 surat	78.619.200		200.947.600		327.638.000		416,74%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Tahun	182.000.000	100%	111.768.171	12 bulan	162.000.000		342.485.922		454.254.093		249,59%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Tahun	152.016.080	100%	134.480.090	1 tahun	149.427.120		390.738.955		525.219.045		345,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan urusan Pemerintah dan mesin lainnya	100%	502.192.400	100%	338.942.500	100%	560.696.489		1.250.348.728		1.589.291.228		316,47%	Dinas Komunikasi dan Informatika

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4			100%	168.920.000	1 unit	51.600.000		108.700.900		277.620.900		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	1 Tahun	281.700.800	100%	75.077.500	19 unit	326.694.889		662.276.309		737.353.809		261,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4					7 unit			0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (AC)					1 unit			108.628.819		153.718.819		175,20%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Genset)					10 unit			0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Komputer/Notebook)	1 Tahun	87.740.000	100%	45.090.000	20 unit	49.650.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Printer)					25 unit			0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab bangunan kantor	1 Paket	132.751.600	100%	49.855.000	1 Paket	132.751.600		370.742.700		420.597.700		316,83%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	80%	4.347.389.603	100%	5.753.418.194	80%	4.211.399.596		11.889.338.610		17.642.756.804		405,82%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	100%	4.347.389.603	100%	5.753.418.194	100%	4.211.399.596		11.889.338.610		17.642.756.804		405,82%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Berita melalui Aplikasi Monitoring Media	12 dokumen	193.904.703	100%	481.769.450	12 bulan	318.365.000		785.969.000		1.267.738.450		653,79%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah layanan audio visual, streaming video dan multimedia					12 bulan			792.251.010		1.066.320.454		383,34%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah publikasi konten pada Media Komunikasi Publik	12 dokumen	278.167.200	1	274.069.444	12 bulan	297.166.620		0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Terbentuknya KIM					5 KIM			0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 dokumen	1.173.895.200	1	1.071.169.300	12 bulan	1.267.510.200		2.961.285.600		4.032.454.900		343,51%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Publikasi media cetak dan Media elektronik	36 media elektronik	2.701.422.500	1	3.926.410.000	36 media elektronik	2.328.357.776		7.349.833.000		11.276.243.000		417,42%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika</b>	0,9	3.077.683.910	100%	4.222.552.100	0,7355	2.669.443.100		10.047.643.460		14.270.195.560		463,67%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkoneksi OPD dengan jaringan intra pemerintah kota Jambi</b>	100%	2.232.980.010	100%	3.217.701.650	100%	2.624.443.100		8.120.465.850		11.338.167.500		507,76%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang diawasi dan Jumlah Sub Domain yang diawasi	-	-	100%	44.968.000	1 domain dan 65 sub domain	45.000.000		154.917.000		199.885.000		#VALUE!	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	41 Terhubung 41 Terkoneksi	2.232.980.010	100%	3.172.733.650	2 paket	2.579.443.100		5.310.140.000		8.482.873.650		379,89%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Informatika	3%	844.703.900	100%	1.004.850.450	3%	823.048.890		2.211.156.780		3.216.007.230		380,73%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi SPBE	2 Laporan	52.781.490	100%	4.776.950	2 kali	49.600.000		185.250.000		190.026.950		360,03%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Literasi Digital	-	-	100%	89.892.000	1 dokumen	10.349.080		40.505.660		130.397.660		#VALUE!	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan	22 Aplikasi 22 Web	458.808.200	100%	471.858.800	23 aplikasi 23 buah	495.913.200		1.207.160.600		1.679.019.400		365,95%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rapat koordinasi dan evaluasi smart city	1 Kali 1 Kali 1 Paket	33.572.110	100%	4.779.940	1 kali	23.239.500		189.275.000		194.054.940		578,02%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan pengelolaan SDM TIK	1 Tahun 1 Kali	299.542.100	100%	433.542.760	12 orang	243.947.110		588.965.520		1.022.508.280		341,36%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	tersedianya data statistik sektoral	40%	58.942.700	100%	32.219.800	40%	85.317.516		354.887.650		387.107.450		656,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	100%	58.942.700	100%	32.219.800	100%	85.317.516		354.887.650		387.107.450		656,75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Sinkronisasi Statistik Sektoral	2 Dokumen	58.942.700	100%	7.249.800	1 kali	9.030.284		11.651.420		18.901.220		32,07%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pelatihan Pengelolaan Statistik	0%	-	0%	-	40 orang	36.327.375		113.118.250		113.118.250		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Perencanaan Metadata	0%	-	100%	24.970.000	1 dokumen	39.959.857		119.319.610		144.289.610		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Rasio Jumlah informasi milik Pemerintah yang diamankan	55%	56.175.254	100%	52.593.750	55%	60.750.300		16.134.000		68.727.750		122,35%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	100%	56.175.254	100%	52.593.750	100%	60.750.300		16.134.000		68.727.750		122,35%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terpenuhi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	12 Laporan	56.175.254	100%	50.313.750	12 laporan	60.750.300		16.134.000		66.447.750		118,29%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	B	6.493.365.067,00		2.026.157.022		6.333.188.390		0		2.026.157.022		31,20%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akip	100%	32.778.924,00		23.614.762	100%	31.999.976		83.171.100		106.785.862		325,78%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( RKA , RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	2 Dokumen 2 Dokumen	22.612.254,00	64,62	14.215.762	4 dokumen	21.999.977		74.130.800		88.346.562		390,70%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LPPD,E Sakip, Lap Tahunan Probis)	5 Dokumen	10.166.670	94,00	9.399.000	4 dokumen	9.999.999		36.366.000		45.765.000		450,15%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	3.827.352.780,00		1.867.601.410	100%	4.177.195.254		9.849.451.248		11.717.052.658		306,14%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan	30 Orang	3.537.641.180,00	47,34	1.745.867.506	33 Orang	3.814.624.262		9.148.239.518		10.894.107.024		307,95%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengelola Arsip yang dapat dibayarkan selama 12 bulan	20 Orang				30 orang			676.246.100		796.083.670		305,94%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Administrasi)	1 Orang				5 Orang			0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan	45 Dokumen	260.211.600	50,51	119.837.570	45 berkas	339.278.172			0		0		#DIV/0!
	Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non Asn yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan	37 Orang				37 Orang			0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPPTSP Kota Jambi	2 Dokumen	8.500.000,00	25,29	1.896.334	1 Dokumen	7.498.730		8.660.000		10.556.334		124,19%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan/semesteran DPMPPTSP Kota Jambi	9 Kali	16.000.000,00	18,96	2.994.750	12 kali	15.794.090		16.305.630		19.300.380		120,63%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100%	239.194.000,00			100%	188.680.000		267.800.000		267.800.000		111,96%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian	70 pegawai	139.194.000,00	-	-	30 Pegawai,81 Pegawai, 30 pcs	88.680.000		144.800.000		144.800.000		104,03%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah BIMTEK Peraturan Perundang-Undangan	25 kali	100.000.000,00	-	-	12 Kali	100.000.000		123.000.000		123.000.000		123,00%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Kantor</b>	100%	656.564.058,02		130.444.410	100%	639.993.810		1.241.322.065		1.371.766.475		208,93%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air & Listrik	9 Jenis	18.151.830,00	73,46	12.486.650	9 Jenis	16.998.300		33.974.600		46.461.250		255,96%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK	1 Buah dan 43 Pake				11 Unit			722.542.580		805.659.190		797,08%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	101.076.358	59,62	83.116.610	21 Jenis	123.596.660		0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis	80.160.870,00	18,75	17.222.150	11 Jenis	90.973.850		178.513.500		195.735.650		244,18%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	2 Laporan	84.675.000,00	17,16	4.117.500	446 Bungkus,242 Kotak,11 Dus, 1647 kotak	44.075.000		114.862.500		118.980.000		140,51%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100%	372.500.000	9,28	13.501.500	1 tahun	364.350.000		360.008.313		373.509.813		100,27%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah								0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</b>	100%	109.611.843,99		-	100%	256.442.500		2.954.717.550		2.954.717.550		2695,62%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeluer	1 Paket dan 2 Unit	-	-	-	3 Unit	8.893.500		731.945.500		731.945.500		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20 unit	109.611.844	0	0	3 Jenis, 6 Unit	247.549.000		1.725.390.050		1.725.390.050		1574,09%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran								0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>	100%	1.100.143.760,99		246.925.788	100%	639.955.650		1.769.292.037		2.016.217.825		183,27%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis ATK	2 Jenis				2 Jenis			59.487.200		62.998.400		488,18%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah surat masuk dan keluar	2350 Lembar	12.904.755	59,77	3.511.200	2350 Lembar	23.078.550		0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pemadam Kebakaran	5 Tagihan	467.650.000	35,33	124.969.988	1 Tahun	353.850.000	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu							
	Jumlah jasa Daya Internet																		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	Jumlah jasa Daya Listrik																			#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Jasa Sumber Daya Air																			#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor	27 Orang	619.589.005,99	46,90	118.444.600	14 Orang	263.027.100		751.089.702		869.534.302	140,34%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	100%	527.719.700,00		105.670.900	100%	398.921.200		791.374.800		897.045.700	169,99%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK/ KIR Administrasi	28 Unit	13.000.000,00	69,09	6.857.400	23 Unit	9.925.000		17.128.100		23.985.500	184,50%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	28 Unit	322.390.000,00	31,74	64.978.500	23 Unit	204.730.000		476.691.700		541.670.200	168,02%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	135 Unit	81.329.700,00	10,13	14.335.000	135 Unit, 8 Unit	129.466.200		228.390.000		242.725.000	298,45%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Tahun	111.000.000,00	61,29	19.500.000	1 Tahun	54.800.000		78.915.000		98.415.000	88,66%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi</b>	2 Investor	71.570.717,00		1.743.500				96.952.800		98.696.300	137,90%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi</b>	1 dokumen	71.570.717,00		1.743.500				96.952.800		98.696.300	137,90%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	71.570.717,00	3,10	1.743.500				96.952.800		98.696.300	137,90%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Peningkatan Jumlah Rencana Investasi</b>	10%	272.536.996		-	5%	233.758.660		3.701.960		3.701.960	1,36%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelaksanaan Promosi Investasi Di Dalam dan Di Luar Kota Jambi</b>	100%	272.536.996		-	100%	233.758.660		450.523.318		450.523.318	165,31%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Investasi Di Dalam dan Di Luar Kota Jambi	5 Dokumen	272.536.996	-	-	4 Kali	233.758.660		450.523.318		450.523.318	165,31%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu								



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88	830.421.798		265.246.705	87,5%			84.719.495		349.966.200		42,14%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang terbitkan	90%	830.421.798		265.246.705	90%	1.069.593.771		2.276.124.109		2.541.370.814		306,03%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	5000 Izin	680.480.400	41,00	244.061.805	5000 Izin	927.143.773		1.969.353.613		2.213.415.418		325,27%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah sarana dan prasarana serta izin usaha yang memenuhi komitmen	2000 izin	89.484.300	-		2200 izin	82.013.550		151.729.800		151.729.800		169,56%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penurunan tingkat pengaduan konsultasi dari tahun sebelumnya	30 Orang	60.457.098	42,37	21.184.900	30%	60.436.448		155.040.696		176.225.596		291,49%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Pelaksanaan Perizinan Oleh Pelaku Usaha sesuai Dengan Pedoman Dengan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	457.841.289		131.938.350	100%	659.249.019		0		131.938.350		28,82%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan	100%	457.841.289		131.938.350	100%	659.249.019		1.312.930.066		1.444.868.416		315,58%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	LKPM dan profil Pemantauan Perusahaan	500 Kegiatan Usaha	117.107.108	36,96	56.058.450	2 Dokumen	159.629.623		318.177.489		374.235.939		319,57%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bimtek	90 Pelaku Usaha	57.960.411	2,6	2.999.000	3 kali 90 Pelaku Usaha	115.262.146		168.074.730		171.073.730		295,16%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Terlaksananya Bimtek Tata Cara Pengisian LKPM Online								0		0		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepatuhan Terhadap ketentuan perizinan dan Non Perizinan	400 Kegiatan Usaha	282.773.770	30,17	72.880.900	380 Pelaku Usaha	384.357.250		826.677.847		899.558.747		318,12%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8 Dokumen	47.264.133		29.118.400	100%	47.222.759		135.989.067		165.107.467		349,33%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kota	8 Dokumen	47.264.133		29.118.400	100%	47.222.759		135.989.067		165.107.467		349,33%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan dan Non Perizinan pada Tingkat Kota	8 Dokumen	47.264.133	44,12	29.118.400	5000 Izin	47.222.759		135.989.067		165.107.467		349,33%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
<b>BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	5.229.327.667		4.877.530.477	B	4.944.185.204		11.169.709.251		16.047.239.728		306,87%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69				68,5			0		0		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran</b>	4 Laporan	35.206.122	100%	33.000.787	4 Laporan	34.000.007		63.107.000		96.107.787		272,99%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.549.670	2 Dokumen	1.999.800	2 Dokumen	1.999.987		7.406.000		9.405.800		368,90%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.656.452	1 Dokumen	1.999.987	2 Laporan	1.999.987		7.426.000		9.425.987		354,83%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	1 Tahun	29.001.000	4 Laporan	30.000.000		48.275.000		77.276.000		257,59%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan</b>	6 Laporan	4.166.539.123	1	3.905.152.804	6 Laporan	4.213.752.527		9.754.989.801		13.660.142.605		327,85%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/Bulan	3.673.193.379	1 Tahun	3.292.672.154	34 Orang/Bulan	3.595.889.897		8.428.476.001		11.721.148.155		319,10%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	475.961.590	1 Tahun	602.355.600	12 Dokumen	606.162.590		1.307.271.300		1.909.626.900		401,21%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	7.385.940	6 Dokumen	4.996.900	6 Laporan	5.700.200		7.590.200		12.587.100		170,42%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	9.998.214	5 Dokumen	5.128.150	5 Laporan	5.999.840		11.652.300		16.780.450		167,83%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum</b>	4 Laporan	507.607.899	1	215.415.539	4 Laporan	250.199.955		517.991.967		733.407.506		144,48%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	15.030.275	1 Tahun	25.189.200	4 Paket	15.000.000		38.311.900		63.501.100		422,49%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	71.918.456	1 Tahun	54.881.400	7 Paket	61.999.955		88.221.900		143.103.300		198,98%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	250.000.000	1 Tahun	135.344.939	4 Laporan	173.200.000		391.458.167		526.803.106		210,72%	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Rutin Perkantoran	12 Laporan	161.200.000	1	77.920.047	12 Laporan		243.633.383		321.553.430		199,47%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	125.000.000	3 Paket	60.620.047	12 Laporan	122.000.000		211.873.383		272.493.430	217,99%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 Laporan	36.200.000	1 Tahun	17.300.000	4 Laporan	37.260.000		31.760.000		49.060.000	135,52%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan dan Kendaraan Dinas	20 Unit	278.654.523	100%	254.878.800	20 Unit		568.987.100		823.865.900		295,66%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala, Rehabilitasi Sedang/Berat, STNK Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit	218.000.000	19 Unit	179.806.000	20 Unit	195.399.550		404.952.100		584.758.100	268,24%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	60.654.523	1 Tahun	75.072.800	1 Unit	91.573.165		164.035.000		239.107.800	394,21%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Persentase OKP yang Aktif</b>	93%		66%		86%		3.222.820.280		4.187.677.180		266,56%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	<b>Persentase Pemuda Pelopor</b>	83%	1.571.001.500	70%	964.856.900	75%	1.523.330.000	0	0	0	#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	<b>Persentase Wirausaha Muda Pemula</b>	90%		77%		78%		0	0	0	#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemuda Pelopor dan Wirausaha Muda Pemula</b>	117 Orang	1.521.001.500	72%	914.856.900	117 Orang	1.373.330.000		2.772.820.280		3.687.677.180	242,45%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Kapasitas DayaSaing Wirausaha PemulaKabupaten/Kota dari SeluruhKecamatan	50 Orang	23.010.000	1 Kegiatan	39.959.000	100 Orang	58.910.000		202.188.000		242.147.000	1052,36%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana AksiDaerah/RAD TingkatKabupaten/Kota	1 Dokumen	87.627.000	1 Kegiatan	18.274.000	1 Dokumen	95.635.000		183.325.000		201.599.000	230,06%	Dinas Pemuda dan Olahraga	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari SeluruhKecamatan	11 Orang	68.250.000	-		11 Orang	47.400.000		47.400.000		47.400.000		69,45%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	56 Orang	1.342.114.500	-		56 Orang	1.171.385.000		2.339.907.280		2.339.907.280		174,34%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OKP yang Aktif</b>	1 Dokumen	50.000.000	100%	50.000.000	1 Dokumen			450.000.000		500.000.000		1000,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000		450.000.000		500.000.000		1000,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga</b>	87%		31%		62%			20.655.422.932		26.642.347.182		261,08%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<b>Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi</b>	82%	10.204.625.000	78%	5.986.924.250	80%	6.197.379.180		0		0		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Pendidikan</b>	69%	402.475.000	100%	598.921.350	65%	411.076.680		735.859.400		1.334.780.750		331,64%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	3 Unit	402.475.000	5 Paket	598.921.350	3 Unit	411.076.680		735.859.400		1.334.780.750		331,64%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina</b>	134 Orang	2.707.295.000	81%	621.483.600	129 Orang	1.325.792.500		2.523.143.032		3.144.626.632		116,15%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	864.850.000	3 Kegiatan	538.061.200	5 Pelatda	529.097.500		690.240.832		1.228.302.032		142,02%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	134 Orang	335.095.000	2 Kegiatan	51.155.400	129 Orang	796.695.000		1.426.052.200		1.477.207.600		440,83%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	Orang	Rp 1.500.000.000	-	Rp -	166 Orang	Rp406.850.000							
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	2 Dokumen	6.800.000.000	100%	4.497.239.300	2 Dokumen	4.300.000.000		17.122.598.500		21.619.837.800		317,94%	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	6.800.000.000	2 Paket	4.497.239.300	2 Dokumen	4.300.000.000		17.122.598.500		21.619.837.800		317,94%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah Masyarakat Gemar Berolahraga</b>	3 Lokasi	172.260.000	76%	44.880.000	3 Lokasi			273.822.000		318.702.000		185,01%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tersedianya Olahraga Bagi Masyarakat	3 Dokumen	172.260.000	1 Kegiatan	44.880.000	3 Dokumen	160.510.000		273.822.000		318.702.000		185,01%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Persentase Gudup Yang Dibina</b>	80%	1.302.045.833	26%	1.221.335.400	50%	1.157.005.616		3.623.277.501		4.844.612.901		372,08%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Jumlah Gudup yang Dibina</b>	770 Orang	1.302.045.833	1	1.221.335.400	450 Orang			3.623.277.501		4.844.612.901		372,08%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Tersedianya Database Kepramukaan	1 Dokumen	155.357.100	1 Dokumen	16.784.500	1 Dokumen	66.156.200		159.274.676		176.059.176		113,33%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	170 Organisasi	929.155.469	1 Kegiatan	1.130.000.000	150 Organisasi	867.064.163		3.212.709.629		4.342.709.629		467,38%	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan yang Mendapat Pembinaan	100 Orang	217.533.264	2 Kegiatan	74.550.900	100 Orang	223.785.253		251.293.196		325.844.096		149,79%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan</b>	9,01%	853.117.720	2,32%	908.019.301	7,38%	856.770.613		811.837.766		1.719.857.067		201,60%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengembangan Aplikasi dan Pemanfaatan ijambikota</b>	50336 Pengunjung	652.229.109	14239 Pengunjung	717.602.162	40000 Pengunjung	674.144.819		629.254.219		1.346.856.381		206,50%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	99 Perpustakaan	54.025.103	161 Perpustakaan	34.169.853	90 Perpustakaan	67.264.381		51.664.381		85.834.234		158,88%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Yang Diikuti Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	2 Bimtek	41.228.825	2Bimtek	26.739.512	2bimtek	34.597.619		31.097.619		57.837.131		140,28%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka Yang Datang ke Perpustakaan	50336 Pengunjung	404.031.848	14239 Pengunjung	379.004.080	45.336 Pengunjung	467.425.656		445.254.556		824.258.636		204,01%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Buku Yang Diolah	900 Eks	52.714.299	1279 buku	41.356.120	825 eks	95.238.845		95.219.345		136.575.465		259,09%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan dan Pustakawan dan Pustakawan	1 Laporan	5.408.480	1 laporan	3.252.060	1 Laporan	9.618.318		6.018.318		9.270.378		171,40%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Indeks Baca Masyarakat Kota Jambi</b>	0.9%	200.888.611	0.9%	190.417.139	32.5%	182.625.794		182.583.547		373.000.686		185,68%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi	10 Kali Sosialisasi	79.248.183	6 Kali Sosialisasi	44.240.950	7 Kali Sosialisasi	72.043.751		72.003.750		116.244.700		146,68%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Penghargaan	5 Penghargaan	91.646.281	3 Penghargaan	125.149.246	3 Penghargaan	83.314.684		83.314.684		208.463.930		227,47%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah literasi inklusi sosialisasi	3 Kegiatan	29.994.147	2 Kegiatan	12.477.359	2 Kegiatan	12.477.359		27.265.113		48.292.056		161,00%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	2 Naskah	117.664.141	1 Naskah	36.888.330	2 Naskah	109.214.030		109.319.515		146.207.845		124,26%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Melestarikan Naskah Kuno	2 Naskah	23.400.715	1 Naskah	14.311.285	1 kegiatan	21.273.120		17.398.105		31.709.390		135,51%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	jumlah sosialisasi tentang pelestarian Naskah Kuno	2 Kegiatan Sosialisasi	23.400.715	1 Kegiatan Sosialisasi	14.311.285	1 Kegiatan Sosialisasi	21.273.120		17.398.105		31.709.390		135,51%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	500 Buku/Eks	94.263.426	66 Buku/Eks	22.577.045	83 Buku/Eks	87.940.910		91.921.410		114.498.455		121,47%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Buku dengan Konten Etnis Budaya Nusantara	160 Eks	18.652.273	123 Buku/Eks	16.314.295	83 Buku/Eks	87.940.910		91.921.410		108.235.705		580,28%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	8.741.658.815	100%	6.938.699.827	100%	6.863.758.750		7.146.772.242		14.085.472.069		161,13%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Sakip	80%	75.915.107	80%	53.882.584	80%	70.512.500		70.049.119		123.931.703		163,25%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.465.147	3 Dokumen	51.569.784	11 Dokumen	67.494.712		67.181.422		118.751.206		181,40%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	5Laporan	3.017.788			5laporan	3.017.788				2.867.697		95,03%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	6.762.049.426	100%	5.339.771.138	100%			5.183.109.325		10.522.880.463		155,62%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	6.488.252.650	50 Orang	5.098.985.209	50 Orang	4.653.551.899		4.926.798.365		10.025.783.574		154,52%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang/Jasa	35 Orang	271.927.568	32 Orang	239.681.331	32 Orang	266.171.680				254.611.680		494.293.011	181,77%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Semesteran	3 Dokumen	1.869.208	3 Dokumen	1.104.598	3 Dokumen	1.699.280				1.699.280		2.803.878	150,00%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	132.127.180	100%	79.678.800	100%	127.683.800		101.488.800		181.167.600		137,12%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	100Stel	75.000.000	90Stel	62.964.000	100Stel	75.000.000				65.934.000		128.898.000	171,86%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	2Orang	39.565.900	0Orang	0	4Orang	52.683.800				35.554.800		35.554.800	89,86%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	401.175.465	100%	233.740.218	100%			610.547.738		844.287.956		210,45%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	20Item	27.474.844	21Item	12.499.278	21Item	23.277.826		23.447.926		35.947.204		130,84%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor	54item	58.018.818	54item	53.833.340	54item	188.264.510		287.584.550		341.417.890		588,46%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuma harian	5item	5.879.500	5item	3.732.000	5item	5.345.000		5.345.000		9.077.000		154,38%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	31612lembar	24.187.803	28886Lembar	14.044.300	28104lembar	21.988.912		21.322.412		35.366.712		146,22%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1Tahun	259.000.000	1Tahun	133.951.300	kaliTahun	283.195.000		272.847.850		406.799.150		157,07%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	622.043.280	100%	428.142.761	100%			625.774.845		1.053.917.606		169,43%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	435Lembar	63.970.280	565Lembar	24.834.800	435 Lembar	58.904.800		58.954.800		83.789.600		130,98%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	4Item	450.480.000	4item	299.618.961	4item	450.480.000		455.679.045		755.298.006		167,67%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3Item	31.669.000	3Item	24.015.000	3Item	28.790.000		31.217.000		55.232.000		174,40%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	5Orang	75.924.000	5Orang	79.674.000	5Orang	79.674.000		79.924.000		159.598.000		210,21%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	603.903.397	100%	523.037.276	100%			518.852.735		1.041.890.011		172,53%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7unit	173.211.600	7unit	137.629.460	7unit	173.211.600		147.859.850		285.489.310		164,82%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18unit	210.054.200	18unit	163.777.675	18unit	210.054.200		143.704.200		307.481.875		146,38%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2Item	7.645.597	2Item	6.950.531	2Item	6.950.543		6.950.485		13.901.016		181,82%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor	1Paket	212.992.000	1Paket	214.679.610	1Paket	214.003.200		220.338.200		435.017.810		204,24%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Arsip yang Bernilai Guna Tinggi</b>	79%	881.835.037	54%	676.469.899	60%			714.266.086		1.390.735.985		157,71%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip yang Terselamatkan</b>	5OPD	138.524.319	49OPD	58.638.287	5OPD			85.440.007		144.078.294		104,01%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan/Monitoring Arsip Dinamis	5OPD	138.524.319	88OPD	58.638.287	5OPD	138.524.447		85.440.007		144.078.294		104,01%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Inaktif yang Terkelola	1200Berkas	396.910.241	9018Berkas	326.209.820	1200Berkas			306.593.530		632.803.350		159,43%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang Terselamatkan	1200Berkas	396.910.241	9018Berkas	326.209.820	1200Berkas	309.744.200		306.593.530		632.803.350		159,43%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Arsip Dinamis, Seminar Storyline Kegiatan dan Penerapan Aplikasi SIKD	1Dokumen	346.400.477	1Dokumen	291.621.792	1Dokumen			322.232.549		613.854.341		177,21%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN  Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota													
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Buku Storyline Sejarah Kota Jambi	1Buku	167.941.608	0Buku	45.026.700	1Buku dan OPD	153.461.525		167.331.255		212.357.955		126,45%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Arsip Dinamis pada PD/Lembaga	21Lembaga	178.458.869	21Lembaga	246.595.092	26Lembaga	226.998.812		154.901.294		401.496.386		224,98%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya	88%	321.841.358	37%	134.277.247	68%	283.332.444		252.739.654		387.016.901		120,25%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang akan Dimusnahkan Dibawah 10 Tahun	1000Berkas	43.228.863	1178Berkas	132.196.333	1000Berkas	39.298.955		13.078.955		145.275.288		336,06%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dimusnahkan di Bawah 10 Tahun	1000Berkas	15.267.272	1178Berkas	127.396.528	1000Berkas	13.879.338		9.364.338		136.760.866		895,78%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Yang Dimusnahkan di Bawah 10 Tahun	1000Berkas	27.961.591	2238Berkas	4.799.805	1000Berkas	25.419.617		3.714.617		8.514.422		30,45%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Arsip yang Diserahkan dan Dimusnahkan</b>	1000Berkas	256.915.875	0Berkas	0	1000OPD			188.209.309		188.209.309		73,26%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang Diserahkan dan Dimusnahkan	1000Berkas	256.915.875	0Berkas	0	1000Berkas	224.309.484		188.209.309		188.209.309		73,26%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Arsip yang Autentikasi</b>	200Berkas	21.696.620	200Berkas	2.080.914	200Berkas			51.451.390		53.532.304		246,73%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Yang di autentikasi	200Berkas	21.696.620	200Berkas	2.080.914	200Berkas	19.724.005		51.451.390		53.532.304		246,73%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip</b>	1izin	14.184.830			1izin	12.895.179		7.482.679		7.482.679		52,75%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>Izin Penggunaan Arsip</b>	1izin	14.184.830			1izin	12.895.179		7.482.679		7.482.679		52,75%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	<b>Jumlah SOP</b>													
	<b>Jumlah Daftar Arsip Hasil penyediaan Daftar Dan penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup</b>													
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP/Perwal	1SOP	4.262.830			1SOP	3.875.179		3.875.179		3.875.179		90,91%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penyediaan Daftar	1Daftar	9.922.000			1Daftar	9.020.000		3.607.500		3.607.500		36,36%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	-	5.530.736.317		4.369.488.342	60,03	5.158.035.410		4.890.750.065		9.260.238.407		167,43%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	100%	10.989.055	98%	9.840.050	75	9.824.650		7.166.550		17.006.600		154,76%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	10.989.055	98%	9.840.050	2 Dok	9.824.650		7.166.550		17.006.600		154,76%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan</b>	100%	3.966.185.322	96%	3.353.634.325	100%	3.857.774.478		3.729.149.761		7.082.784.086		178,58%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.478.616.848	95%	2.937.874.149	29 Org	3.421.975.788		3.309.872.261		6.247.746.410		179,60%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	60 orang	480.969.600	99%	409.761.200	35 Org	429.678.400		414.229.600		823.990.800		171,32%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	6.598.874	100%	5.998.976	1 Dok	6.120.290		5.047.900		11.046.876		167,41%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	62.500.000	71%	39.300.000	100%	64.000.000		48.000.000		87.300.000		139,68%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	53,26%	37.500.000	50 Stel	34.300.000	52 Stel	39.000.000		37.350.000		71.650.000		191,07%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan	5 Orang	25.000.000	3 Kali	5.000.000	10 Kali	25.000.000		10.650.000		15.650.000		62,60%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum	100%	601.412.340	77%	249.910.710	100%	647.615.477		596.778.299		846.689.009		140,78%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, SDA dan Listrik	209 buah/pcs	16.497.140	21 Unit	8.339.900	25 Unit	7.126.680		5.747.400		14.087.300		85,39%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 Org	225.000.000	79%	120.296.650	2 org	297.898.797		276.282.209		396.578.859		176,26%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah Jenis Barang Habis Pakai	1150				10362 bh			0		0	#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	buah							0		0	#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	33.576 lbr	18.658.200	79%	13.430.730	20.143 lb	22.583.000		17.644.500		31.075.230		166,55%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	1.220 ktk	33.000.000	91%	27.210.000	1980 ktk	11.850.000		6.525.000		33.735.000		102,23%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Kali/hari	308.257.000	74%	80.633.430	31 kali	312.207.000		290.579.190		371.212.620		120,42%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi	100%	99.720.000	96%	75.760.308	100%	83.507.805		75.988.355		151.748.663		152,17%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	100%	99.720.000	96%	75.760.308	552.900 MB 1310 M3 24.000 Kwh	83.507.805		75.988.355		151.748.663		152,17%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah Jasa Listrik								0		0		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah Jasa Sumberdaya Air								0		0		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah Jasa Telepon								0		0		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administari umum	100%	339.929.600	88%	343.325.749	100%	495.313.000		433.667.100		776.992.849		228,57%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional untuk Lapangan	26 Unit	324.803.600	84%	230.789.649	25 Unit	291.276.000		249.672.700		480.462.349		147,92%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20 Unit	15.126.000	37 Unit	10.307.000	37 Unit	26.037.000		7.940.000		18.247.000		120,63%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	1 Unit	102.229.100	1 Unit	178.000.000		176.054.400		278.283.500		#VALUE!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase Pengembangan Kebudayaan</b>	35%	1.125.617.972	38%	375.417.640	100%	949.199.222		825.818.112		1.201.235.752		106,72%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota</b>	35%	965.617.972	32%	314.828.520	35%	825.186.795		708.954.542		1.023.783.062		106,02%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Masyarakat Pelaku Seni dan Budaya, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dilakukan Pembinaan	35 kali	965.617.972	37%	314.828.520	30 Kali	825.186.795		708.954.542		1.023.783.062		106,02%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pembinaan lembaga adat</b>	35%	160.000.000	35%	60.589.120	35%	124.012.427		116.863.570		177.452.690		110,91%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah orang yang dilatih untuk masyarakat/lembaga adat	80 Kelompok	80.000.000	50 Org	26.315.820	50 Org	76.996.169		66.406.790		92.722.610		115,90%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	80 Orang	80.000.000	100 Org	34.273.300	100 Org	47.016.258		46.476.780		80.750.080		100,94%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	35%	48.875.530	94%	141.077.856	100%	97.296.190		96.535.190		237.613.046		486,16%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat kesenian daerah kota yang dibina</b>	35%	48.875.530	35%	141.077.856	35%	97.296.190		96.535.190		237.613.046		486,16%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	jumlah pelatihan SDM kesenian tradisional yang terlatih	100 org	28.814.500	100 Org	70.751.013	100 Org	97.296.190		96.535.190		167.286.203		580,56%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi</b>	35%	3.848.889.142	86%	21.376.033	100%	121.404.970		72.146.914		93.522.947		2,43%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sejarah Kota Jambi yang Dibina</b>	35%	1.963.188.889	86%	21.376.033	35%	121.404.970		72.146.914		93.522.947		4,76%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah kota jambi yang dapat diperdayakan	50 orang	27.488.637	50 Org	21.376.033	50 Org	83.485.530		64.196.914		85.572.947		311,30%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah akses data dan informasi sejarah	50 Orang	50.000.000	-	-		37.919.440		7.950.000		7.950.000		15,90%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI POLA KONSUMSI MASYARAKAT	1%	1.200.000.000	37,5 %	463.369.225	100%	436.442.814		438.372.093		901.741.318		75,15%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	100%	600.000.000	100%	234.441.780	100%	108.126.180		107.978.907		342.420.687		57,07%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	12	600.000.000	0	234.441.780	100%	108.126.180		107.978.907		342.420.687		57,07%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	37%	300.000.000	17,50%	89.054.985	100%	113.718.000		110.485.900		199.540.885		66,51%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	12 TON	300.000.000	10.505 Kg	89.054.985	10.000 Kg	110.486.590		110.485.900		199.540.885		66,51%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	100%	300.000.000	100%	139.872.460	100%	214.598.634		219.907.286		359.779.746		119,93%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Analisis Pola Konsumsi Pangan Kota Jambi						57.711.460		0		57.711.460		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Percontohan Pekarangan Kelompok Wanita Tani	7 KWT	200.000.000	5 KWT		5 Laporan			219.907.286		302.068.286		151,03%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sosialisasi B2SA dan Pangan Lokal	2 kali		2 Kali	82.161.000	2 kali	224.113.380		0		82.161.000		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan pangan	80%	225.000.000	3%	64.661.540	60%	90.916.110		96.687.852		161.349.392		71,71%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan pembinaan Demapan	20%	190.000.000	10%	64.661.540	2%	98.996.110		96.687.852		161.349.392		84,92%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan dan pembinaan Demapan	8 Kelurahan	160.000.000	4 Kelurahan	64.661.540	4 Kelurahan	98.996.110		96.687.852		161.349.392		100,84%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PENINGKATAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR DAERAH								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tingkat Keamanan Pangan Segar	100%	2.004.000.000	78,25%	158.040.840	100%	493.154.756		489.393.158		647.433.998		32,31%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	1	-	97,46%	158.040.840	100%	493.154.756		489.393.158		647.433.998		#VALUE!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya jejaring keamanan pangan daerah (JKPD)	2 Kecamatan	-		100.239.640	2 Kecamatan	92.809.850		90.594.500		190.834.140		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tersedianya Petugas Pengambil Contoh (PPC)	44 Orang		11 Orang		22 Orang			90.594.500		90.594.500		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pembentukan satgas pangan	-		1 TIM		1 TIM			90.594.500		90.594.500		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT yang diregistrasi	5 komoditi				3 Komoditi			42.913.658		42.913.658		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah PSAT yang direkomendasi	3 komoditi				3 Komoditi	43.557.606		0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah PSAT yang disertifikasi	7 komoditi				5 Sertifikasi			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan bahan/alat kedokteran/laboratorium	1 Paket		1 Paket		1 Paket			355.885.000		413.686.200		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penyediaan Reagent	650 Regent		250 Regent	57.801.200	450 sampel	356.787.300		0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sertifikasi komoditi pangan prima 3	5 Sampel		8 Sampel		5 Komoditi			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata</b>	25%	1.885.700.252	24%	977.430.730	30%	1.033.841.064		804.800.790		1.782.231.520		94,51%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota</b>	25%	1.373.596.128		602.244.000	100%	716.389.442		622.616.990		1.224.860.990		89,17%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Jambi	1 Dok.	145.418.128	1 Dok	101.157.300	1 Dok	80.258.000		75.706.800		176.864.100		121,62%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Jambi	6 Keg.	1.182.720.000	2 Keg	465.898.000	5 Keg	599.449.382		531.408.240		997.306.240		84,32%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	12 kali	45.458.000	12 Kali	35.188.700	12 Kali	36.682.060		15.501.950		50.690.650		111,51%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis yang ditetapkan</b>	25%	285.967.771	87%	249.029.160	100%	111.156.022		67.139.250		316.168.410		110,56%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	SK Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Kawasan	19.200.000	1 Kws	44.615.260	1 Kws	33.090.870		1.140.550		45.755.810		238,31%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibina	7 kelompok	170.367.771	81%	125.892.600	7 Klp	78.065.152		65.998.700		191.891.300		112,63%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	35%	97.350.015	91%	80.610.850	100%	89.275.650		42.612.800		123.223.650		126,58%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	2 kampung Wisata	97.350.015	40 Org	80.610.850	40 Org	44.212.150		42.612.800		123.223.650		126,58%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kota	25%	128.786.338	47%	45.546.720	100%	117.019.950		72.431.750		117.978.470		91,61%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Kota	100 kali	98.268.338	48 Kali	45.546.720	100 Kali	89.275.650		54.441.150		99.987.870		101,75%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata	50 orang	30.518.000	0%	-	150 Org	27.744.300		17.990.600		17.990.600		58,95%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Cakupan Pemasaran Pariwisata</b>	25%	1.447.000.000	30%	835.614.242	30%	1.185.940.647		1.124.742.200		1.960.356.442		135,48%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata</b>	25%	1.447.000.000	62%	835.614.242	100%	1.185.940.647		1.124.742.200		1.960.356.442		135,48%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata Daerah	4 keg.	1.160.000.000	98%	689.027.852	4 Keg	963.129.960		947.234.612		1.636.262.464		141,06%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Pariwisata yang disediakan	2 Dok	147.000.000	96%	137.902.500	3 Media	113.319.297		83.127.826		221.030.326		150,36%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	1 Dok.	140.000.000	44%	8.683.890	1 Dok	109.491.390		94.379.762		103.063.652		73,62%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	20%	478.879.390	35%	292.310.723	35%	1.038.998.820		1.008.632.161		1.300.942.884		271,66%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata ekonomi kreatif tingkat dasar yang dapat dilaksanakan</b>	20%	478.879.390	93%	292.310.723	100%	1.038.998.820		1.008.632.161		1.300.942.884		271,66%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	40 orang	93.304.500	30 Org	56.814.780	30 Org	83.354.500		81.841.800		138.656.580		148,61%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan atau Siswa)	100 orang	80.574.890	100 Org	126.730.453	100 Org	81.945.960		72.437.341		199.167.794		247,18%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang Pariwisata yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	80 orang	170.000.000	96%	108.765.490	80 Org	160.780.850		158.588.250		267.353.740		157,27%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Usaha Kuliner	Jumlah Peserta Festival dan Peserta Usaha Kuliner	50 orang	135.000.000	-	-	80 Org	712.917.510		695.764.770		695.764.770		515,38%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi Perikanan tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai Danau dan Rawa</b>	1%	85.000.000	628,5 Ton	43.646.054	100%	73.255.200		73.105.200		116.751.254		137,35%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	<b>Jumlah sarana usaha perikanan tangkap</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah sarana usaha perikanan tangkap</b>	100%	85.000.000	25,31%	43.646.054	100%	73.255.200		73.105.200		116.751.254		137,35%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Budidaya	1 Paket	85.000.000	24.500 Ekor	43.646.054	32 Unit	73.255.200		73.105.200		116.751.254		137,35%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah pengembangan budidaya ikan kecil</b>	3%	400.000.000	2.157,37 ton	99.062.164	3%	439.125.881		434.693.661		533.755.825		133,44%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Kecil</b>	3%	120.000.000	3%	78.714.264	100%	150.211.949		147.914.815		226.629.079		188,86%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah sampel pengujian penyakit ikan	3 kplk	120.000.000	3 kplk	150.261.949	13 kplk	150.211.949		147.914.815		298.176.764		248,48%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah sampel pengujian penyakit ikan</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	<b>Produksi Benih di UPTD PBAT</b>	1	280.000.000	76,05%	1.597.581.051	100%	288.913.932		286.778.846		1.884.359.897		672,99%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Benih UPTD PBAT	1224000 ekor	220.000.000	1.351.000	134.180.401	1.200.000 Ekor	236.986.132		235.264.046		369.444.447		167,93%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Pengujian Penyakit Ikan	24 Sampel	60.000.000	24 Sampel	20.347.900	24 Sampel	51.927.800		51.514.800		71.862.700		119,77%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Produksi produk Perikanan bernilai tambah/produksi Olahan Hasil Perikanan</b>	1%	135.000.000	1.557 ton	93.655.530	100%	97.214.300		95.784.221		189.439.751		140,33%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terfasilitasi sarana dan prasarana	1%		25,10%	93.655.530	1%	97.214.300		95.784.221		189.439.751		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Ikan konsumsi	2 kplk		185 Orang	93.655.530	75	97.214.300		95.784.221		189.439.751		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terfasilitasi sarana dan prasarana								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan promosi dan lomba pengolahan hasil perikanan								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	14.802.539.712	100%	13.322.198.727	100%	14.802.539.712		13.179.678.220		26.501.876.947		179,04%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat daerah Dalam Dokumen Perencanaan	100%	87.400.000	100%	98.503.000	100%	87.400.000		83.429.459		181.932.459		208,16%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	69.400.000	10 Dokumen	65.598.000	10 Dokumen	69.400.000		66.704.459		132.302.459		190,64%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen			16.725.000		49.630.000		275,72%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	12 Bulan	18.000.000	12 bulan	32.905.000	12 Bulan	18.000.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	100%	12.170.263.404	1 Dokumen	11.068.278.319	100%	12.170.263.404		11.011.926.814		22.080.205.133		181,43%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji	118 Orang		118 Orang		118 Orang			10.534.999.214		21.121.030.683		181,53%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tunjangan ASN	328 Jiwa	11.634.814.804	328 Jiwa	10.586.031.469	328 Jiwa	11.634.814.804		0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	50 Orang	525.323.600	50 Orang	466.276.800	50 Orang	525.323.600		469.277.600		935.554.400		178,09%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Dokumen	10.125.000	1 Dokumen	15.970.050	1 Dokumen	10.125.000		7.650.000		23.620.050		233,28%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.800.000	100%	8.085.000	100%	7.800.000		4.800.000		12.885.000		165,19%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD yang diawasi dan Laporan Aset Bulanan	12 laporan	7.800.000	12 laporan	8.085.000	12 laporan	7.800.000		4.800.000		12.885.000		165,19%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	319.840.000	100%	122.253.700	100%	319.840.000		309.103.480		431.357.180		134,87%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas (PDH), Satpam dan Petugas Kebersihan	185 Stell	136.750.000	153 Stell	61.145.000	185 Stell	136.750.000		132.498.480		193.643.480		141,60%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data ASN/Non ASN	12 kali	22.590.000	12 kali	24.341.900	12 kali	22.590.000		21.000.000		45.341.900		200,72%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pegawai	60 orang	22.850.000	60 orang	28.066.800	60 orang	22.850.000		21.300.000		49.366.800		216,05%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 Kali	12.750.000	3 Kali	5.700.000	3 Kali	12.750.000		12.115.000		17.815.000		139,73%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 kali	124.900.000	7 kali	3.000.000	7 kali	124.900.000		122.190.000		125.190.000		100,23%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	392.664.518	100%	185.711.140	100%	392.664.518		386.626.103		572.337.243		145,76%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen / instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	20 jenis	28.742.153	20 jenis	23.282.600	20 jenis	28.742.153		28.500.150		51.782.750		180,16%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	81.319.919	12 bln	80.239.390	12 bln	81.319.919		75.674.703		155.914.093		191,73%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	16 Jenis	32.602.446	16 Jenis	27.426.200	16 Jenis	32.602.446		32.451.250		59.877.450		183,66%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Penggandaan	34.000		34.000		34.000		0	0	#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	50 Kali	250.000.000	8 kali	54.762.950	50 Kali	250.000.000		250.000.000		304.762.950		121,91%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	104.071.740	100%	173.967.118	100%	104.071.740		64.258.300		238.225.418		228,91%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	100%	77.077.740	1 Paket	39.600.000	100%	77.077.740		55.082.300		94.682.300		122,84%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	100%	26.994.000	2 Paket	54.268.918	100%	26.994.000		9.176.000		63.444.918		235,03%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	-	1 Paket	80.098.200	1 Paket	-		0		80.098.200		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	821.327.368	100%	768.902.350	100%	821.327.368		755.053.924		1.523.956.274		185,55%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa pengiriman surat/dokumen penting				12.300.000				0		12.300.000		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	2 No Tlp	308.923.768	2 No Tlp	262.970.450	2 No Tlp	308.923.768		274.651.924		537.622.374		174,03%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Jasa Listrik	110.900 VA		110.900 VA		110.900 VA			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Jasa Sumber Daya Air	5 Rekening		5 Rekening		5 Rekening			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Jasa WIFI	80 Mbps		80 Mbps		80 Mbps			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 Orang	512.403.600	33 Orang	493.631.900	33 Orang	512.403.600		480.402.000		974.033.900		190,09%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	899.172.682	100%	896.498.100	100%	899.172.682		564.480.140		1.460.978.240		162,48%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK/KIR	33 Unit	596.725.382	33 Unit	658.022.900	33 Unit	596.725.382		507.245.140		1.165.268.040		195,28%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	65.967.300	1 Paket	31.234.000	12 Bulan	65.967.300		57.235.000		88.469.000		134,11%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	164.700.000	1 Paket	99.408.700	1 Paket	164.700.000		0		99.408.700		60,36%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehab pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Paket	71.780.000	1 Paket	107.832.500	1 Paket	71.780.000		0		107.832.500		150,23%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN</b>	20%	960.000.000	20%	289.014.340	5,6%	2.966.877.449		1.251.749.792		1.540.764.132		160,50%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian			8,60%	25.145.413	16%	60.449.600		60.398.000		85.543.413		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Inventarisasi dan Pendampingan Pemanfaatan Alsintan			10					60.398.000		85.543.413		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penataan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)			8	25.145.413	55 Laporan	60.449.600		0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pendampingan Penyaluran Pupuk dan Pestisida			5					0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan ketersediaan bibit unggul	100%	830.000.000	109,40%	428.794.793	100%	2.906.427.849		1.191.351.792		1.620.146.585		195,20%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Bibit Unggul dan Calon Pohon Induk	3600 Btg	300.000.000	3200 btg	164.402.495	3.000 Btg	190.299.574		190.059.239		354.461.734		118,15%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB)	60 ekor	250.000.000	60 Ekor	100.380.954	60 Ekor	121.625.114		118.525.130		218.906.084		87,56%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	4 jenis	280.000.000	4 Pkt (100%)	167.919.794	1 Dokumen	2.594.503.161		882.767.423		1.050.687.217		375,25%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN</b>	80%	85.000.000	20%	232.710.129	7,6%	70.000.000		69.597.000		302.307.129		355,66%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Screen House Hidroponik	-	-	14%	175.011.650	20%	70.000.000		69.597.000		244.608.650		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan Screen House Hidroponik	2 unit	85.000.000	4 Unit	111.338.500	20 Unit	70.000.000		69.597.000		180.935.500		212,87%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>PERSENTASE PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGUJIAN SAMPEL KESMAVET</b>								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal hewan yang ASUH	75%	669.000.000	20%	401.761.735	75%	929.957.165		857.843.634		1.259.605.369		188,28%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tervaksinnya hewan penular rabies	800 ekor	275.000.000	800 Ekor	142.365.860	800 Ekor	386.475.645		327.220.500		469.586.360		170,76%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sosialisasi Zoonosis	150 orang	200.000.000	150	118.545.000	150	129.055.840		117.938.200		236.483.200		118,24%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tervaksinasi Hewan Penular Rabies	800 dosis		800		800			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Pemeriksaan kesehatan hewan	3500 ekor	75.000.000	3.500	23.820.860	3.500	257.419.805		209.282.300		233.103.160		310,80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan jasa medik veteriner	100%	50.000.000	107,89	16.216.708	100%	76.149.607		74.932.370		91.149.078		182,30%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Medik Veteriner	11.960 ekor	50.000.000	30226 Ekor	79.517.176	11.880 Ekor	76.149.607		74.932.370		154.449.546		308,90%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian dan pemeriksaan sampel kesmavet	80 Sampel	164.000.000	80	95.060.050	75%	110.306.200		105.317.950		200.378.000		122,18%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengujian dan Pemeriksaan Sampel Kesmavet	80 Sampel	164.000.000	80	95.060.050	80	110.306.200		105.317.950		200.378.000		122,18%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan Pemotongan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH	80%	180.000.000	76,82 %	148.119.117	100%	357.025.713		350.372.814		498.491.931		276,94%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak	5400 ekor	180.000.000	3.995 Ekor	148.119.117	5.500 Ekor	357.025.713		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	-	-	95%				100%						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	LUASAN PENGENDALIAN OPT	90%	145.000.000	90%	75.508.216	90%	104.232.560		102.973.498		178.481.714		123,09%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase pertanaman Aman dari serangan OPT dan DPI (Dampak Perubahan Iklim)								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah luasan pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	20%	145.000.000	100%	75.508.216	100%	104.232.560		102.973.498		178.481.714		123,09%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pengendalian OPT Tanaman Pangan HortikulturaPerkebunan	25 Ha	145.000.000	25 Ha (95%)	75.508.216	25 Ha	104.232.560		102.973.498		178.481.714		123,09%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	2%	260.000.000			20%	413.336.845		389.310.193		389.310.193		149,73%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBINA								0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas/skor	195 KT	360.000.000			195 KT	413.336.845		389.310.193		389.310.193		108,14%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP berprestasi	3 BPP				3 Bpp	158.149.814		152.618.076		152.618.076		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah penyuluh berprestasi	14 Orang				14 Orang			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Keikutsertaan dalam hari Krida Pertanian, PENAS	-				20 Org	136.704.267		136.353.437		136.353.437		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani	-				294 Klpk			0		0		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana prasarana penyuluhan yang difasilitasi	-				22 Unit	60.240.957		59.245.823		59.245.823		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang yang diselenggarakan	-				18 Kali	58.241.807		41.092.857		41.092.857		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									0		0		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55,49	39.886.018.767	76,66%	8.104.925.140	100%	8.736.958.696		8.877.437.945		16.982.363.085		42,58%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	217.290.000	BB	49.877.281	BB	79.836.089		61.962.912		111.840.193		51,47%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	110.366.000	6	25.088.871	6	48.067.089		30.981.456		56.070.327		50,80%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	12	106.924.000	4	24.788.410	4	31.769.000		30.981.456		55.769.866		52,16%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	32.385.296.240	99,31%	7.090.035.885	100%	7.139.653.355		6.807.881.707		13.897.917.592		42,91%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	27.314.113.240	99,52%	6.811.701.595	72 ASN	6.971.955.605		6.517.666.607		13.329.368.202		48,80%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	100%	4.873.412.000	93,11%	228.976.000	29 Orang	287.156.300		240.481.000		469.457.000		9,63%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	9.950.000	64,44%	1.594.860	5 Dokumen	1.510.300		1.373.000		2.967.860		29,83%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	10.973.000	86,55%	2.379.920	72 Laporan	24.497.850		24.218.300		26.598.220		242,40%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	176.848.000	102,57%	45.383.510	12 laporan	24.414.800		24.142.800		69.526.310		39,31%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks reformasi birokrasi Perangkat Daerah</b>	55,44	907.550.000	87,90%	149.427.000	100%	170.000.000		170.529.000		319.956.000		35,25%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu dan Pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	100%	708.050.000	89,15%	142.637.000	191 Stell	202.125.000		161.359.000		303.996.000		42,93%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	199.500.000	67,90%	6.790.000	8 Orang	69.460.000		9.170.000		15.960.000		8,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	2.830.526.527	82,09%	406.698.600	100%	495.454.701		939.185.947		1.345.884.547		47,55%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	72.500.000	100,00%	7.858.840	6 Jenis	15.902.700		12.271.531		20.130.371		27,77%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.319.422.000	92,00%	295.322.425	4 Jenis 18 Jenis 1 Jenis 3 Buah 4 Roll 10 Unit 400 Paket	356.169.698		506.775.882		802.098.307		60,79%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	83.544.527	81,93%	17.153.938	3 Jenis	22.699.963		17.851.911		35.005.849		41,90%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	100%	118.060.000	80,14%	19.314.600	300 Bungkus 300 Kotak	4.500.000		1.620.000		20.934.600		17,73%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	1.237.000.000	55,16%	67.048.797	150 Dus 300 Kotak 350 Dus 400 Bungkus 1200 Kotak 85 Kali 1 Tahun	401.784.034		400.666.623		467.715.420		37,81%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	399.000.000			100%	97.161.630							Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	399.000.000			15	97.161.630							Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	1.741.020.344	72,89%	1.741.020.344	100%	436.345.951		202.967.331		1.943.987.675		111,66%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100%	84.053.144	86,50%	84.053.144	1 Tahun	22.187.168		10.904.710		94.957.854		112,97%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.664.100.000	73,42%	279.736.490	5 Titik 840 Mbps 198108 Kwh 5544 Kubik	339.500.000		362.842.668		642.579.158		38,61%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	137.660.000	58,59%	20.083.000	2 Unit 2 Unit 4 Unit 15 Unit 15 Unit 1 Unit 2 Jenis	25.800.000		24.295.000		44.378.000		32,24%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	1.659.280.000	21,86%	90.844.674	100%	415.668.600		393.231.031		484.075.705		29,17%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	1.470.780.000	90,64%	334.080.003	43 Kendaraan	369.878.138		353.429.811		687.509.814		46,74%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%	79.800.000	84,38%	16.876.600	43 Kendaraan	20.000.000		12.044.900		28.921.500		36,24%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	108.700.000	42,59%	11.531.500	46 Unit	27.074.300		27.756.320		39.287.820		36,14%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	181.970.000	98,80%	116.379.650	66,66%	117.797.684		75.727.400		192.107.050		105,57%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	50.244.000	101%	22.442.500	66,66%	22.190.776		20.779.800		43.222.300		86,02%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	174	50.244.000	38	22.442.500	58	26.051.300		20.779.800		43.222.300		86,02%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	31.726.000	103%	23.583.900	66,66%	22.975.822		25.532.800		49.116.700		154,82%	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	168	31.726.000	56	23.583.900	35	26.284.600		25.532.800		49.116.700		154,82%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>	<b>Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan</b>	100%	25.000.000	88,56%	13.691.800	66,66%	15.459.739		5.776.500		19.468.300		77,87%	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Penerbitan SIUP-MB Golongan B dan C	90	25.000.000	25	13.691.800	35	7.479.150		5.776.500		19.468.300		77,87%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan</b>	100%	75.000.000	99,11%	56.661.450	66,66%	57.171.347		23.638.300		80.299.750		107,07%	
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pelaku Usaha penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa	45	75.000.000	15	56.661.450	20	29.559.250		23.638.300		80.299.750		107,07%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	100%	2.850.000.000	97,01%	1.755.283.290	66,66%	1.809.364.398		1.530.979.350		3.286.262.640		115,31%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	100%	1.000.000.000	99,17%	365.215.870	66,66%	474.119.509		345.929.340		711.145.210		71,11%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan	12	650.000.000	8	137.830.050	5 Unit Pasar	359.969.410		233.250.450		371.080.500		57,09%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Perizinan Perpasaran Yang diterbitkan	8038	350.000.000	250	227.385.820	2819 Izin	114.150.099		112.678.890		340.064.710		97,16%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	100%	1.850.000.000	96,46%	1.390.067.420	66,66%	1.441.095.829		1.185.050.010		2.575.117.430		139,20%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	18	1.350.000.000	6	1.038.763.220	6 Unit Pasar	817.554.820		802.791.400		1.841.554.620		136,41%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Penerimaan Retribusi Dari Pemberdayaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.175.000.000	500.000.000	5.762.582.543	351.304.200	4.725.000.000	367.660.900		382.258.610		733.562.810		146,71%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting</b>	100%	1.156.565.000	102%	688.580.300	66,66%	672.438.941		953.395.550		1.641.975.850		141,97%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	1.156.565.000	102%	688.580.300	66,66%	672.438.941		950.695.550		1.639.275.850		141,74%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Bapokting pada Pelaku Usaha	243	231.565.000	53	59.324.950	53	121.089.207		118.877.950		178.202.900		76,96%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	42	925.000.000	42	629.255.350	14	624.984.700		831.817.600		1.461.072.950		157,95%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100	368.000.000	0		66,66	6.250.100		5.123.500		5.123.500		1,39%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memiliki Legalitas Perizinan	17	27.000.000	0		15	6.250.100		5.123.500		5.123.500		18,98%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase pengembangan ekspor</b>	100%	511.835.000	65,38%	58.892.350	58,33%	90.075.335		78.632.569		137.524.919		26,87%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan ekspor	100%	511.835.000	65,38%	58.892.350	58,33%	90.075.335		78.632.569		137.524.919		26,87%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	6	261.835.000	1	14.175.850	1	11.373.200		11.267.840		25.443.690		9,72%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaksanaan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3	250.000.000	1	44.716.500	1	57.874.400		67.364.729		112.081.229		44,83%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	100%	1.075.000.000	81,03%	104.143.616	79,49%	128.527.168		114.407.925		218.551.541		20,33%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	1.075.000.000	81,03%	104.143.616	79,49%	128.527.168		114.407.925		218.551.541		20,33%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/tera Ulang	13933	950.000.000	3977	92.596.016	4104	104.247.566		98.251.825		190.847.841		20,09%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang Dilakukan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	300	125.000.000	61	11.547.600	100	16.506.825		16.156.100		27.703.700		22,16%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri</b>	100%	3.111.000.000	74,14%	447.847.050	56,88%	604.034.948		925.135.127		1.372.982.177		44,13%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	100%	3.111.000.000	74,14%	447.847.050	56,88%	604.034.948		925.135.127		1.372.982.177		44,13%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30	3.111.000.000	8	447.847.050	8	796.192.789		882.183.573		1.330.030.623		42,75%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Kemitraan Usaha	5	150.000.000	0	-	1	12.856.690		12.717.900		12.717.900		8,48%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan	2	75.000.000	0	-	1	30.749.400		30.233.654		30.233.654		40,31%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>									0		0		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase perencanaan dan pembangunan industri</b>	100%	310.000.000	60,93%	290.656.180	66,66%	528.376.298		1.472.897.387		1.763.553.567		568,89%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perencanaan dan pembangunan industri</b>	100%	310.000.000	60,93%	290.656.180	66,66%	528.376.298		1.472.897.387		1.763.553.567		568,89%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	5	60.000.000	1	51.885.918	1	90.495.000		87.113.600		138.999.518		231,67%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Sumber Daya Industri	100	60.000.000	5	9.864.750	7	210.043.186		209.203.260		219.068.010		365,11%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	110	100.000.000	60	72.752.486	60	88.229.610		184.537.400		257.289.886		257,29%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	120	90.000.000	10	78.375.000	2	139.608.502		992.043.127		1.070.418.127		1189,35%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pengendalian izin usaha industri</b>	100%	274.474.494	96,16%	274.474.494	66,66%	63.644.234		22.625.200		297.099.694		108,24%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengendalian izin usaha industri</b>	100%	274.474.494	96,16%	274.474.494	66,66%	63.644.234		22.625.200		297.099.694		108,24%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	60	75.000.000	19	28.099.230	23	27.853.760		27.668.400		55.767.630		74,36%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) dalam memenuhi ketentuan perizinan	60	150.000.000	22	38.047.342	18	35.790.474		35.502.940		73.550.282		49,03%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase pengelolaan sistem informasi industri</b>	100%	295.000.000	92,62%	83.329.986	66,66%	48.592.985		47.969.030		131.299.016		44,51%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengelolaan sistem informasi industri</b>	100%	295.000.000	96,62%	83.329.986	66,66%	48.592.985		47.969.030		131.299.016		44,51%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan dan Analisis Data Industri Melalui Sistem SIINAS	16	120.000.000	1	31.173.640	4	24.672.755		24.507.350		55.680.990		46,40%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	16	175.000.000	4	52.156.346	3	23.920.230		23.461.680		75.618.026		43,21%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	38.338.922.731	100%	29.178.043.342	100%	38.960.766.728		36.383.026.398		65.561.069.740		171,00%	Sekretariat Daerah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	215.050.000	100%	111.957.090	100%	175.200.000		155.721.876		267.678.966		124,47%	Sekretariat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.000.000	3 Dokumen	51.208.005	3 Dokumen	70.100.000		69.252.844		120.460.849		136,89%	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	17.050.000	1 Dokumen	4.608.594	1 Dokumen	7.500.000		6.882.700		11.491.294		67,40%	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	3.582.501	1 Dokumen	7.500.000		6.964.000		10.546.501		95,88%	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	2.823.460	1 Dokumen	7.500.000		6.464.000		9.287.460		112,58%	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	8.250.000	1 Dokumen	2.859.980	1 Dokumen	7.500.000		7.016.600		9.876.580		119,72%	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen	82.500.000	2 Dokumen	46.874.550	2 Dokumen	75.100.000		59.141.732		106.016.282		128,50%	Sekretariat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	19.180.646.803	100%	13.944.810.894	100%	17.164.913.960		15.794.134.976		29.738.945.870		155,05%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	17.441.239.243	138 Orang	12.682.989.022	138 Orang/Bulan	15.515.995.760		14.329.968.807		27.012.957.829		154,88%	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi	250 Dokumen 98 Orang	1.512.963.100	250 Dokumen 98 Orang	1.149.330.180	250 Dokumen	1.448.868.200		1.284.918.730		2.434.248.910		160,89%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset Dan Pengadaan Barang/Jasa								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	4 Dokumen	220.000.000	4 Dokumen	112.491.692	4 Dokumen	200.050.000		179.247.439		291.739.131		132,61%	Sekretariat Daerah
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	187.000.000	100%	145.659.265	100%	170.100.000		140.886.750		286.546.015		153,23%	Sekretariat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	187.000.000	1 Laporan	145.659.265	1 Laporan	170.100.000		140.886.750		286.546.015		153,23%	Sekretariat Daerah
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	435.325.000	100%	48.800.000	100%	398.514.000		391.484.665		440.284.665		101,14%	Sekretariat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu	86 Stel	69.080.000	86 Stel	48.800.000	261 Paket	195.750.000		195.554.250		244.354.250		353,73%	Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	27 ASN	366.245.000	27 ASN	-	22 Orang	202.764.000		195.930.415		195.930.415		53,50%	Sekretariat Daerah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	3.317.129.050	100%	2.135.681.564	100%	4.365.819.550		3.831.104.259		5.966.785.823		179,88%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Elektronik	27 Komponen Listrik	109.998.934	27 Komponen Listrik	98.632.831	27 Paket	140.000.000		139.997.622		238.630.453		216,94%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan	47 Jenis 25 Jenis	119.990.126	47 Jenis 25 Jenis	97.781.933	47 Paket 25 Paket	136.281.050		130.853.270		228.635.203		190,55%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Perlengkapan Kantor								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	2 Unit 30 Jenis	165.385.000	2 Unit 30 Jenis	298.185.660	2 Paket 30 Paket	1.486.396.865		1.475.360.174		1.773.545.834		1072,37%	Sekretariat Daerah
	Jumlah peralatan rumah tangga, peralatankebersihan dan bahan pembersih rumah dinas KDH,WKDH dan SEKDA yang disediakan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Jenis	93.733.200	9 Jenis	72.215.200	9 Jenis	90.004.000							
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Jenis	2.127.856.500	3 Jenis	1.039.656.736	3 Laporan	1.995.088.135							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 ASN 5 kali	700.165.290	17 ASN 5 kali	529.209.204	17 Laporan 5 Laporan	518.049.500							
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	24.200.000	100%	1.100.880.000	100%	893.000.000		882.400.000		1.983.280.000		8195,37%	Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	24.200.000	1 Unit	1.100.880.000	1 Unit	893.000.000		882.400.000		1.983.280.000		8195,37%	Sekretariat Daerah
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	4.826.465.540	100%	4.259.831.708	100%	5.181.098.367		4.938.382.437		9.198.214.145		190,58%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat	12.000 Surat	517.753.280	12.000 Surat	466.400				347.870.000		740.506.000		143,02%	Sekretariat Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	70 Tagihan Telepon 700.000 VA	2.605.446.741	70 Laporan 700.000 Laporan 60000 Laporan	1.963.803.787	70 Laporan 700.000 Laporan 60000 Laporan	2.145.000.000		2.026.438.212		3.990.241.999		153,15%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Jasa Listrik								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Jasa Sumber Daya Air								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Genset Kantor	8.500 Liter 2184 Liter 60 Minggu 30 Jenis 4 Jenis 400 Papan 56 Orang 10 Jenis 1 Unit 20 Tabung 1 Unit 10 Tabung 4 Jenis 2 TV Kabel	1.703.265.519	8.500 Liter 2184 Liter 60 Minggu 30 Jenis 4 Jenis 400 Papan 56 Orang 10 Jenis 1 Unit 20 Tabung 1 Unit 10 Tabung 4 Jenis 2 TV Kabel	1.903.391.921	8.500 Laporan 2184 Laporan 60 Laporan 30 Laporan 4 Laporan 400 Laporan 56 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 20 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	2.655.531.967		2.564.074.225		4.467.466.146		262,29%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Bahan Bakar, Oli Mesin Pemotong Rumput								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Belanja Anggrek								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Belanja Kebersihan Kantor								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Jasa Publikasi								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Laundry, peralatan dan Perlengkapan Kantor								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Pemeliharaan Aquarium								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Perbaikan Mesin Genset								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Restribusi Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Sewa Meja, Kursi, Tenda, Alat Hiburan/Stand/Panggung, Tanaman Hias dan Alat Kerja								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah TV Kabel Sekretariat Daerah Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Peneliharaan Barang Milik Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	2.728.946.219	100%	2.960.450.525	100%	3.543.667.110		3.305.826.875		6.266.277.400		229,62%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2 Jenis	225.061.760	2 Jenis	193.899.471	2 Unit	240.401.600		198.145.085		392.044.556		174,19%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah STNK/KIR	120 Unit 114 Unit	1.890.907.039	120 Unit 114 Unit	1.803.281.654	120 Unit	2.163.197.750		2.039.410.507		3.842.692.161		203,22%	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah/Jabatan/Dinas	115 Unit 10 Jenis	227.700.000	115 Unit 10 Jenis	89.512.900	115 Unit 10 Unit	171.700.000		117.466.133		206.979.033		90,90%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Jasa Tenaga Kantor	2 Jenis 3 Unit 8006 M2	385.277.420	2 Jenis 3 Unit 8006 M2	873.756.500	2 Unit 3 Unit 8006 M2	968.367.760		950.805.150		1.824.561.650		473,57%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Pembayaran PBB Rumas Dinas KDH/WKDH,SEKDA								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	12 Bulan	909.960.119	12 Bulan	822.362.724	12 Bulan	856.036.472		850.109.122		1.672.471.846		183,80%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2 Orang	190.560.119	2 Orang	168.362.724	2 Orang/Bulan	173.236.472		167.309.122		335.671.846		176,15%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perengkapannya	16 Stel	59.400.000	16 Stel	54.000.000	16 Stel	82.800.000		82.800.000		136.800.000		230,30%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2 Orang	660.000.000	2 Orang	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000		600.000.000		1.200.000.000		181,82%	Sekretariat Daerah
Fasilitas Kerumahtangga Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.215.500.000	100%	1.316.070.510	100%	1.328.000.000		1.310.872.884		2.626.943.394		216,12%	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.215.500.000	2 Orang	1.316.070.510	2 Orang	1.328.000.000		1.310.872.884		2.626.943.394		216,12%	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	1.138.500.000	100%	963.553.856	100%	1.005.146.750		974.811.867		1.938.365.723		170,26%	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Kelembagaan	39 Perangkat Daerah	211.826.560	39 Perangkat Daerah	132.279.900	2 Dokumen	145.128.800		144.364.630		276.644.530		130,60%	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitasi Penerapan SP, SOP dan Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Perangkat Daerah	734.173.440	2 Laporan	726.815.656	2 Laporan	736.924.700		716.827.287		1.443.642.943		196,64%	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	1 Dokumen	192.500.000	2 Laporan	104.458.300	2 Laporan	123.093.250		113.619.950		218.078.250		113,29%	Sekretariat Daerah
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	4.160.200.000	100%	2.190.347.930	100%	4.735.306.991		4.657.399.809		6.847.747.739		164,60%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Keprotokolan	1000 Acara	713.442.400	1000 Acara	603.220.000	1000 Laporan	576.707.800		569.260.800		1.172.480.800		164,34%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Tugas Pimpinan	1000 Materi	3.190.457.600	1000 Materi	1.475.783.057	1000 Laporan	3.888.754.021		3.871.416.939		5.347.199.996		167,60%	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan	1000 Dokumentasi	256.300.000	1000 Dokumentasi	111.344.873	1000 Laporan	269.845.170		216.722.070		328.066.943		128,00%	Sekretariat Daerah
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti</b>	100%	29.192.832.680	100%	26.296.714.592	100%	26.511.730.716		25.809.319.312		52.106.033.904		178,49%	Sekretariat Daerah
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti</b>	100%	14.084.222.680	100%	12.601.423.428	100%	11.425.195.696		11.141.870.642		23.743.294.070		168,58%	Sekretariat Daerah
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan	11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Rapat Koordinasi	784.403.840	11 Kecamatan 11 Kecamatan 2 Rapat Koordinasi	342.963.714	2 Dokumen	1.360.708.764		1.140.002.240		1.482.965.954		189,06%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kelurahan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kota Jambi								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Penataan Batas Wilayah	10 Kelurahan 5 Persil	11.851.141.280	10 Kelurahan 5 Persil	10.648.354.775	15 Dokumen	8.840.508.071		8.789.907.540		19.438.262.315		164,02%	Sekretariat Daerah
	Tersedianya Lahan Milik Pemerintahan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Forkopimda	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1.448.677.560	3 Dokumen	1.610.104.939	3 Dokumen	1.223.978.861		1.211.960.862		2.822.065.801		194,80%	Sekretariat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Tersedianya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Tersedianya Buku Laporan SPM								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	12.559.470.000	100%	11.928.514.430	100%	12.710.838.680		12.410.965.445		24.339.479.875		193,79%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Kali	12.011.571.000	1 Kali	11.623.737.060	1 Dokumen	12.210.638.680		11.915.155.942		23.538.893.002		195,97%	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan UKS/M	1 Kali	280.742.000	1 Kali	113.652.000	1 Dokumen	250.100.000		246.062.503		359.714.503		128,13%	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Senam Kesegaran Jasmani, Rakor Penyalahgunaan Narkoba, Rakor Penanganan HIV & AIDS, Evaluasi P4GN	1 Kali	267.157.000	1 Dokumen	191.125.370	1 Dokumen	250.100.000		249.747.000		440.872.370		165,02%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	80%	1.603.140.000	80%	1.196.773.515	80%	1.383.693.260		1.351.608.417		2.548.381.932		158,96%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Fasilitasi Proses Pembentukan Produk Hukum	322 Produk Hukum	329.336.150	322 Produk Hukum	236.389.680	325 Dokumen	269.913.500		260.080.589		496.470.269		150,75%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Perkara	2 Perkara 4 Laporan RANHAM 10 Pertimbangan Hukum	797.740.350	2 Perkara 4 Laporan RANHAM 10 Pertimbangan Hukum	610.007.010	12 Kasus	744.298.260		735.599.375		1.345.606.385		168,68%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Pelaporan RANHAM dan Kota Peduli HAM								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Pertimbangan Hukum								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum	454 Dokumen 18 Kali	476.063.500	454 Dokumen 18 Kali	350.376.825	325 Dokumen	369.481.500		355.928.453		706.305.278		148,36%	Sekretariat Daerah
	Jumlah Penyuluhan Hukum								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	946.000.000	100%	570.003.219	100%	992.003.080		904.874.808		1.474.878.027		155,91%	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Rapat Brainstorming Kerjasama Dalam Negeri	1 Kali	375.020.580	30 Dokumen	251.592.476	30 Dokumen	432.213.380		407.552.701		659.145.177		175,76%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Rapat Inisiasi fasilitasi kerjasama dalam negeri								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Tersusunnya Dokumen NK dan MoU								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Tersusunnya Dokumen PKS dan RK								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terfasilitasinya Rapat Inisiasi Kerjasama Luar Negeri	6 Kali	350.580.560	8 Dokumen	196.959.595	8 Dokumen	348.968.200		294.011.073		490.970.668		140,05%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya English Class Training								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Rapat Brainstorming Kerjasama Luar Negeri								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pada Pelaksanaan NK, MoU dan PKS	1 Kali 2 Dokumen	220.398.860	1 Laporan	121.451.148	1 Laporan	210.821.500		203.311.034		324.762.182		147,35%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kerjasama								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Tersusunnya Dokumen Kerjasama								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan</b>	100%	3.700.399.693	100%	3.121.635.031	100%	1.941.259.344		1.890.588.335		5.012.223.366		135,45%	Sekretariat Daerah
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan</b>	100%	745.051.699	100%	437.570.792	100%	581.664.575		556.682.181		994.252.973		133,45%	Sekretariat Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kebijakan BLUD	11 Kali 1 Kali	266.793.560	11 Kali 1 Kali	120.982.640	4 Dokumen	185.228.887		183.753.215		304.735.855		114,22%	Sekretariat Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi kebijakan BLUD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya rapat koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi penyaluran tanggung jawab sosial (TJS) perusahaan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Monitoring Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Bersubsidi	12 Kali	198.137.886	12 Kali	139.102.368	4 Laporan	208.095.075		196.979.353		336.081.721		169,62%	Sekretariat Daerah
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Koordinasi, fasilitasi dan sarasehan pengembangan ekonomi mikro kecil	16 Kali	280.120.253	16 Kali	177.485.784	4 Dokumen	188.340.613		175.949.613		353.435.397		126,17%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan pemantauan realisasi tunggakan kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (KUPEM) dan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pembinaan ekonomi mikro kecil								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya sosialisasi ekonomi kerakyatan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengelolaan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	100%	71.060.000	100%	61.769.850	100%	80.372.100		80.162.100		141.931.950		199,74%	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Konsolidasi dan evaluasi Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	39 Perangkat Daerah 1 Dokumen	71.060.000	39 Laporan	61.769.850	39 Laporan	80.372.100		80.162.100		141.931.950		199,74%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya peningkatan sistem informasi evaluasi (Portal UKPBJ)								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan dan penggunaan sistem bagi pelaku usaha								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	100%	2.747.140.000	100%	2.577.942.220	100%	1.132.717.900		1.109.959.690		3.687.901.910		134,25%	Sekretariat Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya konsolidasi dan pengendalian pengadaan barang/jasa	39 Perangkat Daerah	2.177.343.850	39 Perangkat Daerah	2.205.365.900	300 Dokumen	461.128.750		445.677.685		2.651.043.585		121,76%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Koordinasi PBJ dan Pendampingan Dokumen Perencanaan Pengadaan PBJ OPD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya pembahasan/coaching regulasi pengadaan barang/jasa dan aturan terkait								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Tender OPD, Pemantauan/Evaluasi dan pembuktian kualifikasi								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tercapainya peningkatan kompetensi pengelola LPSE sesuai standart	300 Penyedia 17 Dokumen 30%	266.148.850	300 Penyedia 17 Dokumen 30%	212.886.900	17 Dokumen	358.348.650		352.475.505		565.362.405		212,42%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya fasilitasi verifikasi dan kualifikasi pelaku usaha								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya pengendalian dokumen standart LPSE								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terpenuhinya 17 Standar LPSE								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Evaluasi dan Peningkatan Level Kematangan UKPBJ	4 Kegiatan 50 Orang 1 Kegiatan	303.647.300	4 Kegiatan 50 Orang 1 Kegiatan	159.689.420	576 Orang	313.240.500		311.806.500		471.495.920		155,28%	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Evaluasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya pembinaan bagi pengelola pengadaan barang/jasa (PPKom, Pejabat Pengadaan dan Pelaku Usaha)								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Pembinaan Dokumen Kontrak OPD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya penghitungan Angka Kredit Fungsional Pengadaan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Fungsional Pengadaan Barang/Jasa								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya penyusunan regulasi pengelolaan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Daerah
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan</b>	100%	137.147.995	100%	44.352.169	100%	146.504.769		143.784.364		188.136.533		137,18%	Sekretariat Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, dan Monitoring Kebijakan ESDM Minyak dan Gas Bumi dan Lingkungan Hidup, Serta Penerima Manfaat City Gas dan Energi SDA lainnya	12 Kali	137.147.995	12 Kali	44.352.169	4 Dokumen	146.504.769		143.784.364		188.136.533		137,18%	Sekretariat Daerah
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	49.009.886.084	100%	42.633.362.858	100%	43.453.209.450		38.574.596.456		81.207.959.314		165,70%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	73%	218.694.100	73%	14.681.600	73%	76.759.091		16.318.950		31.000.550		14,18%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jasa Konsultansi	1. 4 Paket 2. 2 Dokumen	189.505.600	2 Dokumen	6.637.500	7 Dokumen	72.709.091		14.583.700		21.221.200		11,20%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.145.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.050.000		1.735.250		1.735.250		33,73%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</b>	100%	5.148.954.865	100%	3.937.881.242	100%	5.169.973.168		4.011.337.254		7.949.218.496		154,39%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	143 Dokumen	4.679.072.515	29 Dokumen	3.622.386.042	34 Orang	4.819.066.168		3.721.601.054		7.343.987.096		156,95%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1. 44 Dokumen 2. 52 Orang	444.451.350	50 Dokumen	314.329.200	44 Dokumen	328.512.000		277.417.500		591.746.700		133,14%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	54 Dokumen	5.479.500	50 Dokumen	-	54 Dokumen	12.225.000		5.370.600		5.370.600		98,01%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester	15 Dokumen	7.479.000	14 Dokumen	1.166.000	15 Dokumen	10.170.000		6.948.100		8.114.100		108,49%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	100%	118.000.000	100%	58.257.500	100%	71.322.200		63.450.000		121.707.500		103,14%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	2.457.500	1 Dokumen	253.000		0		2.457.500		20,48%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	253.000		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.029.500		7.650.000		7.650.000		63,75%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	55.800.000	1 Dokumen	62.280.700		55.800.000		111.600.000		159,43%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	506.000		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	80%	466.861.500	80%	306.720.500	80%	345.472.500		429.110.270		735.830.770		157,61%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH)	1. 129 Stel 2. 24 Stel 3. 26 Stel	130.042.500	374 Stel	299.670.500	3 Paket	169.457.500		279.983.070		579.653.570		445,74%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pakaian Dinas Harian PAMDAL DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1. 3 Tahun 2. 1 Tahun 3. 33 Orang/Kali	336.819.000	1 Kali	7.050.000	15 Orang	176.015.000		149.127.200		156.177.200		46,37%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Biaya Kontribusi Bimtek/Diklat								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	100%	7.708.842.600	100%	5.945.429.977	100%	7.687.421.584		6.744.961.125		12.690.391.102		164,62%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	900 Buah	93.712.500	884 Buah	84.864.250	1 Paket	122.433.418		117.260.400		202.124.650		215,69%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. 43 Unit 2. 1 Paket	764.912.594	274 Unit	992.028.950	3 Paket	862.727.476		116.929.620		1.108.958.570		144,98%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pengadaan Mic Conference								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat dan Bahan Kebersihan	1. 32 Item 2. 44 Item 3. 60 Kali 4. 262 Orang	587.801.301	398 Buah	646.993.337	2 Paket	970.111.980		798.988.105		1.445.981.442		246,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Alat Tulis Kantor								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Rapat								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Makanan dan Minuman Harian Pegawai								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak	1. 12 Item 2. 200.000 Lembar	511.030.905	100%	605.172.760	2 Paket	570.531.210		371.487.296		976.660.056		191,12%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Belanja Penggandaan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2959 Eksemplar	274.312.500	62400 Eksemplar	173.438.850	6 Dokumen	111.245.000		80.504.515		253.943.365		92,57%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	120 Kali	75.750.000	423 Kali	32.382.975	120 Laporan	58.170.000		21.079.042		53.462.017		70,58%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Biasa	1. 1 Tahun 2. 590 Orang/Hari	5.251.318.800	53 Kali	3.410.548.855	45 Laporan	4.992.202.500		4.987.724.387		8.398.273.242		159,93%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reses)								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	150.004.000	0%	-	100%	-		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100%	93.716.700	100%	-	100%	254.773.000		252.735.900		252.735.900		269,68%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Papan Struktur	9 Unit	93.716.700	0%	-	20 Unit	254.773.000		252.735.900		252.735.900		269,68%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Umum</b>	80%	2.207.338.868	80%	1.778.475.599	80%	1.819.540.200		1.639.587.946		3.418.063.545		154,85%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Petugas Administrasi	23 Orang	460.915.665	20 Orang	375.072.560	12 Laporan	428.255.400		379.190.850		754.263.410		163,64%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air	1. 3 Rekening 2. 1 Rekening 3. 4 Rekening 4. 10 Rekening	1.235.488.163	18 Rekening	910.723.623	12 Laporan	824.000.000		726.560.366		1.637.283.989		132,52%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Internet								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Listrik								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Telepon								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Papan Ucapan	166 unit	83.790.000	266 unit	133.430.000	1 Laporan	139.680.000		131.311.900		264.741.900		315,96%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Laundry Perlengkapan Kantor	1. 1 Tahun 2. 26 Orang	427.145.040	26 Orang	359.249.416	1 Laporan	427.604.800		402.524.830		761.774.246		178,34%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	80%	2.499.436.619	80%	4.198.250.235	80%	3.414.020.828		2.375.844.389		6.574.094.624		263,02%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Kendaraan Roda Dua	1. 12 Unit 2. 9 Unit 3. 4 Orang 4. 21 Unit	717.720.360	21 Unit	596.622.194	21 Unit	720.043.200		549.349.301		1.145.971.495		159,67%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	BBM Kendaraan Roda Dua								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	BBM, Premi Asuransi dan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Tenaga Supir Pimpinan DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM Kendaraan Roda Dua	1. 18 Unit 2. 8 Unit 3. 26 Unit	516.505.500	18 Unit	377.761.861	26 Unit	781.513.200		535.580.952		913.342.813		176,83%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	BBM, Premi Asuransi dan Suku Cadang Kendaraan Roda Empat								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pajak Kendaraan Dinas Lapangan								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Inventaris Kantor	788 Unit	66.192.000	0 Unit	-	1 Tahun	33.040.000		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BBM Genset dan Mesin Potong Rumput	1. 9736 Liter 2. 181 Unit	218.734.511	9736 Liter	223.073.100	222 Unit	272.718.582		242.846.080		465.919.180		213,01%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	umlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga Pengaman Dalam DPRD	1. 24 Orang 2.1200 M2/Tahun	800.856.000	24 Orang	2.742.143.880	6 Paket	1.448.857.000		899.399.016		3.641.542.896		454,71%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Pemeliharaan Gedung Kantor								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	7 Item	179.428.248	9 Item	258.649.200	8 Item	157.848.846		148.669.040		407.318.240		227,01%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	100%	28.962.581.417	100%	25.465.032.815	100%	23.082.214.179		22.111.524.202		47.576.557.017		164,27%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45 Orang	28.146.007.680	45 Orang	25.026.470.565	45 Orang	22.304.254.906		22.069.903.702		47.096.374.267		167,33%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Atribut DPRD	1. 6 Buah 2. 329 Stel	747.599.237	237 Stel	424.240.000	7 Paket	711.999.273		654.872.250		1.079.112.250		144,34%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Pakaian Dinas DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD	45 Orang	68.974.500	45 Orang	14.322.250	45 Orang	65.960.000		1.670.500		15.992.750		23,19%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Layanan Administrasi DPRD	Fasilitas Layanan Administrasi DPRD	75%	1.585.459.415	75%	928.633.390	75%	1.531.712.700		1.148.275.420		2.076.908.810		131,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Tenaga Petugas Administrasi	18 Orang	358.108.850	16 Orang	273.323.048	12 Dokumen	333.226.400		314.171.750		587.494.798		164,05%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Layanan Administrasi DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Fraksi	32 Kali	346.443.615	64 Kali	306.736.642	8 Laporan	333.791.300		306.937.220		613.673.862		177,14%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Paripurna dan Rapat Koordinasi/Konsultasi DPRD	15 Kali	880.906.950	18 Kali	348.573.700	18 Laporan	864.695.000		527.166.450		875.740.150		99,41%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</b>	85%	39.306.105.420	85%	14.337.238.923	85%	37.349.313.539		28.409.954.755		42.747.193.678		108,75%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Fasilitas Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	75%	4.211.142.186	75%	930.686.824	75%	3.776.475.000		2.259.061.219		3.189.748.043		75,75%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitas penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda dan non ranperda	25 Kali	1.349.454.488	20 Kali	343.420.529	1 Dokumen	1.401.730.000		1.096.391.231		1.439.811.760		106,70%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitas pembahasan rancangan peraturan daerah	6 Ranperda	2.751.437.698	6 Ranperda	487.287.845	6 Ranperda	2.274.745.000		1.328.041.767		1.815.329.612		65,98%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	2 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	99.978.450	2 Dokumen	100.000.000		0		99.978.450		90,68%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	85%	4.462.875.900	85%	1.108.986.662	85%	2.467.877.004		2.192.959.110		3.301.945.772		73,99%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitas Pembahasan KUA dan PPAS	12 Kali	877.669.275	17 Kali	223.004.030	1 Dokumen	505.796.009		480.079.359		703.083.389		80,11%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Fasilitas Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Kali	726.308.625	5 Kali	178.817.860	1 Dokumen	492.867.782		427.963.082		606.780.942		83,54%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pembahasan APBD	Jumlah Fasilitasi Pembahasan APBD	14 Kali	739.780.125	14 Kali	256.463.268	1 Dokumen	630.432.500		482.866.106		739.329.374		99,94%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan	18 Kali	879.249.525	18 Kali	219.048.745	1 Dokumen	377.590.450		346.606.300		565.655.045		64,33%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Fasilitasi Pembahasan Laporan Semester	11 Kali	55.085.625	0%	-	1 Dokumen	-		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Fasilitasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	19 Kali	1.184.782.725	11 Kali	231.652.759	1 Dokumen	461.190.263		455.444.263		687.097.022		57,99%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	85%	12.325.773.390	85%	4.675.544.910	85%	14.169.045.353		11.458.325.545		16.133.870.455		130,90%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	55 Kali	2.444.897.910	57 Kali	926.997.546	5 Laporan	2.704.805.200		2.096.280.002		3.023.277.548		123,66%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	55 Kali	2.426.948.160	57 Kali	1.031.620.153	5 Laporan	3.415.425.200		2.822.335.726		3.853.955.879		158,80%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	55 Kali	2.430.413.160	57 Kali	1.078.721.249	5 Laporan	3.435.510.200		2.721.073.703		3.799.794.952		156,34%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perekonomian	55 Kali	2.426.948.160	57 Kali	999.068.565	5 Laporan	3.428.775.200		2.622.229.055		3.621.297.620		149,21%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	15 Kali	1.276.474.500	14 Kali	293.135.886	4 Dokumen	639.012.070		639.009.070		932.144.956		73,02%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran	29 Kali	1.320.091.500	17 Kali	346.001.511	4 Dokumen	545.517.483		545.515.236		891.516.747		67,53%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	85%	5.916.291.024	85%	2.506.273.569	85%	4.788.390.500		3.007.623.197		5.513.896.766		93,20%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pendalaman Tugas DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1. 1 Tahun 2. 1 Tahun 3. 4 Kali	3.108.000.000	5 Kali	358.072.857	1 Dokumen	2.495.736.000		781.905.697		1.139.978.554		36,68%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Iuran Asosiasi								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Liputan Media Massa	1853 Kali	1.718.102.925	940 Kali	1.497.500.000	6 Dokumen	1.613.620.000		927.600.000		2.425.100.000		141,15%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	319.149.936	0%	-	8 Orang	-		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	266.229.936	8 Orang	244.609.024	8 Orang	247.878.400		246.878.400		491.487.424		184,61%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Fallilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD								0		0		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bahan Informasi Kegiatan DPRD	1 Dokumen	472.170.762	1 Dokumen	406.091.688	1 Dokumen	420.072.800		395.368.350		801.460.038		169,74%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program Kerja DPRD	3 Kali	32.637.465	0%	-	1 Dokumen	11.083.300		3.500.750		3.500.750		10,73%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	50%	2.420.242.071	50%	1.559.161.655	50%	1.897.862.232		1.580.728.245		3.139.889.900		129,73%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan Hasil Kunjungan Lapangan	34 Laporan	223.256.250	34 Laporan	144.706.950	34 Laporan	212.625.000		127.219.000		271.925.950		121,80%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	5 Dokumen	18.116.280	5 Dokumen	1.800.000	3 Dokumen	7.253.532		0		1.800.000		9,94%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pelaksanaan Reses	Laporan Hasil Reses	45 Laporan	2.178.869.541	45 Laporan	1.412.654.705	3 Dokumen	1.677.983.700		1.453.509.245		2.866.163.950		131,54%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	85%	358.584.660	85%	180.464.862	85%	594.293.200		435.226.999		615.691.861		171,70%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Kode Etik DPRD	5 Kali	140.568.750	6 Kali	56.210.800	5 Dokumen	155.530.000		136.512.495		192.723.295		137,10%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Kali	218.015.910	6 Kali	124.254.062	1 Dokumen	438.763.200		232.272.510		356.526.572		163,53%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	50%	90.999.909	50%	-	50%	-		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	jumlah persetujuan kerja sama daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	88.667.350	0%	-	1 Dokumen	-		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	jumlah persetujuan kerja sama daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	2.332.559	0%	-	1 Dokumen	-		0		0		0,00%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	80%	9.520.196.280	80%	3.376.120.441	80%	9.655.370.250		7.476.030.440		10.852.150.881		113,99%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Kali	5.907.131.160	13 Kali	2.503.088.878	6 Dokumen	7.046.213.800		5.675.542.367		8.178.631.245		138,45%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan Kinerja DPRD	1 Dokumen	99.027.600	1 Dokumen	79.874.512	13 Laporan	81.467.000		75.427.100		155.301.612		156,83%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	25 Kali	2.111.428.200	22 Kali	711.279.239	1 Dokumen	1.683.524.000		1.549.881.742		2.261.160.981		107,09%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD	9 Kali	1.402.609.320	6 Kali	81.877.812	1 Dokumen	844.165.450		175.179.231		257.057.043		18,33%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>					100%	9.342.161.253		0		0		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		198.000.000			100%	364.172.869		245.514.869		245.514.869		124,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	6 dokumen	180.000.000	-	-	6 dokumen	61.831.699		57.573.699		57.573.699		31,99%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen	3 dokumen	18.000.000	-	-	3 dokumen	302.341.170		187.941.170		187.941.170		1044,12%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.096.881.243			100%	4.965.291.555		4.485.414.328		4.485.414.328		88,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 ASN	4.293.452.943	-	-	37 ASN	4.531.759.355		4.116.799.678		4.116.799.678		95,89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen	36 Dokumen	709.018.300	-	-	12 Dokumen	390.040.100		332.835.850		332.835.850		46,94%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa								0		0		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen	6 Dokumen	46.500.000	-	-	2 Dokumen	19.998.850		16.886.100		16.886.100		36,31%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	36 Laporan	47.910.000	-	-	12 Laporan	23.493.250		18.892.700		18.892.700		39,43%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	100%	162.236.655	-	-	100%	54.034.300		40.853.800		40.853.800		25,18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Jenis	146.714.715	-	-	6 Jenis	49.106.700		38.104.200		38.104.200		25,97%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	15.521.940	-	-	13 Laporan	4.927.600		2.749.600		2.749.600		17,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		855.552.758			100%	504.257.800		271.669.428		271.669.428		31,75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	63 Stel	154.350.000	-		140 Stel	159.390.000		151.630.600		151.630.600		98,24%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Data	236.136.758	-		3 Data	76.567.800		56.862.200		56.862.200		24,08%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Diklat	346.906.350	-		6 Diklat	144.500.000		9.996.800		9.996.800		2,88%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang/kali	118.159.650	-		4 orang/kali	123.800.000		53.179.828		53.179.828		45,01%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		4.611.587.228			100%	1.839.032.497		1.594.743.499		1.594.743.499		34,58%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	197.653.367	-		1 Jenis	81.764.889		81.739.750		81.739.750		41,36%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1.490.234.892	-		4 Jenis	861.227.881		752.011.294		752.011.294		50,46%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 paket	579.533.277	-		7 Jenis	234.006.987		233.508.144		233.508.144		40,29%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	142.910.460	-		1 Tahun	58.985.300		53.985.800		53.985.800		37,78%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	31.594.500	-		1 Tahun	16.876.000		0		0		0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 kali	91.165.252	-		100 kali	37.882.700		20.967.700		20.967.700		23,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	2.000.000.000	-		1 Tahun	499.945.400		419.187.671		419.187.671		20,96%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Tahun	78.495.480	-		1 Tahun	48.343.340		33.343.140		33.343.140		42,48%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>					100%	440.317.030		210.783.930		210.783.930		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	996.173.325	-		6 Jenis	440.317.030		210.783.930		210.783.930		21,16%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					100%	559.912.400		426.414.187		426.414.187		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2700 Surat	90.479.970			900 Surat	35.014.800		19.580.000		19.580.000		21,64%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi - Jumlah Jasa Listrik - Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100 Mbps 20000 KWH 50M3	877.275.000			100 Mbps 20000 KWH 50M3	292.000.000		235.196.987		235.196.987		26,81%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	226.012.500			1 Tahun	100.000.000		40.218.000		40.218.000		17,79%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	404.727.750			1 Tahun	132.897.600		131.419.200		131.419.200		32,47%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100%	615.142.802		457.245.604		457.245.604		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 unit	754.078.500			22 Unit	239.390.000		196.732.411		196.732.411		26,09%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	162.288.000			8 Unit	51.350.000		49.019.600		49.019.600		30,21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 unit	183.613.500			30 Unit	59.920.000		59.538.000		59.538.000		32,43%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 paket	53.548.425			1 Jenis	150.000.000		125.496.400		125.496.400		234,36%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	263.785.413			1 Tahun	99.982.802		21.959.193		21.959.193		8,32%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	40.046.068			1 Tahun	14.500.000		4.500.000		4.500.000		11,24%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah</b>					100%	1.121.299.264		0		0		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	585.187.187			100%	608.387.187		539.074.996		539.074.996		92,12%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kali	268.780.287	-	-	1 Kali	268.780.287		255.480.287		255.480.287		95,05%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJ MD/RKPD)	2 Dokumen	316.406.900	-	-	2 Dokumen	339.606.900		283.594.709		283.594.709		89,63%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Data Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								195.252.139		195.252.139		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%		62,69%	12.853.290	100%	30.074.950		21.749.950		34.603.240		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	100%		83,91%	87.091.834	100%	136.210.040		94.661.814		181.753.648		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100%		87,09%	87.091.834	100%	91.446.875		78.840.375		165.932.209		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	96%	249.091.768			90%	255.180.212		211.146.776		211.146.776		84,77%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 kali	79.886.518			2 Kali	85.924.962		66.475.224		66.475.224		83,21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 dokumen 4 triwulan 100%	169.205.250			4 Dokumen 4 triwulan 39 OPD	169.255.250		144.671.552		144.671.552		85,50%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	24,55	804.107.629			22,56	1.211.019.387		472.354.413		472.354.413		58,74%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Peningkatan Kinerja Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	24,92	470.473.072,89			27,99	301.702.405		288.244.985		288.244.985		61,27%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		17,67	333.634.556,11			17,88	192.705.024							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7 PD	93.674.929			12 Kali	91.799.929		78.603.223		78.603.223		83,91%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		7 PD				-								
		4 Kali				-								
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19 PD	710.432.700			24 Kali	402.607.500		393.751.190		393.751.190		55,42%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		19 PD				-								
		22 Kali				-								
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	21.82	335.922.437				406.581.775		324.537.171		324.537.171		96,61%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	2 Dokumen	221.191.754			6 OPD	107.506.427		73.452.840		73.452.840		33,21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monev perencanaan bidang perekonomian	6 OPD	21.821.898			6 OPD	20.664.767		13.238.220		13.238.220		60,66%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	2 Dokumen	78.623.575			2 OPD	74.454.091		50.673.459		50.673.459		64,45%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monev perencanaan Bidang SDA	2 OPD	14.285.210			2 OPD	203.956.490		187.172.652		187.172.652		1310,25%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Koordinasi</b>	21.82	508.106.501				310.030.183		224.639.364		224.639.364		44,21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	363.373.549			5 OPD	204.097.326		164.206.507		164.206.507		45,19%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Monev perencanaan bidang infrastruktur	5 OPD	144.732.952			5 OPD	105.932.857		60.432.857		60.432.857		41,75%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									0		0		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan					100%	683.358.616		0		0		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen	100%	758.140.747			100%	253.915.385		236.989.146		236.989.146		31,26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	fasilitasi/koordinasi	#####			2 fasilitasi	152.565.385		135.794.646		135.794.646		19,62%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	dokumen	65.999.775			1 Dokumen	101.350.000		101.194.500		101.194.500		153,33%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	100%	-			100%	48.914.630		46.974.200		46.974.200		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dokumen	-			1 dokumen	47.825.900		45.885.900		45.885.900		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	-			1 dokumen	1.088.730		1.088.300		1.088.300		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen	100%	-			100%	96.488.000		90.638.000		90.638.000		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dokumen	-			1 dokumen	47.213.000		44.213.000		44.213.000		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	-			1 dokumen	49.275.000		46.425.000		46.425.000		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah FGD / Raker /Rakor/ Tim Koordinasi Penguatan sistem inovasi daerah	15%	888.279.758			15%	284.040.601		255.956.310		255.956.310		28,81%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah FGD/raker/rakor/tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Kota Jambi - Jumlah Inovasi Daerah	437.329.965			5 Kali	75.887.180		56.725.436		56.725.436		12,97%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	- Jumlah Kategori Penghargaan - Jumlah Lomba Inovasi Daerah - Jumlah Lomba Inovasi	450.949.793			2 Kategori 1 Kali	208.153.421		199.230.874		199.230.874		44,18%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>KEUANGAN</b>									0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	11.476.607.000	100%	7.015.723.855	100%	9.968.862.235		17.825.431.868		24.841.155.723		216,45%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	80,00 Nilai	48.396.000	79,03	36.995.750	78,28	62.230.550		143.082.150		180.077.900		372,09%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	12.100.000	4 dokumen	9.249.350	4 Dokumen	32.234.150		80.063.750		89.313.100		738,12%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.886.000	1 dokumen	3.661.900	1 dokumen	4.036.900		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 kali		1 kali		1 kali			#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	4.856.000	1 dokumen	3.637.700	1 dokumen	4.012.700		4.012.700		7.650.400		157,55%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	1 kali		1 kali		1 kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.252.000	1 dokumen	5.617.700	1 dokumen	5.992.700		17.228.100		22.845.800		315,03%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 kali		1 kali		1 kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	7.252.000	1 dokumen	5.580.300	1 dokumen	5.955.300		5.955.300		11.535.600		159,07%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD, Jumlah Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	1 kali		1 kali		1 kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			24.461.600		33.710.400		278,62%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Koordinasi penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 kali	12.099.000	1 kali	9.248.800	1 kali	9.998.800		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	9.082.522.000	100%	5.355.459.072	100%	7.542.192.336		13.507.068.105		18.862.527.177		207,68%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	7.683.254.000	44 orang	4.410.481.006	44 Orang	6.390.249.680		11.354.846.593		15.765.327.599		205,19%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang/ Jasa	30 orang	1.375.070.000	30 orang	925.149.510	30 Orang	1.131.943.050		2.103.169.630		3.028.319.140		220,23%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Kali	12.100.000	2 Kali	9.828.610	2 Kali	9.999.660		24.997.170		34.825.780		287,82%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			24.054.712		34.054.658		281,44%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	2 laporan	12.100.000	2 laporan	9.999.946	2 laporan	9.999.946		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Laporan Keuangan triwulanan	4 laporan		4 laporan		4 laporan			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	65 indeks	289.578.000	67,5 indeks	55.880.000	55 indeks	255.500.000		291.235.400		347.115.400		119,87%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 stel	67.760.000	80 stel	55.880.000	90 stel	75.500.000		142.465.400		198.345.400		292,72%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan	25 kali	221.818.000	-	0	25 kali	180.000.000		148.770.000		148.770.000		67,07%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	766.714.000	100%	286.118.036	100%	662.598.532		1.575.553.760		1.861.671.796		242,81%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	7 jenis	30.250.000	7 jenis	23.543.301	7 jenis	24.991.175		67.363.727		90.907.028		300,52%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	17 Jenis	72.596.000	17 jenis	59.993.000	17 jenis	60.236.000		147.079.000		207.072.000		285,24%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32 jenis	60.467.000	32 jenis	33.710.125	32 jenis	49.972.450		103.442.095		137.152.220		226,82%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	5 jenis	24.200.000	5 jenis	29.800.000	5 jenis	20.000.000		45166000		74.966.000		309,78%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	84.699.000	10 jenis	65.419.210	10 jenis	107.398.907		258.004.407		323.423.617		381,85%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu	2 Jenis	60.500.000	2 jenis	34.465.700	2 jenis	50.000.000		119.497.600		153.963.300		254,48%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35 Kali	434.003.000	35 kali	39.186.700	35 Kali	350.000.000		835.000.931		874.187.631		201,42%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	105.030.000	100%	215.900.000	100%	334.444.617		341.061.770		556.961.770		530,29%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	8 unit	99.585.000	8 unit	211.400.000	44 unit	329.944.617		336.561.770		547.961.770		550,25%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 unit	5.445.000	1 unit	4.500.000	1 unit	4.500.000		4.500.000		9.000.000		165,29%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	562.808.000	100%	318.732.681	100%	469.451.600		835.069.385		1.153.802.066		205,01%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelolaan Surat menyurat	4600 surat	6.048.000	4275 surat	3.877.500	4600 Surat	7.450.000		10.417.680		14.295.180		236,36%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi	100 mbps	484.000.000	100 mbps	283.355.181	100 mbps	400.000.000		716.325.305		999.680.486		206,55%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah jasa listrik	63000 kwh		63000 kwh		63000 kwh			0	0	#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	4 orang	72.761.000	3 orang	31.500.000	4 Orang	62.001.600		108.326.400		139.826.400		192,17%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	621.564.000	100%	746.638.316	100%	642.444.600		1.132.361.298		1.878.999.614		302,30%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas, Operasional	25 Kendaraan	424.589.000	25 Kendaraan	344.844.860	25 Kendaraan	356.439.600		774.830.298		1.119.675.158		263,71%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah STNK/KIR	25 Kendaraan		25 Kendaraan		25 Kendaraan			0	0	#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20 unit	64.036.000	20 unit	102.672.000	20 unit	52.921.000		124.373.000		227.045.000		354,56%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	90.591.000	1 gedung	264.664.600	1 gedung	198.084.000		193.311.000		457.975.600		505,54%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 genset	42.350.000	1 genset	34.456.856	1 genset	35.000.000		39.847.000		74.303.856		175,45%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%	35.655.584.000	100%	10.287.905.656	100%	32.420.125.886		29.485.610.915		39.773.516.571		111,55%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%	21.735.997.000	100%	3.398.342.210	100%	11.216.830.119		17.477.000.801		20.875.343.011		96,04%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS	2 Dokumen	1.820.607.000	2 Dokumen	930.281.120	2 Dokumen	1.539.065.419		2.155.652.293		3.085.933.413		169,50%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	20 Kali		12 Kali		20 Kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	2 Dokumen	193.600.000	2 Dokumen	65.985.387	2 Dokumen	158.590.619		141.648.080		207.633.467		107,25%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Kali		9 Kali		10 Kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	10 kali	39.020.000	9 kali	22.096.910	10 kali	32.246.274		53.044.274		75.141.184		192,57%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah verifikasi Dokumen RKA SKPD	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5 Kali	39.021.000	5 Kali	19.872.930	5 Kali	32.244.724		16.110.424		35.983.354		92,22%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah verifikasi dokumen perubahan RKA SKPD	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah verifikasi Dokumen DPA SKPD	8 Kali	39.023.000	4 Kali	24.274.768	8 Kali	32.248.141		54.774.423		79.049.191		202,57%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5 Kali	39.023.000	5 Kali	22.724.768	5 Kali	32.907.234		19.543.084		42.267.852		108,32%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	jumlah verifikasi dokumen DPA Perubahan	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda	148.224.000	1 Perda	199.724.544	1 Perda	178.866.637		315.175.511		514.900.055		347,38%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah dokumen Perkada Penjabaran APBD	1 Perkada		1 Perkada		1 Perkada			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah	12 kali		12 kali		12 kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	11 Perkada Perubahan		1 Perkada Perubahan		1 Perkada Perubahan			96.212.965		175.540.865		150,34%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1 Perda Perubahan		1 Perda Perubahan		1 Perda Perubahan			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Kali	116.764.000	6 Kali	79.327.900	6 Kali	175.780.465		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Kali	85.462.000	12 kali	30.037.256	15 Kali	81.397.557		128.329.671		158.366.927		185,31%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 regulasi				1 regulasi			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pendapatan	4 kali	193.985.000	3 kali	85.449.670	4 kali	162.551.125		233.875.396		319.325.066		164,61%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran belanja	10 kali	229.900.000	10 kali	81.328.514	10 kali	200.491.521		251.270.857		332.599.371		144,67%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pembiayaan	18 kali	18.791.375.000	16 kali	1.837.238.443	18 kali	8.590.440.403		14.011.363.823		15.848.602.266		84,34%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%	1.058.793.000	85%	884.766.352	85%	1.010.083.203		2.494.718.019		3.379.484.371		319,18%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	4 Kali	261.041.000	4 kali	199.022.076	4 Kali	242.167.756		513.733.613		712.755.689		273,04%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Surat Keputusan	20 SK		43 SK		20 SK			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 SPD	287.700.000	232 SPD	244.899.420	160 SPD	264.348.810		723.602.985		968.502.405		336,64%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas	4 Kali		4 Kali		4 Kali			91.444.640		113.556.960		180,15%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Laporan bulanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah PFK bulanan	12 Dokumen	63.036.000	12 Dokumen	22.112.320	12 Dokumen	57.305.200		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah penyampaian Laporan harian Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dan Pelaksanaan Pemungutan PFK	269 Dokumen		269 Dokumen		269 Dokumen			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan	144 Dokumen		144 Dokumen		144 Dokumen			100.179.380		126.639.609		227,66%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi SP2D	480 Dokumen		480 Dokumen		480 Dokumen		0		0		#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 kali	55.626.000	12 kali	26.460.229	12 kali	50.569.010		#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran	160 Dokumen	103.575.000	150 dokumen	87.569.106	2 dokumen	132.170.472		443.883.520	531.452.626		513,11%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	5200 Dokumen	287.820.000	5300 Dokumen	304.703.201	5200 Dokumen	263.521.955		621.873.881	926.577.082		321,93%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan	2 Kali		2 Kali		2 Kali			0	0		#DIV/0!		
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%	1.202.971.000	100%	942.293.975	100%	1.243.930.594		2.746.215.958	3.688.509.933		306,62%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi/Monitoring Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 kali	90.332.000	12 kali	62.727.500	12 kali	63.473.990		159.282.950	222.010.450		245,77%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Kewajiban dan Ekuitas persemester realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan	2 Berita Acara	36.694.000	2 Berita Acara	36.978.400	2 Berita Acara	59.837.300		104.932.300	141.910.700		386,74%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Bulanan	12 Berita Acara		12 Berita Acara		12 Berita Acara			0	0		#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan LO dan Beban Persemester	2 Berita Acara		2 Berita Acara		2 Berita Acara			0	0		#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi	14 koordinasi	33.613.000	13 koordinasi	3.957.750	14 koordinasi	24.128.094		47.615.076	51.572.826		153,43%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi	19 konsolidasi	238.108.000	19 koordinasi	213.822.084	19 konsolidasi	251.764.482		683.749.760	897.571.844		376,96%		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan KDH dan Peraturan KDH	4 Dokumen	264.152.000	4 Dokumen	166.246.830	4 Dokumen	187.098.551		517.965.870		684.212.700		259,02%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan KDH dan Peraturan KDH	5 Koordinasi		5 Koordinasi		5 Koordinasi			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Konsep Tanggapan /Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen Tanggapan	31.152.000	3 dokumen tanggapan	0	3 dokumen tanggapan	7.099.973		20.267.250		20.267.250		65,06%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian	12 Kali		12 kali		12 kali			410.793.550		489.361.950		522,62%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	11 Kasus	93.637.000	17 kasus	78.568.400	5 kasus	157.332.450		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Surat Keputusan Majelis	11 SK		2 SK		5 SK			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 aplikasi	272.153.000	1 aplikasi	236.569.461	1 aplikasi	314.042.550		450.054.412		686.623.873		252,29%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	4 kali	52.958.000	4 kali	66.321.200	4 kali	51.060.650		241.659.740		307.980.940		581,56%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	4 kali	90.182.000	4 kali	77.102.350	4 kali	128.092.554		109.895.050		186.997.400		207,36%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%	11.657.826.000	1 00%	5.062.503.119	100%	18.728.212.870		6.767.676.137		11.830.179.256		101,48%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 jenis	11.657.826.000	1 jenis	5.062.503.119	1 jenis	18.728.212.870		6.667.676.137		11.730.179.256		100,62%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	80%	1.471.870.000	79%	818.459.369	75%	1.872.144.098		2.107.262.067		2.925.721.436		198,78%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi</b>	80%	1.471.870.000	79%	818.459.369	75%	1.872.144.098		2.107.262.067		2.925.721.436		198,78%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen standar harga barang	1 dokumen	193.321.000	1 dokumen	102.435.400	1 dokumen	161.637.872		290.853.400		393.288.800		203,44%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	1 dokumen	53.721.000	-	0	1 dokumen	44.396.400		29.396.400		29.396.400		54,72%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kesesuaian Mutasi BMD	2 laporan		2 laporan		2 laporan			281.026.535		408.281.585		180,63%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Pemasangan Plank untuk Kepemilikan BMD	25 plank		19 plank		32 plank			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut Jenis Golongan Aset	7 laporan	226.036.000	7 laporan	127.255.050	7 laporan	190.048.495		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Update Laporan Administasi dan Fisik/Kondisi BMD (KIR)	2 laporan		3 laporan		2 laporan			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Kejelasan Status BMD Yang dikuasai PihakLain	3 Status BMD				3 Status BMD			298.694.322		486.991.362		191,78%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Laporan Proses Pensertifikatan Tanah danPengamanan atas kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan dinas (BPKB dan STNK)	4 Kali	253.929.000	4 Kali	188.297.040	4 Kali	716.713.213		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah penyelesaian perkara/sengketa BMD	2 perkara/ sengketa				2 perkara/ sengketa			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah proses pensertifikatan BMD berupa asettanah	30 persil		6 persil		30 persil			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Pengajuan Penilaian Barang Milik Daerah KeTim Penilai Pemerintah (KPKNL)	3 kali	53.482.000	1 kali	16.577.906	3 kali	148.643.827		181.186.317		197.764.223		369,78%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	2 Kali		2 Kali		2 Kali			174.951.744		260.658.029		191,86%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Pengecekan Pelaporan Inventaris Barang	2 Kali		2 Kali		2 Kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Pengecekan Status Penggunaan BMD	2 Kali	135.859.000	2 Kali		2 Kali	41.344		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Pengendalian BMD Penggunaan dan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Perencanaan Kebutuhannya setiap OPD	4 Kali		2 Kali		4 Kali			0		0	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya	2 Kali		2 Kali		2 Kali			286.673.125		389.720.140		218,25%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Peningkatan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah	2 Kali lipat	178.566.000	2,5 Kali lipat	103.047.015	2 Kali lipat	163.283.328		0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Dengan Penyampaian Regulasi dan kisi-kisi Tentang optimalisasi BMD	2 Kali		2 Kali		2 Kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan Neraca dengan Akuntansi Jumlah Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Tingkat OPD	3 Kali	143.731.000	3 Kali	68.000.040	3 Kali	108.592.930		216.104.200		284.104.240		197,66%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Tingkat OPD	12 Kali		12 Kali		12 Kali			0		0		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 kali	83.208.000	4 kali	48.912.853	4 kali	82.143.744		230.870.994		279.783.847		336,25%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Seluruh OPD (Pengguna Barang dan Pengurus Barang)	2 kali	150.025.000	2 kali	78.227.780	2 kali	129.042.945		117.505.030		195.732.810		130,47%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	26.577.150.000	B	16.158.806.627	100%	28.659.284.219		17.252.083.958		33.410.890.585		125,71%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	29.963.000	0	15.745.000	100%	31.689.000		19.123.976		34.868.976		116,37%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	23.356.000	2 Dok	730.000	1 Dok	25.683.000		25.083.000		25.813.000		110,52%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	5 Dok	6.607.000	5 Dok	15.015.000	5 Dok	6.006.000		6.006.000		21.021.000		318,16%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	23.773.546.000	0	12.040.652.393	100%	22.327.094.817		12.968.331.570		25.008.983.963		105,20%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Insentif Pajak Daerah	58 Orang	23.382.425.000	61 Orang	11.690.662.693	63 Orang	21.927.073.817		15.566.167.822		27.256.830.515		116,57%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan ASN								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset, dan pengadaan barang/jasa	3 Dok	347.231.000	3 Dok	304.713.700	3 Dok	347.231.000		328.539.916		633.253.616		182,37%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Kontrak								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semester	2 Lap	43.890.000	2 Lap	45.276.000	2 Lap	52.790.000		52.412.750		97.688.750		222,58%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	381.561.000	0	228.497.000	100%	601.100.000		411.144.169		639.641.169		167,64%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	1 Paket	124.275.000	1 Paket	78.398.000	1 Paket	124.275.000		123.495.700		201.893.700		162,46%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah seragam pelayanan								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan	4 orang	217.486.000	2 orang	3.400.000	1 orang	190.825.000		86.405.000		89.805.000		41,29%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	39.800.000	5 orang	146.699.000	31 orang	286.000.000		249.990.673		396.689.673		996,71%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	861.569.000	100%	999.053.144	100%	1.596.080.366		842.222.306		1.841.275.450		213,71%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	27.611.000	4 Paket	75.275.940	4 Paket	32.584.770		26.640.119		101.916.059		369,11%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Pemeliharaan Instalasi Listrik								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	2 paket	548.733.000	4 paket	564.021.754	2 paket	1.008.861.906		581.247.748		1.145.269.502		208,71%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jumlah Perlengkapan Kantor								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	36.245.000	11 Paket	47.088.000	12 Paket	41.245.000		39.529.000		86.617.000		238,98%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Penggandaan ( Fotocopy )	12 Paket	22.315.000	11 Paket	112.086.700	12 Paket	23.223.690		23.101.500		135.188.200		605,82%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Belanja Barang Cetak								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Surat Kabar / Majalah	1 Dok	7.140.000	2 Dok	3.844.000	1 Dok	7.140.000		2.750.000		6.594.000		92,35%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum Rapat	12 Lap	69.525.000	12 Lap	62.923.000	12 Lap	83.025.000		36.992.000		99.915.000		143,71%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah makan minum tamu								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Lap	150.000.000	9 Lap	133.813.750	12 Lap	400.000.000		386.434.656		520.248.406		346,83%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	-	100%	576.400.000	100%	2.268.600.000		2.159.540.120		2.735.940.120		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan atau operasional	0	0	2 Unit	576.400.000	2 Unit	2.268.600.000		2.199.620.000		2.776.020.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	451.410.000	100%	917.789.379	100%	470.860.000		281.864.927		1.199.654.306		265,76%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1 Lap	24.810.000	1 Lap	59.000.000	1 Lap	29.260.000		28.960.000		87.960.000		354,53%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Paket Kiriman								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Sumber daya Air	12 Lap	426.600.000	12 Lap	858.789.379	12 Lap	441.600.000		345.445.831		1.204.235.210		282,29%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jasa Sumber Daya Listrik								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jasa Sumber Daya Telekomunikasi/Internet								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	1.079.101.000	100%	1.380.669.711	100%	1.363.860.036		569.856.890		1.950.526.601		180,75%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar kendaraan dinas/operasional	31 Unit	566.284.000	31 Unit	960.828.956	31 Unit	621.617.499		472.509.878		1.433.338.834		253,11%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah dokumen perizinan kendaraan dinas/operasional								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	jumlah jasa tenaga pengemudi								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	31 Unit	91.176.000	70 Unit	149.185.750	31 Unit	106.090.200		95.756.050		244.941.800		268,65%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah perbaikan peralatan kerja								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	2 Gedung	421.641.000	2 Gedung	270.655.005	2 Gedung	636.152.337		422.856.890		693.511.895		164,48%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Tenaga Keamanan								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	100%	4.180.086.000	100%	4.107.715.655	100%	5.472.225.738		4.728.981.148		8.836.696.803		211,40%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	9%	4.180.086.000	9%	4.107.715.655	9%	5.472.225.738		4.728.981.148		8.836.696.803		211,40%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	3 Dok	80.895.000	2 Dok	107.873.450	2 Dok	264.015.746		239.073.400		346.946.850		428,89%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen Analisis dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dok	75.876.000	2 Dok	70.354.950	2 Dok	125.796.830		106.487.400		176.842.350		233,07%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Publikasi Pajak Daerah	6 Lap	316.019.000	6 Lap	176.656.550	6 Lap	374.962.960		321.450.950		498.107.500		157,62%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Jenis Publikasi Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Jenis Publikasi Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Alat Ukur Pajak Air tanah	37 Unit	397.915.000	18 Unit	323.961.000	37 Unit	1.065.138.326		1.037.414.379		1.361.375.379		342,13%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Belanja Modal Sarana Penunjang Pengelolaan Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Penyediaan Prasarana Konsultasi Telematika								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah SPPT PBB yang tercetak								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Baru yang ditetapkan	12 Lap	125.305.000	12 Lap	294.442.500	12 Lap	249.574.790		163.164.790		457.607.290		365,19%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Data Pajak Daerah	12 Lap	384.481.000	12 Lap	466.829.000	12 Lap	413.778.502		386.273.108		853.102.108		221,88%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pemenang Lomba								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas BPHTB yang dinilai	11,500 Objek Pajak	413.666.000	11,200 Objek Pajak	470.891.600	11,500 Objek Pajak	422.491.180		303.311.635		774.203.235		187,16%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pemutakhiran SPPT PBB								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Penditilan Zona Nilai Tanah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan	7,500 WP	200.937.000	12,999 WP	89.618.660	7,500 WP	205.381.756		183.431.758		273.050.418		135,89%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah konsultasi Wajib pajak Daerah	22,500 Layanan	258.187.000	1,000 Layanan	5.930.320	23,300 Layanan	266.099.538		266.099.538		272.029.858		105,36%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah layanan wajib pajak daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas yang diteliti dan diverifikasi	165,000 Dokumen	103.456.000	165,000 Dokumen	103.456.000	165,000 Dokumen	103.456.000		96.976.130		402.950.055		389,49%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB	3 Dok	1.100.304.000	3 Dok	984.678.270	3 Dok	1.177.094.100		938.979.100		1.923.657.370		174,83%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah surat tagihan tunggakan piutang pajak daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah surat teguran tunggakan piutang pajak daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Junlah Pemeriksaan kasus objek pajak daerah	1 Dok	83.957.000	1 Dok	84.899.220	1 Dok	88.406.840		79.106.840		164.006.060		195,35%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan kasus objek pajak daerah	2 Dok	500.668.000	2 Dok	725.606.210	2 Dok	522.918.220		417.012.920		1.142.619.130		228,22%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah penempelan stiker QR Code pada objek pajak reklame								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Pemantauan Data Wajib Pajak								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan Retribusi Daerah	12 Lap	138.420.000	4 Lap	-	12 Lap	199.590.820		190.199.200		190.199.200		137,41%	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pengawasan Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Jumlah Pengawasan Pajak Daerah								0		0		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
<b>KEPEGAWAIAN</b>									0		0		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	A	69.999.319.761			A	8.078.749.671		8.617.226.613		8.617.226.613		12,31%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Peningkatan Nilai AKP</b>	A	149.997.510	A	11.165.100	A	38.171.080		11.422.650		22.587.750		15,06%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.495.510	1Dokumen	3.153.600	6 Dokumen	18.286.460		10.058.450		13.212.050		58,73%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	67.502.000	2Laporan	2.315.500	3 Laporan	19.884.620		1.364.200		3.679.700		5,45%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	100%	59.650.380.281		10.050.328.108	100%			5.366.516.756		15.416.844.864		25,85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	36 Dokumen	58.761.648.040	12Dokumen	9.820.793.758	12 Dokumen	5.194.036.694		5.137.362.406		14.958.156.164		25,46%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	78 ASN	798.732.000	20Orang	221.311.800	21 Orang	263.812.800		223.046.500		444.358.300		55,63%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi OPD	36 Dokumen	30.000.250	12Dokumen	2.832.250	12 Dokumen	10.356.000		2.759.650		5.591.900		18,64%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	36 Dokumen	29.999.991	12Dokumen	3.723.800	12 Dokumen	11.110.000		3.348.200		7.072.000		23,57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	277.175.000		61.869.000	100%	90.000.000		63.694.320		125.563.320		45,30%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi Barang Milik Daerah	36 Kali	77.603.000	12Kali	10.749.000	12 Kali	30.588.000		4.973.320		15.722.320		20,26%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa tenaga Tim PBJ dan BMD	18 ASN	199.572.000	5ASN	51.120.000	6 ASN	59.412.000		58.721.000		109.841.000		55,04%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kompetensi ASN Perangkat Daerah</b>	70%	597.327.000		65.346.036	56%	203.525.000		166.378.385		231.724.421		38,79%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian khusus hari- hari tertentu	247 Stel	183.775.000	66Stel	46.101.000	77 Stel	63.525.000		44.662.952		90.763.952		49,39%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	26 kali	176.086.000	7Kali	16.395.036	5 kali	60.000.000		30.620.448		47.015.484		26,70%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi dan Bimtek	52 kali	237.466.000	12Kali	2.850.000	12 kali	80.000.000		29.960.448		32.810.448		13,82%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor</b>	90%	2.883.207.600		437.855.141	90%	798.381.600		646.897.758		1.084.752.899		37,62%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik	16 Jenis	46.572.000	5Jenis	14.885.000	5 Jenis	15.946.000		15.110.000		29.995.000		64,41%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	56 Jenis		11Jenis		13 Jenis ATK,	216.252.600		#REF!		#REF!		#REF!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	25 Jenis	674.369.600	7Orang	185.763.800	10 Orang			212.749.900		212.749.900		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	27 Orang		8Jenis		9 Jenis			0		0		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	148.531.000	1Jenis	43.935.062	4 Jenis	23.683.000		19.950.000		63.885.062		43,01%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Rapat dan tamu	9700 pcs	259.500.000	1797Pcs	39.175.000	3000 pcs	68.000.000		59.555.000		98.730.000		38,05%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	190 Kali	1.674.705.000	46Kali	128.451.779	65 Kali	448.000.000		318.471.358		446.923.137		26,69%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan arsip aktif, in aktif dan Arsip Vital	15000 Arsip Dinamis	79.530.000	5000Arsip	25.644.500	5000 Arsip	26.500.000		21.061.500		46.706.000		58,73%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100%	3.329.019.514		1.874.659.900	100%	445.730.000		1.448.751.700		3.323.411.600		99,83%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit Mobil	550.000.000	2Unit	49.450.000				250.000.000		299.450.000		54,45%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeler yang diadakan	382 Unit	589.819.911	132Unit	458.212.400	116 Unit	126.620.000		275.508.000		733.720.400		124,40%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	285 Unit	1.246.761.203	97Unit	874.514.500	22 Unit	264.110.000		483.505.000		1.358.019.500		108,92%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 Paket	942.438.400	4Paket	492.483.000	1 Paket	55.000.000		439.738.700		932.221.700		98,92%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Umum Perkantoran</b>	100%	1.488.656.600		302.965.790	100%	467.256.497		401.483.267		704.449.057		47,32%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	18800 Surat	381.656.600	6948Surat	105.530.000	6400 Surat	148.101.600		110.828.000		216.358.000		56,69%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi		347.000.000	80Mbps		80 Mbps,			290.655.267		488.091.057		140,66%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Jumlah Jasa Sumber Daya Air		760.000.000	1018kubik		620 meter Kubik	319.154.897		0		0		0,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Jumlah Jasa Sumber Daya Listrik Gedung Diklat dan Gedung Kantor			31450KWH		66000 KWH			0		0		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Jumlah jasa sumberdaya listrik Gedung Kantor			92865KWH		45000 KWH			0		0		#DIV/0!	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	1 Unit Kendaraan Dinas			480.872.900	0,9	556.370.000		512.081.777		992.954.677		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	26 Unit	75.000.000	1Unit	20.661.500	1 Unit	25.000.000		20.362.900		41.024.400		54,70%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	26 Unit	850.489.856	26Unit	223.826.900	26 Unit	272.230.000		206.543.572	430.370.472		50,60%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Jumlah STNK/KIR	26 Unit		26 Unit		26 Unit		0	0		#DIV/0!			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	223 Unit	175.260.000	53Unit	49.945.000	73 Unit	60.220.000		58.353.305	108.298.305		61,79%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung	2 Gedung	522.806.400	8Orang	186.439.500	9 Orang	198.920.000		226.822.000	413.261.500		79,05%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Jasa pengaman kantor	8 Orang		2Gedung	2 Gedung			0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	95%	12.732.871.435		618.943.824	93%	3.439.193.932		1.444.331.384	2.063.275.208		16,20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Meningkatnya Layanan administrasi Kepegawaian</b>	92%	4.805.555.734		240.523.434	90%	1.910.591.394		409.714.585	650.238.019		13,53%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan Sesuai Kebutuhan	100%	4.020.528.884		1.350.000	150 CPNS	1.398.727.059		0	1.350.000		0,03%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Terlaksananya Dukungan Kebijakan Pengadaan ASN	100%							0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK	3 Kali	19.873.145		795.350				55.379.662	56.175.012		282,67%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Terselenggaranya Pengadaan PNS dan PPPK Sesuai Kebutuhan	6 Kali	44.999.235		923.900	2 Kali	110.001.274		0	923.900		2,05%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Meningkatnya Efisiensi Administrasi Pemberhentian	92%	40.933.972	90%	23.559.502	1 Kali	35.901.321		28.097.669	51.657.171		126,20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	3 Kali	22.674.230		2.731.250				0	2.731.250		12,05%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Profesi ASN	3 Kali	72.524.642	1Kali	11.975.879	1 Kali	64.011.166		91.651.060	103.626.939		142,89%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Dukungan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Perwako	18.514.261		2.545.880	1 Perwali	5.297.493		588.630	3.134.510		16,93%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang Dikelola	5 Aplikasi	358.294.227	5Aplikasi	122.977.550	5 Aplikasi	202.388.794		156.984.641	279.962.191		78,14%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Kelengkapan Data ASN	92%	160.230.397	84%	65.527.423	90%	76.144.860		68.727.080		134.254.503		83,79%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Audit Database dan Sistem Informasi Kepegawaian	92%	27.082.820	84%	8.136.700	90%	18.119.427		8.285.843		16.422.543		60,64%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Terpenuhinya Jabatan Sesuai dengan kompetensi</b>	99%	2.044.517.091		378.420.390	98%	818.877.140		540.495.411		918.915.801		44,95%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Persetujuan Mutasi yang Diterbitkan	450 SK	283.340.036	76SK	42.571.000	150 SK	98.793.060		68.265.760		110.836.760		39,12%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Diterbitkan	3000 SK	224.327.590	1129SK	28.367.500	1000 SK	76.984.580		68.529.080		96.896.580		43,19%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sesuai dengan Kompetensi	98%	1.536.849.465	96%	307.481.890	96%	643.099.500		403.700.571		711.182.461		46,28%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Terlaksananya peningkatan kualifikasi ASN</b>	32%	3.804.118.992			30%	233.647.786		95.061.100		95.061.100		2,50%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Penilaian Kompetensi dan Potensi (Talent Pool)	135 ASN	540.000.000			0	122.470.395		0		0		0,00%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Diklat dan Tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat	1 Laporan AKD	113.759.386	1Laporan	33.772.430	1 Laporan	39.599.860		38.765.400		72.537.830		63,76%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Jabatan Fungsional yang dibina	9 Jabatan Fungsional	28.725.159	3Jabatan	3.106.400	3 Jabatan	61.577.805		47.416.450		50.522.850		175,88%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK yang diterbitkan	1071 SK	31.634.447	302SK	4.178.760	357 SK	9.999.726		8.879.250		13.058.010		41,28%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Menurunya Angka Pelanggaran Disiplin ASN</b>	7,1%	2.078.679.618			6,7%	476.077.612		399.060.288		399.060.288		19,20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	239.078.328	1Dokumen	44.030.688	1 Dokumen	94.767.521		94.372.725		138.403.413		57,89%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD Yang di Lakukan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39 OPD	48.699.705	33OPD	7.770.160	39 OPD	11.653.000		6.403.000		14.173.160		29,10%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS Yang Memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya	6 OPD	85.409.277	6OPD	22.797.500	6 OPD	158.580.694	109.522.994	132.320.494		154,93%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Terpenuhinya OPD Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Baik					200 Orang		0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Terpenuhinya Pemberian Penghargaan Kepada ASN yang Berprestasi					6 Orang		0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang Memperoleh Pembekalan Yang Memasuki Masa Pensiun					40 ASN	142.014.810	132.895.782	246.703.321		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pembinaan	80 Orang	1.213.272.917	20Orang		20 Orang		0	0		0,00%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Jumlah Kartu Pegawai/Kartu Suami/Kartu Istri yang Telah Diusulkan	750 Kartu		436Kartu	113.807.539	250 Kartu		0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Yang Ditindaklanjuti	3 Dokumen		0Dokumen		1 Dokumen		0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	Jumlah PNS yang Diambil Sumpah/Janji PNS					150 Orang		0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Yang Telah Diselesaikan	75%	164.999.537	46.7%	32.037.530	28 kasus	49.974.135	39.178.335	71.215.865		43,16%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah SK Pemberian Izin Perceraian Pegawai Yang Telah Terbitkan	36 SK	21.047.534	22SK	4.853.560	12 SK	4.591.640	2.191.640	7.045.200		33,47%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Disiplin	39 OPD	51.499.725	39OPD	9.334.520	41 OPD	14.495.812	14.495.812	23.830.332		46,27%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								0	0		#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi</b>	57%	14.466.864.615			53%	3.119.120.342	2.529.157.624	2.529.157.624		17,48%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Meningkatnya Kompetensi Teknis ASN</b>	38%	1.792.839.761		324.115.180	40%	531.609.443	483.865.626	807.980.806		45,07%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang memperoleh Pengembangan Kompetensi Teknis	520 orang	1.679.250.147	120Orang	289.216.780	120 orang	485.743.704		469.183.826		758.400.606		45,16%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang memperoleh pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis	600 orang	113.589.614	200Orang	34.898.400	200 orang	45.865.739		14.681.800		49.580.200		43,65%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Meningkatnya Kompetensi Manajerial ASN</b>	69%	12.674.024.854			65%	2.587.510.899		2.030.790.698		2.030.790.698		16,02%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	985 orang	12.562.702.187	144Orang	1.221.926.475	132 orang	2.551.827.832		2.030.790.698		3.252.717.173		25,89%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Memperoleh Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan setelah pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	213 orang	111.322.667	71 Orang	30.953.200	71 orang	35.683.067		14.501.300		45.454.500		40,83%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									0		0		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	-LEVEL 3 -3,45	11.139.849.900		8.376.972.608	-	8.837.255.000		9.059.612.615		17.436.585.223		156,52%	Inspektorat Daerah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan pelaksanaan</b>	84,5	2.497.500			-	2.640.000		0		0		0,00%	Inspektorat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.248.750			-	2 Dokumen	1.320.000	0		0		0,00%	Inspektorat Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Laporan	1.248.750			-	1 Dokumen	1.320.000	0		0		0,00%	Inspektorat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	100%	8.937.790.947	100%	6.750.814.023	-	6.851.729.612		6.777.232.285		13.528.046.308		151,36%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jasa pembayaran asuransi kesehatan	65 orang/ bulan	8.768.734.947	60 Orang	6.615.910.023	65 orang/ bulan	6.721.433.612		6.643.469.285		13.259.379.308		151,21%	Inspektorat Daerah
	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN								0		0		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	12 Dokumen	169.056.000	7 Orang	134.904.000	14 Orang	130.296.000		133.763.000		268.667.000		158,92%	Inspektorat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	14.400.000	100%	45.332.000	-	52.728.000		52.728.000		98.060.000		680,97%	Inspektorat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang	12 Laporan	14.400.000	6 Orang	45.332.000	6 Orang	52.728.000		52.728.000		98.060.000		680,97%	Inspektorat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi kepegawaian	72,11	289.342.500	74%	151.584.000	-	343.987.500		266.760.351		418.344.351		144,58%	Inspektorat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	70 Stel	46.902.000	70 Stel	55.550.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	54 Orang	232.710.000	2 Kali	12.290.000	8 kali	59.210.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	56.632.500	12 Kali	29.972.000	12 kali	71.727.500		51.529.401		81.501.401		143,91%	Inspektorat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70%	-	30 Kali	62.420.000	45 kali	157.500.000		100.225.000		162.645.000		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	4 paket	647.161.981	100%	243.397.753	-	542.064.788		700.755.438		944.153.191		145,89%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	4 paket	15.050.133	8 Jenis	8.055.610	9 Jenis	11.530.487		9.438.420		17.494.030		116,24%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan	4 paket	77.610.785	43 Jenis	70.973.100	45 Jenis	100.018.501		75.914.259		146.887.359		189,26%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan	4 paket	15.252.493	18 Jenis	10.033.800	20 Jenis	16.433.100		11.990.373		22.024.173		144,40%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan	11 Laporan	77.997.480	21 Jenis	67.831.830	11 Jenis	70.424.200		61.027.870		128.859.700		165,21%	Inspektorat Daerah
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kotak/ bungkus	12 Laporan	101.491.740	200 Buah	14.440.600	960 Buah	23.842.500		52.415.200		66.855.800		65,87%	Inspektorat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	359.759.350	80 Kali	72.062.813	180 Kali	319.816.000		511.969.316		584.032.129		162,34%	Inspektorat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pelaksanaan pengadaan	70%	584.878.572	100%	554.957.000	-	191.879.500		426.033.800		980.990.800		167,73%	Inspektorat Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan	10 unit	15.136.364	6 Jenis	19.690.000	2 Jenis	22.770.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan	15 unit	169.742.208	4 Jenis	39.267.000	7 Jenis	169.109.500		312.633.800		351.900.800		207,31%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pelaksanaan penyediaan	100%	341.448.400	100%	265.513.732	-	302.463.600		310.536.503		576.050.235		168,71%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	12 Laporan	4.900.000	150 Surat	2.568.000	310 Dokumen	3.100.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aplikasi	12 Laporan	128.200.000	10 Mbps 900 kubik 39600 kwh	96.995.732	10 Mbps 900 kubik 39600 kwh	105.600.000		115.272.903		212.268.635		165,58%	Inspektorat Daerah
	Jumlah Jasa Komunikasi								0		0		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
	Jumlah Jasa Sumber Daya Air								0		0		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
	Jumlah Jasa Sumber Daya Listrik								0		0		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang	12 Laporan	208.348.400	10 Orang	165.950.000	12 Laporan	193.763.600		192.213.600		358.163.600		171,91%	Inspektorat Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pelaksanaan pemeliharaan	5%	322.330.000	100%	365.374.100	-	549.762.000		503.566.238		868.940.338		269,58%	Inspektorat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	28 Unit	283.880.000	26 Unit	191.153.300	28 Unit	283.880.000		236.157.738		427.311.038		150,53%	Inspektorat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan	86 unit	38.450.000	20 Unit	28.102.300	90 Unit	49.100.000		52.953.000		81.055.300		210,81%	Inspektorat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket	-	-	1 Paket	129.426.500	3 Paket	196.790.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	-	-	1 Gedung	16.692.000	1 Gedung	19.992.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset yang material</b>								810.425.000		810.425.000		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan</b>								672.925.000		672.925.000		#DIV/0!	Inspektorat Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	154 Laporan	323.700.000	329 Laporan	115.670.000.000	154 Laporan	461.000.000		427.950.000		116.097.950.000		35865,91%	Inspektorat Daerah
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan	40 Laporan	40.500.000	40 Laporan	36.350.000	40 Laporan	56.550.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	40 Laporan	40.500.000	40 Laporan	43.625.000	40 Laporan	56.550.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	1 Kesepakatan	106.190.100	12 Laporan	170.400.000	12 Laporan	195.620.000		0		170.400.000		160,47%	Inspektorat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan	48 dokumen	267.900.000	8 Laporan	217.050.000	32 Laporan	253.200.000		206.050.000		423.100.000		157,93%	Inspektorat Daerah
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	70%	187.860.000	95%	209.250.000	-	265.800.000							
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan	12 Laporan	187.860.000	20 Laporan	209.250.000	12 Laporan	265.800.000		137.500.000		346.750.000		184,58%	Inspektorat Daerah
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset yang material</b>	3	832.800.000	86%	217.175.000	-	1.618.825.000		636.000.000		853.175.000		102,45%	Inspektorat Daerah
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	7	832.800.000	86%	217.175.000	-	1.618.825.000		363.000.000		580.175.000		69,67%	Inspektorat Daerah
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	40 Perangkat Daerah	486.500.000	-	-	87 Laporan	1.144.025.000		573.425.000		573.425.000		117,87%	Inspektorat Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan	40 Perangkat Daerah	134.400.000	2 Laporan	94.175.000	6 Laporan	184.900.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Inspektorat Daerah
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>KECAMATAN</b>									0		0		#DIV/0!	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH</b>	92%	8.409.488.300		6.641.324.425	74,31	6.939.737.978		6.745.551.095		13.386.875.520		159,19%	Kecamatan Kota Baru
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Nilai AKIP	A	28.603.000		29.355.050	A	15.725.700		15.725.700		45.080.750		157,61%	Kecamatan Kota Baru
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dok	7.092.000	2 Dok	12.910.000	2 Dok	12.910.100		12.910.100		18.722.900		264,00%	Kecamatan Kota Baru

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	6.568.500		7.894.600	4 Laporan	2.815.600		2.815.600		10.710.200		163,05%	Kecamatan Kota Baru
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, jumlah jasa adm. Aset dan pengadaan barang/jasa	100%	6.582.247.600		5.174.861.199	90%	5.248.855.581		5.110.052.070		10.284.913.269		156,25%	Kecamatan Kota Baru
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan	62 orang	6.167.866.600		4.911.554.449	50 Orang	4.947.244.231		4.809.640.720		9.721.195.169		157,61%	Kecamatan Kota Baru
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen	405.549.000	6 Dokumen	256.080.000	6 Dokumen	294.109.600		292.909.600		548.989.600		135,37%	Kecamatan Kota Baru
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang di buat	12 Laporan	8.832.000		7.226.750	12 Laporan	7.501.750		7.501.750		14.728.500		166,76%	Kecamatan Kota Baru
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	71.828.000		44.961.100	87%	57.324.800		57.324.800		102.285.900		142,40%	Kecamatan Kota Baru
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah jasa pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	66.472.000		40.560.000	4 Laporan	57.324.800		57.324.800		97.884.800		147,26%	Kecamatan Kota Baru
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	80%	177.278.000		88.646.700	80%	142.359.600		139.479.600		228.126.300		128,68%	Kecamatan Kota Baru
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu	80 Paket	80.000.000		56.000.000	80 paket	60.000.000		58.520.000		114.520.000		143,15%	Kecamatan Kota Baru
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah koordinasi pelaksanaan SIMPEG	2 Dokumen	23.139.000		4.420.600	2 Dokumen	22.268.900		22.268.900		26.689.500		115,34%	Kecamatan Kota Baru
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	49.139.000		8.226.100	2 Dokumen	40.090.700		40.090.700		48.316.800		98,33%	Kecamatan Kota Baru
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan per UU	5 kali	25.000.000		20.000.000	4 Orang	20.000.000		18.600.000		38.600.000		154,40%	Kecamatan Kota Baru
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	85%	366.616.700		265.083.149	85%	325.273.769		323.748.784		588.831.933		160,61%	Kecamatan Kota Baru
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	17.801.000		14.575.688	43 Paket	13.469.363		13.469.363		28.045.051		157,55%	Kecamatan Kota Baru
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	3 Paket	18.276.000		15.032.600	3 Paket	66.436.045		65.099.000		80.131.600		438,45%	Kecamatan Kota Baru
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK	3 Paket	44.414.700		62.351.661	3 Paket	26.725.961		26.725.961		89.077.622		200,56%	Kecamatan Kota Baru
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	3 Paket	38.912.000		31.889.000	3 Paket	23.812.800		23.812.800		55.701.800		143,15%	Kecamatan Kota Baru
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	1300 Ktk/bks	24.750.000		20.250.000	6 Laporan	31.500.000		31.342.500		51.592.500		208,45%	Kecamatan Kota Baru

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	25 Orang/ kali	215.050.000		115.051.900	12 Laporan	158.660.000		158.629.560		273.681.460		127,26%	Kecamatan Kota Baru
<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	jumlah kegiatan penatausahaan arsip dinamis	10 orang/ hari	7.413.000		5.932.300	4 dokumen	4.669.600		4.669.600		10.601.900		143,02%	Kecamatan Kota Baru
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	185.000.000		127.092.900	85%	547.810.520		544.918.920		672.011.820		363,25%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit				8 Unit	436.000.000		433.160.000		433.160.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebeleur	4 Paket	60.000.000		72.370.100	4 Paket	111.810.520		111.758.920		184.129.020		306,88%	Kecamatan Kota Baru
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	23.900.000		568.190.892	85%	216.289.773		199.015.171		767.206.063		3210,07%	Kecamatan Kota Baru
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	23.900.000		195.713.292	12 bulan	176.289.773		159.015.171		354.728.463		1484,22%	Kecamatan Kota Baru
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								0		0		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								0		0		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								0		0		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								0		0		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Sewa Gedung Kantor	-	-		372.477.600	2 Kantor	40.000.000		40.000.000		412.477.600		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	85%	974.015.000		343.133.435	85%	386.098.235		355.286.050		698.419.485		71,71%	Kecamatan Kota Baru
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional</i>	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	1 Tahun	164.626.000		135.583.435	21 Unit	157.583.435		128.901.250		264.484.685		160,66%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	82 Unit	709.389.000		57.550.000	82 unit	52.550.000		50.420.000		107.970.000		15,22%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	100.000.000		150.000.000	1 unit	175.964.800		175.964.800		325.964.800		325,96%	Kecamatan Kota Baru
<b>Program PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN	91%	353.296.500		151.105.515	90	333.717.315		328.292.830		479.398.345		135,69%	Kecamatan Kota Baru

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	85%	196.880.500		68.517.995	85%	190.105.995		184.681.510		253.199.505		128,61%	Kecamatan Kota Baru
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan In</i>	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kali	32.226.000		20.723.300	2 Laporan	22.288.900		22.288.900		43.012.200		133,47%	Kecamatan Kota Baru
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan	2 Kali	164.654.500		47.794.695	2 Dokumen	167.817.095		162.392.610		210.187.305		127,65%	Kecamatan Kota Baru
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		18.688.000		8.252.660	90,65	5.882.660		5.882.660		14.135.320		75,64%	Kecamatan Kota Baru
<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen	9 Dok	18.688.000		8.252.660	9 Laporan	5.882.660		5.882.660		14.135.320		75,64%	Kecamatan Kota Baru
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat</b>	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN	90,65%	137.728.000		74.334.860	90,65%	137.728.660		137.728.660		212.063.520		153,97%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan	5 Jenis	99.489.000		50.216.280	5 dokumen	111.258.080		111.258.080		161.474.360		162,30%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Non Perizinan	7 Jenis	38.239.000		24.118.580	7 Jenis	26.470.580		26.470.580		50.589.160		132,30%	Kecamatan Kota Baru
<b>Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	PERSENTASE KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN		10.744.802.000		3.660.322.107		4.216.007.137		4.136.900.736		7.797.222.843		72,57%	Kecamatan Kota Baru
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga masyarat yg dibina di kelurahan		5.372.401.000		3.660.322.107		4.216.007.137		4.136.900.736		7.797.222.843		145,13%	Kecamatan Kota Baru
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah musrenbangkel dan muskel	1 Kec/ 5 Kel	33.610.000		28.279.860	1 Kec/ 5 Kel	28.279.792		24.339.523		52.619.383		156,56%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Peningkatan sarana dan prasarana	50 Titik/ Lokasi	2.122.222.000		1.043.990.429	50 Titik/ Lokasi	973.176.965		915.715.266		1.959.705.695		92,34%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah masyarakat yang dibina di kelurahan	10 Lembaga	3.216.569.000		2.588.051.818	10 Lembaga	3.214.550.380		3.196.845.947		5.784.897.765		179,85%	Kecamatan Kota Baru
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	PERSENTASE PENINGKATAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN KONDUSIF		808.611.100		832.486.980	65%	463.900.450		426.578.950		1.259.065.930		155,71%	Kecamatan Kota Baru
<i>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan		758.583.600		805.876.240	81%	432.374.910		397.153.410		1.203.029.650		158,59%	Kecamatan Kota Baru

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dn instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 Kali	133.583.600		103.956.240	4 Laporan	84.374.910		49.393.410		153.349.650		114,80%	Kecamatan Kota Baru
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	jumlah pembinaan dan koordinasi dgn tokoh agana dan masyarakat	22 keg/bulan	625.000.000		701.920.000	22 keg/bulan	348.000.000		347.760.000		1.049.680.000		167,95%	Kecamatan Kota Baru
<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Fasilitasi penanganan perda dan perkada		50.027.500		26.610.740	2 jenis	31.525.540		29.425.540		56.036.280		112,01%	Kecamatan Kota Baru
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe</i>	Jumlah Laporan	2 Kali	50.027.500		26.610.740	4 Laporan	31.525.540		29.425.540		56.036.280		112,01%	Kecamatan Kota Baru
<b>ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>TERWUJUDNYA FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		880.832.600		555.651.129	79%	526.264.450		511.272.300		1.066.923.429		121,13%	Kecamatan Kota Baru
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah		880.832.600		555.651.129	85%	526.264.450		511.272.300		1.066.923.429		121,13%	Kecamatan Kota Baru
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	8 Dokumen	880.832.600		555.651.129	8 Dokumen	526.264.450		511.272.300		1.066.923.429		121,13%	Kecamatan Kota Baru
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	6.817.135.257		3.486.854.387	100%			7.165.781.229		10.652.635.616		156,26%	Kecamatan Telanaipura
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Nilai AKIP	100%	37.017.881		16.782.380	100%			34.904.885		51.687.265		139,63%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	25 Buku	8.234.415		9.152.500	25 Buku	7.842.300		7.822.060		16.974.560		206,14%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	30 Buku	5.540.246		1.589.280	30 Buku	5.276.425		5.216.425		6.805.705		122,84%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	30 Buku	5.537.070		0	30 Buku	5.273.400		5.198.400		5.198.400		93,88%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	30 Buku	5.480.475			30 Buku	5.219.500		5.129.500		5.129.500		93,60%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	30 Buku	6.045.270			30 Buku	5.757.400		5.682.400		5.682.400		94,00%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Buku	6.180.405		6.040.600	20 Buku	5.886.100		5.856.100		11.896.700		192,49%	Kecamatan Telanaipura



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan</b>	100%	5.942.581.397		2.941.467.402	100%			5.917.928.240		8.859.395.642		149,08%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	5.347.027.582		2.778.672.302	56 Orang	5.092.407.221		5.367.452.131		8.146.124.433		152,35%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	45.994.200		6.008.500	1 Tahun	43.804.000		43.894.000		49.902.500		108,50%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Orang	538.300.560		149.055.000	50 Orang	512.667.200		495.859.200		644.914.200		119,81%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Dokumen	5.732.238		7.731.600	7 Dokumen	5.263.635		5.263.635		12.995.235		226,70%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Dokumen	5.526.817		0	7 Dokumen	5.459.274		5.459.274		5.459.274		98,78%	Kecamatan Telanaipura
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	24.000.000		10.000.000	100%			24.000.000		34.000.000		141,67%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	3 Orang	24.000.000		10.000.000	3 Orang	24.000.000		24.000.000		34.000.000		141,67%	Kecamatan Telanaipura
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	100%	86.701.250		0	100%			66.175.000		66.175.000		76,33%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas Beserta Atributnya	77 Stell	66.701.250		0	77 Stell	63.525.000		63.525.000		63.525.000		95,24%	Kecamatan Telanaipura
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	20.000.000		0	4 Kali	20.000.000		2.650.000		2.650.000		13,25%	Kecamatan Telanaipura
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	275.594.400		136.287.440	100%			234.943.466		371.230.906		134,70%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	7.594.400		3.745.500	4 Jenis	3.522.200		3.522.200		7.267.700		95,70%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	7.000.000		48.932.400	2 Jenis	5.744.640		5.744.640		54.677.040		781,10%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Jenis ATK	25 Jenis	60.000.000		28.877.360	25 Jenis	60.000.033		80.296.295		109.173.655		181,96%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	6.000.000		11.412.180	2 Jenis	4.980.580		10.413.385		21.825.565		363,76%	Kecamatan Telanaipura
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Makanan dan Minuman	1 Tahun	95.000.000		43.320.000	1 Tahun	0		0		43.320.000		45,60%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	22 Orang/Tahun	100.000.000		0	22 Orang/Tahun	100.000.000		134.966.946		134.966.946		134,97%	Kecamatan Telanaipura

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	52.573.080		0	100%			492.209.970		492.209.970		936,24%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit				1 Unit	413.000.000		411.710.000		411.710.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebeleur	5 Unit	21.000.000		0	5 Unit	19.299.999		19.299.970		19.299.970		91,90%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	31.573.080		0	5 Unit	30.069.600		61.200.000		61.200.000		193,84%	Kecamatan Telanaipura
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	171.771.749		274.914.765	100%			130.255.011		405.169.776		235,88%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat Menyurat	2 Jenis	5.250.000		6.490.000	2 Jenis	5.000.000		5.000.000		11.490.000		218,86%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	20 Rekening	135.021.749		41.647.265	20 Rekening	128.592.142		125.255.011		166.902.276		123,61%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Orang	31.500.000		233.267.500	2 Orang			0		233.267.500		740,53%	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	226.895.500		107.402.400	100%			199.189.657		306.592.057		135,12%	Kecamatan Telanaipura
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17 Unit	150.423.000		42.642.400	17 Unit	143.260.000		124.004.701		166.647.101		110,79%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48 Unit	21.472.500		14.860.000	48 Unit	20.450.000		20.384.956		35.244.956		164,14%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Titik	55.000.000		49.900.000	1 Titik	55.000.000		54.800.000		104.700.000		190,36%	Kecamatan Telanaipura
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	9800%	1.956.436.576		32.292.564	9500%			1.987.718.012		2.020.010.576		103,25%	Kecamatan Telanaipura
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	47.864.199		5.851.364	100%			45.659.650		51.511.014		107,62%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</i>	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	4.385.169		0	2 Kegiatan	4.176.351		4.151.050		4.151.050		94,66%	Kecamatan Telanaipura
<i>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	1 Tahun	43.479.030		5.851.364	1 Tahun	41.408.600		41.508.600		47.359.964		108,93%	Kecamatan Telanaipura

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada</i>	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	1.897.677.230		18.822.200	100%			1.931.682.032		1.950.504.232		102,78%	Kecamatan Telanaipura
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	2 Kegiatan	1.850.464.503		18.822.200	2 Kegiatan	1.762.347.146		1.887.401.265		1.906.223.465		103,01%	Kecamatan Telanaipura
<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Jenis	47.212.727		0	1 Jenis	44.964.502		44.280.767		44.280.767		93,79%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Persentase Pelayanan yang Diakomodir	100%	10.895.147		7.619.000	100%			10.376.330		17.995.330		165,17%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Pelayanan Perizinan non-usaha yang Dipenuhi	3 Jenis	4.720.779		6.403.000	3 Jenis	4.495.980		4.495.980		10.898.980		230,87%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Pelayanan non-perizinan yang Dipenuhi	4 Jenis	6.174.368		1.216.000	4 Jenis	5.880.350		5.880.350		7.096.350		114,93%	Kecamatan Telanaipura
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80%	3.082.935.546			70%			3.861.967.752		3.861.967.752		125,27%	Kecamatan Telanaipura
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	80%	3.082.935.546			60%			3.861.967.752		3.861.967.752		125,27%	Kecamatan Telanaipura
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Musrenbang Kelurahan	6 Kelurahan	26.668.635		11.219.145	6 Kelurahan	25.398.700		23.061.700		34.280.845		128,54%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun	100%	822.504.431		0	100%	783.337.553		751.141.912		751.141.912		91,32%	Kecamatan Telanaipura
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dibina di Kelurahan	8 Lembaga	2.233.762.480		697.497.581	8 Lembaga	2.547.392.838		3.087.764.140		3.785.261.721		169,46%	Kecamatan Telanaipura
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	632.968.956		36.936.400	100%	182.827.577		188.450.577		225.386.977		35,61%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	615.731.736		14.912.500	100%	166.411.177		172.061.177		186.973.677		30,37%	Kecamatan Telanaipura
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal</i>	Jumlah Pembinaan	2 Pembinaan	174.731.736		14.912.500	2 Pembinaan	166.411.177		172.061.177		186.973.677		107,01%	Kecamatan Telanaipura
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	Persentase Rapat-Rapat dan Koordinasi	100%	17.237.220		22.023.900	100%			16.389.400		38.413.300		222,85%	Kecamatan Telanaipura

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi	6 Kali	17.237.220		22.023.900	6 Kali	16.416.400		16.389.400		38.413.300		222,85%	Kecamatan Telanaipura	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	700.969.220		110.608.956	100%			626.609.333		737.218.289		105,17%	Kecamatan Telanaipura	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	100%	700.969.220		110.608.956	100%			626.609.333		737.218.289		105,17%	Kecamatan Telanaipura	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka	Jumlah Pembinaan	7 Pembinaan	71.271.165		14.675.000	7 Pembinaan	67.877.300				65.927.300		80.602.300	113,09%	Kecamatan Telanaipura
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	3 Kegiatan	629.698.055		95.933.956	3 Kegiatan	599.712.433				560.682.033		656.615.989	104,27%	Kecamatan Telanaipura
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	975.000.000			100%	8.306.421.286				20.796.116.797		20.796.116.797	2132,94%	Kecamatan Jelutung
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Nilai AKIP		22.932.960			85%	23.944.263				36.801.726		36.801.726	160,48%	Kecamatan Jelutung
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.695.280			2 Dokumen	4.833.563				9.667.126		9.667.126	261,61%	Kecamatan Jelutung
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.964.000			1 Dokumen	3.525.000				7.050.000		7.050.000	237,85%	Kecamatan Jelutung
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	1 Dokumen	2.622.000			1 Dokumen	3.400.000				3.400.000		3.400.000	129,67%	Kecamatan Jelutung
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.520.280			1 Dokumen	3.898.900				7.797.800		7.797.800	172,51%	Kecamatan Jelutung
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	1 Dokumen	4.402.800			1 Dokumen	4.796.300				4.796.300		4.796.300	108,94%	Kecamatan Jelutung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	4.728.600			3 Dokumen	3.490.500				4.090.500		4.090.500	86,51%	Kecamatan Jelutung
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tertib Administrasi Keuangan	100%	7.451.369.174			100%	6.662.134.873				16.499.621.220		16.499.621.220	221,43%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	6.977.998.694			63 Orang	5.876.911.047				15.138.780.740		15.138.780.740	216,95%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3.997.200			3 Dokumen	4.679.600				4.679.600		4.679.600	117,07%	Kecamatan Jelutung
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Orang	454.536.000			47 Orang	582.442.800				1.347.357.800		1.347.357.800	296,42%	Kecamatan Jelutung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	7 Dokumen	14.837.280			7 Dokumen	8.803.080				11.005.280		11.005.280	74,17%	Kecamatan Jelutung
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	46.752.000			100%	41.760.000				99.820.000		99.820.000	213,51%	Kecamatan Jelutung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang	7 Orang	46.752.000			7 Orang	41.760.000		97.440.000		97.440.000		208,42%	Kecamatan Jelutung
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	63.000.000			100%	83.750.000		119.977.641		119.977.641		190,44%	Kecamatan Jelutung
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	85 Pcs	51.000.000			85 Pcs	63.750.000		63.686.000		63.686.000		124,87%	Kecamatan Jelutung
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	12.000.000			4 Kali	20.000.000		56.291.641		56.291.641		469,10%	Kecamatan Jelutung
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah								810.429.132		810.429.132		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik	11 Jenis	5.794.404			11 Jenis	34.303.610,00		99.112.618		99.112.618		1710,49%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor	8 Jenis dan 35 Jenis	140.725.728			8 Jenis dan 35 Jenis	77.668.640,00		203.088.850		203.088.850		144,32%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	44.988.636			8 Jenis	21.087.121,00		40.922.711		40.922.711		90,96%	Kecamatan Jelutung
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	1090 Kotak	23.220.000			1090 Kotak	30.225.000,00		59.745.000		59.745.000		257,30%	Kecamatan Jelutung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	25 O/K	139.597.800			25 O/K	175.000.000,00		407.559.953		407.559.953		291,95%	Kecamatan Jelutung
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		123.327.000			100%	495.100.000		1.817.272.000		1.817.272.000		1473,54%	Kecamatan Jelutung
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur		80.057.400			4 Unit	37.000.000,00		69.560.000		69.560.000		86,89%	Kecamatan Jelutung
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		43.269.600			14 Unit	458.100.000,00		1.747.712.000		1.747.712.000		4039,12%	Kecamatan Jelutung
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	175.876.980		451.197.854		451.197.854		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat		10.052.376			2108 Surat	8.876.980,00		25.121.480		25.121.480		249,91%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air		214.466.543			2400 Kubik, 24.7 mbps, 2400 Kwh	167.000.000,00		426.076.374		426.076.374		198,67%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							0		0		0		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		283.252.800			100%	485.570.799		960.997.224		960.997.224		339,27%	Kecamatan Jelutung
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	21 Unit dan 21 Unit	156.436.800			21 Unit dan 21 Unit	168.930.799,00		273.551.224		273.551.224		174,86%	Kecamatan Jelutung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18 Unit	14.616.000			18 Unit	24.710.000,00		78.305.000		78.305.000		535,75%	Kecamatan Jelutung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	59.400.000			2 Unit	291.930.000,00		609.141.000		609.141.000		1025,49%	Kecamatan Jelutung
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan					100%	217.213.870		475.985.456		475.985.456		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		28.383.528			100%	61.307.940		77.738.040		77.738.040		273,88%	Kecamatan Jelutung
<b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</b>	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	10 Kali/Keg	14.882.280			10 Kali/Keg	12.917.100,00		29.347.200		29.347.200		197,20%	Kecamatan Jelutung
<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	12 Kali/Keg	13.501.248			12 Kali/Keg	48.390.840,00		122.694.210		122.694.210		908,76%	Kecamatan Jelutung
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ad</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		76.637.652			100%	71.315.510		184.997.970		184.997.970		241,39%	Kecamatan Jelutung
<b>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</b>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	3 Kali/Keg	70.640.400			3 Kali/Keg	67.147.300,00		177.867.750		177.867.750		251,79%	Kecamatan Jelutung
<b>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</b>	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	5.997.252			6 Dokumen	4.168.210,00		7.130.220		7.130.220		118,89%	Kecamatan Jelutung
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	1	18.267.252			100%	84.590.420		213.249.446		213.249.446		1167,39%	Kecamatan Jelutung
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</b>	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	13.401.000			3 Jenis	79.911.900,00		204.760.926		204.760.926		1527,95%	Kecamatan Jelutung
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</b>	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	14 Jenis	4.866.252			14 Jenis	4.678.520,00		8.488.520		8.488.520		174,44%	Kecamatan Jelutung
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					100%	4.741.276.088		6.998.118.796		6.998.118.796		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>									0		0		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>							2.550.000		0		0		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	70%	4.418.950.080			80%	4.741.276.088		6.998.118.796		6.998.118.796		158,37%	Kecamatan Jelutung
<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</b>	Jumlah Musrebangkel dan Muskel	7 kali/keg	14.760.000			7 kali/keg	9.750.000,00		16.550.416		16.550.416		112,13%	Kecamatan Jelutung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	56 titik/lokasi	1.176.000.000			56 titik/lokasi	1.100.000.000,00		1.086.889.550	1.086.889.550		92,42%	Kecamatan Jelutung	
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	7 lembaga	3.228.190.080			7 lembaga	3.631.526.088,00		5.894.678.830	5.894.678.830		182,60%	Kecamatan Jelutung	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif					100%	525.085.150		865.698.450	865.698.450		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		1.204.540.884			100%	525.085.150		865.698.450	865.698.450		71,87%	Kecamatan Jelutung	
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Pembinaan		56.452.884			0	105.085.150,00		157.860.450	157.860.450		279,63%	Kecamatan Jelutung	
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>			1.148.088.000			0	420.000.000,00		707.838.000	707.838.000		61,65%	Kecamatan Jelutung	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100%	368.032.580		555.529.080	555.529.080		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		501.146.885			100%	368.032.580		555.529.080	555.529.080		110,85%	Kecamatan Jelutung	
<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka</i>	Jumlah Pembinaan		55.000.000			2 Kali	2.588.790,00		5.552.580	5.552.580		10,10%	Kecamatan Jelutung	
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan		446.146.885			14 Kegiatan	365.443.790,00		666.185.400	666.185.400		149,32%	Kecamatan Jelutung	
							13.226.725.678		0	0		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	100%	5.215.185.768	100%	4.814.969.680	100%	5.500.915.103		12.553.917.963	17.368.887.643		333,04%	Kecamatan Pasar	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Nilai AKIP	85%	20.956.540	85%	13.134.050	85%	19.051.400		28.921.600	42.055.650		200,68%	Kecamatan Pasar	
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dok	2.451.460	2 Dok	1.703.900	2 Dok	2.228.600		4.344.600	6.048.500		246,73%	Kecamatan Pasar	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	3.685.000	1 Dok	2.600.000	1 Dok	3.350.000		10.050.000	12.650.000		343,28%	Kecamatan Pasar	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	1 Dok	3.355.000	1 Dok	1.100.000	1 Dok	3.050.000		2.950.000	4.050.000		120,72%	Kecamatan Pasar	
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	3.797.420	1 Dok	1.476.750	1 Dok	3.452.200		4.804.000	6.280.750		165,40%	Kecamatan Pasar	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	1 Dok	2.530.000	1 Dok	2.025.000	1 Dok	2.300.000		2.200.000	4.225.000		167,00%	Kecamatan Pasar	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	5.137.660	4 Dok	4.228.400	4 Dok	4.670.600		4.573.000	8.801.400		171,31%	Kecamatan Pasar	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan</b>	100%	3.978.352.477	100%	4.395.048.095	100%	4.961.838.428		9.320.032.558	12.713.120.657		319,56%	Kecamatan Pasar	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	33 Org	3.552.244.355	32 Org	3.167.390.039	33 Org	3.571.067.408		8.407.841.158		11.575.231.197		325,86%	Kecamatan Pasar
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	30 orang	420.726.240	30 orang	221.520.000	30 orang	382.878.400		901.715.200		1.123.235.200		266,98%	Kecamatan Pasar
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran/Tahunan	9 Dok	5.381.882	9 Dok	4.178.060	9 Dok	7.892.620		10.476.200		14.654.260		272,29%	Kecamatan Pasar
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	100%	39.336.000	100%	36.160.000	100%	35.760.000		77.480.000		113.640.000		288,90%	Kecamatan Pasar
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang	6 Org	39.336.000	9 Org	36.160.000	6 Org	35.760.000		77.480.000		113.640.000		288,90%	Kecamatan Pasar
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	100%	62.700.000	100%	54.000.000	100%	57.000.000		113.054.400		167.054.400		266,43%	Kecamatan Pasar
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	62 Stel	56.100.000	60 Stel	42.000.000	62 Stel	51.000.000		101.054.400		143.054.400		255,00%	Kecamatan Pasar
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Bimtek dan Peraturan Per-UU an	1 Kali	6.600.000	2 Kali	12.000.000	1 Kali	6.000.000		12.000.000		24.000.000		363,64%	Kecamatan Pasar
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Tertib Administrasi Umum</b>	100%	244.510.750	100%	181.616.401	100%	308.690.730		570.015.612		751.632.013		307,40%	Kecamatan Pasar
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik	5 Jenis	12.415.810	5 Jenis	7.998.650	6 Jenis	14.689.430		26.677.200		34.675.850		279,29%	Kecamatan Pasar
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor	25 Jenis dan 10 Jenis	63.582.090	25 Jenis dan 10 Jenis	41.853.900	15 Jenis dan 13 Jenis	72.706.700		144.407.860		186.261.760		292,95%	Kecamatan Pasar
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	22.064.350	5 Jenis	30.265.851	6 Jenis	38.159.600		65.749.200		96.015.051		435,16%	Kecamatan Pasar
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Makanan dan Minuman	1350 Kotak	36.448.500	1350 Kotak	20.250.000	2209 Kotak	33.135.000		40.470.000		60.720.000		166,59%	Kecamatan Pasar
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	20 OK	110.000.000	20 OK	81.248.000	20 OK	150.000.000		292.711.352		373.959.352		339,96%	Kecamatan Pasar
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	181.665.001	100%	132.001.599	100%	537.924.545		1.192.252.100		1.324.253.699		728,95%	Kecamatan Pasar
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	370.700.000	-	-	5 Unit	367.000.000		791.633.200		791.633.200		213,55%	Kecamatan Pasar
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebel	11 Unit	21.999.997	-	-	11 Unit	19.999.997		54.398.500		54.398.500		247,27%	Kecamatan Pasar
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	126.665.004	17 Unit	102.001.299	23 Unit	120.924.548		286.220.600		388.221.899		306,49%	Kecamatan Pasar



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sapras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	33.000.000	2 Unit	30.000.300	1 Unit	30.000.000		59.999.800		90.000.100		272,73%	Kecamatan Pasar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	422.983.000	100%	844.999.531	100%	329.530.000		618.653.384		1.463.652.915		346,03%	Kecamatan Pasar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi/Jumlah Tenaga Administrasi Umum	5 Orang	114.983.000	1050 Lembar	10.500.000	5 Orang	104.530.000		243.820.000		254.320.000		221,18%	Kecamatan Pasar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Listrik, Jumlah Jasa Sumber Daya Air	10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik	308.000.000	10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik	240.000.331	10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik	225.000.000		374.833.384		614.833.715		199,62%	Kecamatan Pasar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	264.682.000	100%	159.970.000	100%	251.120.000		436.827.181		596.797.181		225,48%	Kecamatan Pasar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR	25 Unit	224.477.000	21 Unit	143.720.000	25 Unit	204.070.000		363.877.181		507.597.181		226,12%	Kecamatan Pasar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC/Laptop dan Printer	25 Unit 15 Unit	40.205.000	25 Unit	16.250.000	25 Unit 15 Unit	36.550.000		63.000.000		79.250.000		197,11%	Kecamatan Pasar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	347.724.850	100%	82.414.200	100%	313.651.000		427.413.800		509.828.000		146,62%	Kecamatan Pasar
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	82.182.100	100%	19.251.500	100%	77.811.000		171.647.000		190.898.500		232,29%	Kecamatan Pasar
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	10 Kali	82.182.100	10 Kali	19.251.500	10 Kali	77.811.000		171.647.000		190.898.500		232,29%	Kecamatan Pasar
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ad	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan	100%	118.422.700	100%	37.852.000	100%	102.932.000		245.047.200		282.899.200		238,89%	Kecamatan Pasar
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan/Jumlah Tenaga Administrasi	1 Kali 3 Orang	118.422.700	1 Kali	37.852.000	1 Kali 3 Orang	102.932.000		245.047.200		282.899.200		238,89%	Kecamatan Pasar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakamodir	100%	147.120.050	100%	25.310.700	100%	132.908.000		278.205.000		303.515.700		206,30%	Kecamatan Pasar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan/Jumlah Tenaga Administrasi	3 Jenis 5 Orang	133.798.500	3 Jenis	17.090.000	3 Jenis 5 Orang	120.797.500		262.350.000		279.440.000		208,85%	Kecamatan Pasar
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan	14 Jenis	13.321.550	14 Jenis	8.220.700	14 Jenis	12.110.500		15.855.000		24.075.700		180,73%	Kecamatan Pasar

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.391.429.607	100%	1.269.211.173	100%	1.678.243.360		1.825.993.094		3.095.204.267		222,45%	Kecamatan Pasar
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan	70%	1.391.429.607	80%	1.269.211.173	80%	1.678.243.360		2.395.719.237		3.664.930.410		263,39%	Kecamatan Pasar
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Musrebangkel dan Muskel	4 Kali	17.841.945	4 Kali	15.663.480	4 Kali	16.628.040		13.714.500		29.377.980		164,66%	Kecamatan Pasar
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	23 Lokasi	465.135.000	23 Lokasi	457.500.000	23 Lokasi	435.350.000		460.676.726		918.176.726		197,40%	Kecamatan Pasar
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan	34 Lembaga	908.452.662	34 Lembaga	796.047.693	34 Lembaga	1.226.265.320		1.921.328.011		2.717.375.704		299,12%	Kecamatan Pasar
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	308.768.280	100%	31.252.500	100%	582.387.635		369.043.350		400.295.850		129,64%	Kecamatan Pasar
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	308.768.280	100%	31.252.500	100%	582.387.635		588.845.850		620.098.350		200,83%	Kecamatan Pasar
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	60 Lokasi	308.768.280	60 Lokasi	31.252.500	60 Lokasi	294.387.635		588.845.850		620.098.350		200,83%	Kecamatan Pasar
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	60 Lokasi	-	0	-	60 Lokasi	288.000.000		697.360.000		697.360.000		#DIV/0!	Kecamatan Pasar
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	539.400.951	100%	318.638.600	100%	460.157.301		547.568.500		866.207.100		160,59%	Kecamatan Pasar
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	100%	539.400.951	100%	318.638.600	100%	460.157.301		756.943.500		1.075.582.100		199,40%	Kecamatan Pasar
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Umum di Kecamatan	17 Keg.	539.400.951	15 Keg.	318.638.600	17 Keg.	460.157.301		756.943.500		1.075.582.100		199,40%	Kecamatan Pasar
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.767.203.498	100,00%	6.952.920.583	100%	0		17.333.531.432		24.286.452.015		312,68%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Peningkatan Nilai AKIP	100%	49.757.574	100%	24.279.849	100%	#N/A		236.329.930		260.609.779		523,76%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	22 Buku	66.924.825	10 Dokumen	4.412.049	2 Dokumen	62.160.600		148.712.400		153.124.449		228,80%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.662.000	2 Dokumen	4.233.200	2 Dokumen	4.521.320		12.944.800		17.178.000		303,39%	Kecamatan Jambi Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.937.000	2 Dokumen	4.233.200	1 Dokumen	4.150.603		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat	30 Buku	5.219.574	2 Dokumen	4.683.200	1 Dokumen	4.538.760		12.481.900		17.165.100		328,86%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD Perangkat Daerah	25 Buku	5.937.000	2 Dokumen	3.933.200	1 Dokumen	4.847.200		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	20 Buku	27.002.000	2 Dokumen	2.785.000	2 Dokumen	23.728.760		53.015.600		55.800.600		206,65%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Tertib Administrasi Keuangan</b>	100%	6.087.920.893	100%	5.415.981.364	100%	#N/A		12.635.517.028		18.051.498.392		296,51%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	54 Orang	5.737.678.343	54 Orang	5.092.854.264	56 Orang	4.817.322.233		12.044.924.428		17.137.778.692		298,69%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.905.750	1 Tahun	4.900.100	1 Tahun	8.690.760		7.470.600		12.370.700		649,13%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Orang	345.000.000	50 Orang	308.862.000	50 Orang	336.240.000		715.569.000		1.024.431.000		296,94%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	64 Kali	3.336.800	7 Dokumen	9.365.000	7 Dokumen	3.663.020		9.842.800		19.207.800		575,64%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	100%	58.440.000	100%	39.360.000	100%			85.280.000		124.640.000		213,28%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100%	58.440.000	100%	39.360.000	100%	39.360.000		85.280.000		124.640.000		213,28%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Profesionalitas ASN													
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Bimbingan Teknis													
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum</b>	100%	359.195.800	100%	234.251.039	100%			572.769.902		807.020.941		224,67%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Jenis	15.628.250	4 Jenis	21.133.229	4 Jenis	13.572.130		27.236.180		48.369.409		309,50%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	38.445.000	14 Jenis	154.016.280	14 Jenis	41.082.470		118.265.532		272.281.812		708,24%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Cetak dan Penggandaan	7 Jenis 150000 L	39.888.200	2 Jenis	15.941.530	2 Jenis	14.195.500		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Makanan dan Minuman	2400 Kotak	32.800.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	11.250.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20 Kali	125.000.000	22 Orang/Tahun	28.160.000	22 Orang/Tahun	131.270.000		368.075.690		396.235.690		316,99%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	261.060.498	100%	118.774.400	100%			1.352.285.000		1.471.059.400		563,49%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					7 Unit	390.000.000		1.352.285.001		1.352.285.001		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	570.918.733	100%	675.552.931	100%	528.437.600		1.003.927.273		1.679.480.204		294,17%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat Menyurat	200 Surat	35.829.200	2 Jenis	10.092.340	2 Jenis			162.963.400		173.055.740		483,00%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245 Kubik 180mbps 100075 kwh	301.645.133	20 Rekening	144.600.191	20 Rekening	194.000.000		307.990.473		452.590.664		150,04%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor			28 Orang	28.990.000	2 Orang	17.500.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	33 Orang	233.444.400	28 Orang	491.870.400	2 Orang	242.948.400		489.443.400		981.313.800		420,36%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	438.350.000	100%	297.080.000	100%			278.372.800		575.452.800		131,28%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	25 Unit 3 Unit	190.420.000	17 Unit	124.400.000	17 Unit	164.750.000		278.372.801		402.772.801		211,52%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6 Unit 2 Paket	179.480.000	1 Titik	172.680.000	1 Titik	35.595.520		0		172.680.000		96,21%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	100%	2.657.272.759	92%	220.673.570	87%	2.200.502.991		804.491.099		1.025.164.669		38,58%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	100%	484.914.720	100%	83.839.470	100%	378.776.890		804.491.100		888.330.570		183,19%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</i>	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Laporan	392.224.036	2 Kegiatan	49.177.670	2 Kegiatan	56.915.600		108.729.600		157.907.270		40,26%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			1 Tahun	34.661.800	1 Tahun	321.861.290		695.761.500		730.423.300		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelayanan yang Diakomodir</b>	100%	2.089.019.321	100%	19.203.200	100%	1.821.726.101		4.269.017.591		4.288.220.791		205,27%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dipenuhi	5 Perizinan	34.480.280	3 Jenis	19.203.200	3 Jenis	79.085.800		156.769.600		175.972.800		510,36%	Kecamatan Jambi Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Dipenuhi	1 Tahun	1.992.640.301			14 Jenis	1.742.640.301		4.112.247.991		4.112.247.991		206,37%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan</b>	1 Tahun	1.992.640.301			14 Jenis	2.910.105.712		6.467.775.287		6.467.775.287		324,58%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	65%	2.980.297.874	60%	2.946.241.422	163%	2.910.105.712		2.699.831.780		5.646.073.202		189,45%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Musrenbang Kelurahan	5 Kelurahan	14.724.900	5 Kelurahan	14.653.164	6 Kelurahan	14.724.900		0		14.653.164		99,51%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun	100%	818.344.435	100%	732.096.572	100%	748.152.273		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dibina di Kelurahan	8 Lembaga	2.147.228.539	8 Lembaga	2.199.491.686	8 Lembaga	2.147.228.539		5.043.090.981		7.242.582.667		337,30%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif</b>	100%	132.610.000	100%	754.780.000	100%	468.127.800		745.850.000		1.500.630.000		1131,61%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan</i>	100%	69.512.099	100%	726.580.000	100%	376.500.000		745.850.000		1.472.430.000		2118,24%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Persentase Jumlah Lokasi yang Diterbitkan	4 Kali	69.512.100	100%	1.500.000	100%	24.000.000		52.000.000		53.500.000		76,97%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Terpenuhinya Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi	-	-	100%	725.080.000	100%	352.500.000		693.850.000		1.418.930.000		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA</b>	100%	66.305.000	100%	28.200.000	100%	91.627.800		184.570.100		212.770.100		320,90%	Kecamatan Jambi Selatan
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe</i>	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi	2 Kegiatan	66.305.000	5 Kelurahan	28.200.000	5 Kelurahan	91.627.800		184.570.101		212.770.101		320,90%	Kecamatan Jambi Selatan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	370.695.300	100%	206.500.000	100%	145.070.000		243.482.500		449.982.500		121,39%	
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah</i>	Jumlah Kegiatan Pembinaan	7 kegiatan	370.695.300	7 kegiatan	206.500.000	7 kegiatan	145.070.000		243.482.500		449.982.500		121,39%	
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	3 Kegiatan	370.695.300	3 Kegiatan	206.500.000	3 Kegiatan	145.070.000		243.482.500		449.982.500		121,39%	Kecamatan Jambi Selatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	#####	100,00	9.655.179.062	100	10.023.195.226		7.323.781.450	16.978.960.512		52,95%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP Kecamatan	A	110.150.000,00	BB	9.645.100	BB	112.119.550		110.369.900	120.015.000		108,96%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 dokumen	82.000.000,00	7 dokumen	18.315.550	7 Dokumen	91.889.150		90.139.500	108.455.050		132,26%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	6 laporan	28.150.000,00	2 Laporan	4.186.150	2 Laporan	20.230.400		20.230.400	24.416.550		86,74%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tertib Administrasi Keuangan	100%	#####	100,00	7.650.778.950	100%	7.866.777.316		7.623.144.886	15.273.923.836		67,23%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70 Orang	21.216.798.940	70 orang	7.222.756.550	72 orang	7.433.131.816		7.192.216.886	14.414.973.436		67,94%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	24.062.000,00	1 dokumen	3.050.600	1 dokumen	3.609.900		3.052.900	6.103.500		25,37%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan an Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.449.813.100,00	33 dokumen	417.790.300	33 Dokumen	424.874.200		422.933.700	840.724.000		57,99%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	Jumlah laporan keuangan bulanan	36 laporan	28.986.000,00	12 laporan	7.181.500	12 laporan	5.161.400		4.941.400	12.122.900		41,82%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	121.200.000,00	100,00	21.360.000	100%	26.927.800		26.927.800	48.287.800		39,84%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan	121.200.000,00	12 laporan	21.360.000	12 laporan	26.927.800		26.927.800	48.287.800		39,84%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tertib administrasi kepegawaian	100%	366.360.000,00	50,00	61.425.100	100%	92.237.800		92.528.700	153.953.800		42,02%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	354 stel	237.000.000,00	114 pcs	56.925.000	116 stel	87.000.000		86.269.200	143.194.200		60,42%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	6 dokumen	25.360.000,00	2 dokumen	4.500.100	2 Dokumen	5.237.800		6.259.500	10.759.600		42,43%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	18 orang	104.000.000,00	-	-	1 orang	-		0	0		0,00%	Kecamatan Jambi Timur	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tertib Administrasi Umum	100%	1.393.329.300,00	50,00	313.870.100	100%	207.528.850		324.447.716	638.317.816		45,81%	Kecamatan Jambi Timur	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	26.500.000,00	3 paket	10.169.500	3 paket	3.867.600		3.633.600		13.803.100		52,09%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 paket	405.000.000,00	3 paket	121.608.200	3 paket	134.091.900		132.347.530		253.955.730		62,71%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket barang Cetak dan	6 paket	52.775.000,00	2 paket	12.687.400	2 paket	12.340.350		12.091.750		24.779.150		46,95%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36 laporan	155.380.000,00	12 laporan	45.240.000	12 laporan	57.229.000		55.039.000		100.279.000		64,54%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39 laporan	577.127.000,00	12 laporan	114.205.000	12 laporan	150.000.000		149.150.836		263.355.836		45,63%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Barang penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.823.731.700,00	100,00	93.124.200	100%	1.013.958.700,00		530.429.700		623.553.900		34,19%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	11 unit	782.000.000,00	0%	-	10 unit	482.000.000		480.471.000		480.471.000		61,44%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket mebel yang disediakan	43 unit	299.514.700,00	2 unit	6.716.600	10 unit	482.000.000		49.958.700		56.675.300		18,92%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.502.801.920,00	100,00	1.110.608.612	100%	233.159.410		225.821.067		1.336.429.679		38,15%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 laporan	12.000.000,00	12 laporan	2.910.000	12 laporan	82.479.200		82.479.200		85.389.200		711,58%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	525.198.320,00	12 laporan	139.545.812	12 laporan	150.680.210		143.341.867		282.887.679		53,86%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	2.031.650.000,00	100,00	381.647.000	100%	470.485.800		441.231.600		822.878.600		40,50%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a</i>	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 kendaraan	552.560.000,00	31 kendaraan	171.677.000	31 kendaraan	255.828.200		226.574.000		398.251.000		72,07%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	106 unit	66.490.000,00	6 unit	4.470.000	12 unit	12.180.000		12.180.000		16.650.000		25,04%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 gedung	1.412.600.000,00	1 gedung	205.500.000	1 gedung	202.477.600		202.477.600		407.977.600		28,88%	Kecamatan Jambi Timur
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	98	481.405.460	0,00	113.223.800	95	560.834.000		585.829.250		699.053.050		145,21%	Kecamatan Jambi Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	143.322.000	100,00%	20.641.300	100%	256.499.300		254.332.300		274.973.600		191,86%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</i>	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 dokumen	78.422.000	5 dokumen	3.787.500	5 dokumen	250.796.400		249.056.600		252.844.100		322,41%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	64.900.000	1 laporan	16.853.800	1 laporan	5.702.900		5.275.700		22.129.500		34,10%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ad</i>	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	225.503.460	100%	51.924.400	100%	304.334.700		298.130.500		350.054.900		155,23%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	30 dokumen	162.845.960	7 dokumen	38.322.300	10 dokumen	273.095.700		268.321.800		306.644.100		188,30%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	12 laporan	62.657.500	3 laporan	13.602.100	3 laporan	31.239.000		29.808.700		43.410.800		69,28%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP	100%	112.580.000	100,00%	40.658.100	100%	67.017.500		66.113.300		106.771.400		94,84%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 laporan	45.800.000	4 laporan	8.311.600	1 laporan	40.180.200		39.579.600		47.891.200		104,57%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	27 laporan	66.780.000	9 laporan	32.346.500	7 laporan	26.837.300		26.533.700		58.880.200		88,17%	Kecamatan Jambi Timur
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	90%	13.452.785.620	80%	3.133.000.972	80%	4.989.726.850		4.730.510.696		7.863.511.668		58,45%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	90%	13.452.785.620	80%	4.032.512.980	80%	4.989.726.850		4.730.510.696		8.763.023.676		65,14%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90 lembaga	150.890.000	90 lembaga	44.864.000	90 lembaga	42.170.350		38.258.910		83.122.910		55,09%	Kecamatan Jambi Timur



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	108 sarana	3.682.255.800	28 sarana	1.046.882.380	38 sarana	1.205.806.000		1.112.070.156		2.158.952.536		58,63%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	90 lembaga	9.619.639.820	72 lembaga	2.940.766.600	90 lembaga	3.741.750.500		3.580.181.630		6.520.948.230		67,79%	Kecamatan Jambi Timur
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	3.119.430.000	36,56%	1.427.440.800	90%	640.518.700		533.099.600		1.960.540.400		62,85%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan	100%	2.923.120.000	40,62%	1.360.315.500	80%	640.518.700		581.154.800		1.941.470.300		66,42%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Hasil sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	21 laporan	136.500.000	5 laporan	21.795.500	4 laporan	100.518.700							
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	27 laporan	2.786.620.000	9 laporan	1.126.667.500	9 laporan	540.000.000		534.140.000		1.660.807.500		59,60%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase fasilitasi penerapan dan penegakan perda/perkada	100%	196.310.000	100,00%	27.379.200	100%	53.532.200		51.701.000		79.080.200		40,28%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe</i>	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara republik indonesia	50 laporan	196.310.000	10 laporan	27.379.200	16 laporan	53.532.200		51.701.000		79.080.200		40,28%	Kecamatan Jambi Timur
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1.717.121.800	100,00	71.376.100	100%	1.288.711.700		1.273.516.950		1.344.893.050		78,32%	Kecamatan Jambi Timur
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%	1.717.121.800	100,00	71.376.100	100%	1.288.711.700		1.273.516.950		1.344.893.050		78,32%	Kecamatan Jambi Timur

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka</i>	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, regional, dan nasional	300 orang	57.500.000	100 orang	7.735.600	100 orang	7.074.900		4.979.900		12.715.500		22,11%	Kecamatan Jambi Timur
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	21 dokumen	1.659.621.800	7 dokumen	63.640.500	7 Dokumen	1.281.636.800		1.268.537.050		1.332.177.550		80,27%	Kecamatan Jambi Timur
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5.732.566.227	100%	5.148.075.413	100%	5.949.023.879		5.721.935.104		10.870.010.517		189,62%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Nilai AKIP	100%	16.858.990	100%	14.864.950	100%	6.905.976		6.905.976		21.770.926		129,14%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.832.092	2 Dokumen	3.832.092	2 Dokumen	2.587.805		2.587.805		6.419.897		167,53%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.683.628	1 Dokumen	2.683.628	1 Dokumen	820.380		820.380		3.504.008		95,12%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.550.436	1 Dokumen	2.550.436	1 Dokumen	757.152		757.152		3.307.588		129,69%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.088.612	1 Dokumen	2.088.612	1 Dokumen	642.400		642.400		2.731.012		130,76%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.982.730	1 Dokumen	988.691	1 Dokumen	594.000		594.000		1.582.691		79,82%	Kecamatan Danau Teluk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.721.492	2 Laporan	2.721.491	2 Laporan	1.504.239		1.504.239		4.225.730		155,27%	Kecamatan Danau Teluk
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.598.711.964	100%	4.488.912.311	100%	4.638.570.520		4.459.965.783		8.948.878.094		194,60%	Kecamatan Danau Teluk
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	4.210.030.764	43 Orang/Bulan	4.189.821.111	43 Orang/Bulan	4.255.368.520		4.080.063.783		8.269.884.894		196,43%	Kecamatan Danau Teluk
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	386.731.200	12 Dokumen	297.386.000	12 Dokumen	381.392.000		378.092.000		675.478.000		174,66%	Kecamatan Danau Teluk
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.950.000	3 Laporan	1.705.200	3 Laporan	1.810.000		1.810.000		3.515.200		180,27%	Kecamatan Danau Teluk
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	22.560.000	100%	22.560.000	100%	24.032.300		22.560.000		45.120.000		200,00%	Kecamatan Danau Teluk
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	-	12 Laporan	1.472.300		1.472.300		1.472.300		58,89%	Kecamatan Danau Teluk
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22.560.000	2 Laporan	22.560.000	2 Laporan	22.560.000		22.560.000		45.120.000		200,00%	Kecamatan Danau Teluk
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	122.902.000	100%	44.800.000	100%	103.213.500		99.080.000		143.880.000		117,07%	Kecamatan Danau Teluk
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket	51.000.000	64 Paket	44.800.000	61 Paket	45.750.000		42.700.000		87.500.000		171,57%	Kecamatan Danau Teluk
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	51.902.000	-	-	3 Dokumen	45.463.500		44.380.000		44.380.000		85,51%	Kecamatan Danau Teluk
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000	-	-	2 Orang	12.000.000		12.000.000		12.000.000		60,00%	Kecamatan Danau Teluk
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	214.583.182	100%	179.944.468	100%	251.288.526		247.794.549		419.189.011		195,35%	Kecamatan Danau Teluk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6.547.381	10 Paket	2.960.730	12 Paket	5.434.561		5.434.561		8.395.291		128,22%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.217.500	36 Paket	33.021.730	6 Paket	3.217.500		3.207.600		36.229.330		1126,01%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	51.456.201	-	-	50 Paket	47.661.165		47.447.400		47.447.400		92,21%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	8.362.100	10 Paket	24.391.362	5 Paket	7.175.300		7.129.100		31.520.462		376,94%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	40.000.000	5 Laporan	8.287.250	5 Laporan	33.750.000		33.532.500		41.819.750		104,55%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	105.000.000	10 Laporan	102.733.390	5 Laporan	154.050.000		151.043.388		253.776.778		241,69%	Kecamatan Danau Teluk
<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	230.050.190	100%	139.124.300	100%	401.176.000		399.159.400		538.283.700		233,99%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	298.000.000	-	-	6 Unit	390.000.000		388.050.000		388.050.000		130,22%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	85.021.089	7 Paket	38.072.300	3 Paket	7.326.000		7.259.400		45.331.700		53,32%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	145.029.101	11 Unit	101.052.000	2 Unit	3.850.000		3.850.000		104.902.000		72,33%	Kecamatan Danau Teluk
<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	145.000.000	100%	92.063.742	100%	166.282.890		150.677.097		242.740.839		167,41%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.000.000	12 Laporan	92.063.742	12 Laporan	166.282.890		150.677.097		242.740.839		167,41%	Kecamatan Danau Teluk
<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	381.899.901	100%	174.355.648	100%	357.554.167		335.792.299		510.147.947		133,58%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	190.178.000	26 Unit	150.785.648	26 unit	180.586.168		160.339.299		311.124.947		163,60%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	45.016.711	15 Unit	-	26 unit	17.740.000		17.740.000		17.740.000		39,41%	Kecamatan Danau Teluk

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	146.705.190	6 Unit	23.570.000	6 Unit	159.227.999		157.713.000		181.283.000		123,57%	Kecamatan Danau Teluk
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	241.566.203	100%	8.839.032	100%	211.423.140		208.437.940		217.276.972		89,95%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	192.794.702	100%	2.670.000	100%	169.490.600		167.341.400		170.011.400		88,18%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</i>	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	15.938.300	2 Laporan	2.670.000	2 Laporan	6.623.900		6.623.900		9.293.900		58,31%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	176.856.402	1 Dokumen	-	1 Dokumen	162.866.700		160.717.500		160.717.500		90,87%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase pelayanan yang terakomodir	100%	48.771.501	100%	6.169.032	100%	41.932.540		41.096.540		47.265.572		96,91%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	43.789.210	2 Dokumen	1.423.101	2 Dokumen	37.410.290		37.410.290		38.833.391		88,68%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	4.982.291	10 Laporan	4.745.931	10 Laporan	4.522.250		3.686.250		8.432.181		169,24%	Kecamatan Danau Teluk
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.660.125.000	100%	1.517.938.467	100%	2.095.742.054		2.038.596.852		3.556.535.319		214,23%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	1.660.125.000	100%	1.517.938.467	100%	2.095.742.054		2.038.596.852		3.556.535.319		214,23%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	12.125.000	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.994.600	3 Lembaga Kemasyarakatan	12.125.000		12.125.000		20.119.600		165,93%	Kecamatan Danau Teluk

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 titik lokasi	500.000.000	10 titik lokasi	488.742.650	15 Titik Lokasi	449.999.999		404.972.250		893.714.900		178,74%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1.148.000.000	3 Pokmas/Ormas	1.021.201.217	5 Lembaga/Kelurahan	1.633.617.055		1.621.499.602		2.642.700.819		230,20%	Kecamatan Danau Teluk
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	181.728.393	100%	8.230.000	100%	364.884.998		401.914.998		410.144.998		225,69%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	181.728.393	100%	8.230.000	100%	364.884.998		401.914.998		410.144.998		225,69%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	31.728.393	1 Laporan	8.230.000	1 Laporan	64.884.998		32.624.998		40.854.998		128,76%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	150.000.000	12 Laporan	632.160.000	12 Laporan	300.000.000		369.290.000		1.001.450.000		667,63%	Kecamatan Danau Teluk
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	425.873.635	100%	168.739.800	100%	339.971.499		321.783.999		490.523.799		115,18%	Kecamatan Danau Teluk
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	425.873.635	100%	168.739.800	100%	339.971.499		321.783.999		490.523.799		115,18%	Kecamatan Danau Teluk
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	425.873.635	5 Dokumen	168.739.800	5 Dokumen	339.971.499		321.783.999		490.523.799		115,18%	Kecamatan Danau Teluk
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9.819.225.797	100%	6.817.757.924	100%	6.913.109.023		16.679.608.078		23.497.366.002		239,30%	Kecamatan Pelayangan
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	31.659.540	7 Dokumen	2.035.154	7 Dokumen	31.183.200		69.068.200		71.103.354		224,59%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.506.740	2 Dokumen	779.306	2 Dokumen	30.030.400		66.762.600		67.541.906		221,40%	Kecamatan Pelayangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.152.800	1 Dokumen	1.255.848	1 Dokumen	1.152.800		2.305.600		3.561.448		308,94%	Kecamatan Pelayangan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	6.674.466.079	100%	5.865.784.763	100%	5.772.250.136		14.060.239.565		19.926.024.328		298,54%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang	6.301.762.429	57 Orang	5.598.642.063	57 Orang	5.412.904.136		13.262.167.965		18.860.810.028		299,29%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Orang	4.120.050	57 Orang	898.700	57 Orang	1.016.400		988.800		1.887.500		45,81%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Orang	368.583.600	36 Orang	266.244.000	36 Orang	358.329.600		797.082.800		1.063.326.800		288,49%	Kecamatan Pelayangan
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	43.296.000	100%	30.660.000	100%	39.360.000		72.360.000		103.020.000		237,94%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	6 Orang	43.296.000	6 Orang	30.660.000	6 Orang	39.360.000		72.360.000		103.020.000		237,94%	Kecamatan Pelayangan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	26.400.000	100%	-	100%	20.000.000		54.000.000		54.000.000		204,55%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	70 Pcs	171.600.000	70 Pcs	34.650.000	70 Pcs	-		42.000.000		76.650.000		44,67%	Kecamatan Pelayangan
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Kali	26.400.000	4 Kali	-	4 Kali	20.000.000		12.000.000		12.000.000		45,45%	Kecamatan Pelayangan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	836.168.672	100%	226.672.189	100%	215.019.237		614.682.947		841.355.136		100,62%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Jenis	49.573.848	7 Jenis	15.305.400	7 Jenis	9.308.200		23.581.580		38.886.980		78,44%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	173.924.296	26 Jenis	58.985.000	26 Jenis	86.779.787		204.735.620		263.720.620		151,63%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Penggandaan	41460 Lembar	30.978.420	41460 Lembar	24.650.989	41460 Lembar	9.831.250		19.543.249		44.194.238		142,66%	Kecamatan Pelayangan
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Snack Kotak	1600 Kotak	225.720.000	1600 Kotak	43.500.000	240 Kotak	3.600.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	18 Kali	182.047.812	18 Kali	20.305.000	18 Kali	105.500.000		362.472.498		382.777.498		210,26%	Kecamatan Pelayangan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	1.343.403.486	100%	22.149.600	100%	413.000.000		1.036.600.000		1.058.749.600		78,81%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebeleur	3 Jenis	266.729.868	3 Jenis	55.022.000	3 Jenis	-		0		55.022.000		20,63%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	1.343.403.486	3 Unit	22.149.600	3 Unit	413.000.000		1.036.600.000		1.058.749.600		78,81%	Kecamatan Pelayangan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	563.611.000	100%	470.591.118	100%	182.504.400		372.001.866		842.592.984		149,50%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Materai	750 Lembar	8.800.000	750 Lembar	6.050.000	750 Lembar	21.854.800		50.049.400		56.099.400		637,49%	Kecamatan Pelayangan

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	157.124.000	100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	121.625.418	100 Mbps 270.000 Kwh 1440 Kubik	128.000.000		246.788.666		368.414.084		234,47%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Orang	397.687.000	19 Orang	342.915.700	19 Orang	32.649.600		75.163.800		418.079.500		105,13%	Kecamatan Pelayangan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	300.221.020	100%	199.865.100	100%	239.792.050		400.655.500		600.520.600		200,03%	Kecamatan Pelayangan
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	208.723.020	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	182.017.100	Roda 2 : 25 Unit Roda 3 : 1 Unit Roda 4 : 2 Unit	229.792.050		385.165.500		567.182.600		271,74%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27 Unit	91.498.000	27 Unit	17.848.000	27 Unit	10.000.000		15.490.000		33.338.000		36,44%	Kecamatan Pelayangan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	130.094.007	100%	23.157.352	100%	150.246.735		341.722.840		364.880.192		280,47%	Kecamatan Pelayangan
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	44.605.352	100%	6.854.567	100%	26.306.800		49.074.900		55.929.467		125,39%	Kecamatan Pelayangan
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</i>	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kali	22.319.022	2 Kali	1.362.718	2 Kali	5.038.000		2.250.000		3.612.718		16,19%	Kecamatan Pelayangan
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan	3 Kali	22.286.330	3 Kali	5.491.849	3 Kali	21.268.800		46.824.900		52.316.749		234,75%	Kecamatan Pelayangan
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ad</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	44.533.555	100%	14.266.575	100%	80.291.335		192.057.140		206.323.715		463,30%	Kecamatan Pelayangan
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	8 Kegiatan	44.533.555	8 Kegiatan	14.266.575	8 Kegiatan	80.291.335		192.057.140		206.323.715		463,30%	Kecamatan Pelayangan
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	40.955.100	100%	2.036.210	100%	43.648.600		100.590.800		102.627.010		250,58%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	27.399.900	3 Jenis	1.039.500	3 Jenis	21.224.800		47.479.400		48.518.900		177,08%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Fasilitas Non Perizinan	15 Jenis	13.555.200	15 Jenis	996.710	15 Jenis	22.423.800		53.111.400		54.108.110		399,17%	Kecamatan Pelayangan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.108.662.120	100%	1.356.862.289	100%	1.963.385.020		2.873.051.540		4.229.913.829		136,07%	Kecamatan Pelayangan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.108.662.120	100%	1.356.862.289	100%	1.963.385.020		2.873.051.540		4.229.913.829		136,07%	Kecamatan Pelayangan
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel	6 Kali	33.000.000	6 Kali	2.958.000	6 Kali	4.275.000		8.500.000		11.458.000		34,72%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	13 Titik Lokasi	1.172.200.000	13 Titik Lokasi	430.793.934	13 Titik Lokasi	428.870.000		536.573.750		967.367.684		82,53%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinina Di Kelurahan	8 Lembaga	1.903.462.120	8 Lembaga	923.110.355	8 Lembaga	1.530.240.020		2.327.977.790		3.251.088.145		170,80%	Kecamatan Pelayangan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	143.206.470	100%	15.480.000	100%	161.124.900		374.950.200		390.430.200		272,63%	Kecamatan Pelayangan
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	130.831.470	100%	15.030.000	100%	159.924.900		373.750.200		388.780.200		297,16%	Kecamatan Pelayangan
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Pembinaan	4 Kali	130.831.470	4 Kali	15.030.000	4 Kali	159.924.900		373.750.200		388.780.200		297,16%	Kecamatan Pelayangan
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>							251.760.000		0		0		#DIV/0!	Kecamatan Pelayangan
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	12.375.000	100%	450.000	100%	1.200.000		1.200.000		1.650.000		13,33%	Kecamatan Pelayangan
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe</i>	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	12.375.000	2 Kegiatan	450.000	2 Kegiatan	1.200.000		1.200.000		1.650.000		13,33%	Kecamatan Pelayangan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1.864.885.468	100%	146.838.080	100%	282.754.000		424.246.200		571.084.280		30,62%	Kecamatan Pelayangan
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1.864.885.468	100%	146.838.080	100%	282.754.000		424.246.200		571.084.280		30,62%	Kecamatan Pelayangan
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	9 Kegiatan	1.864.885.468	9 Kegiatan	146.838.080	9 Kegiatan	282.754.000		424.246.200		571.084.280		30,62%	Kecamatan Pelayangan
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100,00%	2.156.934.220	100,00%	8.648.953.335	100,00%	8.518.291.319		8.775.905.063		17.424.858.398		807,85%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Nilai AKIP	0,00%	28.919.630	0,00%	41.056.000	0,00%	33.447.825		33.447.825		74.503.825		257,62%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.196.477	2 Dokumen	8.459.000	2 Dokumen	3.960.825		3.960.825		12.419.825		295,96%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.971.881	1 Dokumen	8.959.000	1 Dokumen	5.662.000		5.662.000		14.621.000		244,83%	Kecamatan Alam Barajo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	6.250.424	1 Dokumen	8.959.000	1 Dokumen	5.937.000		5.937.000		14.896.000		238,32%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	6.250.424	1 Dokumen	8.959.000	1 Dokumen	5.937.000		5.937.000		14.896.000		238,32%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	6.250.424	1 Dokumen	2.959.000	1 Dokumen	5.937.000		5.937.000		8.896.000		142,33%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.341.400	2 Dokumen	2.761.000	2 Dokumen	6.014.000		6.014.000		8.775.000		138,38%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tertib Adminitrasi Keuangan	0%		0	6.369.549.625	0,00%	6.366.523.943		6.615.153.318		12.984.702.943		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	6.015.744.540	60 Orang	5.985.009.003	60 Orang	5.737.678.343		5.972.047.718		11.957.056.721		198,76%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	35 Dokumen	669.105.600	35 Orang	369.536.022	35 Orang	628.845.600		643.105.600		1.012.641.622		151,34%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tertib Adminitrasi Barang Milik Daerah	0%	141.660.000	5 Orang	36.360.000	0,00%	122.580.000		125.780.000		162.140.000		114,46%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	12Laporan	141.660.000	5 Orang	36.360.000	8 orang	122.580.000		125.780.000		162.140.000		114,46%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tertib Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0%	87.412.500	90 pcs	45.000.000	0,00%	95.000.000		94.318.000		139.318.000		159,38%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	100 Paket	87.412.500	90 pcs	45.000.000	100 pcs	75.000.000		74.368.000		119.368.000		136,56%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	21.000.000	5 Kali	0	5 Kali	20.000.000		19.950.000		19.950.000		95,00%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	0%	408.074.229	0	384.602.781	0,00%	341.597.920		411.438.133		796.040.914		195,07%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	24.401.574	10 Jenis	20.075.550	10 Jenis	23.030.370		23.027.785		43.103.335		176,64%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75Paket	39.793.500	20 Jenis 225 Buah	128.908.540	75 Jenis 150 Buah	38.445.000		38.403.750		167.312.290		420,45%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	117.321.455	0	0	15 jenis	107.434.350		107.405.250		107.405.250		91,55%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Cetakan Jumlah Penggandaan	7 Paket	42.257.700	7 Jenis 160.000 Lembar	69.669.600	7 Jenis 150.000 Lembar	39.888.200		39.888.200		109.557.800		259,26%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah Makanan dan Minuman	28Laporan	34.300.000	2400 Kotak	95.320.000	1560 Kotak	32.800.000		32.800.000		128.120.000		373,53%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar kota	10Laporan	150.000.000	20 Kali	70.629.091	1 tahun	100.000.000		169.913.148		240.542.239		160,36%	Kecamatan Alam Barajo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	710.970.146	0,894541634	344.043.200	0,00%	822.363.499		816.669.937		1.160.713.137		163,26%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	310.000.000	18 Unit	0	9 unit	440.000.000		434.817.000		434.817.000		140,26%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pengadaan Mebel</b>	Jumlah Pengadaan Mebel	75Paket	221.097.068	100%	92.740.000	72 unit	210.409.500		210.372.900		303.112.900		137,09%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	179.873.078	34 Unit	251.303.200	18 unit	171.953.999		171.480.037		422.783.237		235,05%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	0%	206.845.133	0	839.161.427		197.045.132		153.896.263		993.057.690		480,10%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Jasa Air Jumlah Jasa Internet Jumlah Jasa Listrik	12 Laporan	206.845.133	245 Kubik 280 Mbps 1.000.075 Kwh	220.656.227	245 Kubik 280 Mbps 100.075 Kwh	197.045.132		153.896.263		374.552.490		181,08%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	0%	566.711.182	0	589.180.302	0,00%	539.733.000		525.201.587		1.114.381.889		196,64%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a</b>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Jumlah STNK/KIR Roda 2 Jumlah STNK/KIR Roda 3 Jumlah STNK/KIR Roda 4	26 Unit roda 2 1 Unit roda 3 3 Unit roda 4	231.632.000	17 Unit roda 2 1 Unit roda 3 2 Unit roda 4	149.272.600	26 Unit roda 2 1 Unit roda 3 3 Unit roda 4	220.552.000		200.133.787		349.406.387		150,85%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya	102 unit	71.900.000	51 Unit	33.630.000	102 unit	68.450.000		68.450.000		102.080.000		141,97%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	6 Unit	263.179.182	6 Unit 3 Paket	406.277.702	225 m2/tahun 2 paket	250.731.000		256.617.800		662.895.502		251,88%	Kecamatan Alam Barajo
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100%	834.172.103	100%	492.015.659	100,00%	723.252.462		691.408.462		1.183.424.121		141,87%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan	0%	596.064.474	0	331.582.589	0,00%	496.074.722		460.412.222		791.994.811		132,87%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</b>	Jumlah Kegiatan yang di Laksanakan	5 Laporan	487.652.428	5 Kegiatan	267.125.204	5 Kegiatan	394.204.037		375.599.037		642.724.241		131,80%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Dokumen	108.412.046	3 Kegiatan	64.457.385	3 Kegiatan	101.870.685		84.813.185		149.270.570		137,69%	Kecamatan Alam Barajo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada</b>	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0%	87.392.927	0	116.593.660	0,00%	83.338.720		83.234.220		199.827.880		228,65%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Perencanaan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan	5 Dokumen	72.890.582	4 Kegiatan	107.170.400	5 Kegiatan	69.480.000		69.375.500		176.545.900		242,21%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen	1 Laporan	14.502.345	1 Dokumen	9.423.260	1 Dokumen	13.858.720		13.858.720		23.281.980		160,54%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelayanan yang terakomodir	0%	150.714.702	0	43.839.410	0,00%	143.839.020		147.762.020		191.601.430		127,13%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan	5 Dokumen	99.287.028	5 Perizinan	31.024.950	5 Perizinan	94.720.280		97.120.280		128.145.230		129,07%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Non Perizinan	15 Laporan	51.427.674	15 Non Perizinan	12.814.460	15 Non Perizinan	49.118.740		50.641.740		63.456.200		123,39%	Kecamatan Alam Barajo
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif dalam Pembangunan	100%	3.814.949.031	100%	3.880.446.380	0,00%	3.804.408.497		4.255.282.164		8.135.728.544		213,26%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	0%	3.814.949.031	0	3.880.446.380	0,00%	3.804.408.497		4.255.282.164		8.135.728.544		213,26%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	14.197.539	2 Kali	17.748.168	2 Kali	14.018.890		13.512.890		31.261.058		220,19%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang terakomodir	10 Unit	964.606.797	5 Titik Lokasi	1.195.636.112	10 titik lokasi	955.937.457		921.894.724		2.117.530.836		219,52%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Partisipasi Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	7 Pokmas/ Ormas	2.836.144.695	7 Lembaga	2.667.062.100	7 Lembaga	2.834.452.150		3.319.874.550		5.986.936.650		211,09%	Kecamatan Alam Barajo
<b>KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	149.437.300	100%	714.424.300	100,00%	408.787.100		393.483.300		1.107.907.600		741,39%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Peningkatan Pembinaan sistim Keamanan Lingkungan	0%	79.862.100	4 Kegiatan	632.550.000	0,00%	342.482.100		342.376.100		974.926.100		1220,76%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Pembinaan	4 Laporan	79.862.100	4 Kegiatan	15.750.000	4 kali	64.082.100		65.682.100		81.432.100		101,97%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Kegiatan	2 Laporan	292.320.000	2 Kegiatan	616.800.000	2 Kegiatan	278.400.000		276.694.000		893.494.000		305,66%	Kecamatan Alam Barajo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Peningkatan Pembinaan sistim Keamanan Lingkungan	0%	69.575.200	2 Kegiatan	81.874.300	0,00%	66.305.000		51.107.200		132.981.500		191,13%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe</i>	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	2 Laporan	69.575.200	2 Kegiatan	81.874.300	2 kegiatan	66.305.000		51.107.200		132.981.500		191,13%	Kecamatan Alam Barajo
<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	359.606.205	6 Kegiatan	244.534.080	0,00%	350.295.300		351.816.700		596.350.780		165,83%	Kecamatan Alam Barajo
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan	100%	359.606.205	6 Kegiatan	244.534.080	0,00%	350.295.300		351.816.700		596.350.780		165,83%	Kecamatan Alam Barajo
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100%	359.606.205	6 Kegiatan	244.534.080	6 Kegiatan	350.295.300		351.816.700		596.350.780		165,83%	Kecamatan Alam Barajo
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5.746.974.929	100%	6.287.884.547	100%	6.521.760.225		19.816.437.333		26.104.321.880		454,23%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,71 nilai	13.811.331	7 Dokumen	7.211.000	67,97 nilai	17.551.118		4.993.620.463		5.000.831.463		36208,18%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12.531.768	2 Dokumen	5.553.000	7 Dokumen	15.711.753		16.305.230		21.858.230		174,42%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1.279.563	1 Dokumen	1.658.000	3 Dokumen	1.839.365		1.672.150		3.330.150		260,26%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	4.839.142.258	100%	4.898.888.126	100%	5.112.146.012		11.487.824.136		16.386.712.262		338,63%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	4.317.037.508	48 Orang	4.576.840.426	48 Orang	4.624.588.702		10.470.524.736		15.047.365.162		348,56%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	4.568.610	48 Orang	4.140.100	48 Orang	5.204.610		8.094.800		12.234.900		267,80%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42 Orang	511.570.600	48 Orang	312.213.200	48 Orang	476.845.200		995.818.600		1.308.031.800		255,69%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	3 Dokumen	5.965.540	3 Dokumen	5.694.400	3 Dokumen	5.507.500		13.386.000		19.080.400		319,84%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	32.160.000	100%	29.660.000	100%	34.560.000		66.920.000		96.580.000		300,31%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah	8 Orang	32.160.000	8 Orang	29.660.000	8 Orang	34.560.000		66.920.000		96.580.000		300,31%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	133.250.000	100%	41.995.800	100%	63.750.000		198.829.000		240.824.800		180,73%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	170 stel	123.250.000	84 stel	20.000.000	84 stel	20.000.000		190.179.000		232.174.800		188,38%	Kecamatan Danau Sipin

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Kali	10.000.000						8.650.000		8.650.000		86,50%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	235.247.815	100%	203.079.633	100%	184.776.495		452.738.695		655.818.328		278,78%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	16.797.630	15 jenis	12.599.400	7 Jenis	14.809.575		22.034.100		34.633.500		206,18%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	Jumlah bahan logistik kantor	3 Jenis	79.619.585			3 Jenis	79.670.920		150.059.710		150.059.710		188,47%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Penggandaan	3 Jenis	13.830.600	3 Jenis	24.248.290	3 Jenis	10.296.000		13.601.000		37.849.290		273,66%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	125.000.000	14 orang kali	36.708.305	1 Tahun	80.000.000		267.043.885		303.752.190		243,00%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	102.422.725	100%	147.738.500	100%	413.000.000		1.376.564.310		1.524.302.810		1488,25%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional					7 Unit	413.000.000		1.294.590.000		1.294.590.000		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebeleur													
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya													
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	195.600.000	100%	757.515.288	100%	228.100.000		363.269.181		1.120.784.469		573,00%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Materai	1322 Surat	6.000.000	1200 Surat	6.000.000	1300 Surat	5.500.000		9.800.000		15.800.000		263,33%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air	1 Tahun	189.600.000	220 Mbps, 111.556 kwh, 1.768 kubik	167.985.288	220 Mbps, 111.556 kwh, 1.768 kubik	222.600.000		353.469.181		521.454.469		275,03%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	195.340.800	100%	201.796.200	100%	467.876.600		876.671.548		1.078.467.748		552,10%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4	19 Unit	176.670.800	18 Unit	115.176.200	19 Unit	162.650.800		274.938.400		390.114.600		220,81%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37 Unit	18.670.000	20 Unit	8.405.000	36 Unit	24.760.000		11.406.500		19.811.500		106,11%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	jumlah Pemeliharaan/Rahabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Paket	78.215.000	1 Paket	280.465.800		590.326.648		668.541.648		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	440.681.919	100%	271.363.310	100%	379.413.810		826.504.610		1.097.867.920		249,13%	Kecamatan Danau Sipin

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	89.934.742	100%	17.435.000	100%	82.039.100		169.849.100		187.284.100		208,24%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	12 kali	89.934.742	12 kali	17.435.000	12 kali	82.039.100		169.849.100		187.284.100		208,24%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ad</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	257.020.803	100%	235.351.010	100%	209.964.910		497.539.810		732.890.820		285,15%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	4 Kegiatan	257.020.803	4 Kegiatan	235.351.010	4 Kegiatan	209.964.910		497.539.810		732.890.820		285,15%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	93.726.374	100%	18.577.300	100%	87.409.800		159.115.700		177.693.000		189,59%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Jenis	83.466.580	3 Jenis	12.688.800	3 Jenis	76.403.700		149.940.700		162.629.500		194,84%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Fasilitas Non Perizinan													
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.173.967.539	100%	2.709.144.386	100%	3.092.734.243		6.202.331.827		8.911.476.213		280,77%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.173.967.539	100%	2.709.144.386	100%	3.092.734.243		6.202.331.827		8.911.476.213		280,77%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel	1 Kali	13.999.202	1 Kali	13.995.326	1 Kali	14.196.146		53.234.684		67.230.010		480,24%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	36 Titik/Lokasi	903.221.911	40 Titik/Lokasi	666.409.260	47 Titik/Lokasi	903.223.628		1.331.813.965		1.998.223.225		221,23%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinina Di Kelurahan	12 Lembaga	2.256.746.426	12 Lembaga	2.028.739.800	12 Lembaga	2.175.314.469		4.817.283.178		6.846.022.978		303,36%	Kecamatan Danau Sipin
<b>KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	396.121.773	100%	112.368.000	100%	110.791.800		758.337.900		870.705.900		219,81%	Kecamatan Danau Sipin
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	382.573.968	100%	99.672.000	100%	97.448.500		744.213.400		843.885.400		220,58%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Pembinaan	12 Kali	382.573.968	12 Kali	99.672.000	12 Kali	97.448.500		203.493.400		303.165.400		79,24%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Meningkatnya Upaya Antisipasi Penyebaran Covid-19	100%		100%	662.070.000	100%	275.250.000		540.720.000		1.202.790.000		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	13.547.805	100%	12.696.000	100%	13.343.300		14.124.500		26.820.500		197,97%	Kecamatan Danau Sipin
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Pe</i>	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	24 Kali	13.547.805	24 Kali	12.696.000	24 Kali	13.343.300		14.124.500		26.820.500		197,97%	Kecamatan Danau Sipin
<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	126.253.840	100%	1.048.338.113	100%	211.284.600		366.851.350		1.415.189.463		1120,91%	Kecamatan Paal Merah
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	126.253.840	100%	1.048.338.113	100%	211.284.600		366.851.350		1.415.189.463		1120,91%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka</i>	Jumlah pembinaan	4 Kegiatan	18.650.000	4 Kegiatan	18.650.000	4 Kegiatan	16.150.000		18.550.000		37.200.000		199,46%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	7 Kegiatan	107.603.840	7 Kegiatan	1.029.688.113	7 Kegiatan	195.134.600		348.301.350		1.377.989.463		1280,61%	Kecamatan Paal Merah
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	7.589.565.691	100	6.899.605.174	100	7.325.739.801		6.619.469.933		13.519.075.107		178,13%	Kecamatan Paal Merah
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	19.800.000	100	18.000.000	100			#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100	8.140.000	100	7.400.000	100	10.261.250		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	100	6.600.000	100	6.000.000	100	6.000.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	5.060.000	100	4.600.000	100	4.600.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	5.532.776.817	100	5.029.797.106	100			5.361.918.528		10.391.715.634		187,82%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	5.041.131.338	100	4.582.846.671	100	4.538.966.186		4.761.568.343		9.344.415.014		185,36%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	5.498.829	100	4.998.935	100	154.617.335		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Jasa Adminitrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa	100	481.768.320	100	437.971.200	100	449.503.200		441.783.200		879.754.400		182,61%	Kecamatan Paal Merah



4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100	4.378.330	100	3.980.300	100	3.980.300		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	61.600.000	100	56.000.000	100			#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pengadaan Khusus Hari-Hari Tertentu	100	61.600.000	100	56.000.000	100	60.000.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	873.776.015	100	794.341.832	100			370.728.125		1.165.069.957		133,34%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	9.334.600	100	8.486.000	100	12.303.830		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	678.854.702	100	617.140.638	100	112.212.793		130.428.713		747.569.351		110,12%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Cetakan & Penggandaan	100	14.625.600	100	13.296.000	100	5.188.700		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat & Tamu Kecamatan/Kelurahan	100	84.700.000	100	77.000.000	100	3.982.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan	100	2.409.000	100	2.190.000	100	11.760.000		13.935.000		16.125.000		669,36%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah & Dalam Daerah	100	47.973.193	100	43.611.994	100	165.800.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	413.534.923	100	375.940.839	100			240.398.000		616.338.839		149,04%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraandinas yang diadakan	100				100	413.000.000		412.009.995		412.009.995		#DIV/0!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Pengadaan Mebeleur	100	281.316.530	100	255.742.300	100	38.104.000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	100				100	93.260.500		143.830.000		143.830.000		#DIV/0!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Bangunan Lainnya	100	132.218.393	100	120.198.539	100	203.299.700		202.294.000		322.492.539		243,91%	Kecamatan Paal Merah
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	297.513.158	100	270.466.507	100			175.397.080		445.863.587		149,86%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan	100	123.179.980	100	111.981.800	100	182.034.707		40.725.000		152.706.800		123,97%	Kecamatan Paal Merah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Jasa Komunikasi Internet, Sumber Daya Air, Sumber Daya Listrik	100	174.333.178	100	158.484.707	100	45.575.000		134.672.080		293.156.787		168,16%	Kecamatan Paal Merah
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100	390.564.779	100	355.058.890	100			391.093.850		746.152.740		191,04%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a</i>	Jumlah STNK/KIR/Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100	173.416.758	100	157.651.598	100	190.654.800		147.608.700		305.260.298		176,03%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	22.693.000	100	20.630.000	100	39.684.350		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	194.455.021	100	176.777.292	100	200.810.800		201.360.800		378.138.092		194,46%	Kecamatan Paal Merah
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	199.371.414	100	181.246.740	100			124.450.050		305.696.790		153,33%	Kecamatan Paal Merah
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	102.761.164	100	93.419.240	100			69.722.370		163.141.610		158,76%	Kecamatan Paal Merah
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Ins</i>	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100	65.690.614	100	59.718.740	100	41.645.178		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	100	37.070.550	100	33.700.500	100	58.618.140		50.442.200		84.142.700		226,98%	Kecamatan Paal Merah
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ad</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	64.059.754	100	58.236.140	100			#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	100	64.059.754	100	58.236.140	100	66.807.180		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen	100	0	100	0	100	2.355.592		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100	32.550.496	100	29.591.360	100			#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Non Perizinan	100	32.550.496	100	29.591.360	100	10.801.200		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Paal Merah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>		<b>13</b>		<b>14 = 7 + 13</b>		<b>15 = 14/6 x 100%</b>		<b>16</b>
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	100	4.701.155.656	100	4.273.777.869	100	4.798.437.387		2.176.156.011		6.449.933.880		137,20%	Kecamatan Paal Merah
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	100	4.701.155.656	100	4.273.777.869	100	4.798.437.387		2.176.156.011		6.449.933.880		137,20%	Kecamatan Paal Merah
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel	100	13.865.500	100	12.605.000	100	15.972.984		15.284.544		27.889.544		201,14%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun	100	1.338.555.426	100	1.216.868.569	100	1.020.225.000		979.841.900		2.196.710.469		164,11%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Lembaga yang dibina dikelurahan	100	3.348.734.730	100	3.044.304.300	100	3.277.239.403		3.743.488.303		6.787.792.603		202,70%	Kecamatan Paal Merah
<b>KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100	950.316.730	100	863.924.300	100	449.228.550		411.449.550		1.275.373.850		134,21%	Kecamatan Paal Merah
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase peningkatan kerukunan dan ketertiban masyarakat	100	950.316.730	100	863.924.300	100	449.228.550		411.449.550		1.275.373.850		134,21%	Kecamatan Paal Merah
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vert</i>	Jumlah Pembinaan	100	171.692.730	100	156.084.300	100	114.234.550		112.169.550		268.253.850		156,24%	Kecamatan Paal Merah
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	778.624.000	100	707.840.000	100	300.000.000		299.280.000		1.007.120.000		129,35%	Kecamatan Paal Merah
<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	322.320.943	100	293.019.039	100			462.491.599		755.510.638		234,40%	Kecamatan Paal Merah
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100	322.320.943	100	293.019.039	100			462.491.599		755.510.638		234,40%	Kecamatan Paal Merah
<i>Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan</i>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	322.320.943	100	293.019.039	100	483.636.000		462.491.599		755.510.638		234,40%	Kecamatan Paal Merah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							0		0		0		#DIV/0!	
							0		0		0		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase tercapainya Nilai AKIP	100%	20.597.250.000	100%	4.852.752.878	100%	4.606.084.228		4.360.427.709		9.213.180.587		44,73%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20 dokumen, 12 laporan	360.000.000	1 dokumen rancangan awal renja 2023, koordinasi ke Bappeda, koordinasi ke Instansi, Rapat OPD, input RKP di Bappeda, Rapat penyusunan RKA 2022, Koordinasi ke Bappeda dan ke Keuangan input RKA 2022	63.223.857	Ranwal Ranja 2023, Renja 2023, Perjanjian Kinerja 2022, Perjanjian Kinerja Perubahan, Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra Perubahan,	88.061.020		87.426.048		150.649.905		41,85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Kesbangpol	4 dokumen	104.000.000	1 dokumen rancangan awal renja 2022, koordinasi ke Bappeda, koordinasi ke Instansi, Rapat OPD, input RKP di Bappeda	13.521.800	1 Dokumen Ranwal Renja, 1 Dokumen Renja, 1 Dokumen PK, 1 Dokumen PK Perubahan, 1 Dokumen IKU, 1 Dokumen Renstra Perubahan	66.744.820		66.146.973		79.668.773		76,60%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.000.000	3 laporan (LKJ 2020, LPPD 2020, Laporan Tahunan 2020), koordinasi ke Bappeda, Inspektorat, bagian pemerintahan dan Organisasi, Penyusunan LKE (koordinasi ke Inspektorat)	11.814.557	3 laporan	21.316.200	-	-		21.279.075		42.595.275		360,53%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	332 orang, 16 dokumen, dan 8 laporan	14.927.600.000	54 orang	3.170.840.673	100%	3.463.240.434		3.145.494.462		6.316.335.135		42,31%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	168 Orang	12.400.000.000	40 orang	2.720.079.173	26 orang/bulan	2.950.479.934		2.657.681.962		5.377.761.135		43,37%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan, aset, dan pengadaan barang dan jasa	164 orang	2.500.000.000	14 orang	447.346.000	12 dokumen	503.282.000		478.334.000		925.680.000		37,03%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Autansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	9.200.000		437.000	12 dokumen	3.345.000		3.345.000		3.782.000		41,11%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	8 laporan	9.200.000		772.500	14 laporan	6.133.500		6.133.500		6.906.000		75,07%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	168 orang, 8 dokumen, 12 orang/kali	234.000.000	42 Paket, 2 dokumen, 3 orang/kali	75.950.000	42 Paket, 2 dokumen, 3 orang/kali	66.150.000		63.150.000		139.100.000		59,44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	168 Orang	124.000.000	42 Paket	63.500.000	42 Paket	33.750.000		33.750.000		97.250.000		78,43%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan administrasi kepegawaian	4 dokumen	20.000.000	1 dokumen	4.950.000	1 dokumen	9.900.000		9.900.000		14.850.000		74,25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen sistem informasi kepegawaian	4 dokumen	30.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000		7.500.000		15.000.000		50,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis implementasi Peraturan undangan yang diikuti	12 orang/kali	60.000.000	-	-	3 orang/kali	15.000.000		12.000.000		12.000.000		20,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 jenis, 64 item, 15 macam, 4 jenis, 2400 kota kue, 2400 bungkus makan kemasan, 496 galon, 60 dus, 160 porsi, 200 kali, 2800 nomor	2.342.450.000		492.393.192	100%	326.244.564		326.056.325		818.449.517		34,94%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik	9 jenis	28.000.000	9 jenis	9.493.900	1 paket komponen alat listrik	6.293.900		6.284.000		15.777.900		56,35%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	64 item	340.000.000	64 item	172.937.700	5 paket (ATK, Kertas dan Cover, bahan komputer, perabot kantor, dan alat kantor lainnya (mesin absen wajah)	85.233.664		85.076.428		258.014.128		75,89%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	64.000.000	4 jenis	25.266.500	4 Paket (barang cetak dan penggandaan)	13.684.000		13.684.000		38.950.500		60,86%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2400 kotak kue, 2400 bungkus makanan kemasan, 496 galon, 60 dus, 160 porsi	160.000.000	600 kotak kue, 600 bungkus makanan kemasan, 124 galon, 15 dus, 40 porsi	39.247.800	Laporan	35.728.000		35.718.500		74.966.300		46,85%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200 kali	1.400.000.000	sharing informasi ke Kab. Bungo, Sharing informasi ke Padang	234.646.292	1 Laporan	175.000.000		174.988.397		409.634.689		29,26%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD mulai tahun 2014 sampai 2019	2800 nomor	50.450.000	197 nomor, koordinasi ke DKP, konsultasi dan koordinasi ke DKDP, Pengadaan Box Arsip	10.801.000	1 dokumen	10.305.000		10.305.000		21.106.000		41,84%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	9 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4, 12 item, 15 macam, 10 jenis, 1 software	840.000.000	33 unit (2 item), 1 paket teralis besi jendela dan ventilasi, 5 unit kendaraan roda 2	193.432.300	100%	179.656.600		265.643.000		459.075.300		54,65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	12 item	140.000.000	5 unit kursi direktur dan manager, 5 unit kursi kantor, 9 unit meja kerja 1 Biro	33.885.500		39.000.000		38.600.000		72.485.500		51,78%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor	15 macam	126.000.000	2 unit filling kabinet, 1 unit infocus, 1 unit laptop, 5 unit ups, 1 unit hard disk, 5 unit printer, 1 unit keyboard	55.925.800		111.836.600		109.243.000		165.168.800		131,09%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan aset lainnya	jumlah pengadaan aset lainnya	10 jenis	64.000.000	1 paket teralis besi jendela dan ventilasi	7.921.000	1 unit sound system, dan 1 unit sound portable	-	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10000 surat, Mbps, Kubik, KWh	348.000.000		100.555.656	100%	86.749.400		80.684.624		181.240.280		52,08%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	10000 surat	8.000.000	46 lembar materai 3000, dan 310 lembar materai 6000	3.998.000	1 Laporan	3.600.000		3.600.000		7.598.000		94,98%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, jumlah jasa sumber daya air, dan jumlah jasa listrik	Mbps, Kubik, KWh	340.000.000	Mbps, Kubik, KWh	96.557.656	12 Laporan	83.149.400		77.084.624		173.642.280		51,07%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	5 unit roda 4, dan 9 unit roda 2, 1 unit roda 4, dan 2 unit roda 2, almari, meja, dan kursi, AC, printer, laptop, komputer, 14 filling cabinet, perluasan parkir, rehab atap kantor, interior ruang kaban, sekban, mushola, dan aula, ruang pelayanan, Pengecatan Pagar /instansi	1.545.200.000		756.357.200	100%	395.982.210		391.973.250		1.148.330.450		74,32%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan, jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas jabatan, jumlah STNK/KIR	25 unit roda 4, dan 40 unit roda 2	796.000.000	15 unit roda 4, dan 27 unit roda 2, dan suku cadang	384.906.900	14 unit	214.030.000		211.412.452		596.319.352		74,91%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan, dan perizinan	1 unit roda 4, dan 2 unit roda 2	96.000.000	1 unit roda 4, dan 2 unit roda 2	41.552.100	3 unit	28.000.000		27.257.798		68.809.898		71,68%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Mebel	jenis mebel yang dilakukan pemeliharaan/rehab	almari, meja, dan kursi	40.000.000	1 paket meja	8.100.000	unit	10.000.000		9.900.000		18.000.000		45,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin	AC, printer, laptop, komputer	120.000.000	AC, printer, laptop, komputer	47.650.000	43 unit	29.870.000		29.870.000		77.520.000		64,60%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dan jenis asset yang dilakukan pemeliharaan	14 filling cabinet, laundry, ac split	53.200.000	14 filling cabinet, laundry, ac split	22.850.000	Laundry perlengkapan kantor	3.465.000		3.465.000		26.315.000		49,46%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bagian gedung kantor yang dilakukan rehabilitasi	rehab wc, dapur, ruang pegawai, perluasan parkir, rehab atap kantor, interior ruang kaban, sekban, mushola, dan aula, ruang pelayanan	400.000.000	rehab wc, dapur, ruang pegawai, perluasan parkir, rehab atap kantor, interior ruang kaban, sekban, mushola, dan aula, ruang pelayanan, rehab atap kantor pd bagian yang bocor, pembuatan ruang pelayanan	225.411.200	1 unit	80.619.000		80.568.000		305.979.200		76,49%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	Pengecatan Pagar /instansi	40.000.000	Pengecatan Pagar /instansi, dan perbaikan papan merek	25.887.000	Rehab gudang	29.998.210		29.500.000		55.387.000		138,47%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPWK (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	970.340.000	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (350 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi, sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 250 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang), 200 peserta test urine, 150 orang peserta sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila, 3 kali movev	473.925.010	36%	315.403.000		295.537.000		769.462.010		79,30%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan Kota Jambi	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPWK (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	970.340.000	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (350 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 250 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang), 3 kali movev	473.925.010	100%	315.403.000		295.537.000		769.462.010		79,30%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah rapat pengurus FPK dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, Jumlah rapat Panitia Silaturahmi Kebangsaan, Jumlah Rapat Koordinasi dengan Pengurus FPK Tk. Kota dan Kecamatan dengan Pengurus Dewan Pembina FPK, Jumlah Rapat Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Jumlah Rapat Tim Pembinaan Ideologi Pancasila, Jumlah Peserta Silaturahmi Kebangsaan, Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila,	41 kali rapat, 4 kali sosialisasi PPWK (1010 orang), 4 kali silaturahmi kebangsaan (800 orang) dan 4 kali pembinaan Ideologi Pancasila (960 orang)	924.000.000	1 kali rapat panitia, 1 kali silaturahmi kebangsaan (350 orang peserta), 1 kali rapat koordinasi sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 250 orang, rapat pengurus Dewan Pembina FPK (24 orang),	460.065.180	785 orang yang mengikuti koordinasi	300.157.000		280.327.000		740.392.180		80,13%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	monitoring, evaluasi dan pelaporan	48 kali movev	46.340.000	3 kali movev	13.859.830	12 kali movev	15.246.000		15.210.000		29.069.830		62,73%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE</b>	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Jambi	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat	5.266.541.000	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey, 1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Parpol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021),	1.573.704.725	100%	116.449.471	1		#VALUE!		#VALUE!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Perumusan Kebiakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politi, Etika budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Meningkatnya motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat	5.266.541.000	2 kali rapat, 80 orang peserta pendidikan politik, 80 orang peserta sosialisasi, 150 orang peserta pemantauan pilgub, dan 25 kali survey, 1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Parpol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), pembinaan ke 13 Parpol tentang LHP BPK	1.573.704.725	100%		1.487.851.066					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 kali rapat verifikasi, 4 kali sosialisasi, 3 kali bimtek, 6 kali pembinaan, Rapat 14 kali, sosialisasi 12 kali, 2 kali rakor, 2 kali penyelenggaraan Pemilu, 7 kali rapat	5.167.241.000	1 kali pemantauan situasi politik, 1 kali sosialisasi permendagri No. 18 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Parpol, 1 kali pemantauan tahapan Pemilu ke KPU Propinsi dan Kota dalam rangka Pemilihan Suara Ulang (27 Mei 2021), Pencairan dana hibah bagi Parpol, 1 kali sosialisasi bagi pemilih pemula, bintek pembinaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan parpol, 13 kali monitoring ke lapangan	1.560.183.225	316 orang yang mengikuti koordinasi	1.471.179.566							
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan		99.300.000	pembinaan ke 13 Parpol tentang LHP BPK, Rapat monitoring dan evaluasi 6 kali dan monitoring ke lapangan 6 kali	13.521.500	4 laporan movev	16.671.500							
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Fasilitas Pembinaan Ummat Beragama dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	56 kali rapat, 10 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	1.658.310.000	9 kali rapat, 15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine, 7 kali rapat, 9 kali pemantauan	416.078.700	100%	248.069.000							
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	Meningkatnya toleransi antar ummat beragama dan Pemberian Izin Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi serta Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56 kali rapat, 10 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	1.658.310.000	18 kali rapat, 2 kali sosialisasi, 18 laporan, 36 OH studi komparative, dan 277 OH monitoring ke lapangan	416.078.700	100%	248.069.000	208.045.600		624.124.300			37,64%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fa	Jumlah rapat FKUB, Jumlah peserta Sosialisasi FKUB, Jumlah Rapat PAKEM, Jumlah rapat Tim Pencegahan dan Pengangulangan Narkoba, Jumlah rapat Persiapan test urine Narkoba, Jumlah peserta Sosialisasi Narkoba, Jumlah rapat fasilitasi Peran Pemda dan masyarakat dalam pelestarian dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Seni Daerah		829.155.000	18 kali rapat, 2 kali sosialisasi	337.296.300	882 orang yang mengikuti koordinasi	201.845.000		167.071.600		504.367.900		60,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, P	Jumlah pelaporan FKUB, Jumlah pelaporan PAKEM, Jumlah Pelaporan Narkoba, Jumlah Pelaporan Seni, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (pemantauan)		536.220.000	18 laporan, 36 OH studi komparative, dan 277 OH monitoring ke lapangan	78.782.400	18 laporan monev	46.224.000		40.974.000		119.756.400		22,33%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Peningkatan Peran Ormas dalam Pembangunan di Kota Jambi	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	2.651.310.000	1 kali pembinaan, 1 kali rapat, 15 kali pemantauan, Fasilitasi Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP), Pencairan Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP)	817.807.005	100%	716.650.000		707.762.500		1.525.569.505		57,54%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi</b>	Meningkatnya Ormas yang memiliki kemampuan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara sistematis	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	2.651.310.000	1 kali pembinaan, 1 kali rapat, 15 kali pemantauan, Fasilitasi Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP), Pencairan Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP)	817.807.005	100%	716.650.000		707.762.500		1.525.569.505		57,54%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Jambi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Meningkatnya Ormas yang memiliki kemampuan dan berpartisipasi dalam pembangunan secara sistematis	Rapat 8 kali, 1 kali pelatihan, 1 kali sharing dan 6 kali pembinaan	2.542.080.000	1 kali pembinaan, 1 kali rapat, 15 kali pemantauan, Fasilitasi Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP),Pencairan Dana Hibah terhadap 4 Ormas (FKUB, Forkom Ormas, LVRI, dan PP),17 kali pemantauan	786.997.056	200 orang yang mengikuti koordinasi	675.100.000		675.062.500		1.462.059.556		57,51%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			109.230.000	168 orang / hari pemantauan ,100 buku database	30.809.949	3 laporan	41.550.000		32.700.000		63.509.949		58,14%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Peningkatan Fasilitas Pembinaan Ummat Beragama dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	56 kali rapat,10 kali rapat, 8 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	1.658.310.000	9 kali rapat,15 kali pemantauan, 3 kali rapat, 350 peserta test urine, 7 kali rapat,9 kali pemantauan	416.078.700	100%	248.069.000		208.045.600		624.124.300		37,64%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Meningkat nya toleransi antar ummat beragama dan Pemberian Izin Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi serta Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56 kali rapat,10 kali rapat, 8 kali tes urine narkoba (1.475 orang) dan 4 kali sosialisasi narkoba (950 orang)	1.658.310.000	18 kali rapat, 2 kali sosialisasi,18 laporan, 36 OH studi komparative, dan 277 OH monitoring ke lapangan	416.078.700	100%	248.069.000		208.045.600		624.124.300		37,64%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyala	Jumlah rapat FKUB, Jumlah peserta Sosialisasi FKUB, Jumlah Rapat PAKEM, Jumlah rapat Tim Pencegahan dan Pengangulangan Narkoba, Jumlah rapat Persiapan test urine Narkoba, Jumlah peserta Sosialisasi Narkoba, Jumlah rapat fasilitasi Peran Pemda dan masyarakat dalam pelestarian dan Pengembangan serta Komunikasi Pegiat Seni Daerah		829.155.000	18 kali rapat, 2 kali sosialisasi	337.296.300	882 orang yang mengikuti koordinasi	201.845.000		167.071.600		504.367.900		60,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4	5	6		7		8		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasil	Jumlah pelaporan FKUB, Jumlah pelaporan PAKEM, Jumlah Pelaporan Narkoba, Jumlah Pelaporan Seni, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (pemantauan)		536.220.000	18 laporan, 36 OH studi komparative, dan 277 OH monitoring ke lapangan	78.782.400	18 laporan movev	46.224.000		40.974.000		119.756.400		22,33%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persenase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	52 kali rapat, 116 kali monitoring dan 4 kali sosialisasi terorisme dan radikalisme	496.764.800	8 kali rapat, 2 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	142.374.000	100%	134.651.000		131.311.500		273.685.500		55,09%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik So</b>	Meningkatnya Pencegahan dini potensi konflik di Kota jambi serta monitoring, evaluasi dan Pelaporan	52 kali rapat, 116 kali monitoring dan 4 kali sosialisasi terorisme dan radikalisme	496.764.800	8 kali rapat, 2 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	142.374.000	100%	134.651.000		131.311.500		273.685.500		55,09%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rapat orang asing, Jumlah rapat FKDM, dan Jumlah rapat PKS		388.925.000	2 kali rapat, 1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi,	128.204.000	695 orang yang mengikuti koordinasi	98.621.000		95.997.000		224.201.000		57,65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang melakukan survey orang asing, jumlah orang yang melakukan survey FKDM, dan Jumlah laporan yang dihimpun		107.839.800	1 kali sosialisasi FKDM ke Kecamatan, 1 kali Survey orang Asing (3 lokasi), 1 kali pemantauan FKDM ke Gerja Methodist	14.170.000	2 laporan movev	36.030.000		35.314.500		49.484.500		45,89%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

##### **3.1.1. Kondisi Perekonomian Global**

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2022, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

### 3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Meskipun terjadi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022, mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signifikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan pada tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US\$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung.



Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19. Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport Championship, World Super Bike); pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh sebesar 4,9 persen.

Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan

sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2023 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

Tabel 3.1.  
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,115.5	2,254.5	2,428.9	1,378.4	1,404.2	1,435.9
Pertambangan dan penggalian	993.5	1,523.7	2,393.4	790.5	822.1	858.2
Industri pengolahan	3,068.0	3,266.9	3,591.8	2,209.9	2,284.8	2,396.6
Pengadaan listrik dan gas	179.7	190.1	204.7	108.8	114.9	122.5
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.3	12.0	12.5	9.4	9.9	10.2
Konstruksi	1,652.7	1,771.7	1,913.0	1,072.3	1,102.5	1,124.7

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	1,994.0	2,199.9	2,516.6	1,385.7	1,449.8	1,529.9
Transportasi dan pergudangan	689.5	719.6	983.5	393.4	406.2	486.9
Penyediaan akomodasi dan makan minum	394.0	412.3	472.1	299.1	310.7	347.9
Informasi dan komunikasi	696.0	748.8	812.8	652.1	696.5	750.4
Jasa keuangan	696.1	736.2	809.3	457.5	464.6	473.6
Real estate	453.8	468.2	488.3	324.3	333.3	339.0
Jasa perusahaan	294.3	301.1	341.4	195.7	197.1	214.4
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	586.0	586.7	605.1	365.4	364.3	373.4
Jasa pendidikan	551.2	557.7	566.6	350.3	350.7	352.7
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	201.5	227.2	236.2	142.2	157.1	161.4
Jasa lainnya	302.6	312.2	354.2	196.6	200.8	219.8
<b>Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar</b>	<b>14,879.7</b>	<b>16,288.8</b>	<b>18,730.4</b>	<b>10,331.6</b>	<b>10,669.5</b>	<b>11,197.5</b>
<b>Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk</b>	<b>563.7</b>	<b>687.9</b>	<b>858.0</b>	<b>391.4</b>	<b>450.6</b>	<b>512.9</b>
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>	<b>15,443.4</b>	<b>16,976.7</b>	<b>19,588.4</b>	<b>10,723.0</b>	<b>11,120.1</b>	<b>11,710.4</b>

Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 32,01 persen dan 16,29 persen, serta komponen impor barang dan jasa sebesar 28,35 persen dan 14,75 persen.

Tabel 3.2.  
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,899.9	9,236.0	10,160.4	5,780.2	5,896.7	6,187.2
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	201.5	207.9	229.0	130.3	132.4	139.9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,491.2	1,569.5	1,500.7	874.1	911.2	870.1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,897.0	5,227.9	5,697.3	3,419.2	3,549.2	3,686.6
Perubahan Inventori	97.9	111.1	129.4	51.3	62.7	70.7

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Ekspor Barang dan Jasa	2,676.5	3,634.4	4,797.7	2,083.9	2,458.0	2,858.3
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,415.5	3,189.9	4,094.2	1,686.0	2,105.2	2,415.8
Diskrepansi Statistik 1)	-405.1	179.8	1,168.1	70.0	215.1	313.4
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>	<b>15,443.4</b>	<b>16,976.7</b>	<b>19,588.4</b>	<b>10,723.0</b>	<b>11,120.1</b>	<b>11,710.4</b>

Keterangan: 1) Selisih PDB Lapangan Usaha dan PDB Pengeluaran

Sumber : BPS, 2022

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemic COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian *herd immunity*. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023 seiring dengan menurunnya angka kasus aktif COVID-19 memasuki fase transisi dari pandemi menuju endemi.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022,

hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Tabel 3.3.  
Sasaran Ekonomi RKP 2023

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2023
<b>Perkiraan besaran-besaran pokok</b>	
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,3-5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): akhir periode	3,6
<b>Neraca pembayaran</b>	
Cadangan devisa (USD miliar)	144,2-145,3
- dalam bulan impor	6,1-6,0
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,5-0,5
<b>Keuangan Negara</b>	
Penerimaan perpajakan (% PDB)	9,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,7)
Surplus/defisit APBN (% PDB)	(2,8)
Stok utang pemerintah (% PDB)	39,4

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2023
<b>PMTB/Investasi</b>	
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,1-6,3
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.200-1.300
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	396-420
<b>Target Pembangunan</b>	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,36-73,37
Penurunan Emisi GRK	27,02
<b>Indikator Pembangunan</b>	
Nilai Tukar Petani (NTP)	105-107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-108

Sumber: RKP 2023

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID- 19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada 3,6 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp14.300,00-Rp14.800,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2023 TPT diharapkan turun menjadi 5,3-5,5 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,36-73,37. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-107 dan NTN pada kisaran 107-108.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan delisit transaksi berjalan seiring dengan

akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus Kebijakan Makro 2023 sebagai berikut:

**a. Peningkatan Produktivitas**

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengemballkan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

**b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif**

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan layak (*decent job*), serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

### c. **Pembangunan yang Berkelanjutan**

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan. Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun 2023 antara lain adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional 3,6 persen;
- b. Tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,9 persen.
- c. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.800 per dolar AS;
- d. Asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 90 dollar/barel, dengan lifting minyak 660.000 barel per hari, dan lifting gas diperkirakan 1.100.000 barel per hari.



### 3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2019-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen kemudian berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46 persen namun kembali tumbuh pada Tahun 2021 menjadi 3,66 persen dan Tahun 2022 menjadi 5,13 persen.

Tabel 3.4.  
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan  
Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)

Sektor PDRB	2022				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.62	3.09	4.69	9.65	5.00
B. Pertambangan dan Penggalian	9.03	12.61	4.74	5.48	7.82
C. Industri Pengolahan	1.04	4.22	4.54	2.28	3.05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12.31	11.81	13.00	9.62	11.66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.60	1.81	4.67	-0.22	3.15
F. Konstruksi	1.83	2.12	1.44	-8.17	-0.88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.34	3.35	5.62	9.12	5.41
H. Transportasi dan Pergudangan	11.61	21.18	15.26	19.19	16.92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.49	9.47	18.35	8.48	11.09
J. Informasi dan Komunikasi	6.98	7.73	7.15	7.13	7.25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.05	-7.38	-0.20	0.74	-0.72
L. Real Estate	6.74	6.77	2.95	0.76	4.22
M.N. Jasa Perusahaan	14.74	23.20	14.57	8.64	15.13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.02	-10.37	13.54	-2.65	-0.65
P. Jasa Pendidikan	2.75	-2.51	8.21	0.24	2.02
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.01	-0.11	-10.16	-8.57	-2.40
R.S.T.U. Jasa lainnya	5.15	7.39	8.14	10.41	7.81
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4.71</b>	<b>5.37</b>	<b>5.20</b>	<b>5.22</b>	<b>5.13</b>

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,92 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 15,13 persen, serta pengadaan listrik dan gas sebesar 11,66 persen.

Tabel 3.5.  
Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran PDRB	2022				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.03	6.11	3.80	2.99	4.46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.47	7.10	8.04	2.76	6.05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.00	-7.02	-0.17	8.78	1.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.83	2.84	7.24	-6.08	2.38
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	4.26	10.13	9.54	-4.91	4.27
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3.02	10.89	10.03	-14.43	0.40
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4.71</b>	<b>5.37</b>	<b>5.20</b>	<b>5.22</b>	<b>5.13</b>

Sumber : BPS, 2023

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran tahun 2022 menunjukkan perubahan. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2022 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,05 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,46 persen; komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,27 persen; komponen PMTB sebesar 2,38 persen; dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,52 persen.

Pada triwulan II 2022, inflasi Provinsi Jambi tercatat 7,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 2,83% (yoy) dan 4,35% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,94% (yoy) dan 7,63% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi di Kota Jambi terutama didorong oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada triwulan II 2022, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 14,02% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi pada seluruh sub kelompok yang terutama disumbang oleh sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 15,28% (yoy). Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap peningkatan inflasi sub kelompok tersebut di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, ikan nila, dan telur ayam ras. Sejalan dengan Kota Jambi, Kabupaten Bungo juga tercatat mengalami inflasi pada

triwulan II 2022. Inflasi di Kabupaten Bungo tersebut terutama disumbangkan oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 17,25% (yoy). Inflasi kelompok pengeluaran tersebut didorong oleh peningkatan harga pada sub kelompok makanan sebesar 19,29% (yoy). Adapun komoditas pada sub kelompok Makanan yang menyumbang inflasi di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, telur ayam ras, dan kopi bubuk.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan III 2022 diperkirakan akan lebih rendah secara *month to month* dibanding triwulan sebelumnya meskipun lebih tinggi jika dibandingkan secara year on year sebagai dampak base year effect. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan didorong oleh membaiknya kondisi pasokan di tengah mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura, seperti aneka cabai dan bawang merah, di beberapa sentra produksi sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga. Penurunan tekanan harga pada komoditas hortikultura tersebut diperkirakan akan menahan laju inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Jambi. Namun demikian, inflasi keseluruhan tahun 2022 diperkirakan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% dan akan berada di rentang sasaran pada tahun 2023 seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam koridor 4K.

Sama halnya dengan nasional, Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi tidak hanya pada tahun 2020 namun juga berdampak pada tahun 2021. Sasaran Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 – 4,90 persen (yoy), dengan asumsi vaksinasi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak sesuai harapan. Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan meletakkan pondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih

lamban sebagai akibat pembatasan aktivitas juga diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya pemulihan kinerja sektor produksi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat Covid-19, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan mengalami perbaikan yang berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2022.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi saat berlangsung pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,66 persen dengan asumsi beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda pada tahun 2020 dan 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah dengan rencana tahun 2022. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 2,53 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan.

#### **3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi**

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2021 dan 2022, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di

bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor

produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

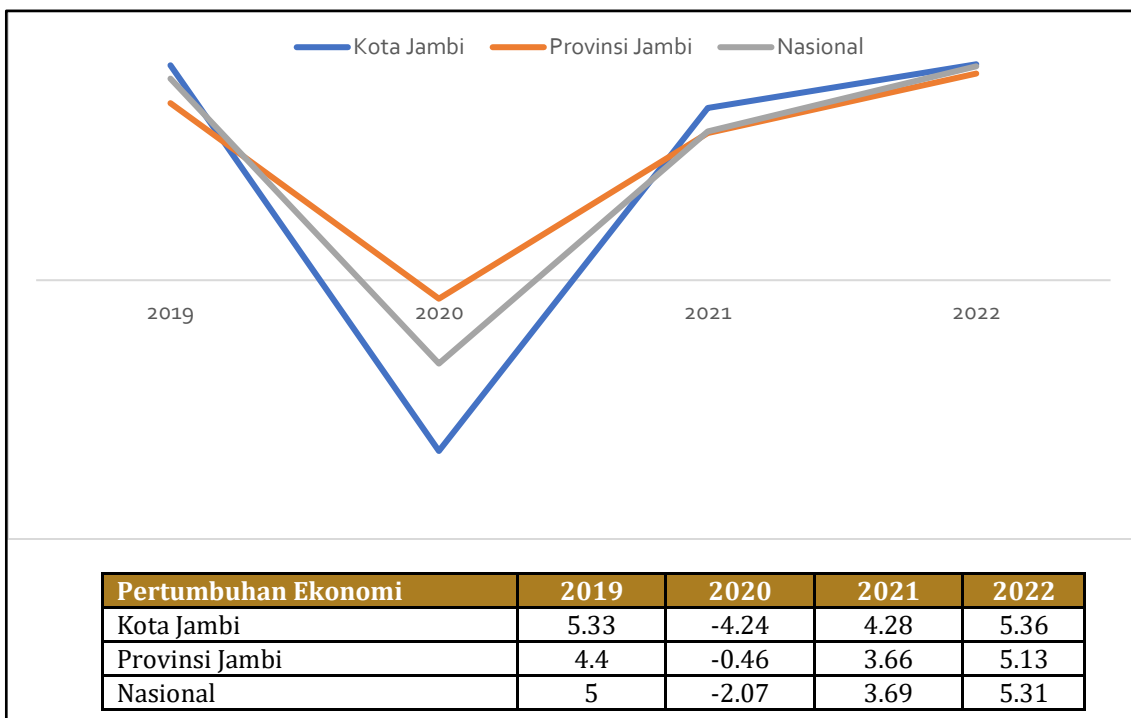
Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

### 3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 tercatat sebesar 4,68% dan meningkat terus sampai dengan tahun 2019, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,24%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dunia maupun nasional yang sedang mengalami pandemi COVID 19. Pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi meningkat kembali menjadi 4,28% dan pada tahun 2022 sebesar 5,36% berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu sebesar 5,13% dan Laju Pertumbuhan Nasional sebesar 5,31 %. Untuk mengetahui perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.1.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)  
Tahun 2019-2022



Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.  
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195.98	190.88	189.62	166.65	168.69
B. Pertambangan dan Penggalian	432.13	425.97	441.94	453.18	452.49
C. Industri Pengolahan	2189.77	2249.76	2224.21	2263.40	2343.69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	33.60	36.10	36.86	39.24	43.32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.13	46.50	45.05	47.28	49.29
F. Konstruksi	1809.48	1943.29	1921.53	2018.40	1999.56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5109.83	5412.71	5102.40	5454.19	5751.44
H. Transportasi dan Pergudangan	2512.09	2557.30	1965.95	1986.01	2319.64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447.02	476.26	444.85	458.85	565.96
J. Informasi dan Komunikasi	974.85	1037.68	1130.82	1175.88	1282.19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1076.09	1104.82	1213.55	1270.63	1260.13
L. Real Estate	474.67	510.07	508.42	524.67	547.62
M.N. Jasa Perusahaan	531.25	542.68	512.41	519.99	619.41
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1341.77	1402.20	1306.86	1322.91	1315.30
P. Jasa Pendidikan	858.39	924.88	955.42	956.96	984.99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486.05	534.36	571.30	675.03	659.87
R.S.T.U. Jasa lainnya	148.78	155.35	149.94	151.21	166.12
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>18667.87</b>	<b>19550.81</b>	<b>18721.13</b>	<b>19484.47</b>	<b>20529.73</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.751,44 Milyar; (b) sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.343,69 Milyar; (c) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 2.319,64 Milyar; (d) sektor Konstruksi sebesar Rp. 1.999,56 Milyar; dan (e) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1.315,30 Milyar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.  
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022

Sektor PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.19	1.11	1.17	0.98	0.92
B. Pertambangan dan Penggalian	2.01	1.79	1.25	1.50	1.81
C. Industri Pengolahan	10.23	9.97	10.84	10.97	10.94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26
F. Konstruksi	8.87	9.15	9.49	9.50	8.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.83	31.14	31.31	32.72	33.20
H. Transportasi dan Pergudangan	12.33	12.03	8.59	8.12	9.75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.37	2.40	2.32	2.22	2.45
J. Informasi dan Komunikasi	4.63	4.69	5.29	5.10	4.82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.54	5.50	6.24	6.34	6.04
L. Real Estate	2.48	2.56	2.69	2.62	2.56
M.N. Jasa Perusahaan	2.99	3.01	3.04	3.01	3.57
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.69	8.59	8.99	8.26	7.24
P. Jasa Pendidikan	4.48	4.57	4.95	4.66	4.34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.21	2.30	2.60	2.85	2.50
R.S.T.U. Jasa lainnya	0.69	0.69	0.70	0.66	0.66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) Tahun terakhir (2018-2022), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun  $n$  dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ( $n-1$  atau  $n-2$  bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Tabel 3.8.  
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16415.75	17584.8	17679.42	18860.43	20730.26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	426.91	482.94	484.45	507.96	573.81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6165.09	6626.44	6495.21	6686.56	6933.65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6292.62	6855.91	6862.88	7475.25	7867.74
Perubahan Inventori	60.11	126.9	139.04	540.47	448.78
Ekspor Barang dan Jasa	25125.16	26482.26	23656.19	26144.25	31616.46
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25688.24	27522.33	25852.04	28321.34	32028.75

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	28797.41	30636.93	29465.15	31893.58	36141.96

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 16.415,75 Milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 20.730,26 Milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan

barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel diatas, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

#### **3.1.4.2. Pendapatan Perkapita**

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.479,44 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.9.  
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya  
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>PDRB (milyar rupiah)</b>						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	28,797.41	30,636.93	29,465.15	31,893.58	36,141.96
2	Atas Dasar Harga Konstan	18,667.87	19,550.81	18,721.13	19,484.47	20,529.73
<b>PDRB per Kapita (ribu rupiah)</b>						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	48,147.91	50,661.66	48,196.62	52,099.90	58,335.54
2	Atas Dasar Harga Konstan	31,211.80	32,329.50	30,622.46	31,828.94	33,136.36

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

### 3.1.4.3. Inflasi

Pada Desember 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,90. Pada kondisi Desember 2022, tingkat inflasi Year to Date (ytd) akan memiliki angka yang sama dengan inflasi Year on Year (yoy), dimana Kota Jambi sebesar 6,39 persen. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan

Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen. Dalam pembentukan deflasi Kota Jambi sebesar 0,55 persen, andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,6900 persen.

Tabel 3.10.

Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Kota Jambi Bulan Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi ytd Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2022 (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Umum (Headline)</b>	<b>114.90</b>	<b>0.79</b>	<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	<b>0.7900</b>	<b>6.3900</b>
Makanan, Minuman, dan Tembakau	117.92	2.28	5.90	5.90	0.6900	1.8204
Pakaian dan Alas Kaki	105.51	0.00	0.84	0.84	0.0000	0.0556
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	111.41	-0.01	4.55	4.55	-0.0018	0.8404
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	115.78	0.50	6.33	6.33	0.0300	0.3784
Kesehatan	112.66	0.01	0.47	0.47	0.0002	0.0086
Transportasi	126.14	0.26	21.25	21.25	0.0347	2.4777
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100.71	-0.14	-0.63	-0.63	-0.0067	-0.0318
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	122.83	0.00	0.27	0.27	0.0000	0.0057
Pendidikan	105.40	0.00	0.54	0.54	0.0000	0.0226
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110.34	0.00	4.16	4.16	0.0000	0.2940
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	121.17	0.65	8.38	8.38	0.0409	0.5173

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

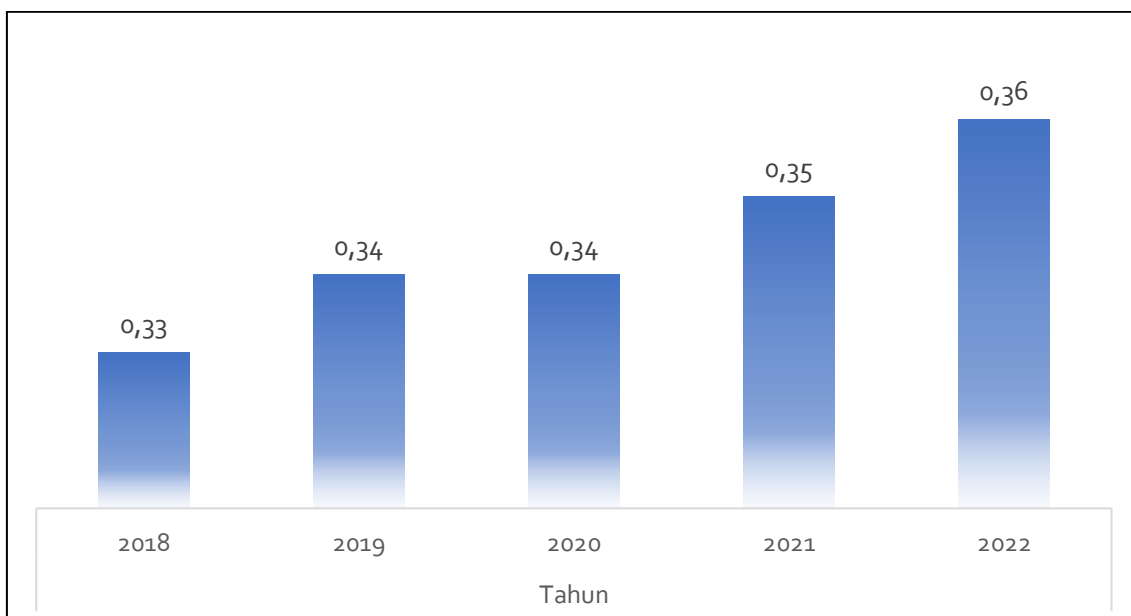
Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi bulan Desember 2022 antara lain: daging ayam ras 0,2400 persen; cabai merah 0,1571 persen; rokok kretek filter 0,0701 persen; telur ayam ras 0,0579 persen; cabai rawit 0,0428 persen; rokok kretek 0,0320 persen; angkutan udara 0,0316 persen; emas perhiasan 0,0217 persen; rokok putih 0,0210 persen; dan bawang putih 0,0196 persen.

#### **3.1.4.4. Koefisien Gini**

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2022 mencapai sebesar 0,36 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,35. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 0,34.





Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 3.2  
Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

### 3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2023 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2018-2022), diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 5,5 persen tahun 2023.

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Pemerintah Kota Jambi

berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan mendorong percepatan peningkatan tingkat vaksinasi, terutama untuk vaksinasi dosis 2 dan vaksin booster untuk mendukung normalisasi mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha. Selain itu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dapat mendorong sentimen positif dari masyarakat dan pelaku usaha.
- Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi.
- Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
- Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, *mempersiapkan clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.
- Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah

dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

### **3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi**

Realisasi tahun 2021 dan tahun 2022, penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11.  
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No.	Uraian	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,652,948,449,754.68</b>	<b>1,668,657,255,118.80</b>	<b>1,692,554,257,075</b>	<b>1,457,947,201,075</b>	<b>1,757,947,201,075</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>384,730,643,791.46</b>	<b>436,885,456,388.00</b>	<b>515,337,970,969</b>	<b>515,337,970,969</b>	<b>815,337,970,969</b>
1.1.01	Pajak Daerah	244,726,978,039.00	301,796,809,124.00	355,000,000,000	355,000,000,000	655,000,000,000
1.1.02	Retribusi Daerah	51,844,265,427.60	40,216,623,270.14	56,226,320,000	56,226,320,000	56,226,320,000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,638,772,829.50	10,528,936,340.30	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	78,520,627,495.36	84,343,087,653.56	94,111,650,969	94,111,650,969	94,111,650,969
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,206,026,802,746.00</b>	<b>1,230,873,892,188.00</b>	<b>1,177,216,286,106</b>	<b>942,609,230,106</b>	<b>942,609,230,106</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,070,421,415,791.00	1,083,896,725,044.00	1,032,564,721,000	797,957,665,000	797,957,665,000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135,605,386,955.00	146,977,167,144.00	144,651,565,106	144,651,565,106	144,651,565,106
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>62,191,003,217.22</b>	<b>897,906,542.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	62,191,003,217.22	897,906,542.80	0	0	0
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62,191,003,217.22	897,906,542.80	0	0	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

### 3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

#### a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.670.844.905.471,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.668.657.255.118,80 (99,87%). Sampai dengan tahun 2022 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)
3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- b. Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- c. Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- d. Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- e. Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah;
- f. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- h. Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang - Undang yang berlaku;
- i. Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- j. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- k. Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2022 mencapai Rp. 436.885.456.388,00 atau 91,18% dari target penerimaan sebesar Rp. 479.170.812.838,00 dan memberikan kontribusi sebesar 28,68%

terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2021, yakni sebesar Rp. 384.730.643.791,46, maka realisasi PAD Tahun 2022 naik sebesar Rp. 52.154.812.596,54. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2022 dikarenakan aktivitas ekonomi yang kembali meningkat setelah pandemi Covid-19. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

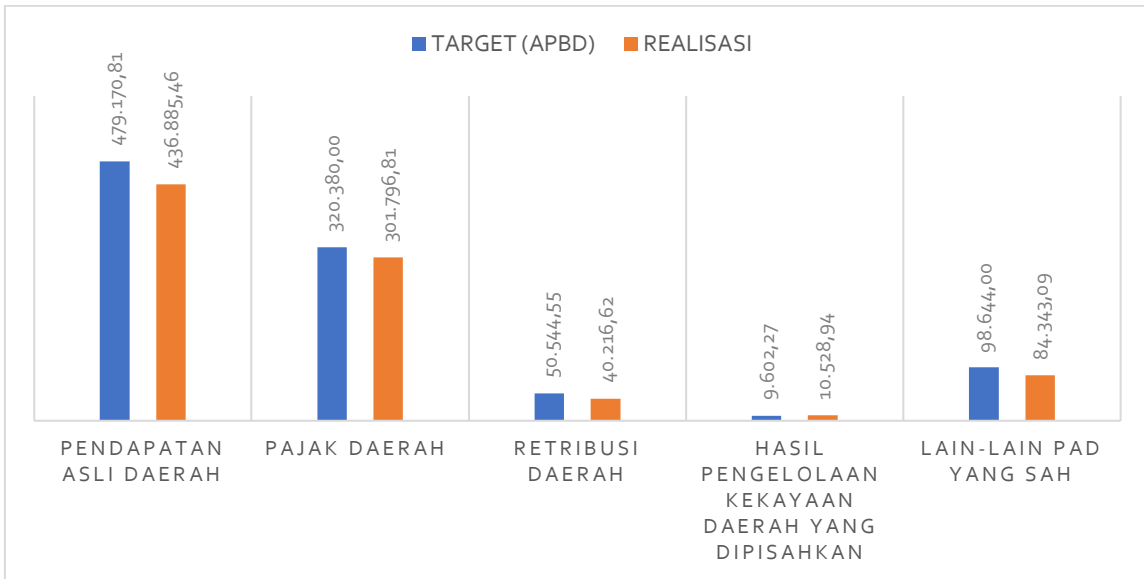
Tabel 3.12.  
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2021 dengan TA 2022

No.	Uraian	2021		% REALISASI	2022		% REALISASI
		TARGET (APBD)	REALISASI		TARGET (APBD)	REALISASI	
1.	Pajak Daerah	297,860,000,000	244,726,978,039	82.16 %	320,380,000,000	301,796,809,124	94.20 %
2.	Retribusi Daerah	55,312,900,000	51,844,265,427	93.73 %	50,544,550,000	40,216,623,270	79.57 %
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	9,638,772,829	100.38 %	9,602,267,383	10,528,936,340	109.65 %
4.	Lain-lain PAD yang sah	91,226,666,850	78,520,627,495	86.07 %	98,643,995,455	84,343,087,653	85.50 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 320.380.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 301.796.809.124,00 atau 94,20%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 50.544.550.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.216.623.270,14 atau 79,57%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.602.267.383,00 terealisasi sebesar Rp. 10.528.936.340,30 atau 109,65%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 98.643.995.455,00 terealisasi sebesar Rp. 84.343.087.653,56 atau 85,50%.

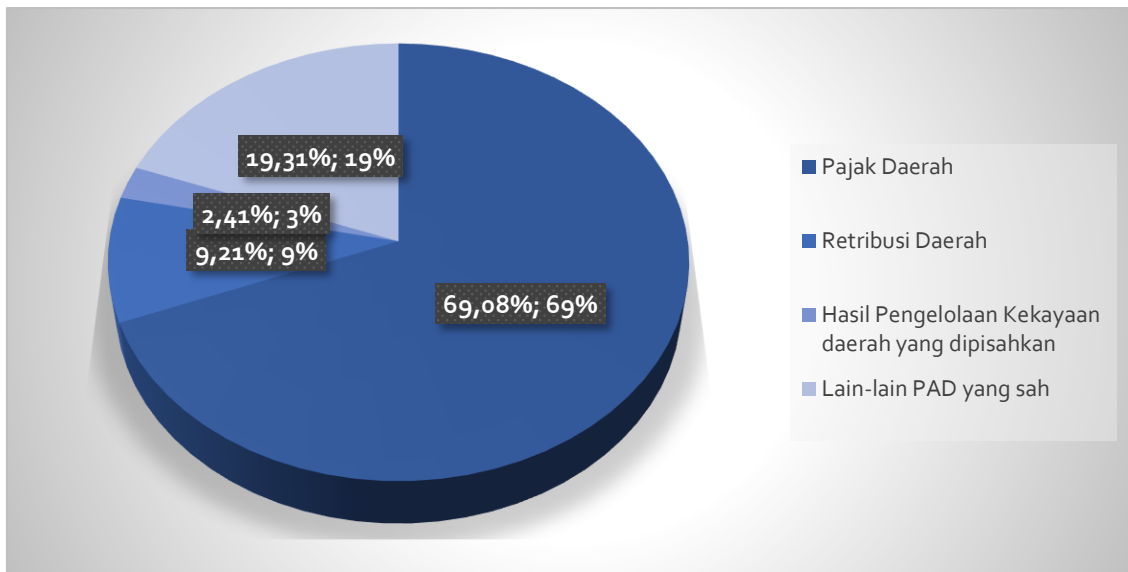
Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.3.  
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar 3.4  
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2022



## b. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

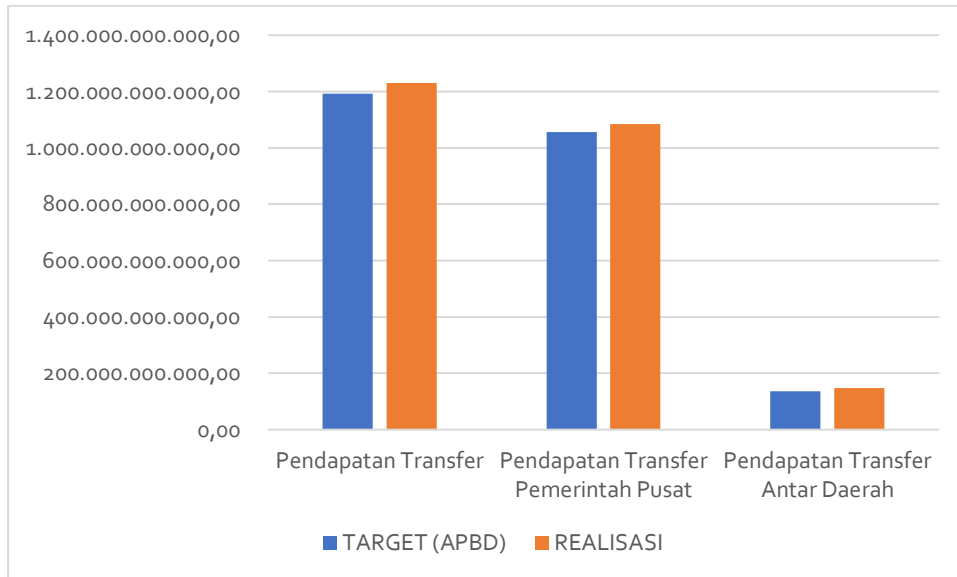
Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.191.674.092.633,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.230.873.892.188,00 atau 103,29%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.13.  
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer  
TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.070.421.415.791,00	1.055.509.404.731,00	1.083.896.725.044,00	102,69
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.605.386.955,00	136.164.687.902,00	146.977.167.144,00	107,94
<b>TOTAL</b>		<b>1.206.026.802.746,00</b>	<b>1.191.674.092.633,00</b>	<b>1.230.873.892.188,00</b>	<b>103,29</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

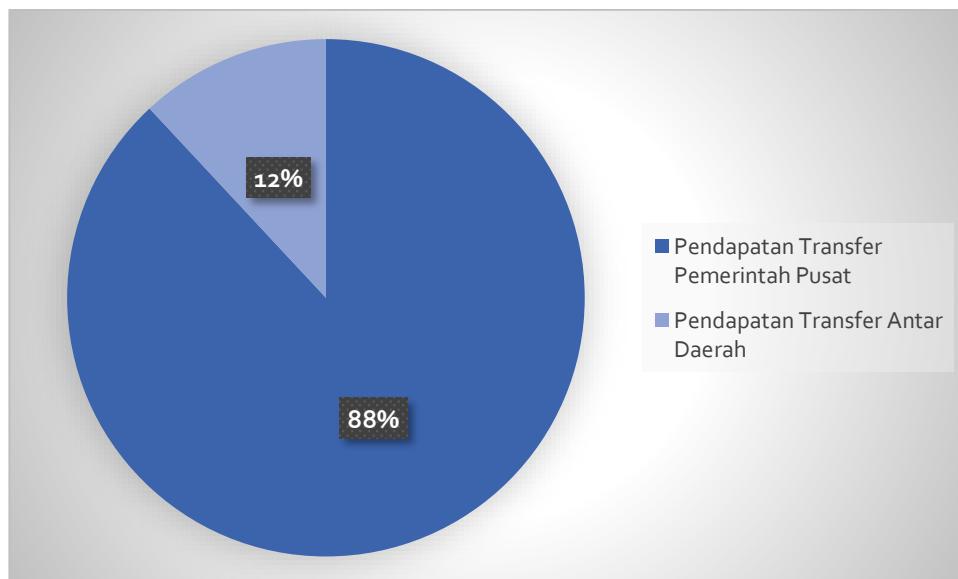
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 1.055.509.404.731,00 realisasinya mencapai Rp. 1.083.896.725.044,00 atau 102,69%. Target penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 136.164.687.902,00 terealisasi sebesar Rp. 146.977.167.144,00 atau 107,94%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.5.  
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.6.  
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022

c. **Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 897.906.542,80. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.14.  
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Pendapatan Hibah	702.908.280,22	0,00	897.906.542,80
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.488.094.937,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.191.003.217,22</b>	<b>0,00</b>	<b>897.906.542,80</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

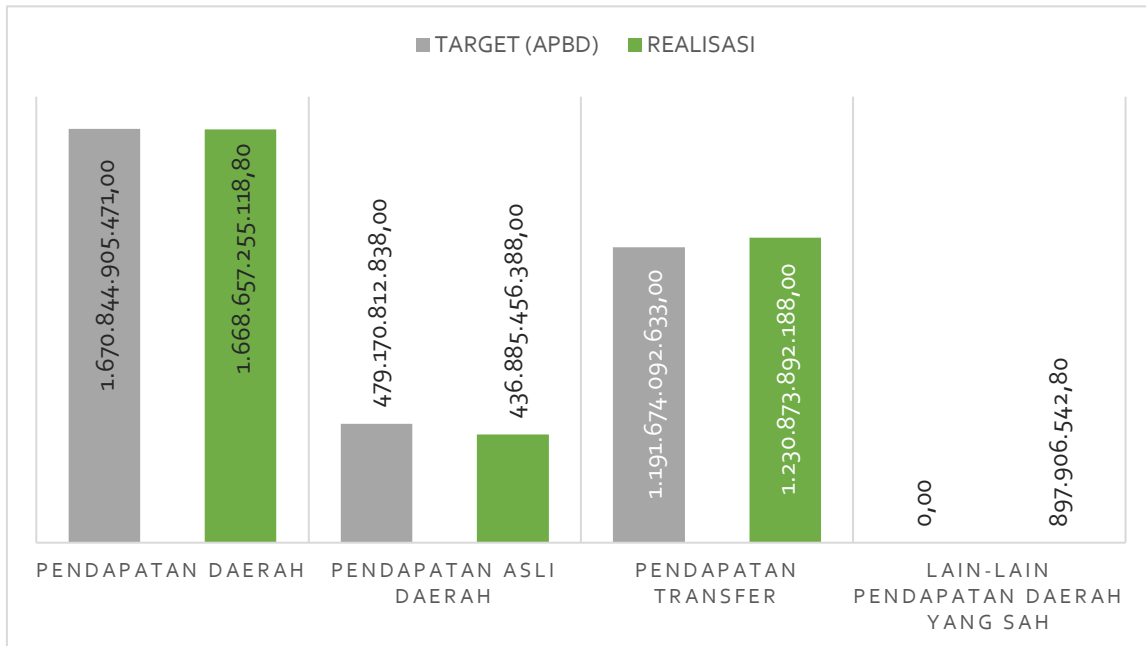
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 tidak terdapat target penerimaan Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 897.906.542,80 dan tidak terdapat target dari komponen penerimaan dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 1.668.657.255.118,80 atau terealisasi 99,87% dari target sebesar Rp. 1.670.844.905.471,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15.  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2022

No	Jenis	Target (Rp) 2022	Realisasi (Rp) 2022	% Realisasi 2021
1	PAD	479.170.812.838,00	436.885.456.388,00	91,18
2	Pendapatan Transfer	1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	103,29
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	897.906.542,80	-
<b>Total</b>		<b>1.670.844.905.471,00</b>	<b>1.668.657.255.118,80</b>	<b>99,87</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.

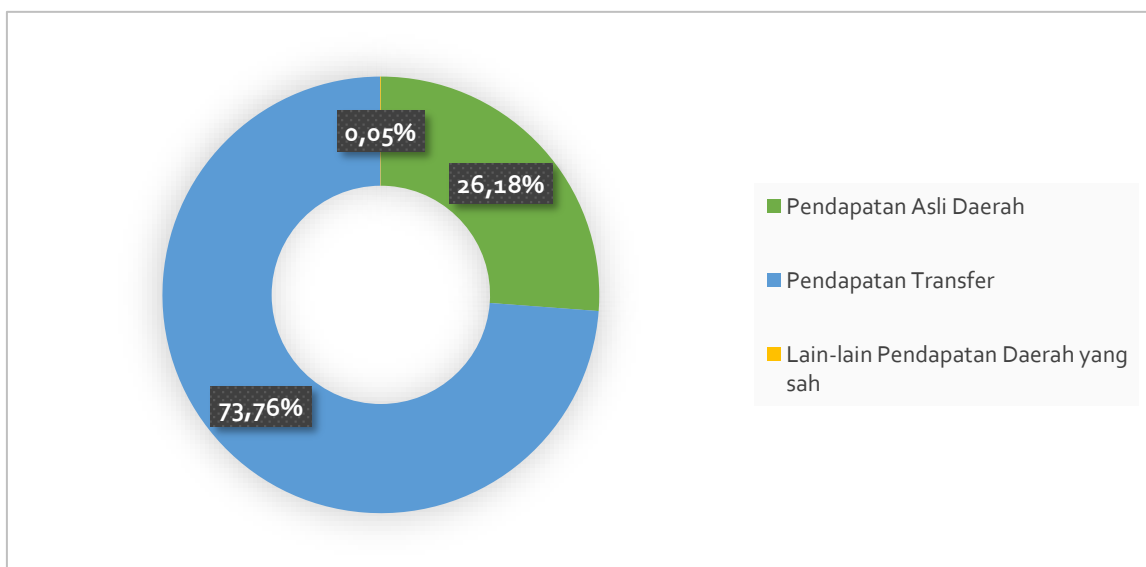


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.7.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.8.

Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2022

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 26,18% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73,76% dan sisanya sebesar 0,05% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Mengintegrasikan sistem aplikasi online agar administrasi penerimaan pajak/retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.

- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi untuk wajib pajak yang menunggak agar lebih tegas.

### **3.2.1.2. Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor

90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Tahun 2023 mempedomani:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - e. Keputusan Walikota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
  - f. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2024.
2. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung local economic serta berkorelasi langsung dengan output yang

akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2023 *“PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK SELARAS DENGAN PENINGKATAN PERDAGANGAN DAN JASA UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif dan berkelanjutan”*;

3. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian INOVASI DAERAH sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi One Agency One Innovation;

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran



yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.812.932.658.629,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.622.847.432.178,57 (89,52%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

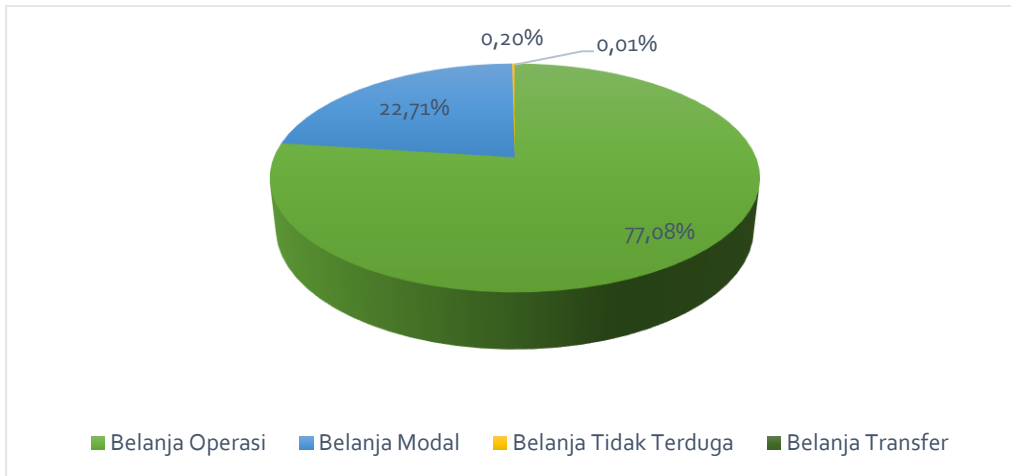
Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.16.  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
1	Belanja Operasi	1.238.942.121.720,85	1.250.909.815.843,08			
2	Belanja Modal	495.805.792.008,94	368.629.083.248,49			
3	Belanja Tidak Terduga	5.609.964.289,99	3.208.533.087,00			
4	Belanja Transfer	0,00	100.000.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>1.740.357.878.019,78</b>	<b>1.622.847.432.178,57</b>	<b>1,744,554,257,075</b>	<b>1,547,947,201,075</b>	<b>1,847,947,201,075</b>

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 1.250.909.815.843,08. Target Belanja Modal pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 401.829.682.271,00 terealisasi sebesar Rp. 368.629.083.248,49 atau 91,74% serta Target Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.416.645.016,00 terealisasi sebesar Rp. 3.208.533.087,00 atau 72,65% dan untuk Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar 100%. Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022, seperti pada gambar di bawah ini.

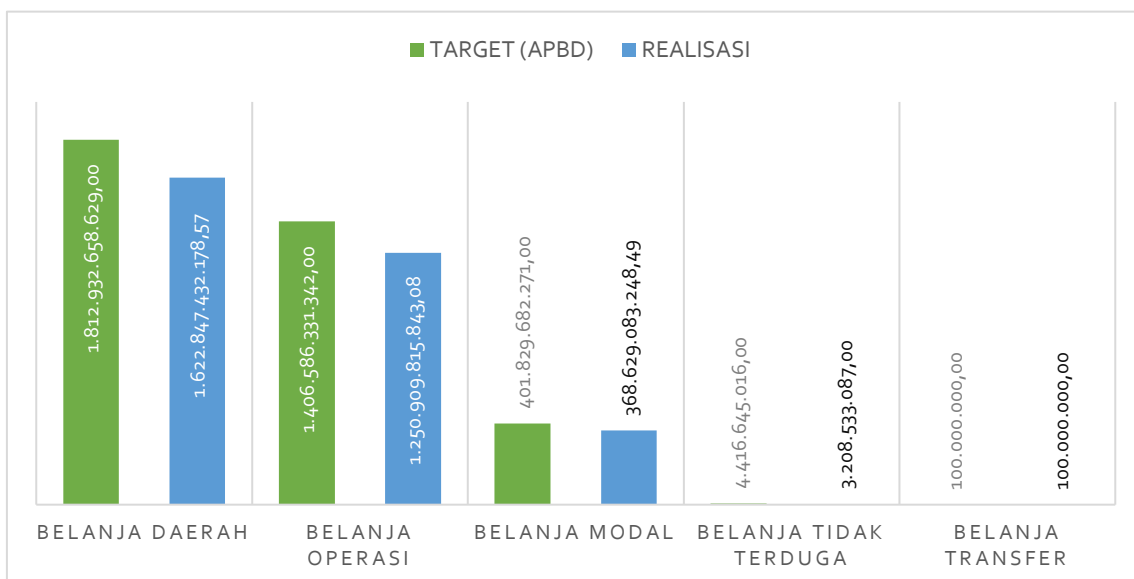


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.9  
Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar 77,08% jauh berada di atas Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan nilai masing-masing sebesar 22,71%, 0,2% dan 0,01%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.10.  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022

## Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.386.617.509.691 dengan realisasi sebesar Rp.1.238.942.121.720,85 atau 89,35% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.17.  
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	736.429.689.205,00	657.648.319.579,50	89,30
2.	Belanja Barang dan Jasa	593.746.544.387,00	535.487.916.812,58	90,19
3.	Belanja Bunga	6.901.104.160,00	5.866.774.340,00	85,01
4.	Belanja Subsidi	2.100.000.000,00	614.964.000,00	29,28
5.	Belanja Hibah	52.968.676.490,00	47.357.346.311,00	89,41
6.	Belanja Bantuan Sosial	14.440.317.100,00	3.934.494.800,00	27,25
<b>Total Belanja Operasi</b>		<b>1.406.586.331.342,00</b>	<b>1.250.909.815.843,08</b>	<b>88,93</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 736.429.689.205,00 terealisasi sebesar Rp. 657.648.319.579,50 atau 89,30%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 593.746.544.387,00 terealisasi sebesar Rp. 535.487.916.812,58 atau 90,19%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp. 6.901.104.160,00 terealisasi sebesar Rp. 5.866.774.340,00 atau 85,01%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 2.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 614.964.000,00 atau 29,28%. Anggaran anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 52.968.676.490,00 terealisasi sebesar Rp. 52.968.676.490,00 atau 89,41%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 14.440.317.100,00 terealisasi sebesar Rp. 3.934.494.800,00 atau 27,25%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.11.  
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022

### Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja Modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 401.829.682.271,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 368.629.083.248,49 atau 91,74%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

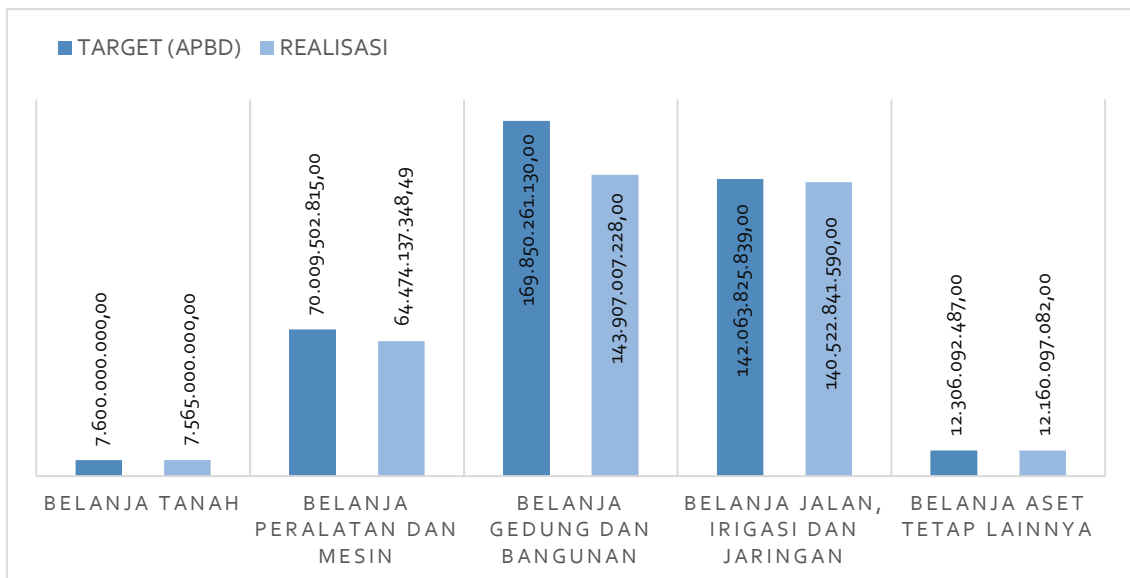
Tabel 3.18.  
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	7.600.000.000,00	7.565.000.000,00	99,54
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.009.502.815,00	64.474.137.348,49	92,09
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.850.261.130,00	143.907.007.228,00	84,73
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.063.825.839,00	140.522.841.590,00	98,92
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.306.092.487,00	12.160.097.082,00	98,81
<b>Total Belanja Modal</b>		<b>401.829.682.271,00</b>	<b>368.629.083.248,49</b>	<b>91,74</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 7.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.565.000.000,00 atau 99,54%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 70.009.502.815,00 terealisasi sebesar Rp. 64.474.137.348,49 atau 92,09%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 169.850.261.130,00 terealisasi sebesar Rp. 143.907.007.228,00 atau 84,73%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 142.063.825.839,00 terealisasi sebesar 140.522.841.590,00 atau 98,92%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 12.306.092.487,00 terealisasi sebesar Rp. 12.160.097.082,00 atau 98,81%.

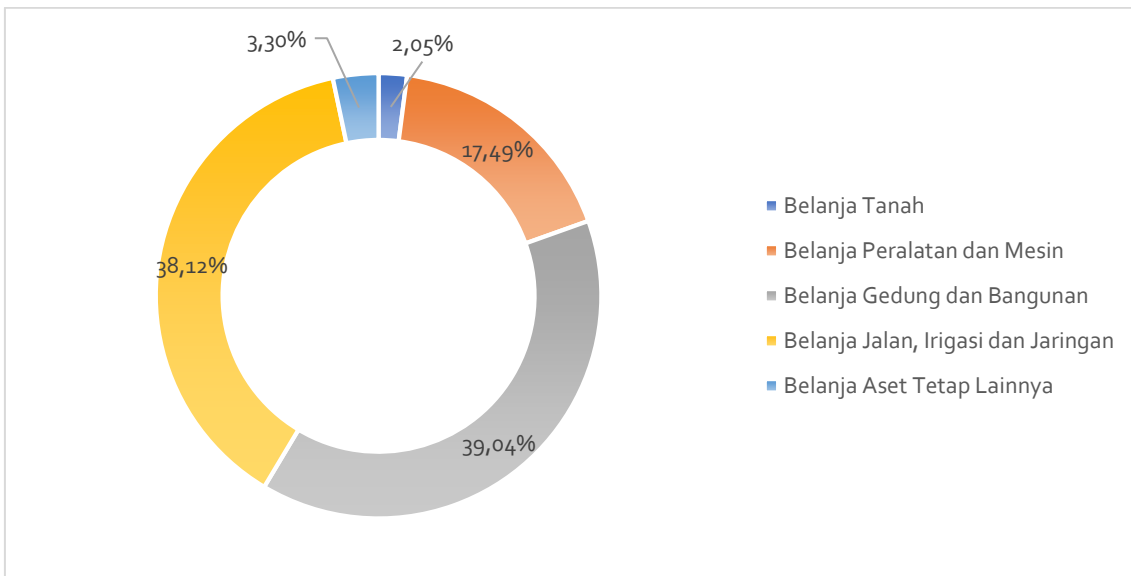
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.12.  
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.13.  
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal  
Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022

### Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.416.645.016,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.208.533.087,00 atau 72,65%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.19.  
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
<b>Total Belanja Tidak Terduga</b>		<b>4.416.645.016,00</b>	<b>3.208.533.087,00</b>	<b>72,65</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

### Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar 100%.

### **3.2.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan meliputi penerimaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2022, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.20.  
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 s.d Tahun 2025

<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>REALISASI 2021</b>	<b>REALISASI 2022</b>	<b>APBD 2023</b>	<b>PROYEKSI 2024</b>	<b>PROYEKSI 2025</b>
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>215.087.753.158,00</b>	<b>215.092.419.627,49</b>	<b>132,000,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>
Penggunaan SILPA	159.678.657.158,00	159.683.323.627,49	132,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-			
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	55.409.096.000,00	55.409.096.000,00			
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>73.000.000.000,00</b>	<b>73.000.000.000,00</b>	<b>80,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70,000,000,000	0	0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>142.087.753.158,00</b>	<b>142.092.419.627,49</b>			
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>187.902.242.567,72</b>			

*Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023*

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1)Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3)Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 yaitu ***“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA, YANG RELIGUS DAN BERBUDAYA”***.

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi.

4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.1.  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	OPD
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Manajemen ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2	DISKOMINFO
				Indeks Sistem Merit	0.5	BKPSDMD
				Nilai SAKIP	B	INSPEKTORAT, BAPPEDA, ORGANISASI
				Maturitas SPIP	3.0	INSPEKTORAT
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,02 (B)	ORGANISASI
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase layanan trantibumlinmas	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	100%	SATPOL PP
				Indeks Kota Toleran	5,71 s/d 5,8	BKBP
		Persentase layanan kebencanaan	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran	100%	DISDAMKAR
				Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100%	DISDAMKAR DINSOS
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih	8.5	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	7.35	DPRKP
				Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah	7.8	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan	7,35*	DISHUB
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56	DLH

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	OPD
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	535 M	DPMPTSP
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.0%	BPPRD BPKAD
		Laju Inflasi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81	DPKP
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.25	DTKK
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.1	DINKES
			Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.4	DSDIK
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.23	DSDIK
			Penurunan prevalensi stunting	Penurunan angka prevalensi stunting	10%	DPPKB DINKES
			Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	DPMPPA
			Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58.06	DISPORA
			Pengendalian angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.2	DPPKB
			Penurunan angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8.28	DINSOS, DPUPR, DPRKP DPP, DTKK
Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	DINSOS			

## 4.2 TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2024 adalah **“Penguatan Stabilitas Ekonomi, Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah, Infrastruktur yang handal serta Lingkungan Hidup Berkelanjutan”**.

### 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.



3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam tahun 2024 adalah sebesar 5,3-5,7%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2024, antara lain antara lain meliputi :

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5 persen;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen;
3. Rasio Gini 0,374-0,377;
4. Indeks Pembangunan Manusia 73-74;
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen;
6. Nilai Tukar Petani 105-108, dan
7. Nilai Tukar Nelayan 110.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 4.2.  
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Produktivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen;</li> <li>b. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan; dan</li> <li>c. Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.</li> </ol>
2	Pembangunan Infrastruktur Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan;</li> <li>b. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak;</li> <li>c. Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan; dan</li> <li>d. Memperluas jangkauan infrastruktur komunikasi dan informasi.</li> </ol>
3	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan tata kelola layanan publik;</li> <li>b. Meningkatkan akuntabilitas;</li> <li>c. Meningkatkan kemampuan ASN; dan</li> <li>d. Meningkatkan ketentraman, dan ketertiban umum.</li> </ol>
4	Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring;</li> <li>b. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;</li> <li>c. Meningkatkan pembangunan gender; dan</li> <li>d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.</li> </ol>
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;</li> <li>b. Penerapan Good Mining Practice (GMP);</li> <li>c. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan</li> <li>d. Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan non alam.</li> </ol>

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2024 berdasarkan RPD Kota Jambi 2024-2026 dan gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 4.3  
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	Mengupayakan pemerataan dan Konektivitas pembangunan antar wilayah seiring dengan upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengoptimalkan Layanan Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga serta terus mewujudkan peningkatan Kesehatan yang bermutu, murah, mudah dan terjangkau guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Peran Serta Warga dalam Pembangunan, Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Angka Kemiskinan
4	Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah	Upaya Penguatan Ekonomi guna Mempertahankan Daya Beli Masyarakat, Penguatan UMKM dan Mendorong Investasi Daerah serta Pengembangan Destinasi Wisata
5	Good Governance	Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Capaian Pembangunan, sejalan dengan Penguatan SDM aparatur, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Sinergitas Dan Kerjasama Antar Wilayah, Kelembagaan dan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah guna mendukung Perwujudan Kota Pintar yang berbasis Transformasi Digital untuk memperkuat Good Governance
6	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Menjaga Kondusifitas Wilayah, Toleransi Kehidupan Masyarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA SERENTAK 2024

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4  
*Tagging* Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Good Governance
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

#### 4.2.4 Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Target		Arahan Provinsi
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertumbuhan Ekonomi	5,33	-4,24	4,08	5,36	5,40	5,55	
Inflasi	1,27	3,09	1,67	6,94	3,50	3,30	
IPM	78,26	78,37	79,12	79,58	79,65	79,72	
Kemiskinan	8,12	8,27	9,02	8,33	8,3	8,28	
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,27	10,66	10,49	8,95	8,8	8,65	
Gini Ratio	0,339	0,342	0,346	0,36	0,35	0,34	

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN**

Kerangka pendanaan RPD tahun rencana disesuaikan kembali dalam RKPD tahun 2024. Antara lain karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dalam RKPD tahun 2023 dengan RPD tahun rencana. Menjelang masa berakhirnya tahun rencana dalam RPD, berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa program yang perlu didorong pencapaiannya, sehingga alokasi anggarannya juga disesuaikan. Selain itu alokasi sumber dana dalam RKPD tahun 2024 ini tidak hanya memperhitungkan kemampuan dana APBD sebagaimana dalam RPJMD, tetapi sudah memperhitungkan dana dari APBN ataupun APBD Provinsi. Rencana kerja dan pendanaan RKPD Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik rencana program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2024

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>					
	<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>					
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	313,491,000,000	B	338,629,000,000
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99.49 Persen	158,764,000,000	99.49 Persen	171,495,000,000
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kompetensi Peserta Didik Terhadap Kearifan Lokal	75 Persen	29,000,000	75 Persen	32,000,000
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 Persen	80,000,000	100 Persen	86,000,000
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan	5 Persen	133,000,000	5 Persen	143,000,000
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>					
	<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	214,297,000,000	B	231,481,000,000
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase indikator SPM Bidang Kesehatan yang mencapai >90%	100%	75,632,000,000	100%	81,697,000,000



NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan yang sesuai standar	100%	1,653,000,000	100%	1,785,000,000
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			686,000,000		741,000,000
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM aktif yang memiliki strata Mandiri	100%	743,000,000	100%	803,000,000
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
	<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	16,358,000,000	BB	17,669,000,000
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	54.19%	31,053,000,000	54.19%	33,544,000,000
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	84.49%	1,777,000,000	84.49%	1,920,000,000
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	73.39%	9,960,000,000	73.39%	10,759,000,000
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah	4.05%	10,100,000,000	4.05%	10,910,000,000
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	51.26%	1,359,000,000	51.26%	1,468,000,000
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	86.52%	47,166,000,000	86.52%	50,948,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	68.44%	148,070,000,000	68.44%	159,943,000,000
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	48.00%	5,659,000,000	48.00%	6,113,000,000
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	90.37%	56,709,000,000	90.37%	61,257,000,000
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	23.64%	1,951,000,000	23.64%	2,107,000,000
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	80%	1,662,000,000	80%	1,795,000,000
<b>4</b>	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
	<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,471,000,000	BB	8,071,000,000
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	63%	1,071,000,000	63%	1,157,000,000
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	66.12%	5,813,000,000	66.12%	6,279,000,000
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan kawasan permukiman yang di layani utilitas umum	88%	29,390,000,000	88%	31,747,000,000
	1.04.06 PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	20%	23,000,000	20%	25,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>					
	<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (70,21)	9,141,000,000	BB (70,21)	9,874,000,000
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	7,203,000,000	100%	7,781,000,000
6	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>					
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		7,932,000,000		8,567,000,000
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Angka Kejadian Bencana	100%	697,000,000	100%	753,000,000
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran	100%	4,588,000,000	100%	4,955,000,000
7	<b>Dinas Sosial</b>					
	<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,099,000,000	BB	7,668,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PKMS	100%	1,661,000,000	100%	1,794,000,000
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	86,000,000	100%	93,000,000
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani	100%	1,292,000,000	100%	1,395,000,000
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	100%	8,127,000,000	100%	8,778,000,000
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat	100%	738,000,000	100%	798,000,000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>8</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>					
	<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	5,816,000,000	100%	6,283,000,000
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja	80%	106,000,000	80%	115,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM & Bekerja	62%	1,425,000,000	62%	1,540,000,000
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar	50%	205,000,000	50%	222,000,000
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang Layak	21.5%	377,000,000	21.5%	407,000,000
	<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>					
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	84.6%	34,000,000	84.6%	37,000,000
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	16.9%	593,000,000	16.9%	641,000,000
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Omset Koperasi	5.0%	149,000,000	5.0%	160,000,000
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas	9.4%	3,320,000,000	9.4%	3,587,000,000
<b>9</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>					
	<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	11,737,000,000	BB	12,678,000,000
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	15,000,000	100%	16,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7 Nilai	1,829,000,000	7 Nilai	1,976,000,000
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	42.30 Nilai	7,784,000,000	42.30 Nilai	8,408,000,000
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	101,000,000	100%	109,000,000
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	376,000,000	100%	406,000,000
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	167,000,000	100%	180,000,000
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	124,000,000	100%	134,000,000
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	90.98%	32,102,000,000	90.98%	34,676,000,000
<b>10</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
	<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81.15	7,172,000,000	81.15	7,747,000,000
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	274,000,000	100%	296,000,000
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	340,000,000	100%	367,000,000
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validitas database kependudukan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	93% 80.60%	2,214,000,000	93% 80.60%	2,392,000,000
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian Data Kependudukan	100%	33,000,000	100%	36,000,000
<b>11</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,876,000,000	BB	6,347,000,000
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG=94.45% IDG=68.40%	766,000,000		827,000,000
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	100%	366,000,000	100%	395,000,000
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga Berkualitas	35%	174,000,000	35%	188,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	25%	263,000,000	25%	284,000,000
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nindya	339,000,000	Nindya	366,000,000
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	100%	605,000,000	100%	654,000,000
	<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	88%	4,656,000,000	88%	5,029,000,000
<b>12</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80 (B)	5,399,000,000	80 (B)	5,832,000,000
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan	1 Tahun	251,000,000	1 Tahun	272,000,000
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan	1 Tahun	3,698,000,000	1 Tahun	3,994,000,000
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	1 Tahun	2,826,000,000	1 Tahun	3,053,000,000



NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri				
<b>13</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>					
	<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	12,676,000,000	100%	13,693,000,000
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0,47	11,991,000,000	0,47	12,952,000,000
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	64.00%	157,000,000	64.00%	169,000,000
<b>14</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>					
	<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,200,000,000	100%	6,697,000,000
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Akses dan kualitas informasi	80%	4,843,000,000	80%	5,231,000,000
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	75%	3,696,000,000	75%	3,992,000,000
	<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral	60%	86,000,000	60%	93,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi	550 Informasi	61,000,000	550 Informasi	66,000,000
<b>15</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu</b>					
	<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,160,000,000	BB	9,895,000,000
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	2 Investor	72,000,000	2 Investor	78,000,000
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)	5%	234,000,000	5%	253,000,000
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88%	1,144,000,000	88%	1,236,000,000
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal	100%	660,000,000	100%	713,000,000
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	8 Dokumen	48,000,000	8 Dokumen	52,000,000
<b>16</b>	<b>Dinas Pemuda dan Olahraga</b>					
	<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,126,000,000	BB	5,537,000,000
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha Muda Pemula Persentase OKP yang Aktif	75% 78% 86%	1,495,000,000	75% 78% 86%	1,615,000,000
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	62% 80%	6,569,000,000	62% 80%	7,095,000,000
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudep yang Dibina	50%	1,140,000,000	50%	1,232,000,000
<b>17</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>					
	<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>					
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	8,19%	821,000,000	8,19%	887,000,000
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	2 Naskah	110,000,000	2 Naskah	119,000,000
	<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>					
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	BB	7,654,000,000	BB	8,268,000,000
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Data Informasi Arsip yang Bernilai Guna Tinggi	54	737,000,000	54	796,000,000
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip Yang Telah Habis Masa Retensinya	100	266,000,000	100	287,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Perizinan Penggunaan Arsip		8,000,000		9,000,000
<b>18</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>					
	<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60.03	5,159,000,000	60.03	5,572,000,000
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%	950,000,000	100%	1,026,000,000
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	98,000,000	100%	106,000,000
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi.	100%	122,000,000	100%	132,000,000
<b>19</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>					
	<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Penganekaragaman pangan	100%	443,000,000	100%	479,000,000
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan	80%	99,000,000	80%	107,000,000
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Pengawasan Pangan Segar Daerah	100	494,000,000	100	533,000,000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
<b>20</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>					
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata	30%	989,000,000	30%	1,069,000,000
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata	30%	1,186,000,000	30%	1,282,000,000
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35%	1,039,000,000	35%	1,123,000,000
<b>21</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>					
	<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum Daratan, Sungai, Danau dan Rawa	100	74,000,000	100	80,000,000
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	3.00%	440,000,000	3.00%	475,000,000
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan produksi produk Perikanan Bernilai Tambah/Produksi Olahan hasil Perikanan	100%	98,000,000	100%	106,000,000
	<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	14,567,000,000	BB	15,735,000,000
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produktivitas Pertanian	5.60%	2,967,000,000	5.60%	3,205,000,000
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	60.33%	70,000,000	60.33%	76,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Pengujian Sampel Kesmavet	100%	931,000,000	100%	1,005,000,000
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luasan Pengendalian OPT	90%	105,000,000	90%	113,000,000
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelompok tani	20%	414,000,000	20%	447,000,000
<b>22</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>					
	<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,648,000,000	BB	10,421,000,000
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	66.66%	90,000,000	66.66%	97,000,000
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	66.66%	1,562,000,000	66.66%	1,687,000,000
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	66.66%	3,018,000,000	66.66%	3,260,000,000
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	70.83%	80,000,000	70.83%	86,000,000
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	79.49%	118,000,000	79.49%	127,000,000
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80.43%	990,000,000	80.43%	1,070,000,000
	<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan Pembangunan Industri	66.66%	1,480,000,000	66.66%	1,598,000,000
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	66.66%	64,000,000	66.66%	69,000,000
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri	66.66%	49,000,000	66.66%	53,000,000
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>23</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>					
	<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>					
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	39,817,000,000	BB	43,010,000,000
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	26,512,000,000	100%	28,638,000,000
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	1,942,000,000	100%	2,097,000,000
<b>24</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>					
	<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>					
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	43,454,000,000	BB	46,938,000,000
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	85%	37,350,000,000	85%	40,345,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>25</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
	<b>5.01 PERENCANAAN</b>					
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	9,343,000,000	B	10,092,000,000
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,122,000,000	100%	1,212,000,000
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	25.16 16.28	1,212,000,000	25.16 16.28	1,309,000,000
	<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	100%	684,000,000	100%	739,000,000
<b>26</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>					
	<b>5.02 KEUANGAN</b>					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	10,247,000,000	B	11,069,000,000
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	100%	17,539,000,000	100%	18,946,000,000
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	75%	2,181,000,000	75%	2,356,000,000



NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
<b>27</b>	<b>Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</b>					
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	28,660,000,000	B	30,958,000,000
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	5,473,000,000	100%	5,912,000,000
<b>28</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>					
	<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>					
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (80)	9,273,000,000	A (80)	10,017,000,000
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	93%	2,260,000,000	93%	2,442,000,000
	<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan kompetensi	53%	3,295,000,000	53%	3,559,000,000
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
<b>29</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>					
	<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>					
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Level Kapabilitas APIP - Nilai Area Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas (Hasil Penilaian Inspektorat)		11,210,000,000		12,108,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)		1,228,000,000		1,326,000,000
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi		1,127,000,000		1,217,000,000
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>30</b>	<b>Kecamatan Kota Baru</b>					
	<b>7.01 KECAMATAN</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6,940,000,000	BB	7,497,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	334,000,000	100%	361,000,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,217,000,000	6 Lembaga	4,555,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	464,000,000	100%	502,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	527,000,000	100%	569,000,000
<b>31</b>	<b>Kecamatan Telanaipura</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,278,000,000	BB	7,862,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	1,995,000,000	100%	2,155,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	3,927,000,000	100%	4,241,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	228,000,000	100%	246,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	644,000,000	100%	696,000,000
<b>32</b>	<b>Kecamatan Jelutung</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,307,000,000	BB	8,973,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	218,000,000	100%	235,000,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,744,000,000	100%	5,125,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	526,000,000	100%	568,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	369,000,000	100%	398,000,000
<b>33</b>	<b>Kecamatan Pasar</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,502,000,000	BB	5,943,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	314,000,000	100%	339,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	1,666,000,000	100%	1,799,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	583,000,000	100%	630,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	461,000,000	100%	498,000,000
<b>34</b>	<b>Kecamatan Jambi Selatan</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6,843,000,000	BB	7,391,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	87%	2,325,000,000	87%	2,512,000,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	63%	3,411,000,000	63%	3,684,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	500,000,000	100%	540,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	212,000,000	100%	229,000,000
<b>35</b>	<b>Kecamatan Jambi Timur</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9,692,000,000	BB	10,469,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	95%	628,000,000	95%	679,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	80%	4,990,000,000	80%	5,390,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	90%	695,000,000	90%	750,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	1,289,000,000	100%	1,393,000,000
<b>36</b>	<b>Kecamatan Danau Teluk</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5,950,000,000	BB	6,427,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	212,000,000	100%	229,000,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	2,096,000,000	100%	2,264,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	340,000,000	100%	368,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	365,000,000	100%	395,000,000
<b>37</b>	<b>Kecamatan Pelayangan</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,138,000,000	BB	7,710,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	148,000,000	100%	160,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	1,964,000,000	100%	2,121,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	450,000,000	100%	486,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	265,000,000	100%	286,000,000
<b>38</b>	<b>Kecamatan Alam Barajo</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,938,000,000	BB	9,655,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	692,000,000	100%	748,000,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,305,000,000	100%	4,650,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	431,000,000	100%	465,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	352,000,000	100%	381,000,000
<b>39</b>	<b>Kecamatan Danau Sipin</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6,742,000,000	BB	7,283,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	421,000,000	100%	455,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	3,593,000,000	100%	3,881,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	434,000,000	100%	468,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	290,000,000	100%	313,000,000
<b>40</b>	<b>Kecamatan Paal Merah</b>					
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	7,326,000,000	BB	7,914,000,000
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan	100%	129,000,000	100%	140,000,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	4,799,000,000	100%	5,184,000,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	450,000,000	100%	486,000,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	464,000,000	100%	501,000,000
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
<b>41</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
	<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>					
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	4,318,000,000	BB	4,664,000,000

NO	OPD/URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, dan Sejarah Kebangsaan	100%	245,000,000	100%	264,000,000
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	100%	1,495,000,000	100%	1,614,000,000
	8.01.04 PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Ormas yang terdaftar	100%	708,000,000	100%	764,000,000
	8.01.05 PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Pencegahan Narkoba	100%	248,000,000	100%	268,000,000
	8.01.06 PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan daerah, Penanganan Konflik sosial dan Pemantauan Orang Asing	100%	108,000,000	100%	117,000,000



## 5.2 TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
<b>I</b>	<b>Kota Baru</b>			<b>Jumlah Aspirasi = 285</b>	
1	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	1	Pengadaan pemasangan LPJU 3 titik di depan langgar Al-Rahim Jl. Sei Lilin RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	2	Pengadaan pemasangan LPJU 3 titik RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	3	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 3 unit di Jl. Darma Karya II Lr. Family I gang Jajuli RT. 46 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	4	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 3 unit di Perum Grand Namura Indah RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	5	Pembangunan drainase 200 meter RT. 28 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	6	Pengadaan pemasangan LPJU 2 titik depan dan belakang SMU 6 Jl. M. Kukuh RT. 28 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	7	Pelebaran dan pendalaman aliran sungai untuk pencegahan banjir di sekitar SD 104 RT. 04 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	8	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 28 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DISDIK
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	9	Perbaikan pembangunan drainase 150 meter RT. 28 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	10	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 Buah RT. 28 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	11	Pengaspalan jalan 250 meter Perumahan Indah Persada RT. 35 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	12	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 35 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DISDIK
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	13	Pengadaan tiang dan lampu penerangan jalan 3 titik RT. 08 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	14	Pelatihan keterampilan menjahit, tata rias atau lainnya untuk ibu-ibu RT. 08 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DTKKUKM
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	15	Pengaspalan jalan 300 meter Jl. Widuri I RT. 01 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	16	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum di 2 titik RT. 01 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	17	Pengaspalan jalan 120 meter RT. 04 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	18	Pembangunan pembuatan parit jalan 150 meter RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	19	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan di 2 titik RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	20	Pengaspalan jalan 120 meter RT. 08 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	21	Pengaspalan jalan 150 meter RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	22	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	23	Pemasangan lampu jalan di 1 titik RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	24	Pemasangan lampu jalan di 3 titik RT. 11 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	25	Pengaspalan jalan 100 meter Lr. Puja Kesuma Jl. Sunan Giri RT. 05 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	26	Pengecoran jalan 150 meter RT. 08 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	27	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik RT. 08 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	28	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik menuju musholla Al-Rahim Jl. Dharmawangsa RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	29	Pengaspalan jalan 150 meter Jl. Dharmawangsa RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	30	Bantuan musholla Al-Rahim Jl. Sei Lilin RT. 13 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	Bagian Kesra
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	31	Pembangunan parit jalan 50 meter RT. 03 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	32	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 2 titik RT. 03 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	33	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik RT. 14 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Muhammad Yasir, S.Pd, MM	GERINDRA	34	Pembangunan pembuatan parit jalan 100 meter menuju musholla Nurhuda RT. 14 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	1	LPJU 15 buah di Lr. Keluarga dan 20 buah di Lr. Family Talang Gulo RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	2	LPJU dengan tiang 50 unit Lr. Keluarga dan Lr. Family Talang Gulo RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	3	Pembangunan parit jalan 800 meter di Lr. Family dan 600 meter di Lr. Keluarga Talang Gulo RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	4	Tindak lanjut terhadap PT. Zodiak dan PT. Tok Siang yang menutup aliran air sungai sehingga menyebabkan banjir di RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	5	Pengecoran jalan 350 meter di jalan menuju SD Negeri 225 menuju Pemakaman Umum Talang Gulo, 200 meter di Lr. Family dan 150 meter jalan menuju Mushola Tarbiyatul Islamiyah RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	6	Pembangunan parit jalan sepanjang 150 meter di pemakaman Talang Gulo RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	7	Pembangunan drainase sepanjang 1000 meter RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	8	LPJU di 14 titik jalan menuju SD Negeri 225 menuju Pemakaman Umum Talang Gulo RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	9	Solusi pencemaran lingkungan dari limbah TPA Talang Gulo yang saat curah hujan tinggi menyebabkan rembesannya mencemari sumber air bersih sumur masyarakat sekitar di RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DLH
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	10	Penambahan pangkalan gas RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	11	Bantuan UMKM pelatihan untuk ibu-ibu, dana dan pengadaan mesin jahit 1 unit RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DTKKUKM
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	12	Penyuluhan parenting anak, remaja dan masyarakat di RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPMPPA
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	13	Pemeriksaan kesehatan gratis 1 kali per-bulan untuk warga RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DINKES
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	14	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DISDIK
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	15	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah Lr. Raden merpati belakang Rapi tenda dan Jl. Sunan Giri lorong tembus RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	16	Pelatihan keterampilan memasak untuk warga RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DTKKUKM
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	17	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 15 buah RT. 04 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	18	Perbaikan pengecoran jalan setapak Lr. Raden Merpati belakang Rapi Tenda RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	19	Perbaikan pengecoran jalan ke SMP Negeri 25 RT. 03 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	20	Pembangunan drainase parit sepanjang 200 meter RT. 05 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	21	Bantuan pengecoran pembangunan masjid RT. 06 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	Bagian Kesra

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	22	Bantuan baju seragam kelompok rebana dan sholawatan untuk 20 orang Kelurahan Suka Karta Kecamatan Kota Baru	Bagian Kesra
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	23	Pengecoran jalan 50 meter Perumahan Bumi Asam Raya RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	24	Bantuan sarana dan prasarana olah raga voli dan badminton berupa tiang lapangan dan fasilitas lainnya RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DISPORA
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	25	Bantuan UMKM berupa bahan dan peralatan Kelompok usaha pembuatan kue, laundry dan penjahit RT. 11 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DTKKUKM
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	26	Normalisasi drainase sebelah pemakaman RT. 05 Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	27	Pengaspalan jalan 50 meter Jl. Sunan Kalijaga RT. 35 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	28	Pengecoran jalan 150 meter Lr. Suka Sari RT. 29 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	29	Pengecoran jalan 50 meter RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	30	Pengecoran jalan lingkungan 50 meter RT. 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	31	Lampu jalan di 3 titik RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	32	Lampu jalan di 4 titik Lr. Muttaqin RT. 06 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	33	Lampu jalan di 1 titik Lr. Sepakat RT. 20 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	34	Lampu jalan di 1 titik RT. 19 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	35	Pembangunan penyambungan drainase 30 meter Lr. Muttaqin RT. 06 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	36	Pembuatan sumur bor RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	37	Pengadaan buku pustaka untuk taman baca RT. 04 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DKP
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	38	Bantuan sarana dan prasarana olah raga lapangan badminton RT. 35 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DISPORA
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	39	Bantuan seragam tim olah raga sebanyak 35 pcs RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DISPORA
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	40	Bantuan pengadaan 1 unit sound system RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	KECAMATAN
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	41	Bantuan musholla Al-Ikhlas Jl. Marsda Surya Dharma RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	Bagian Kesra
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	42	Bantuan UMKM RT. 19, RT. 23 dan RT. 20 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DTKKUKM
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	43	Pengecoran jalan RT. 07 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	44	Pembangunan parit jalan RT. 07 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	45	Pengecoran jalan RT. 12 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Suprapti, SE	PDI - PERJUANGAN	46	Pembangunan parit jalan RT. 12 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
3	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Pengadaan penambahan LPJU di beberapa daerah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Pembangunan pembuatan drainase RT. 39 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Pengaspalan jalan lingkungan di RT. 04 dan RT. 17 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Pengecoran jalan lingkungan lanjutan Jl. Sunan Bonang RT. 39 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Pengecoran jalan lingkungan RT. 05 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Pengecoran jalan lingkungan ke arah musholla RT. 10 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 120 meter lebar 2 meter mengarah ke masjid al-ikhlas RT. 14 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Pembangunan parit dengan tutup sepanjang 100 meter lebar 40 centimeter tinggi 40 centimeter mengarah ke masjid RT. 14 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Pengecoran jalan lingkungan sepanjang RT. 38 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Pengecoran jalan lingkungan samping madrasah depan SD 63 RT. 09 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pengadaan pemasangan LPJU RT. 18 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Pembangunan pembuatan Dam RT. 12, RT. 17, dan RT. 18 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	13	Pembangunan pembuatan drainase jalan dengan tutup panjang 120 meter lebar 40 cm tinggi 40 cm mengarah ke Masjid RT. 14 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	14	Pembangunan perbaikan pembuatan parit jalan kanan kiri mulai dari ujung Jl. Arizona (depan tugu juang) sampai dengan masjid Baitul Ihsan yang rusak dan tertimbun RT. 02 dan RT. 03 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	15	Bantuan sarana dan prasarana posyandu seperti meja dan kursi se Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	KECAMATAN
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	16	Pembangunan pembuatan parit jalan tutup depan SD negeri 53 RT. 11 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	17	Pengecoran jalan depan SD 53 RT. 11 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	18	Pengadaan pemasangan lampu jalan arah masjid Baitur Rahman RT. 11 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	19	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu 6 titik untuk jalan dan lapangan badminton Lr. Bukit Palm RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	20	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 unit Lr. Kulian RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	21	Renovasi lapangan badminton Lr. Bukit Palm RT. 14 Kecamatan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DISPORA
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	22	Pelebaran perbaikan pengecoran jalan sepanjang 150 meter Jl. Purnama Lr. Siswa RT. 14, RT. 18 dan RT. 06 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	23	Pembangunan pembuatan gorong-gorong 1 unit di simpang gardu PLN RT. 18 dan RT. 06 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	24	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 unit RT. 18 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	25	Pengaspalan jalan 200 meter samping pamor ban RT. 18 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	26	Bantuan pengadaan 1 paket wireless mic dan sound untuk pengajian ibu-ibu di RT. 07, RT. 13 dan RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	KECAMATAN
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	27	Bantuan pengadaan 3 unit drum penampung air, 300 buah piring rotan, 1 lusin nampan, 1 lusin keranjang, 1 lusin baskom, 6 buah tempat lauk prasmanan, 2 buah alas meja prasmanan, 3 buah tungku api, 2 buah dandang nasi besar dan 2 buah kualu besar untuk ibu-ibu PKK RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	KECAMATAN
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	28	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan tanpa tiang 3 buah di jalan Posyandu Teratai dan jalan Graha Purnama RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	29	Pembangunan drainase 2 x 2 x 100 meter perbatasan RT. 13, RT. 08 dan RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	30	Pembangunan pembuatan parit jalan 0.5 x 0.5 x 150 meter di jalan Graha Purnama Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	31	Bantuan penyaluran beasiswa kurang mampu untuk 38 orang di RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DISDIK
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	32	Pembangunan pembuatan pagar makam TPU Purnama tinggi 3 meter panjang 100 meter Jl. Koprul Sulaiman Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	33	Pengaspalan jalan lingkungan lebar 3 meter panjang 100 meter di Jl. Graha tembus Jl. Purnama Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	34	Pengecoran jalan 117 meter Lr. H. Abdullah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	35	Pengecoran jalan 150 meter Lr. Delima Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	36	Pengecoran jalan 50 meter Lr. Muncul II Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	37	Pemasangan lampu jalan RT. 29 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	38	Pengecoran jalan Lr. Anda dan Lr. Kempo RT. 15 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	39	Penutupan parit di Jl. Sunan Bonang RT. 39 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	40	Perbaikan gorong-gorong Lr. Baitul Muslim RT. 39 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	41	Pembangunan parit jalan Lr. Lwacer perbatasan RT. 18 dan RT. 39 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	42	Pengaspalan jalan Lr. Lwacer perbatasan RT. 18 dan RT. 39 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	43	Perbaikan pengecoran jalan RT. 28 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	44	Pembangunan parit jalan RT. 14 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	45	Penggantian bola lampu jalan ke lampu LED sepanjang jalan Sunan Bonang Lr. Colombia Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	46	Perbaikan pembangunan drainase RT. 45 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	47	Perbaikan pengecoran jalan RT. 45 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	48	Perbaikan pengecoran jalan menuju masjid RT. 04 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	49	Perbaikan pengecoran jalan RT. 19 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Syofni Herawati, SP	DEMOKRAT KEBANGSAAN	50	Penutupan parit di RT. 18 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
4	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	1	Pembangunan parit jalan 150m x 50cm x 50cm di Jl. Legok Lenang RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	2	Pengecoran jalan 150 m x 3m dan 100m x 4m Jl. Legok Lenang RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	3	Pembangunan drainase 50 m x 2 m x 1,5 m di Jl. Legok Lenang RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	4	Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter di Jl. Graha Purnama RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	5	Parit jalan tutup sepanjang 150 meter x 0,4 m x 0,5 m di Jl. Graha Purnama RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	6	Pembangunan drainase sepanjang 150 meter x 2m x 1,5m di Jl. Graha Purnama RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	7	LPJU tanpa tiang 4 titik Jl. Posyandu Teratai RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	8	Bantuan pengadaan tenda 2 unit RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	KECAMATAN
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	9	Bantuan pengadaan sarana prasarana posyandu teratai 1 paket (meja, kursi dan timbangan) RT. 13 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DINKES
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	10	Pembangunan pagar sepanjang 150 meter dan penimbunan 500m kubik pemakaman umum Bumi Purnama Jl. Kopral Sulaiman RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	11	Pengecoran jalan sepanjang 550 meter Jl. Kopral Sulaiman RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	12	Pengadaan pemasangan LPJU 4 titik Jl. Koprul Sulaiman dan 2 titik di pemakaman umum Bumi Purnama RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	13	Perbaikan pembangunan drainase sepanjang 500 meter Jl. Koprul Sulaiman dan 50 meter pembangunan drainase Lr. RM. Pondok Purnama RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	14	Pengecoran jalan sepanjang 300 meter RT. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	15	Pengadaan pemasangan LPJU 5 titik RT. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	16	Pengadaan lampu penerangan jalan tanpa tiang 3 buah Perumahan Mutiara Hijau Blok L RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	17	Pengadaan lampu penerangan jalan Dengan tiang 2 titik Perumahan Mutiara Hijau Blok L dan Blok K RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	18	Pengecoran jalan 80 meter Jl. Wijaya Kesuma RT. 19 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	19	Pengaspalan jalan 100 meter Jl. Kimaja 2 RT. 19 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	20	Pengadaan lampu penerangan jalan umum 2 buah Jl. Kimaja 2 dan 1 buah Jl. Wijaya Kesuma RT. 19 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	21	Pelebaran polongan atau gorong-gorong 20 meter di depan Lr. Lematang RT. 23 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	22	Perbaikan pembangunan parit jalan 10 meter RT. 23 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	23	Perbaikan pembangunan saluran parit 10 meter di Jl. Kapten A. Bakaruddin Lr. Lematang RT. 23 Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	24	Pengaspalan jalan panjang 145 lebar 4 meter di Jl.Surya RT. 45 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	25	Pengaspalan jalan lingkungan belakang kantor BPK RI RT. 09 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	26	Pengecoran jalan lingkungan panjang 61 meter lebar 5 meter Lr. Masjid Usman Hasman RT. 16/ RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	27	Pembangunan pembuatan parit jalan sepanjang 88 meter lebar 0.5 meter RT. 16 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	28	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 1 titik RT. 16 Kop. Sulaiman Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	29	Pengecoran jalan lanjutan sepanjang 124 meter lebar 6 meter Perum Pesona Kenali Jl. Pangeran Hidayat RT. 32 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	30	Pengecoran jalan sepanjang 161 meter lebar 3 meter Jl. Puyuh I RT. 24 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	31	Pengecoran jalan sepanjang 143 meter lebar 4 meter Lr. Kenari IV RT. 08/ RT. 07 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	32	Pengecoran jalan sepanjang 111 meter lebar 2.5 meter Lr. Ikawangi RT. 09 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	33	Pengaspalan jalan sepanjang 98 meter lebar 3 meter Lr. Bersama RT. 27 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	34	Pengecoran jalan sepanjang 123 meter lebar 3 meter Lr. Nauli RT. 38 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	35	Pembangunan pembuatan parit jalan sepanjang 123 meter Lr. Nauli RT. 38 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	36	Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 108 meter lebar 3 meter RT. 32 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	37	Timbunan pengerasan kelas B dan pengecoran jalan lingkungan sepanjang 35 meter lebar 3.5 meter Lr. Tegal Sari II RT. 34 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	38	Timbunan pengerasan kelas B dan pengecoran jalan lingkungan sepanjang 50 meter lebar 4 meter RT. 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	39	Pengaspalan jalan panjang 100 meter lebar 4 meter RT. 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	40	Pengecoran jalan sepanjang 208 meter lebar 2 meter Jl. Citra 2 RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	41	Perbaikan pengecoran jalan sepanjang 210 meter lebar 3.5 meter Perumahan Mutiara Hijau menuju gereja dan panjang 120 meter lebar 3 meter Lr. Mandalahi RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	42	Pengaspalan jalan lingkungan sepanjang 85 meter lebar 3 meter Perumahan Mutiara Hijau Lr. Robert RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	43	Pengaspalan jalan sepanjang 100 meter Jl. Kimaja 2 dan sepanjang 175 meter Jl. Wijaya Kesuma IV sampai Jl. Kimaja 3 RT. 19 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	44	Pengaspalan jalan sepanjang 250 meter Jl. Mawar II RT. 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	45	Pembebasan lahan sengketa untuk pembangunan drainase di RT. 26 perbatasan dengan RT. 14 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	46	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 5 titik dari bakso selecta arah Lr. Mawar 2 RT. 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	47	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan di 5 titik dari bakso selecta arah Lr. Mawar 2 RT. 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	48	Pengawasan dan evaluasi penyaluran gas subsidi di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	49	Realisasi instalasi city gas RT. 25 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	50	Realisasi lanjutan pengecoran jalan 250 meter di Belakang RT. Royal Prima RT. 22 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	51	Penanggulangan banjir di SMP 25 berbatasan Kelurahan Handil Jaya dengan Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	52	Pembangunan parit jalan depan Lr. Dolok Sanggul RT. 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	53	Lanjutan pengecoran jalan lingkungan panjang 250 meter lebar 4 meter tinggi 15 centimeter RT. 22 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	54	Pengaspalan jalan lingkungan 350 meter Lr. Batang Kapas RT. 08 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	55	Pembangunan perbaikan parit jalan sepanjang 200 meter RT. 22 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	56	Pendalaman drainase sepanjang 300 meter RT. 22 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	57	Pembangunan drainase sepanjang 150 meter RT. 17 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	58	Pengecoran jalan 200 meter di Jl. Pangeran Hidayat Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	59	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 4 titik Jl. Pangeran Hidayat Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	60	Pembangunan drainase 200 meter Lr. Jambu Mente RT. 10 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	61	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik RT. 10 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	62	Bantuan bedah rumah RT. 10 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	63	Pengaspalan jalan 300 meter di Lr. Jambu Mente RT. 10 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	64	Pengecoran jalan akses menuju masjid As Syukur panjang 150 meter lebar 4 meter RT. 25 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	65	Pembangunan parit jalan 900 meter di Jl. H.A.Roni dan 50 meter di Jl. Swadaya RT. 25 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	66	Pengadaan pemasangan lampu jalan akses menuju masjid As Syukur di 2 titik RT. 25 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	67	Beasiswa pelajar kurang mampu 15 orang RT. 25 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DISDIK
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	68	Pembangunan parit jalan panjang 250 meter lebar 2 meter Jl. Peltu Simatupang RT. 14 dan RT. 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	69	Pengaspalan jalan sepanjang 750 meter Jl. Peltu Simatupang RT. 14 dan RT. 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	70	Pembangunan drainase panjang 800 meter di area pemakaman Bumi Ayu RT. 11 dan RT. 14 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Pangeran HK Simanjuntak,SE,M.Si	NASDEM	71	Pengecoran jalan panjang 40 meter di Jl. Kol.M. Kukuh Lr. Cepat RT. 14 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPUPR
5	H. Jasrul, S.Ag	PKS	1	Peninjauan ulang kartu kendali gas Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPP
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	2	Bantuan pembangunan madrasah Masjid Al-Hidayah RT. 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	Bagian Kesra
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	3	Pembangunan parit jalan sekita masjid Al-Hidayah RT. 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	4	Bantuan pembangunan menara masjid Nurul Huda RT. 10 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru.	Bagian Kesra
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	5	Pengecoran jalan RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	6	Pembangunan pelebaran parit jalan RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	7	Penambahan pemasangan LPJU RT. 10, RT. 11, RT. 16, RT. 19, RT. 32 dan RT. 36 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	8	Pengecoran jalan lingkungan RT. 11 Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	9	Pengecoran jalan Lr. Kewanga RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	10	Perbaikan pembangunan parit jalan depan SMP N 14 Jl. Kol.M. Kukuh Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	11	Perbaikan pengecoran jalan tembusan ke Kenali Asam Bawah di Jl. Kimojang RT. 02 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	12	Pengecoran jalan 250 meter Jl. Kenari II RT. 08 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	13	Pengecoran jalan 250 meter di Jl. Wijaya Kesuma 4 Lr. Salikin RT. 01 dan RT. 19 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	14	Bantuan pembangunan pagar musholla RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	Bagian Kesra
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	15	Pembangunan parit jalan RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	16	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DISDIK
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	17	Pelatihan keterampilan memasak kue untuk warga RT. 27 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DTKKUKM
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	18	Pengaspalan jalan 300 meter Jl. Koprul Umar RT. 20 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	19	Lampu penerangan jalan di 3 titik Jl. Koprul Umar RT. 20 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	20	Pengaspalan jalan di depan SMP YKPP Jl. Kol. M. Kukuh Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	21	Pembangunan pembuatan parit jalan dekat SD 36 Kota Jambi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	22	Bantuan UMKM 1 kelompok RT. 05 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru	DTKKUKM
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	23	Pengaspalan jalan RT. 27 Vila Kenali	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	24	Instalasi saluran air bersih PDAM untuk 8 rumah di RT. 17 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	25	Instalasi city gas di RT. 11 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DPP
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	26	Penyaluran beasiswa kurang mampu RT. 11 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DISDIK
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	27	Bantuan UMKM RT. 11 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru	DTKKUKM



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	28	Bantuan renovasi masjid Fastabiqul Khoirat RT. 17 Kelurahan Kenali Asam Bawah	Bagian Kesra
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	29	Perbaikan pengecoran jalan Kebun Bohok Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	30	Bantuan UMKM di Perumahan Modicha Garden/ Mutiara Hijau RT. 24 Kelurahan Kenali Asam Bawah	DTKKUKM
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	31	Pembangunan drainase di Perumahan Modicha Garden/ Mutiara Hijau RT. 24 Kelurahan Kenali Asam Bawah (Nova 0812 7400 308)	DPUPR
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	32	Bantuan UMKM di Jl. Darna Karya RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru (Laila 0852 6604 6145)	DTKKUKM
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	33	Penyaluran beasiswa pelajar Jl. Sunan Gunung Jati RT. 49 Kelurahan Kenali Asam Bawah (Indah 0852 8830 0144)	DISDIK
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	34	Bantuan UMKM di RT. 25 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru (Rahmawati 0822 81 07 0344)	DTKKUKM
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	35	Bantuan UMKM di RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru (Desi Aryani 0823 9150 6884)	DTKKUKM
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	36	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 07 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru (Desi Aryani 0823 9150 6884)	DISDIK
	H. Jasrul, S.Ag	PKS	37	Bantuan untuk balita kurang gizi (Desilawati 0852 6619 9793)	DINKES
6	Joni Ismed, SE	GOLKAR	1	Realisasi pengecoran jalan sepanjang 200 meter lebar 3 meter di Jl. Siswa 2 perbatasan RT. 07 dengan RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	2	Realisasi pembangunan parit jalan dengan tutup sepanjang 200 meter lebar 3 meter di Jl. Siswa 2 perbatasan RT. 07 dengan RT. 14 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	3	Pengadaan pemasangan LPJU 2 titik di jalan menuju masjid Al-Ikhlas RT. 07 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	4	Realisasi normalisasi sungai RT. 07 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	5	Pembangunan pelebaran dan pendalaman parit jalan RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	6	Pengadaan penambahan LPJU 1 titik Jl. Legok Lenang RT. 08 RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	7	Penyaluran bantuan sosial serta verifikasi dan validasi data penerima manfaat di RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DINSOS
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	8	Pengaspalan jalan sepanjang 400 meter di Jl. Kopral Sulaiman RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	9	Pengadaan pemasangan LPJU 5 titik Jl. Kopral Sulaiman RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	10	Bantuan UMKM berupa alat-alat memasak kue untuk 6 orang dan pelatihan keterampilan di Jl. Kopral Sulaiman RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DTKKUKM
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	11	Bantuan bedah rumah di RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	12	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu dan pelajar berprestasi 10 orang RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DISDIK
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	13	Pendataan penerima Jaminan kesehatan BPJS dan KIS di RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DINSOS
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	14	Bantuan pengadaan pembangunan musholla RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	Bagian Kesra
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	15	Pembangunan drainase RT. 08 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	16	Pembangunan turap drainase sepanjang 50 meter lokasi perbatasan RT. 22 dan RT. 25 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	17	Drainase tertutup tanah di samping perumahan kenali raya indah 2 sepanjang 100 RT. 42 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	18	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 23 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	19	Pengaspalan jalan di RT. 23 sepanjang 180 meter Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	20	Pengecoran Jalan lingkungan di masjid al-ikhlas di RT. 39 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	21	Penyaluran bantuan sosial untuk lansia-lansia yang ada di Kecamatan Kota baru Khususnya di kelurahan Kenali Asam Bawah dan Kelurahan Kenali Asam Atas.	DINSOS
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	22	Lampu penerangan jalan lokasi RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	23	Pengaspalan jalan lokasi RT. 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	24	Pengerasan dan pengecoran jalan ke SD 225 kearah kuburan sepanjang 300 Meter Talang Gulo RT. 26 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru.	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	25	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter di jalan pertadabes RT. 25 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	26	Pelebaran pengecoran jalan sepanjang 500 meter di jalan pertadabes RT. 22 dan RT. 25 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	27	Pemasangan lampu penerangan jalan dengan tiang sebanyak 2 buah di jalan pertadabes RT. 25 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	28	Perbaikan pengecoran jalan tanah sepanjang 400 meter di lorong madrasah RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	29	Lampu penerangan jalan umum dengan tiang sebanyak 8 buah di lorong madrasah RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	30	Pembangunan drainase sepanjang 100 meter di RT. 18 dan RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	31	Pembangunan turap jalan sepanjang 80 meter di RT. 18 dan RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	32	Bantuan pengadaan 1 unit tenda pengajian di RT. 19 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	KECAMATAN
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	33	pengecoran jalan 150 x 4 meter di jalan sirsak RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	34	Pembangunan parit jalan 150 meter di jalan langgar RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	35	Pembangunan drainase 100 meter RT. 18 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	36	Pelatihan keterampilan untuk 20 orang di RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DTKKUKM
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	37	Penambahan pangkalan gas di RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	38	Perbaikan pengecoran jalan sepanjang 500 meter di jalan kopral Umar RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	39	Pemasangan lampu penerangan jalan 10 buah di jalan kopral Umar RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	40	Bantuan UMKM 3 Kelompok di jalan kopral Umar RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DTKKUKM
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	41	Bantuan perlengkapan mushola di RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	Bagian Kesra
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	42	Pengecoran jalan sepanjang 50 meter di lorong langgar Nurjannah dan 500 meter di lorong madrasah RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	43	Pembangunan parit jalan sepanjang 43 meter di depan Perum Jambi Garden Regency RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPUPR
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	44	Tiang dan lampu jalan sebanyak 8 buah di lorong madrasah RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	DPRKP
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	45	Bantuan pengadaan Kompangan sebanyak 9 unit dan seragam kompangan sebanyak 15 pcs di RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	Bagian Kesra
	Joni Ismed, SE	GOLKAR	46	Bantuan pengadaan seragam rumah tahfis Ar-Ridho di RT. 21 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru	Bagian Kesra
<b>II</b>	<b>Alam Barajo</b>			<b>Jumlah Aspirasi = 229</b>	
1	H. Muslim	GERINDRA	1	Perbaikan pengecoran jalan RT. 51 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Muslim	GERINDRA	2	Pengadaan pemasangan LPJU 3 buah menuju masjid RT. 51 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Muslim	GERINDRA	3	Realisasi perbaikan pengecoran jalan Lr. Mawar putih RT. 12 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	4	Realisasi perbaikan pengecoran RT. 45 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	5	Peningkatan mutu pelayanan proses pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan secara online dapat lebih cepat prosesnya.	KECAMATAN
	H. Muslim	GERINDRA	6	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan Lr. Kemajuan 2 buah dan Lr. Nangka 1 buah Jl. Puri Masurai IV RT. 07 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Muslim	GERINDRA	7	Realisasi perbaikan pengecoran jalan 200 meter Lr. Nangka RT. 07 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	8	Pemindahan lokasi 1 batang tiang listrik dari Jl. Swadaya ke Lr. Kemajuan RT. 07 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Muslim	GERINDRA	9	Pengadaan penambahan lampu penerangan jalan Perumahan Namura Indah III RT. 55 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Muslim	GERINDRA	10	Perbaikan drainase untuk penanggulangan RT. 07 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	11	Pembangunan pembuatan parit sepanjang jalan menuju masjid RT. 07 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	12	Pendataan ulang penerima bantuan sosial RT. 07 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DINSOS
	H. Muslim	GERINDRA	13	Lampu jalan 8 titik di Jl. Jami'at khairi, Jl. Kebangkitan Bangsa (samping Madrasah), Jl. Pelopor (pangkal jalan), Jl. Griliya (ujung jalan), Jl. Perjuangan (ujung jalan), Jl. Bhineka Tunggal Ika (ujung jalan), Jl. Super Semar (ujung jalan), Jl. Pegangsaan (ujung jalan) RT. 45 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	H. Muslim	GERINDRA	14	Pengaspalan jalan panjang 600 meter lebar 4 meter di Jl. NKRI sampai Jl. Jami'at Khair dan panjang 300 meter lebar 3 meter di Jl. Kemerdekaan RT. 45 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Muslim	GERINDRA	15	Pengecoran jalan panjang 300 meter lebar 4.5 meter RT. 53 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	16	Pengecoran jalan 100 meter RT. 39 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	17	Pengecoran jalan 100 meter RT. 72 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Muslim	GERINDRA	18	Pengecoran jalan 100 meter RT. 30 Blok B Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
2	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	1	Pengaspalan jalan lingkungan di Jl. Asparagus RT. 04 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	2	Pengaspalan jalan lingkungan di Jl. Asparagus IV RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	3	Pengaspalan jalan sepanjang 75 meter Lr. Air Mancur dan 75 meter Lr. Anugrah RT. 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	4	Pengaspalan jalan lebar 4 meter x panjang 250 meter RT. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	5	Pengadaan pembuatan sumur bor 1 unit RT. 16 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	6	Pengecoran jalan sepanjang 300 meter di Perumahan Pesona Jambi Blok x dan Blok H RT. 23 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	7	Pengecoran jalan 50 meter RT. 35 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	8	Penambahan pemasangan LPJU 5 titik di RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	9	Penambahan pemasangan LPJU 3 titik di Jl. Pekan Baru Lr. Prawira RT. 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	10	Penambahan pemasangan LPJU 10 titik di Lr. Pom Bensin RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	11	Penambahan pemasangan LPJU 4 titik di RT. 11 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	12	Penambahan pemasangan LPJU 7 titik di RT. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	13	Penambahan pemasangan LPJU 5 titik di Perumahan Pesona Jambi RT. 23 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	14	Penambahan pemasangan LPJU 5 titik di RT. 35 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	15	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 50 orang Jl. Asparagus RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	16	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 20 orang RT. 11 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	17	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 50 orang RT. 21 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	18	Pelaksanaan pengadaan penyuluhan tentang UMKM dan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	19	Pelatihan keterampilan di Jl. Nusa Indah I RT. 06 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	20	Pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu di Lr. Swadaya RT. 21 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	21	Bantuan permodalan usaha ibu-ibu rumah tangga RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	22	Perbaikan pengecoran jalan sepanjang 350 meter RT. 61 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	23	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 buah Perumahan Kota Baru Indah RT. 19 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	24	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 20 buah RT. 61 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	25	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu yang tepat sasaran di Perumahan Kota Baru Indah RT. 30 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK

<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	26	Bantuan pengadaan fasilitas posyandu berupa meja 3, kasur 1, kursi 10, timbangan bayi dan balita 2 di Perumahan Kota Baru Indah RT. 19 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DINKES
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	27	Normalisasi pendalaman aliran air sungai untuk penanggulangan banjir dari ujung lapangan RT. 30 dan RT. 19 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	28	Perbaikan pengecoran jalan sepanjang 100 meter Blok O dan 100 meter Blok K Perumahan Panorama Sakura Asri RT. 64 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	29	Pengadaan posyandu di Perumahan Panorama Sakura Asri RT. 64 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DINKES
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	30	Instalasi jaringan pipa air bersih PDAM Perumahan Panorama Sakura Asri RT. 64 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	31	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 buah Perumahan Panorama Sakura Asri RT. 64 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	32	Bantuan pengadaan kursi plastic 100 buah dan tenda 2 unit Perumahan Griya Kenali Jaya RT. 59 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	KECAMATAN
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	33	Lampu penerangan jalan di 3 titik Perumahan Griya Kenali Jaya RT. 59 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	34	Bantuan untuk mushollah berupa karpet di Perumahan Griya Kenali Jaya RT. 59 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	Bagian Kesra
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	35	Pengecoran jalan panjang 300 meter lebar 3 meter di Gang Melati RT. 03 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	36	Lampu penerangan jalan 6 titik di Jl. Harapan Tani 1 dan 4 titik di Gang Melati RT. 03 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	37	Pengecoran jalan lingkungan 100 meter di Jl. Sidomulyo dan 100 meter di Lr. Harapan 1 RT. 25 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	38	Pengaspalan jalan 150 meter di Jl. Merak RT. 60 perbatasan dengan RT. 07 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	39	Lampu penerangan jalan di 4 titik Blok P15, P10, P5, P8 RT. 27 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPRKP



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	40	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 2 orang di RT. 27 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	41	Pengaspalan jalan lebar 3 meter panjang 240 meter Jl. Multatuli Lr. Sejahtera, Lr. Sejahtera I, Lr. Sejahtera II, Lr. Sejahtera IV RT. 02 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	42	Lampu jalan dengan tiang di 3 titik Jl. Multatuli Lr. Sejahtera, Lr. Sejahtera I, Lr. Sejahtera II, Lr. Sejahtera IV RT. 02 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	43	Pengecoran jalan 100 meter di Lr. Medan RT. 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	44	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 3 orang RT. 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	45	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 4 orang RT. 22 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
	Maria Magdalena, SS	PDI - PERJUANGAN	46	Pengaspalan jalan panjang 450 meter lebar 3.5 meter RT. 22 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
3	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Perbaikan pembangunan drainase dan gorong-gorong di Perumahan Graha Indah RT. 06 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Pelatihan keterampilan memasak kue untuk 10 orang Jl. Sari Bhakti RT. 09 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Pengaspalan ulang Jl. TP. Sriwijaya depan alfamart antara RT. 1, RT. 05, RT. 06 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Pembangunan parit jalan dan gorong-gorong Jl. TP. Sriwijaya RT. 01, RT. 05, RT. 06 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Pengadaan pemasangan LPJU tanpa tiang 2 buah Perum. Atalanta Blok A. 14 RT. 29 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 2 orang warga atas nama Nafisha dan Saskia Perum. Atalanta Blok A. 14 RT. 29 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pengadaan pemasangan LPJU tanpa tiang 3 buah Jl. TP. Sriwijaya Lr. Melati RT. 07 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 2 orang warga atas nama Wildhan Febrian dan M. Rizky Jl. TP. Sriwijaya Lr. Melati RT. 07 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Bantuan pengadaan sarana prasarana posyandu Nusa Indah II seperti timbangan, terpal dan lainnya RT. 06, RT. 07 dan RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DINKES
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Pengaspalan jalan 20 meter Jl. Asparagus 4 RT. 04 dan RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pengadaan pemasangan LPJU tanpa tiang 4 buah di SMPN 16 dan Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Pengaspalan jalan sepanjang 250 meter di belakang langgar An-Nur, 150 meter di depan Lr. Ros Komplek Guru RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	13	Pengadaan pemasangan LPJU 4 buah RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	14	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 10 orang RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	15	Pengaspalan jalan di Perumahan Mahebat RT. 06 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	16	Pengaspalan jalan di Jl. Mukhtar Lr. Chamia RT. 70 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	17	Pengaspalan Jalan di Jl. Serma Shal Ahmad RT. 07 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	18	Pengadaan tiang dan lampu jalan RT. 06 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	19	Pengecoran jalan lingkungan panjang 150 meter lebar 3 meter RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	20	Pembangunan parit jalan panjang 70 meter lebar 3 meter RT. 08 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	21	Pembangunan drainase panjang 100 meter lebar 2 meter RT. 02 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Hj. Hendriani, S.Pd	DEMOKRAT KEBANGSAAN	22	Pengecoran jalan lingkungan panjang 200 meter RT. 35 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
4	H. Jefrizen, SE	NASDEM	1	Pengecoran jalan sepanjang 1000 meter dari arah gereja sampai Lr. Walet Jl. Sei Bleren, 500 meter Jl. Kurniatama Lr. Tahu RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	2	Pengaspalan jalan 500 meter Lr. Belakang Walet RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	3	Pengadaan pemasangan LPJU 5 titik Lr. Belakang Walet dan 3 titik Jl. Sukajati Lr. Kurma RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	4	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 10 titik Jl. Walet Lr. Musholla RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	5	Bantuan bibit ikan lele 5000 ekor Jl. Bleren RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	6	Bantuan sarana prasarana penyandang cacat timbangan balita 2, timbangan dewasa 2 dan pengukur tinggi badan 1 RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DINKES
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	7	Pengadaan sarana prasarana olahraga voli bola 2 buah dan 1 nettl Jl. Walet RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISPORA
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	8	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu SDN 223 10 orang RT. 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	9	Pengecoran jalan 400 meter Jl. Raden Sayuti arah Masjid Rahmatul Mursidi dan 500 meter Jl. Pajero RT. 23 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	10	Pengadaan pemasangan LPJU 10 titik Jl. Raden Sayuti sampai Jl Pajero RT. 23 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	11	Pengelolaan dan pengangkutan sampah yang berserakan dekat hutan kota mengarah ke Perum Bumi Mayang RT. 23 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DLH
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	12	Pengadaan tempat sampah 1 unit RT. 18 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DLH

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	13	Perbaikan pengecoran Jl. Melati II RT. 18 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	14	Perbaikan pembangunan parit jalan RT. 18 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	15	Pengadaan pemasangan LPJU 3 titik RT. 18 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	16	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 50 orang RT. 18 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	17	Bantuan untuk UMKM pembuatan keripik ubi 5 orang RT. 18 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	18	Pengadaan pemasangan lampu jalan yang rusak dan pemasangan KWH lampu jalan Perumahan NGA RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	19	Pengadaan pemasangan 3 titik tiang dan lampu jalan RT. 23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	20	Perbaikan pengecoran jalan lebar 1.5 meter panjang 50 meter RT. 48 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	21	Realisasi pembangunan drainase untuk normalisasi sungai di RT. 22 dan RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	22	Penambahan anggaran untuk program Bangkit Berdaya di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	KECAMATAN
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	23	Pembangunan pengecoran jalan di RT. 28 arah ke SPN Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	24	Pengadaan tiang listrik 3 batang untuk solusi kabel tidak teratur di Lr. Surau Gunung Merah RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	25	Pembangunan drainase 200 meter di Lr. Surau Gunung Merah RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	26	Realisasi pengecoran jalan 200 meter dari lorong masjid RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	27	Pengecoran jalan lingkungan Perumahan Glory RT. 35 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Jefrizen, SE	NASDEM	28	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan RT. 35 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
5	Ir. Anti Yosefa	PKS	1	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga lapangan volley dan badminton yang perlu pengecoran di RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISPORA
	Ir. Anti Yosefa	PKS	2	Insentif untuk guru ngaji RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	Bagian Kesra
	Ir. Anti Yosefa	PKS	3	Fasilitasi pemerintah agar menjadi kampung wisata industry makanan di RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISPARBUD
	Ir. Anti Yosefa	PKS	4	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DINSOS
	Ir. Anti Yosefa	PKS	5	Bantuan pengadaan sound sytem untuk kelompok rebana ibu-ibu RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	KECAMATAN
	Ir. Anti Yosefa	PKS	6	Fasilitasi pengadaan koperasi wanita dengan kerja sama Bank Jambi sebagai wadah pengembangan usaha RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Ir. Anti Yosefa	PKS	7	Pengecoran jalan masuk perumahan Puri Masurai V RT. 33 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	8	Pembangunan turap sepanjang 200 meter di sungai RT. 11 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	9	Pengecoran perbaikan jalan 150 meter Lr. Mawar Putih RT. 12 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	10	Pembinaan UMKM agar dapat bertahan dan maju di RT. 09 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	Ir. Anti Yosefa	PKS	11	Pembangunan drainase di pagar drum Perumahan Permata Citra RT. 05 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	12	Pengecoran jalan lingkungan RT. 41 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	13	Pengadaan pemasangan lampu jalan RT. 41 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Ir. Anti Yosefa	PKS	14	Pengecoran jalan RT. 08 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	15	Instalasi jaringan listrik PLN RT. 40 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Ir. Anti Yosefa	PKS	16	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana posyandu pemasangan plafon dan pembuatan kamar pemeriksaan di Perumahan Pinang Merah RT. 16 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DINKES
	Ir. Anti Yosefa	PKS	17	Bantuan fasilitasi sertifikasi guru Paud Rahimah Perumahan Pinang Merah RT. 16 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	Bagian Kesra
	Ir. Anti Yosefa	PKS	18	Pembangunan turap di RT. 20 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	19	Pembangunan turap di RT. 10 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	20	Pembangunan turap di RT. 22 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Ir. Anti Yosefa	PKS	21	Bantuan UMKM RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DTKKUKM
	Ir. Anti Yosefa	PKS	22	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 24 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
6	H. Novrial, SH	PAN	1	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan tiang sebanyak 10 buah dan tiang Lr. Sei Bengkal RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	2	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 3 titik di RT.071 Jl. Sei Bengkal Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	3	Pembuatan saluran drainase sepanjang 50 meter di Jl. Sei Bengkal RT.071 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	4	Pengaspalan jalan gang 3 tempat sepanjang 150 meter Lr. Sei Bengkal RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	5	Perbaikan parit jalan sepanjang 150 meter Lr. Sei Bengkal RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Novrial, SH	PAN	6	Pengecoran jalan masuk Perumahan Mitra Residen sepanjang 100 meter dan menuju Perumahan Mitra Residen 2 sepanjang 150 meter Lr. Sei Bengkal RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	7	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 3 titik di Perumahan Mitra Residen 2 RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	8	Pelatihan keterampilan memasak kue sebanyak 40 orang Lr.Sei. Bengkal RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	H. Novrial, SH	PAN	9	Beasiswa untuk pelajar tidak mampu sebanyak 30 orang Lr. Sei Bengkal RT.71 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	H. Novrial, SH	PAN	10	LPJU 1 titik di RT.07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	11	Pengaspalan jalan panjang ± 300 meter lebar 4 meter di Jl. Hijarah RT.07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	12	Pembuatan lorong ke Masjid Asahqirin Panjang 30 meter lebar 2,5 meter di RT.07 dan RT.071 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	13	Pengaspalan/pengecoran jalan menuju Masjid Al-Hariri sepanjang 150 meter Jl.Kenali Jaya RT.02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	14	Pemberdayaan UMKM di Perumahan Bougenville RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	H. Novrial, SH	PAN	15	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 2 titik di Blok CQ dan Blok CP RT.23 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	16	Pemberdayaan UMKM usaha kue basah dan kering RT.58 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DTKKUKM
	H. Novrial, SH	PAN	17	Pengecoran jalan sepanjang 350 meter Jl. Syailendra RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	18	Pembangunan drainase sepanjang 200 meter Jl. Syailendra RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	19	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum 9 titik Jl. Syailendra RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Novrial, SH	PAN	20	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga tiang lapangan 10 batang, tiang net 2 batang, semen 10 sak, pasir 10 mobil dan seragam senam 50 lembar RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DISPORA
	H. Novrial, SH	PAN	21	Bantuan pengadaan alat pengeras suara untuk anggota majelis taklim RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	KECAMATAN
	H. Novrial, SH	PAN	22	Pengaspalan ulang sepanjang 250 meter Jl. Syailendra Lr. Masjid Nurul Yaqin RT. 26 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	23	Pengecoran jalan lingkungan 50 meter perbatasan RT. 16 dan RT. 17 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	24	Instalasi city gas RT. 15, RT. 16, RT. 17, RT. 18 dan RT. 32 Perumahan Pinang Merah Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPP
	H. Novrial, SH	PAN	25	Pengadaan tiang listrik 2 batang Lr. Seroja RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	26	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 titik di Lr. Dahlia, 2 titik Lr. Seroja, 2 titik di Lr. Kenanga dan 1 titik di Lr. Anggrek RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	27	Perbaikan pengecoran jalan 200 meter Lr. Dahlia RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	28	Perbaikan gorong-gorong 6 meter RT. 31 dan RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	29	Bantuan renovasi gapura masjid RT. 17 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	Bagian Kesra
	H. Novrial, SH	PAN	30	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 2 titik Lr. Bersama RT. 16 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	H. Novrial, SH	PAN	31	Perbaikan parit jalan 170 meter Lr. Bersama RT. 16 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	32	Pengaspalan jalan 150 meter Lr. Bersama RT. 16 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	33	Cor/ konblok pendopo 160 meter RT. 17 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	KECAMATAN



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Novrial, SH	PAN	34	Perbaikan pembangunan drainase di perbatasan RT. 31 dan RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	H. Novrial, SH	PAN	35	Bantuan sarana dan prasarana olah raga lapangan voly RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DISPORA
	H. Novrial, SH	PAN	36	Bantuan sarana dan prasarana untuk Kelompok Wanita Tani RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPKP
	H. Novrial, SH	PAN	37	Bantuan pengadaan tenda dan kursi RT. 32 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	KECAMATAN
	H. Novrial, SH	PAN	38	Bantuan pembangunan plafon dan ruang pemeriksaan posyandu 6x9 meter RT. 17 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DINKES
7	Suherman, SE	PBRB	1	Pengaspalan jalan 250 meter Lr. H. Ahmad RT. 43 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	2	Pengecoran jalan 100 meter dekat SMP 22 Jl. H. M. Thaib Pahrudin RT. 08 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	3	Pengaspalan jalan lanjutan 200 meter Jl. Lingkar Barat III Lr. H. Slamet K RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	4	Pengecoran jalan 50 meter Jl. Lingkar Barat III Lr. Masjid RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	5	Pembangunan jalan regit beton sepanjang 300 meter di jln.sersan anwar bay RT.34 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	6	Lampu jalan sebanyak 5 titik di jln.sersan anwar bay RT.34 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	7	Pengaspalan Jalan sepanjang 360 meter di jln.sersan anwar bay RT.39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	8	Pengecoran jalan samping masjid sepanjang 145 meter RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	9	Drainase 200 meter RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suherman, SE	PBRB	10	Box culvert ukuran 1.5 x 5 meter RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	11	Lampu penerangan jalan sebanyak 8 titik di RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	12	Cor beton jalan gang sepanjang 100 meter di RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	13	Beasiswa untuk pelajar yang tidak mampu sebanyak 20 orang di RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Suherman, SE	PBRB	14	Pengaspalan jalan lebar 3 meter panjang 250 meter Lorong H. Slamet RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	15	Lampu penerangan jalan sebanyak 2 buah lokasi antara RT. 44 dan RT. 57 RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	16	Pembangunan Drainase Lanjutan sepanjang 500 meter lokasi antara RT. 44 dan RT. 57 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	17	Cor beton jalan lebar 3 meter panjang 100 meter lokasi sebelah pagar SMPN 22 lorong soni RT. 08 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	18	Pengecoran jalan sepanjang 150 meter lokasi perumahan telaga beliung RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	19	Lampu penerangan jalan 8 buah RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	20	Beasiswa untuk pelajar tidak mampu RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Suherman, SE	PBRB	21	Pembangunan Drainase sepanjang 120 meter di RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	22	Pengecoran jalan Rigit Beton sepanjang 300 meter Lokasi Jln.Zeni RT. 09 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	23	Lampu penerangan jalan tanpa tiang sebanyak 5 buah lokasi jln.Zeni RT. 09 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	24	Pengaspalan Jalan Sepanjang 300 meter Lorong Mangga I dan III RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suherman, SE	PBRB	25	Lampu Penerangan Jalan sebanyak 5 buah Lorong Mangga I dan III RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	26	Beasiswa untuk pelajar di RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.	DISDIK
	Suherman, SE	PBRB	27	Pengaspalan jalan sepanjang 350 meter di jalan tanjung raya RT. 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	28	Lampu penerangan jalan sebanyak 6 buah di jalan tanjung raya RT. 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	29	Bantuan UMKM 1 kelompok di jalan tanjung raya RT. 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DTKKUKM
	Suherman, SE	PBRB	30	Penyaluran Beasiswa di jalan tanjung raya RT. 01 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
	Suherman, SE	PBRB	31	Pengaspalan jalan sepanjang 360 meter di jalan sersan anwar bay lorong suka jaya RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	32	Pembangunan drainase sepanjang 250 meter di lingkungan RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	33	Pembangunan Box culvert ukuran 1,5 m x 2x5 meter sebanyak 1 buah di lorong sukajaya RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	34	Pengecoran jalan sepanjang 100 meter di RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	35	Pemasangan lampu jalan sebanyak 8 buah di lingkungan RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	36	Tiang listrik sebanyak 3 tiang di lingkungan RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	37	Penyaluran beasiswa untuk pelajar tidak mampu sebanyak 18 orang di lingkungan RT. 39 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
	Suherman, SE	PBRB	38	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter di lorong masjid RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	39	Pengecoran jalan sepanjang 300 meter di jalan pelangi RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suherman, SE	PBRB	40	Pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 3 buah di jalan pelangi RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	41	Pembangunan drainase Parit sepanjang 200 meter di jalan pelangi RT. 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	42	Pengecoran jalan sepanjang 100 meter di lorong Mangga 1 RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	43	Pemasangan Lampu jalan sebanyak 5 buah di RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	44	Bantuan UMKM untuk 3 orang RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DTKKUKM
	Suherman, SE	PBRB	45	Bantuan pengadaan Sarana olahraga Badminton 1 set RT. 17 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo	DISPORA
	Suherman, SE	PBRB	46	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter di RT. 42 lorong masjid nurul iman Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	47	Pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 1 buah di RT. 42 lorong masjid Nurul Iman Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	48	Pengecoran jalan sepanjang 200 meter di jalan sersan anwar bay RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	49	Drainase sepanjang 150 meter di jalan sersan anwar bay RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	50	Pembangunan Box Culvert sebanyak 2 buah di jalan sersan anwar bay RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	51	Lampu jalan sebanyak 6 buah di jalan sersan anwar bay RT. 27 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP
	Suherman, SE	PBRB	52	Jalan regit beton sepanjang 400 meter di jalan sersan anwar bay RT. 34 Perum Nusa Indah Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	53	Drainase sepanjang 400 meter di jalan sersan anwar bay RT. 34 Perum Nusa Indah Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
	Suherman, SE	PBRB	54	Lampu jalan 4 buah di jalan sersan anwar bay RT. 34 Perum Nusa Indah Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Suherman, SE	PBRB	55	Gorong-gorong 1 titik di jalan sersan anwar bay RT. 34 Perum Nusa Indah Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPUPR
<b>III</b>	<b>Telanaipura - Danau Sipin - Danau Teluk</b>		<b>Jumlah Aspirasi = 232</b>		
1	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	1	Perbaikan pembangunan jembatan RT. 06 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	2	Pembangunan pengecoran jalan baru dari kelurahan Tanjung Raden ke Jl. Puting di Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	3	Bantuan modal dengan kemudahan terhadap syarat yang telah ditetapkan untuk UMKM Batik Jambi di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk.	DTKKUKM
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	4	Peningkatan mutu dan anggaran program kegiatan pelatihan penguasaan masalah adat yang menyangkut masalah di lingkup Lembaga Hukum Adat Melayu untuk tindak pidana ringan mulai dari tingkat RT, Lurah, Camat sampai Kota Khususnya di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk.	KECAMATAN
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	5	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum 3 buah RT. 05 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk.	DPRKP
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	6	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan umum 1 titik RT. 05 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk.	DPRKP
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	7	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 titik Kelurahan Tanjung Pasir dan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk.	DPRKP
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	8	Realisasi perbaikan pengaspalan dan pengecoran jalan di Kelurahan Tanjung Raden dan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	9	Lanjutan pengecoran jalan lingkungan RT. 08 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	Umar Paruk, A.Md	GERINDRA	10	Pembangunan masjid yang ada di Kelurahan Olak Kemang dan Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk	Bagian Kesra

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
2	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	1	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial RT. 26 dan RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DINSOS
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	2	Pemuktahiran data Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pengaktifan kembali KIS dan BPJS yang terblokir karena lama tidak digunakan RT. 26 dan RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DINKES DAN DINSOS
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	3	Pengadaan 1 unit kontainer sampah sebagai pengganti kontainer yang rusak di RT. 26 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DLH
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	4	Instalasi city gas di RT. 26 dan RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	5	Solusi anjing liar yang mengganggu aktifitas warga di RT. 32 sampai RT. 36 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DAMKAR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	6	Pengadaan tiang listrik 3 unit di RT. 23 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin untuk solusi kabel kendur yang dapat menyebabkan arus pendek.	DPRKP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	7	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 3 unit RT. 12 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	8	Pelatihan UKM Kacang tojin untuk 5 orang RT. 12 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DTKKUKM
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	9	Pengadaan pemasangan lampu jalan 5 unit, belakang pos kamling, Perumahan Gotong Royong, Lr. Sikam, Kost Kurnia RT. 27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	10	Pembangunan pembuatan drainase 100 meter belakang SD 51 dan 150 meter di Cemara III RT. 27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	11	Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 200 meter Lr. Sikam Cemara III, sepanjang 75 meter sebelah gang 45 RT. 27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	12	City Gas di RT. 25, RT. 26 dan RT. 27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	13	Pengadaan pemasangan cermin cembung 1 unit di RT. 27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DISHUB
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	14	Bantuan pembangunan Masjid di RT. 01 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	Bagian Kesra
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	15	Lampu penerangan jalan 2 titik Lr. Banyu Wangi RT. 01 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	16	Bantuan UMKM 2 kelompok RT. 01 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DTKKUKM
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	17	Beasiswa pelajar berprestasi 2 orang RT. 01 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo	DISDIK
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	18	Pengecoran jalan ke pemakaman panjang 300 meter lebar 3 meter RT. 01 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	19	Lampu jalan 2 titik RT. 01 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura	DPRKP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	20	Pembangunan pagar tanah pemakaman 200 meter RT. 01 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura	Bagian Kesra
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	21	Pembangunan turap untuk penanggulangan longsor di pinggiran sungai Batang Hari RT. 01 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	22	Pengecoran jalan 400 meter RT. 03 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	23	Lampu jalan RT. 03 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura	DPRKP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	24	Pengecoran jalan lingkungan 600 meter RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	25	Pengadaan armada pengangkutan sampah RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DLH
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	26	Bantuan peralatan jenazah keranda dan tempat mandi jenazah RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	Bagian Kesra
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	27	Pengecoran jalan setapak 20 meter RT. 31 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	28	Bantuan UMKM kipang kacang, kacang tojin 3 kelompok RT. 12 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin	DTKKUKM
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	29	Pembangunan parit jalan 100 meter RT. 16 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	30	Pembangunan turap untuk pencegahan longsor jalan cor RT. 16 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	31	Lampu jalan 3 titik RT. 10 Kelurahan Sijinjang Kecamatan Jambi Timur	DPRKP
	Ir. M.A. Fauzi	PDI - PERJUANGAN	32	Pengecoran jalan setapak 150 meter RT. 21 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
3	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu serta solusi anak yang putus sekolah di RT. 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DISDIK
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Sosialisasi ataupun undangan untuk komunitas UMKM saat pelaksanaan bazar khususnya UMKM di RT. 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DTKKUKM
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Realisasi perbaikan pengecoran jalan 300 meter RT. 02 Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Normalisasi pelebaran dan pendalaman saluran irigasi menuju sungai Lubuk Panjang Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Pembangunan pengecoran jalan usaha tani RT. 10 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Pembangunan pengecoran jalan usaha tani RT. 06 dan RT. 07 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pembinaan serta bantuan pengadaan alat-alat pertanian traktor, rotary dan mesin air untuk gabungan kelompok tani Kecamatan Danau Teluk.	DPKP
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Pembangunan pembuatan turap sepanjang 600 meter di RT. 01, RT. 02 dan RT. 12 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk.	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Jalan lingkungan dan pertanian di RT.10 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Bantuan alat tanam dan perontok padi di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk	DPKP
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pengecoran jalan penurunan menuju sawah di RT. 06 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Pengecoran jalan lingkungan di RT. 29 Kelurahan Penyengat Rendah Komplek Aur Duri Blok C Kecamatan Telanaipura	DPUPR



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	13	Pengecoran jalan lingkungan di RT. 06 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	14	Pengecoran jalan lingkungan di RT. 12 Kelurahan buluran keali Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	15	Pengecoran jalan lingkungan di RT. 09 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	16	Rehab pengecoran jalan lingkungan di RT. 03 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	17	Seperangkat alat kompiangan di RT. 04 dan RT. 05 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk	Bagian Kesra
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	18	Bantuan pembangunan Masjid Al-Muhajirin RT. 10 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk	Bagian Kesra
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	19	Pengecoran jalan produksi persawahan taligawe kanan di RT. 10 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	H. Muhammad Nasir, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	20	Drainase sepanjang di RT. 09 Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
4	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Pengaspalan lanjutan jalan Komplek Telanai Indah Estate RT. 07 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Pengadaan pemasangan tiang listrik Komplek Telanai Indah Estate RT. 07 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Pengecoran jalan 200 meter ke arah Masjid RT. 24 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Pengaspalan jalan 200 meter RT. 35 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Pengaspalan penambahan ketinggian jalan 300 meter depan Kantor Lurah Legok Pulau Pandan Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Pengadaan Penambahan lampu penerangan jalan 2 titik RT. 35 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pengaspalan jalan Komplek Telanai Indah Estate RT. 07 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Perbaikan pembangunan drainase RT. 07 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Pengadaan penambahan lampu penerangan jalan Komplek Telanai Indah Estate RT. 08 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Penambahan lampu jalan di 4 titik Komplek Telanai Indah Estate Blok D dan Blok E Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura	DPRKP
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pengaspalan jalan 150 meter RT. 08 dan RT. 07 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Perbaikan drainase 200 meter RT. 07 dan RT. 08 Komplek Telanai Indah Estate Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	13	Pengaspalan jalan 100 meter RT. 09 Komplek Telanai Indah Estate Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	14	Pengadaan tempat pembuangan sampah 2 unit RT. 07 dan RT. 08 Komplek Telanai Indah Estate Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura	DLH
	Muhammad Fahri	DEMOKRAT KEBANGSAAN	15	Pelatihan UMKM untuk ibu-ibu RT. 07, RT. 08 dan RT. 09 Komplek Telanai Indah Estate Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura	DTKKUKM
5	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	1	Pengadaan LPJU 1 titik Lr. Sepakat RT. 17 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	2	Pengaspalan jalan 20 meter di Jl. Depati Purbo Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	3	Bantuan pembangunan masjid Al-Muhajirin Jl. Depati Purbo Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	Bagaian Kesra
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	4	Pengadaan pemasangan LPJU 3 titik Jl. Mayjen Sutoyo RT. 08 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	5	Bantuan pengadaan peralatan pengurusan jenazah ringgo-ringgo 1 unit, drum 1 unit, centong 5 unit, baskom besar 5 unit dan tempat memandikan 1 unit Jl. Mayjen Sutoyo RT. 08 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura.	Bagaian Kesra

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	6	Pengadaan pemasangan LPJU 1 titik Jl. Depati Ukur RT. 11 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	7	Pembangunan pembuatan drainase 300 meter Jl. TK Amir Hamzah dan Kertapati RT. 11 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	8	Pembangunan parit jalan lanjutan sepanjang 100 meter Jl. Depati Ukur RT. 10 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	9	Pembangunan parit jalan lanjutan 50 meter Jl. Kertapati Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	10	Pengadaan pemasangan LPJU 2 titik RT. 14 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	11	Pengecoran jalan sepanjang 50 meter RT. 04 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	12	Bantuan perbaikan atap masjid Nurul Ikhsan RT. 04 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	Bagaian Kesra
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	13	Pengadaan tempat sampah di RT. 11 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DLH
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	14	Pembangunan dam untuk solusi penanggulangan genangan air di pemakaman umum pematang sulur di RT. 21 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	15	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter samping CV. Imam tembus Jl. Saman Idrid RT. 24 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	16	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah untuk masjid RT. 24 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	17	Pembangunan turap tinggi 4 meter panjang 18 meter di perbatasan RT. 07 dengan RT. 09 menuju tempat wisata Danau Sipin Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	18	Pengecoran jalan lebar 3 meter panjang 50 meter di Perumahan Aura Bimantara Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	19	Pembuatan pengecoran jalan baru sepanjang 50 meter RT. 05 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	20	Program Kotaku di Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	21	Program sosial dan program pembangkitan ekonomi kerakyatan di Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DINSOS
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	22	Realisasi pengaspalan jalan dari tahun 2015 sepanjang 50 meter samping Puskesmas Sungai Puteri, 300 meter Jl. Letkol Idris dan 100 meter RT. 01 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	23	Pembangunan perluasan drainase sepanjang 200 meter RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	24	Pengadaan penggantian tiang listrik 1 batang RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	25	Pembangunan pembuatan jembatan penghubung RT. 15 – 16 ke RT. 17 – 26 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	26	Pembangunan pembuatan gapura RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DISHUB
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	27	Pengadaan tempat pembuangan sampah sementara RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DLH
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	28	Pembangunan parit sepanjang 100 meter RT. 02 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	29	Pengecoran jalan setapak sepanjang 200 meter lebar 1.5 meter RT. 02 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	30	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 titik RT. 02 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	31	Pengaspalan jalan 200 meter samping CV. Imam RT. 02 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	32	Bantuan pengadaan kursi untuk RT. 01, RT. 02, RT. 03 dan RT. 05 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	33	Bantuan pembangunan masjid Al-Furqon 3x4 meter berupa 30 batang besi, 20 sak semen RT. 23 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	Bagian Kesra
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	34	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah untuk masjid Al-Furqon RT. 23 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	35	Pengaspalan jalan lebar 4 meter panjang 20 meter RT. 04 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	36	Bantuan pengadaan tenda 2 unit dan kursi 30 buah RT. 04 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	37	Pengaspalan jalan lebar 4 meter panjang 500 meter RT. 11 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	38	Pembangunan drainase lebar 45 cm tinggi 35 cm panjang 70 meter RT. 11 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	39	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah RT. 11 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	40	Pengadaan pemasangan kaca cembung jalan di ujung pagar rumah dinas walikota Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DISHUB
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	41	Pengaspalan jalan 700 meter di Jl. Kamboja I Lr. Waskita dari Samping BTN sampai Lr. Balatkop Gedung Putih RT. 20 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	42	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 titik RT. 20 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	43	Pembangunan parit jalan 300 meter RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	44	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 30 orang RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DISDIK
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	45	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 buah RT. 16 Kelurahan Sungai Puteri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	46	Pengaspalan jalan 135 meter Jl. Bunga Raya I RT. 08 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	47	Pengaspalan jalan 200 meter Jl. Maulana Malik Ibrahim (pasar Simpang Pulai) RT. 16 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	48	Pengaspalan jalan 300 meter Jl. Kh. Mas Mansyur RT. 17 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	49	Pengaspalan jalan 110 meter Jl. Sultan Agung RT. 13 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	50	Pengaspalan jalan 100 meter RT. 04 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR

<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	51	Pengecoran jalan lingkungan setapak 50 meter RT. 20 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	52	Perbaikan pembangunan drainase 482 meter Jl. Bunga Raya I RT. 08 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	53	Perbaikan dan pembangunan tutup drainase 400 meter Jl. Maulana Malik Ibrahim dan Jl. KH. Masmansyur RT. 16 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	54	Perbaikan pembangunan drainase 400 meter RT. 11, RT. 14, RT. 15, RT. 16 dan RT. 17 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	55	Lampu jalan 4 titik Jl. Bunga Raya I RT. 08 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	56	Lampu jalan 5 titik RT. 16 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	57	Lampu jalan 4 titik Jl. KH. Masmansyur RT. 18 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	58	Lampu jalan 2 titik RT. 20 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	59	Lampu jalan 2 titik RT. 17 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	60	Lampu jalan 5 titik Jl. Sultan Agung RT. 13 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	61	Lampu jalan 3 titik Jl. Serma Nurmalik RT. 11 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	62	Lampu jalan 2 titik RT. 04 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	63	Lampu jalan 2 titik Jl. KH. Mas Mansyur RT. 15 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	64	Lampu jalan 2 titik RT. 03 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPRKP
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	65	Bantuan pengadaan tenda 1 unit dan kursi plastic 100 pcs Masjid At-Taufiq RT. 08 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	KECAMATAN

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	66	Bantuan pengadaan tenda 2 unit, kursi plastic 200 pcs, dan sound system wireless 1 unit Jl. KH. Mas Mansyur RT. 18 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	67	Bantuan pengadaan tenda 1 unit dan kursi plastic 50 pcs RT. 19 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	68	Bantuan pengadaan tenda 1 unit, kursi plastic 100 pcs dan sound system wireless 1 unit Jl. Serma Nurmalik RT. 11 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	69	Bantuan pengadaan tenda 2 unit, kursi plastic 50 pcs dan baju seragam pengajian 30 pcs RT. 04 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	70	Bantuan pengadaan sound system wireless 1 unit Masjid Darul Ulum RT. 17 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	71	Bantuan pengadaan alat rebana hadroh 1 set RT. 20 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	Bagian Kesra
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	72	Bantuan pengadaan alat rebana hadroh 1 set dan baju seragam hadroh 30 pcs Jl. Bunga Raya III RT. 14 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	Bagian Kesra
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	73	Bantuan pengadaan baju seragam pengajian 35 pcs Masjid Attaufiq RT. 13 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	Bagian Kesra
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	74	Bantuan UMKM untuk 5 orang RT. 12 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DTKKUKM
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	75	Bantuan UMKM untuk 10 orang RT. 16 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DTKKUKM
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	76	Bantuan UMKM untuk 10 orang RT. 20 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DTKKUKM
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	77	Bantuan UMKM untuk 2 kelompok RT. 13 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DTKKUKM
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	78	Bantuan UMKM untuk 1 kelompok Jl. KH. Mas Mansyur RT. 15 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DTKKUKM
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	79	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 10 orang RT. 16 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DISDIK
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	80	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 6 orang RT. 20 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DISDIK

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	81	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 16 orang RT. 15 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DISDIK
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	82	Optimalisasi Program kotaku di Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	83	Mengaktifkan Pos Kamling dan pengadaan CCTV di area rawan untuk solusi permasalahan geng motor di Kota Jambi	KECAMATAN
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	84	Solusi efektif untuk peserta BPJS yang menunggak iuran dan terkait dengan peralihan ke jaminan kesehatan lainnya.	DINKES
	Absar Surwansyah, SH, M,Kn	NASDEM	85	Pengawasan serta tindak lanjut terhadap indikasi kecurangan E - Warung	DINSOS
6	Kurniawansyah, SH	PKS	1	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 titik RT. 25 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Kurniawansyah, SH	PKS	2	Pengadaan pemasangan lampu jalan 5 buah RT. 27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Kurniawansyah, SH	PKS	3	Pengecoran jalan setapak sepanjang 400 meter RT. 27 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kurniawansyah, SH	PKS	4	Bantuan pakan ikan RT. 25 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DTKKUKM
	Kurniawansyah, SH	PKS	5	Pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu RT. 25 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DTKKUKM
	Kurniawansyah, SH	PKS	6	Perbaikan pengecoran jalan samping madrasah Nurul Iman sepanjang 30 meter RT. 25 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kurniawansyah, SH	PKS	7	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 2 orang RT. 25 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin.	DISDIK
7	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	1	Pengecoran jalan 100 meter Lr. Mangga I gang I dan 150 meter Lr. Mangga I gang II RT. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPUPR



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	2	Pengadaan pemasangan LPJU dengan tiang 5 titik Lr. Mangga I RT. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	3	Bantuan pembangunan tempat wudhu masjid Nurul Ikhlas RT. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	Bagian Kesra
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	4	Bantuan guru ngaji masjid Nurul Ikhlas RT. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	Bagian Kesra
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	5	Pengadaan pemasangan tiang LPJU 3 titik Lr. Swadaya I Menuju Masjid Nurul Ikhlas RT. 18 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	6	Pelatihan keterampilan memasak kue di RT. 18 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DTKKUKM
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	7	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu RT. 18 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DISDIK
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	8	penyaluran bantuan sosial untuk lansia dan warga yang belum dapat RT. 18 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura.	DINSOS
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	9	Pengaspalan jalan di Jl. Cendana II RT. 31 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	10	Pelebaran pembangunan parit jalan di Jl. Cendana II RT. 31 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	11	Pengaspalan jalan 200 meter di Jl. Matahari I RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	12	Pengaspalan jalan 500 meter Jl. Kendari RT. 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	13	Pengadaan pemasangan LPJU di Jl. Matahari I RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	14	Pengadaan pemasangan LPJU 2 titik gang Bangkok dan Lr. Mawar Jl. Kendari di RT. 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	15	Instalasi city gas di Jl. Matahari I RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	16	Pembuatan pembangunan parit jalan 500 meter Jl. Kendari RT. 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	17	Pengadaan pemasangan LPJU Lr. Flamboyan RT. 10 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	18	Pengaspalan jalan 200 meter di Jl. Matahari I RT. 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	19	Pelestarian seni dan budaya tiap kecamatan di Kota Jambi.	DISPARBUD
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	20	Penurunan biaya PBB.	BPPRD
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	21	Penertipan parkir liar tiap trotoar kota Jambi.	DISHUB
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	22	Pengadaan perpustakaan tiap kelurahan di Kota Jambi.	DKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	23	Pengaspalan jalan di Jl. Letkol Efendi, Jl. Teratai II dan jalan menuju SDN 178 RT. 26 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	24	Pemasangan LPJU RT. 26 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	25	Perbaikan pembangunan parit jalan RT. 26 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	26	Pengadaan pembangunan poskamling RT. 26 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	KECAMATAN
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	27	Pengadaan spot wifi gratis RT. 26 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DISKOMINFO
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	28	Pembangunan drainase RT. 18 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	29	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga RT. 08 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.	DISPORA
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	30	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 10 titik RT. 08 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	31	Pengadaan pemasangan lampu jalan tanpa tiang 5 buah RT. 08 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	32	Bantuan pembangunan MCK 1 unit RT. 08 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.	DLH
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	33	Pembangunan pengecoran jalan 250 meter Jl. RD. H. Suhur RT. 08 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	34	Pengecoran pelabaran dan peninggian jalan setapak sepanjang 50 meter lebar 1, 5 RT. 04 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk	DPUPR
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	35	Bantuan bedah rumah RT. 04 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	36	Peningkatan mutu pelayanan BPJS agar dapat dipergunakan untuk berobat jalan di Rumah Sakit yang dituju	DINKES
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	37	Beasiswa untuk jenjang pendidikan S1 bagi yang kurang mampu	DISDIK
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	38	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk	DISPORA
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	39	Alih fungsi bangunan SD 128 menjadi Puskesmas Pembantu RT. 01 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk	DISDIK
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	40	Pembangunan gapura pemakaman umum RT. 01 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk	DPRKP
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	41	Bantuan UMKM RT. 04 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk	DTKKUKM
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	42	Bantuan UMKM RT. 09 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk	DTKKUKM
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	43	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 09 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk	DISDIK
	Kemas Faried Alfarelly, SE	GOLKAR	44	Bantuan pengadaan seragam olah raga bola voly RT. 09 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk	DISPORA
8	Achmad Rasid	PAN	1	Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter lebar 3 meter RT. 02 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Achmad Rasid	PAN	2	Pengecoran jalan panjang 65 meter lebar 3 meter RT. 03 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	3	Pembangunan drainase sepanjang 211 meter RT. 02 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	4	Pengadaan pemasangan LPJU tanpa tiang 2 titik RT. 03 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DPRKP
	Achmad Rasid	PAN	5	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 12 orang RT. 02 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DISDIK
	Achmad Rasid	PAN	6	Pembangunan portal jalan tinggi 2,5 meter 2 unit RT. 02 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin.	DISHUB
	Achmad Rasid	PAN	7	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan lebar 3 meter panjang 50 meter RT. 08 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	8	Perbaikan pembangunan drainase sepanjang 150 meter RT. 08 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	9	Perbaikan pembangunan drainase 800 meter SD N 08 RT. 07 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	10	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan lebar 1.5 meter panjang 150 meter RT. 03 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	11	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan lebar 1.5 meter panjang 50 meter RT. 04 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	12	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan lebar 1.5 meter panjang 150 meter RT. 26 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	13	Perbaikan pembangunan drainase 100 meter RT. 04 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	14	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan 1.200 meter dari Puskesmas Putri Ayu Lr. Pertiwi RT. 05, RT. 04, RT. 03, RT, 08 dan RT. 09 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin.	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	15	Pengecoran jalan lingkungan panjang 200 meter lebar 3 meter RT. 16 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	16	Pembangunan parit jalan panjang 70 meter lebar 3 meter RT. 16 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Achmad Rasid	PAN	17	Pembangunan drainase panjang 100 meter lebar 2 meter RT. 03 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	18	Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 200 meter RT. 26 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
	Achmad Rasid	PAN	19	Pengecoran jalan lingkungan panjang 100 meter lebar 70 cm RT. 08 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin	DPUPR
<b>IV</b>	<b>Jambi Timur - Jelutung - Pasar Jambi - Pelayangan</b>			<b>Jumlah Aspirasi = 267</b>	
1	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	1	Pengadaan pemasangan LPJU RT. 13 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	2	Pengadaan pemasangan LPJU RT. 15 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	3	Pengadaan pemasangan LPJU RT. 14 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	4	Pengadaan pemasangan LPJU RT. 20 dan RT. 21 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	5	Pengecoran jalan lingkungan RT. 05 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	6	Pengecoran jalan lingkungan RT. 27 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	7	Pengecoran jalan lingkungan RT. 18 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	8	Pengecoran jalan lingkungan RT. 22 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	9	Pembangunan parit besar atau drainase RT. 13 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	10	Pembangunan parit jalan tutup arah Musholla RT. 18 dan RT. 27 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	11	Pembangunan parit jalan tutup RT. 18 dan RT. 11, RT. 20 dan RT. 22 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	12	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 6 buah Jl. Tarumanegara RT. 13 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	13	Pembangunan parit jalan Jl. Tarumanegara RT. 13 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	14	Pengecoran jalan lingkungan RT. 13 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	15	Pengawasan penerimaan peserta didik baru sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam penerapan sistem zonasi sekolah.	DISDIK
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	16	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di 5 titik RT. 05 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur	DPRKP
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	17	Perbaikan pengecoran jalan 500 meter RT. 05 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Putra Absor Hasibuan, SH	GERINDRA	18	Pembangunan pembuatan drainase RT. 05 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
2	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	1	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 30 orang di Jl.Guru Muchtar RT. 16 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DISDIK
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	2	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 1 orang di Jl. Dr. Sumbiono RT. 17 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DISDIK
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	3	Pengadaan pemasangan tiang LPJU 1 titik di Jl. Dr. Sumbiono RT. 17 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	4	Pelatihan wirausaha untuk ibu-ibu rumah tangga 50 orang di Jl. Dr. Sumbiono RT. 17 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DTKKUKM
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	5	Instalasi city gas 50 KK RT. 17 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPP
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	6	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DISDIK

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	7	Bantuan pinjaman modal usaha tanpa agunan RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DTKKUKM
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	8	Pengecoran jalan gang Patin RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	9	Pengadaan pemasangan LPJU di gang Patin RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	10	Pembangunan drainase RT. 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	11	Perbaikan gorong-gorong RT. 14 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	12	Pengadaan pemasangan LPJU 1 titik RT. 15 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	13	Bantuan pengadaan baju seragam kompiang remaja masjid Al-Munawarah 20 orang RT. 15 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	Bagian Kesra
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	14	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial RT. 15 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DINSOS
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	15	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan Lr. Sado menuju masjid Assa lebar 3 meter panjang 250 meter RT. 42 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	16	Perbaikan jembatan lebar 3 meter panjang 3.5 meter di RT. 43 dan RT. 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	17	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana posyandu berupa bangunan, timbangan dan pengukur tinggi badan RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DINKES
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	18	Fasilitasi pembentukan koperasi simpan pinjam RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DTKKUKM
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	19	Realisasi pembangunan jembatan RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	20	Pengadaan tempat ruang terbuka hijau RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DLH
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	21	Pembangunan ruang kelas SD/ IV 19 RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DISDIK

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	22	Pembangunan drainase depan SD/ IV 19 RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPUPR
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	23	Pengadaan pemasangan CCTV untuk daerah rawan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DISKOMINFO
	Eko Setiawan, SE	GERINDRA	24	Pengecoran jalan lingkungan RT. 53 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPUPR
3	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	1	Perbaikan jalan umum dengan ukuran lebar 3 meter panjang 300 meter di Jl. Wulawarman Lr. Srikandi RT.20 dan RT.19 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	2	Lampu pemakaman sebanyak 2 titik Jl. AMD RT.32 pemakaman Darul Akhirat Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur..	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	3	Baju seragam Lembaga Adat untuk Kelurahan Talang Banjar sebanyak 10 paket di RT.28 Jl. Garuda Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	KECAMATAN
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	4	Alat Adroh sebanyak 10 paket di RT.28 Jl. Garuda Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	Bagian Kesra
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	5	Perbaikan parit jalan sepanjang 500 meter dari Langgar Al-Amin sampai arah SMA 2 RT.33 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	6	Perbaikan jalan depan Masjid Taqwa sepanjang 200 meter dari depan Masjid Taqwa RT.12 Sampai arah Kantor Lurah Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	7	Perbaikan jalan aspal sepanjang 600 meter dari warung Soto Unggul Sakti sampai batas RT.18 Wijaya Pura di RT. 33 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	8	Lampu dan tiang sebanyak 10 titik wilayah samping Unggul Sakti RT.33 dan RT.35 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	9	Lampu dan tiang sebanyak 2 titik samping Kantor Lurah Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	10	Pemerintah Kota Jambi agar aktif turun kelapangan untuk melakukan proses pendataan organisasi-organisasi masyarakat khususnya organisasi kesenian di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DISPARBUD



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	11	Peningkatan bantuan sarana dan prasarana untuk organisasi seni dan budaya Kota Jambi.	DISPARBUD
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	12	Realisasi pembangunan embung di Kelurahan Tanjung Sari dan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur untuk destinasi objek wisata .	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	13	Pembangunan pintu air di sungai Tembeku Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	14	Fasilitasi pembentukan dewan seni dan budaya Kecamatan Jambi Timur.	DISPARBUD
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	15	Penggantian lampu penerangan jalan dengan LED putih sepanjang jalan dari simpang Langit Biru sampai dengan lapangan Langit Biru RT. 02 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	16	Pembangunan pembuatan parit jalan sepanjang 50 meter RT. 02 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	17	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 02 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DISDIK
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	18	Pembangunan parit jalan sepanjang 30 meter Jl. Singo Sari Langit Biru RT. 05 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	19	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 buah RT. 05 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	20	Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter Jl. Kerajaan Melayu RT. 05 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	21	Bantuan pembangunan saluran air limbah rumah warga menuju parit RT. 15 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DLH
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	22	Pengaspalan jalan lebar 4 meter panjang 250 meter RT. 20 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	23	Pengadaan pemasangan lampu jalan 8 titik RT. 20 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	24	Pembenahan kabel listrik PLN Komplek BTN Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	25	Renovasi pembangunan poskamling 1 unit RT. 25 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	KECAMATAN

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	26	Pengadaan lampu penerangan jalan 3 unit RT. 25 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	27	Pengecoran jalan sepanjang 500 meter Jl. Padjajaran RT. 19 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	28	Perbaikan pembangunan parit jalan tutup sepanjang 500 meter Jl. Padjajaran RT. 19 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	29	Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter RT. 18 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	30	Bantuan UMKM berupa alat cetring sate 1 unit atas nama Budi Hartini Jl. Prabu Siliwangi RT. 22 No. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DTKKUKM
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	31	Pengadaan pembangunan gedung sanggar seni di wilayah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	Bagian Kesra
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	32	Penyaluran beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi di Jl. Singosari RT. 04 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DISDIK
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	33	Bantuan pengadaan pakaian adat tari di Jl. Singosari RT. 04, RT. 05 dan RT. 06 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DISPARBUD
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	34	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan dekat Pesantren dan Rawan Keamanan di 4 titik Jl. Singosari RT. 04 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	35	Pengaspalan jalan lebar 2.7cm panjang 300m di Lrg. Mangga RT. 16 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	36	Bantuan Rasta atau PKH RT. 16 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DINSOS
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	37	Bantuan UMKM berupa modal usaha RT. 11 Lr. Madrasah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DTKKUKM
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	38	Pengaspalan jalan samping Masjid Jami Nurul Hasanah di Jl. Kerajaan Melayu RT. 09 dan RT. 10 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	39	Bantuan pengadaan kostum tari perempuan 8 stel, kerincingan 200 pcs, topeng gedhrug yang dari kayu (ori) sebanyak 6 pcs, gendanag tari 1 pcs, selendang tari koin sampur 50 pcs, dan kostum tari pria 12 pcs untuk Kesenian Beledhuk Jaran Setan (BJS) RT. 22 Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DISPARBUD

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	40	Pengadaan pemasangan tiang lampu di 2 titik Perumahan kompleks BTN Jl. Kerajaan Melayu RT. 06 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	41	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik Lr. Godak dan Lr. Bdg 10 RT. 06 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPRKP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	42	Pembangunan perbaikan parit di pinggir tembok pemakaman samping SMA PGRI 4 sepanjang 100m RT. 06 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	43	Perbaikan pembangunan lapangan voly di sekolah SD RT. 06 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DISPORA
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	44	Bantuan UMKM Kue Tradisional berupa Etalase Kaca 1 unit di Jl. Yos Sudarso RT. 15 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur	DPP
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	45	Bantuan UMKM berupa gerobak jualan kue pukis dan peralatan cetakan kue pukis 1 unit di Jl. Yos Sudarso RT. 15 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur	DTKKUKM
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	46	Bantuan pengadaan peralatan hadrok dan sound 1 set di Jl. Yos Sudarso RT. 12 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur	KECAMATAN
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	47	Bantuan UMKM berupa alat-alat usaha dan pembinaan pelatihan RT. 22 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DTKKUKM
	Sutiono, ST	PDI - PERJUANGAN	48	Perbaikan pembangunan drainase sepanjang 350m di Jl. Prabu Siliwangi RT. 22 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
4	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	1	Bantuan untuk UMKM di RT. 10 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur berupa urusan yang menyangkut legalitas untuk pendistribusian produk ke supermarket.	DTKKUKM
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	2	Solusi pencemaran air yang tercemar limbah di RT. 06 dan RT. 10 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.	DLH
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	3	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran RT. 07 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.	DINSOS
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	4	Bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan kesenian marawis atau hadroh RT. 10 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.	DISPARBUD
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	5	Bantuan pengadaan pembuatan sumur bor RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	6	Verifikasi dan validasi data penerima PKH RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DINSOS
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	7	Pengadaan penambahan lampu jalan RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	8	Perbaikan pengecoran jalan 400 meter depan masjid Hidayatullah RT. 32 sampai RT. 29 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	9	Alih fungsi lahan bangunan bekas SD N 160 menjadi TK atau PAUD RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DISDIK
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	10	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana berupa pembangunan permanen dan alat pengeras suara di Posyandu Lansia Kamboja RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DINKES
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	11	Renovasi pembangunan sekolah SD N 192 yang di marger ke SD N 140 RT. 30 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DISDIK
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	12	Renovasi saluran serta pemindahan septik tank pasar induk Talang Banjar yang menimbulkan bau busuk di sekitar permukiman warga saat tergenang air hujan.	DPUPR DAN DLH
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	13	Realisasi pengadaan pemasangan lampu jalan di Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Frans Sugama Tambunan, SH	PDI - PERJUANGAN	14	Verifikasi dan validasi data penerima Bansos di Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DINSOS
5	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Pengecoran jalan yang belum terealisasi dari tahun 2013 RT. 02 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Perbaikan pembangunan turap sepanjang 30 meter yang rusak karena kondisi jalan yang miring 45 derajat RT. 02 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Realisasi pengecoran jalan sepanjang 140 meter RT. 03 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 titik RT. 03 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Bantuan pengadaan perlengkapan jenazah seperti tempat mandi, gentong dan lain-lain di RT. 03 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	Bagian Kesra

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Pengaspalan jalan di RT. 03 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Kebijakan zonasi SMA agar dapat di ambil alih Pemerintah Kota dari Pemerintah Provinsi.	DISDIK
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Pengadaan LPJU di RT. 32 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Pengadaan pemasangan kaca cembung jalan di RT. 32 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DISHUB
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Pembangunan parit jalan RT. 32 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pembangunan drainase di RT. 32 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Perbaikan pembangunan parit jalan belum terealisasi dari tahun 2017 RT. 10 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	13	Pelatihan untuk acara-acara keagamaan RT. 10 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	Bagian Kesra
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	14	Perbaikan parit jalan depan Polsek Jelutung dekat Kantor Lurah Handil Jaya.	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	15	Bantuan modal dan lapak atau tempat berdagang untuk warga RT. 10 yang berlokasi di RT. 10 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DTKKUKM
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	16	Pengecoran jalan RT. 18 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	17	Perbaikan pembangunan parit jalan RT. 18 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	18	Pengadaan pemasangan lampu jalan RT. 18 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPRKP
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	19	Pembangunan parit jalan tutup RT. 24, RT. 07 dan RT. 04 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	20	Instalasi city gas RT. 24 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	21	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPRKP
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	22	Pengadaan pemasangan tiang listrik untuk solusi kabel tidak teratur RT. 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPRKP
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	23	Pembangunan tutup parit jalan RT. 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPUPR
	M. Fuad Safari, S.Sos.I	DEMOKRAT KEBANGSAAN	24	Pemanfaatan lahan kampung bantar serta penyuluhan dan bantuan pertanian media hydroponik agar produktif dengan memanfaatkan pekarangan rumah RT. 08 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPMPPA
6	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Pengecoran jalan menuju pemakaman umum 150 meter RT. 03 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Pengecoran jalan menuju pemakaman umum 150 meter RT. 08 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Pengecoran jalan lingkungan 150 meter RT. 09 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Pembangunan box culvert RT. 08 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Pemasangan lampu jalan 2 titik RT. 01 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPRKP
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Pemasangan lampu jalan 2 titik RT. 04 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPRKP
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pemasangan lampu jalan 1 titik RT. 08 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.	DPRKP
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Pemasangan lampu jalan 1 titik RT. 06 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan.	DPRKP
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Pengecoran jalan menuju kuburan 150 meter RT. 03 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan	DPUPR
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Pembuatan box culvert RT. 08 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pengecoran jalan lingkungan 150 meter RT. 09 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan	DPUPR
	Abdul Rauf	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Pemasangan lampu jalan 1 titik RT. 01 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan	DPRKP
7	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Pengecoran jalan lingkungan 3 x 350 meter dan 4 x 400 dari masjid menuju ke sungai Batang Hari meter RT. 02 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Program UMKM bagi Remaja Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DTKKUKM
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Penimbunan TPA di RT. 03, RT. 04 dan RT. 05 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DLH
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan kampung KB, Rumah Data dan Posyandu Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	BPPKB
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Bantuan pengadaan peralatan pertanian Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DPKP
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Bantuan sarana dan prasarana belajar di madrasah RT. 01 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DISDIK
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pengecoran jalan lingkungan 4,5 meter x 70 meter RT. 05 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Pembangunan pembuatan drainase 200 meter RT. 05 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Abdullah Thaif, A.Md	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Pengadaan pemasangan LPJU di RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 07 dan RT. 08 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
8	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	1	Pelatihan UMKM di RT. 34 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DTKKUKM
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	2	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter lebar 3 meter di Jl. Kartosuro RT. 34 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	3	Pengadaan pemasangan LPJU 5 titik RT. 34 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	4	Realisasi instalasi city gas yang saat ini sudah terpasang meteran RT. 34 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPP
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	5	Pembangunan pembuatan pengecoran jalan tembusan ke SMAN 02 RT. 34 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	6	Pengaspalan Jalan di Jl. Byangkara panjang 192 m lebar 4.5 m RT. 16 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	7	Pembangunan parit jalan Lr. Jengkol RT. 16 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	8	Pengecoran jalan lingkungan RT. 15 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	9	Perbaikan pembangunan parit jalan dari Unggul Sakti sampai Langgar Al Amin RT. 33 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	10	Pengecoran jalan rusak dari Unggul Sakti sampai Langgar Al Amin RT. 33 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	11	Perbaikan pembangunan parit jalan dari Puskesmas sampai perbatasan Wijayapura warga RT. 15 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	12	Perbaikan pengecoran jalan dari Puskesmas sampai perbatasan Wijayapura warga RT. 15 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur	DPUPR
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	13	Bantuan pengadaan baju senam sebanyak 50 Pcs di RT. 31 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur	DISPORA
	Maya Fitriah Siregar	NASDEM	14	Perbaikan pagar pemakaman umum Darul Akhirat di RT. 32 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur	DPRKP
9	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	1	Pelatihan keterampilan kerja bagi warga Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.	DTKKUKM
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	2	Pembangunan box culvert di RT. 05 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung.	DPUPR



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	3	Pembangunan renovasi pendopo sepanjang 8 meter lebar 6 meter tinggi 3 meter RT. 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	KECAMATAN
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	4	Pembangunan poskambling panjang 6 meter lebar 4 meter tinggi 5,5 meter RT. 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	KECAMATAN
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	5	Pengecoran jalan lingkungan sepanjang 40 meter lebar 2,5 meter Jl. Kepondang RT. 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	6	Pengadaan pembangunan taman bermain anak 2 unit ayunan 2 unit bangku enjotan Jl. Kepondang RT. 23 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DISDIK
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	7	Pelatihan keterampilan service motor, handphone atau keahlian lainnya RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DTKKUKM
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	8	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan PKH, Rastra dan KIS RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DINSOS
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	9	Insentif guru ngaji, madrasah dan petugas fardhu kifayah RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	Bagian Kesra
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	10	Realisasi perbaikan pengecoran jalan amd 200 meter RT. 29 Kelurahan Talang Banjar Kelurahan Jambi Timur.	DPUPR
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	11	Penambahan insentif guru PAMI dan Marbot Masjid RT. 29 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	Bagian Kesra
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	12	Realisasi city gas di Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPP
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	13	Bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk pemanfaatan lahan tidur di Kecamatan Pelayangan	DPKP
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	14	Pelatihan UMKM yang berbeda-beda di semua kelurahan Kecamatan Pelayangan	DTKKUKM
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	15	Peninjauan kelayakan WC pesantren – pesantren di Kecamatan Pelayangan	DLH
	H. Muhammad Zayadi, S.Pt	PKS	16	Pengadaan pembangunan gedung sarana olah raga di Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan	DISPORA

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
10	Saiful, SH	GOLKAR	1	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu dan paket A,B,C PKBM untuk 50 orang warga RT. 21 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur.	DISDIK
	Saiful, SH	GOLKAR	2	Pelatihan kewirausahaan untuk 30 orang pemuda serta keterampilan menjahit untuk ibu-ibu dan remaja putri 25 orang RT. 21 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur.	DTKKUKM
	Saiful, SH	GOLKAR	3	Pengecoran jalan setapak sepanjang 75 meter RT. 21 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	4	Pengaspalan jalan lingkungan Jl. Flores dari RT. 01 sampai RT. 11 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	5	Pembanguna perbaikan dan pendalaman parit jalan dari RT. 01 sampai RT. 25 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	6	Pengecoran jalan 300 meter Jl. Gajahmada RT. 51 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	7	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga RT. 11 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DISPORA
	Saiful, SH	GOLKAR	8	Pengadaan pemasangan LPJU menuju ke masjid Miftahurrahma RT. 10 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	9	Solusi anak SD putus sekolah akibat terdampak covid di kota jambi.	DISDIK
	Saiful, SH	GOLKAR	10	Pengecoran jalan setapak lebar 1 meter panjang 150 meter RT. 08 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	11	Pengecoran jalan lingkungan menuju lapangan bulu tangkis sepanjang 150 meter RT. 10 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	12	Pengecoran jalan lingkungan 500 meter RT. 17 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	13	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 4 unit RT. 17 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	14	Pembangunan parit jalan di bawah RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	15	Realisasi pemasangan lampu penerangan jalan RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Saiful, SH	GOLKAR	16	Verifikasi dan validasi bantuan sosial RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DINSOS
	Saiful, SH	GOLKAR	17	Peninjauan pasar hongkong terkait aliran air limbah, jalan rusak dan penataan untuk kelayakan penjualan daging babi RT. 13 – RT. 15 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPP DAN DLH
	Saiful, SH	GOLKAR	18	Pengadaan hydrant pemadam kebakaran RT. 15 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung	DISDAMKAR
	Saiful, SH	GOLKAR	19	Perbaikan pembangunan parit drainase lebar 120 meter tinggi 1 meter sepanjang 500 meter RT. 14 - 15 dan RT. 19 - RT. 20 Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	20	Bantuan pengadaan hydrant pemadam kebakaran 2 unit Jl. Hayam Wuruk RT. 14 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DISDAMKAR
	Saiful, SH	GOLKAR	21	Pengecoran jalan lebar 3.6 meter panjang 115 meter RT. 14 – 15 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	22	Pengadaan tempat pembuangan sampah RT. 13 – RT. 15 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DLH
	Saiful, SH	GOLKAR	23	Pembenahan kabel listrik Jl. Hayam Wuruk RT. 14 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	24	Pembangunan pembuatan drainase sepanjang 800 meter Jl. HMO Bafadhal RT. 01 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	25	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah Jl. HMO Bafadhal RT. 18 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	26	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 buah RT. 24 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	27	Pengecoran jalan lingkungan lebar 3 meter panjang 120 meter RT. 24 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	28	Bantuan pengadaan tenda 2 unit, 50 unit kursi plastic dan 1 unit sound system RT. 24 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	KECAMATAN
	Saiful, SH	GOLKAR	29	Pengadaan gerobak motor pangangkut sampah 1 unit RT. 24 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DLH

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Saiful, SH	GOLKAR	30	Instalasi city gas RT. 24 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPP
	Saiful, SH	GOLKAR	31	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter RT. 13 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	32	Bantuan pengadaan tenda 1 unit, 100 unit kursi plastic dan 1 unit sound system RT. 13 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	KECAMATAN
	Saiful, SH	GOLKAR	33	Bantuan pengadaan tenda 2 unit, 100 unit kursi plastic dan 1 unit sound system RT. 22 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	KECAMATAN
	Saiful, SH	GOLKAR	34	Pengaspalan jalan sepanjang 100 meter Lr. Puskesmas Kemang II RT. 03 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	35	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah Lr. Puskesmas Kemang II RT. 03 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	36	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 buah RT. 16, RT. 19 dan RT. 20 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	37	Pembangunan pembuatan drainase sepanjang 75 meter RT. 16 - RT. 20 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	38	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah Lr. Kemang II RT. 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	39	Pengaspalan jalan 300 meter Lr. Kemang II RT. 25 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	40	Pengadaan tiang dan lampu jalan 5 titik RT. 17 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	41	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 15 orang RT. 17 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DISDIK
	Saiful, SH	GOLKAR	42	Bantuan pengadaan sarana olah raga tenis meja 1 unit RT. 17 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DISPORA
	Saiful, SH	GOLKAR	43	Bantuan pengadaan pengeras suara 1 unit RT. 20 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	KECAMATAN
	Saiful, SH	GOLKAR	44	Pengadaan lampu penerangan jalan 2 buah RT. 17 dan RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Saiful, SH	GOLKAR	45	Pembangunan parit jalan RT. 19 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	46	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 buah Lr. Kemang II RT. 26 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	47	Pelatihan keterampilan memasak kue untuk 30 orang RT. 09 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DTKKUKM
	Saiful, SH	GOLKAR	48	Pengecoran jalan setapa lebar 3 meter panjang 70 meter Jl. Gatot Subroto RT. 20 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	49	Pengadaan pemasangan lampu jalan 4 titik RT. 59 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	50	Pengadaan pemasangan lampu jalan 1 titik depan SD 76 dan 3 titik arah ke masjid Al-Barokah Jl. Kapten Dirham RT. 57 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	51	Pembangunan parit 150 meter Jl. Kapten Dirham RT. 57 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPUPR
	Saiful, SH	GOLKAR	52	Bantuan UMKM untuk 3 orang RT. 57 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DTKKUKM
	Saiful, SH	GOLKAR	53	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 15 orang RT. 57 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DISDIK
	Saiful, SH	GOLKAR	54	Bantuan pembangunan renovasi masjid Al-Barokah RT. 58 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	Bagian Kesra
	Saiful, SH	GOLKAR	55	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 titik Jl. Kapten Dirham RT. 58 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPRKP
	Saiful, SH	GOLKAR	56	Pengaspalan jalan 150 meter menuju Masjid Al-Barokah RT. 58 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung	DPUPR
11	Sartono, SH, M.Hum	PAN	1	Pendataan dan pembinaan UMKM pengrajin rotan serta penyaluran bantuan yang dilakukan secara langsung oleh dinas terkait tanpa perantara pihak ketiga khususnya RT. 04 dan RT. 07 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DTKKUKM
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	2	Realisasi perbaikan jalan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	3	Realisasi pembangunan gapura RT 5 unit di RT. 04 dan RT. 07 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DISHUB
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	4	Pendataan penerima jaminan kesehatan KIS ataupun Jambi Bugar RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DINKES
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	5	Realisasi pembangunan gapura RT. 01 sampai RT. 05 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DISHUB
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	6	Pembangunan parit jalan sepanjang 400 meter Jl. Singosari RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	7	Pengecoran jalan lingkungan 80 meter Jl. Singosari RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	8	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 1 titik dekat Masjid Nurul Huda Jl. Singosari RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	9	Penambahan kuota gas subsidi untuk 20 KK Jl. Singosari RT. 01 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPP
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	10	Pembangunan parit jalan sepanjang 250 meter Jl. Amang Kurat Lr. Jepang Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	11	Penambahan kuota gas subsidi untuk 40 KK Jl. Amang Kurat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPP
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	12	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 buah tanpa tiang Jl. Amang Kurat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	13	Pelatihan keterampilan menjahit untuk 10 orang Jl. Amang Kurat Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DTKKUKM
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	14	Realisasi pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 titik RT. 04 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	15	Bantuan PKH, BPNT, UMKM 5 kelompok Jl. Singosari RT. 25 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DINSOS
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	16	Lampu penerangan jalan 5 unit Jl. Singosari RT. 25 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Sartono, SH, M.Hum	PAN	17	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 10 orang Jl. Singosari RT. 25 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.	DISDIK

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
12	Padlan, SP	PBRB	1	Pengadaan pemasangan LPJU 4 buah RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DPRKP
	Padlan, SP	PBRB	2	Perbaikan dan pembangunan septic tank 200 rumah RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 09, RT. 10 dan RT. 11 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Padlan, SP	PBRB	3	Pembangunan Pos Kamling RT. 02 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	KECAMTAN
	Padlan, SP	PBRB	4	Pembuatan tempat sampah induk 2 unit RT. 03 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DLH
	Padlan, SP	PBRB	5	Pembangunan drainase 60 meter RT. 04 dan RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Padlan, SP	PBRB	6	Pengecoran dan peninggian jalan setapak 700 meter RT. 02, RT. 05, RT. 08, RT. 11 dan RT. 12 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Padlan, SP	PBRB	7	Pengadaan tong sampah biasa 77 unit RT. 02, RT. 04, RT. 08 dan RT. 12 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DLH
	Padlan, SP	PBRB	8	Pengadaan pasar sembako murah setiap bulan untuk 100 KK RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DPP
	Padlan, SP	PBRB	9	Alih fungsi ex kantor camat Pelayangan menjadi rumah tahfiz Quran.	Bagian Kesra
	Padlan, SP	PBRB	10	Bantuan penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 21 orang RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DISDIK
	Padlan, SP	PBRB	11	Pengecoran untuk penambahan ketebalan jalan setapak untuk menanggulangi banjir RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DPUPR
	Padlan, SP	PBRB	12	Bantuan pengadaan seragam senam 50 buah RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.	DISPORA
	Padlan, SP	PBRB	13	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 10 orang Jl. KH. M. Jakfar RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan	DISDIK
	Padlan, SP	PBRB	14	Bantuan pengadaan baju seragam senam 35 pcs Jl. KH. M. Jakfar RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan	DISPORA

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Padlan, SP	PBRB	15	Program bedah rumah untuk 3 rumah Jl. KH. M. Jakfar RT. 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan	DPUPR
<b>V</b>	<b>Jambi Selatan Paal Merah</b>			<b>Jumlah Aspirasi = 368</b>	
1	Kasiono	GERINDRA	1	Drainase sungai panjang 120 meter lebar 1,5 meter di Jl. Liposos I RT.15 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	2	Parit jalan panjang 500 meter lebar 60 cm di Lrg. Annur RT.15 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	3	Rigit beton panjang 150 meter lebar 3 meter di Lrg. Nipah RT.15 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	4.	Lampu penerangan jalan dan tiang sebanyak 2 buah di Lrg Mangga RT.15 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	5	Jalan lingkungan panjang 300 meter di Lr. Amanah I RT.39 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	6	Lampu jalan sebanyak 3 unit dan tiang listrik sebanyak 6 di Jl. Liposos 2 Perum Posos Abadi RT.39 Lrg. Amanah 4 dan 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	7	Kartu Bugar sebanyak 25 orang di RT.35 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DINKES
	Kasiono	GERINDRA	8	Pemeliharaan jalan sepanjang 85 meter Lrg. Pepaya RT.45 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	9.	Revitalisasi jaringan listrik PLN 86 rumah Lrg. Pepaya RT.45 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	10	Pembuatan lokasi wisata terpadu dan pusat wisata kuliner di RT.45 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DISPARBUD
	Kasiono	GERINDRA	11	Bantuan pengadaan sarana dan perlengkapan kesenian hadroh 1 paket di RT.45 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DISPARBUD DAN Bagian Kesra



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kasiono	GERINDRA	12	Pengecoran jalan menuju langgar Baitul Taqwa sepanjang 90 meter lebar 2.5 meter depan SD N 79 Lr. Warso Jl. Sersan Darpin RT. 59 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	13	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah Lr. Saudara RT. 59 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	14	Pengecoran jalan sepanjang 200 meter Lr. Kejayaan Jl. Sersan Tajib RT. 07 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	15	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 buah Jl MAN 3 RT. 07 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	16	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 4 titik Lr Patah Tiga RT. 10 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	17	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 1 titik Lr Perjuangan RT. 32 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	18	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 1 titik RT. 30 (dalam) Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	19	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik Lr Serumpun RT. 22 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	20	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik Lr Melati dan 1 titik Lr. Keluarga RT. 18 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	21	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik depan SDN 119 Lr Bina Karya RT. 09 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	22	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 5 titik RT. 04 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	23	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 5 titik RT. 05 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	24	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 4 titik RT. 03 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	25	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 4 titik RT. 27 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	26	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 3 titik Jl. Berdikari RT. 28 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kasiono	GERINDRA	27	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 4 titik RT. 26 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	28	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik RT. 24 tembus ke RT. 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	29	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik RT. 34 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	30	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik RT. 35 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	31	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 1 titik Pos Kamling RT. 07 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	32	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 2 titik Mushollah Saadatul Mustaqim RT. 36 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	33	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik Masjid Taqwa RT. 15 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	34	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik Lr. Sekintang dan Lr. Naga Mas RT. 21 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Kasiono	GERINDRA	35	Pengaspalan jalan sepanjang 250 meter Lr. Patah Tiga dan 300 meter Lr. Kaka Tua tembus Lr. Patah Tiga RT. 10 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	36	Pengecoran jalan sepanjang 200 meter Lr. Patah Tiga RT. 10 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	37	Pengecoran jalan sepanjang 250 meter Lr. Prihatin tembus Lr. Patah Tiga RT. 06 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	38	Lanjutan pembangunan drainase RT. 32 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	39	Pembangunan parit jalan sepanjang 30 meter RT. 30 berbatasan dengan RT. 03 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	40	Pengaspalan jalan sepanjang 250 meter Lr. Serumpun RT. 22 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	41	Pembangunan drainase sepanjang 500 meter RT. 25 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kasiono	GERINDRA	42	Pembangunan parit sepanjang 150 meter lebar 1.5 meter Lr. Bina Karya sampai belakang Tropi Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	43	Pengecoran jalan sepanjang 70 meter lebar 2 meter RT. 05 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	44	Pengecoran jalan sepanjang 500 meter lebar 3 meter RT. 27 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	45	Pembangunan parit jalan sepanjang 150 meter Jl. Berdikari RT. 28 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	46	Pengecoran jalan sepanjang 150 meter lebar 3 meter RT. 26 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	47	Pembangunan drainase panjang 150 meter lebar 40 cm tinggi 40 cm RT. 26 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	48	Pengecoran jalan sepanjang 350 meter RT. 23 tembus RT. 24 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	49	Pengecoran jalan sepanjang 2.5km pintu gerbang perbatasan Muaro Jambi RT. 29 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	50	Pengecoran jalan sepanjang 130 meter Lr. TK Al-Madani RT. 34 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	51	Pembangunan drainase sepanjang 100 meter RT. 34 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	52	Pengecoran jalan sepanjang 400 meter di Lr. Sriwijaya dan 200 meter jalan setapak RT. 25 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	53	Aspal tempel sepanjang 80 meter RT. 35 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	54	Pembangunan drainase sepanjang 150 meter Jl. Masjid Taqwa RT. 15 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	55	Pembangunan parit jalan sepanjang 200 meter Jl. Masjid Taqwa RT. 15 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	56	Pengecoran jalan setapak sepanjang 135 meter Lr. Sekintang Dayo RT. 21 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Kasiono	GERINDRA	57	Pembangunan parit jalan kiri kanan sepanjang 300 meter Lr. Sekintang Dayo RT. 21 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	58	Pengaspalan jalan sepanjang 120 meter Lr. Naga Mas RT. 21 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	59	Realisasi pembangunan drainase sepanjang 45 meter Lr. Sekintang Dayo tembus RT. 20 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Kasiono	GERINDRA	60	Pemasangan rambu lalu lintas 15 unit dari Jl. Berdikari RT. 21 sampai RT. 27 dan RT. 28 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah	DISHUB
2	Darmawan, SE	GERINDRA	1	Instalasi pipa PDAM sepanjang 200 meter di Lr. Bajapa 3 RT. 06 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	2	LPJU 2 titik Lr. Bajapa 1 dan Lr. Bajapa 3 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Darmawan, SE	GERINDRA	3	Pengecoran jalan daerah kebun jambu Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	4	Bantuan UMKM RT. 06 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DTKKUKM
	Darmawan, SE	GERINDRA	5	Perbaikan pembangunan drainase RT. 06 dan RT. 19 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	6	Perbaikan pengecoran jalan sepanjang 10 meter RT. 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	7	Pengecoran jalan lanjutan 500 meter RT. 46 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	8	Perbaikan drainase RT. 46 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	9	Pengaspalan jalan 500 meter Jl. Babusalam RT. 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	10	Pemasangan lampu penerangan jalan 3 buah Jl. Babusalam dan Jl. Attaqwa RT. 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Darmawan, SE	GERINDRA	11	Pemasangan lampu penerangan jalan 6 buah Perumahan Kampung Kito Blok F-6 RT. 64 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Darmawan, SE	GERINDRA	12	Bantuan pengadaan sarana olah raga net voli Perumahan Kampung Kito Blok F-6 RT. 64 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DISPORA
	Darmawan, SE	GERINDRA	13	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 20 orang RT. 64 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DISDIK
	Darmawan, SE	GERINDRA	14	Pembangunan drainase lanjutan 600 meter dari RT. 17 menuju RT. 16 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	15	Pemasangan lampu penerangan jalan umum 6 buah Lr. Pepaya dan Lr. Bakti RT. 17 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Darmawan, SE	GERINDRA	16	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 10 orang RT. 17 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DISDIK
	Darmawan, SE	GERINDRA	17	Pengecoran jalan 150 meter Lr. Selamat Datang RT. 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Darmawan, SE	GERINDRA	18	Bantuan UMKM untuk 1 kelompok RT. 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah	DTKKUKM
	Darmawan, SE	GERINDRA	19	Lampu jalan di 8 titik Lr. Selamat Datang RT. 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah	DPRKP
3	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	1	Pemutihan biaya tunggakan BPJS khususnya bagi warga RT. 03 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DINKES
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	2	Pembangunan perbaikan drainase RT. 03 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	3	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan RT. 03 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	4	Perbaikan pembangunan drainase RT. 30 dan RT. 26 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	5	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 5 unit RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	6	Pengadaan pemasangan LPJU 1 titik arah sekolah Yadika RT. 50 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	7	Pengadaan pemasangan LPJU 1 titik simpang jerambah bolong Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	8	Perbaikan pembangunan jembatan Aster Biru RT. 30 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	9	Penertipan dan pengawasan pendistribusian gas subsidi di pangkalan RT. 12 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	10	Bantuan pembangunan toilet, tempat wudhu dan menara masjid Nurussa'a RT. 30 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	Bagian Kesra
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	11	Pengecoran jalan RT. 02 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	12	Pengecoran jalan RT. 11 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	13	Pembangunan drainase RT. 11 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	14	Pembangunan drainase 125 meter Jl. RD Wijaya RT. 25 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	15	Pengecoran jalan lingkungan 150 meter RT. 25 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	16	Pengadaan lampu penerangan jalan umum 5 buah Jl. Kopi 2 RT. 25 dan RT. 27 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	17	Pengadaan pemasangan lampu jalan 4 buah RT. 06 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	18	Pembangunan parit jalan tutup 300 meter RT. 06 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	19	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 07 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	20	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 23 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP

<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	21	Pengaspalan jalan 150 meter RT. 23 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	22	Pengaspalan jalan sepanjang 85 meter Lr. Setia RT. 08 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	23	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 08 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	24	Pengaspalan jalan sepanjang 100 meter Lr. Setia RT. 15 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	25	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah Lr. Mustika RT. 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	26	Pengaspalan jalan sepanjang 300 meter Lr. Mustika RT. 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	27	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah samping SMP Nomensen Lr. Jati RT. 22 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	28	Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter RT. 04 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	29	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 20 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	30	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah Jl. Teuku Sulaiman Lr. SD N 188 RT. 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	31	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 16 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	32	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 14 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	33	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 02 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	34	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah Jl. Tarmizi Kadir RT. 11 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	35	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 10 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP

<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	36	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 09 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	37	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 25 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	38	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 18 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	39	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah dekat Pos Kamling Jl. Barau-Barau RT. 21 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	40	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 24 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	41	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 buah RT. 13 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	42	Pengadaan pemasangan lampu jalan 1 buah RT. 01 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	43	Pengadaan pemasangan lampu jalan 3 buah RT. 05 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	44	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 10 orang RT. 05 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DISDIK
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	45	Pembangunan parit tutup 100 meter Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT. 05 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	46	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Mawar pembangunan 4 x 4 meter, meja 3 unit, kursi 6 buah RT. 05, RT. 06 dan RT. 04 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DINKES
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	47	Renovasi pembangunan gapura Jl. Letkol A. Tarmizi Kadir RT. 05 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DISHUB
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	48	Pembangunan turap sepanjang 50 meter RT. 07 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	49	Pembangunan drainase 300 meter RT. 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	50	Pembangunan turap RT. 20 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	51	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 buah RT. 11 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	52	Bantuan pengadaan ambulance untuk masjid Darussalam RT. 17 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DINKES
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	53	Bantuan pengadaan meja posyandu RT. 11 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan.	DINKES
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	54	Realisasi pengecoran jalan di Jl. Jatayu 3 RT. 03 dan RT. 04 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	55	Pendataan dan penambahan kuota gas subsidi di RT. 02, RT. 03 dan RT. 04 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	56	Instalasi city gas di Kelurahan Paal Merah dan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	57	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan di Kenari 3 RT. 04 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	58	Pengecoran jalan di 3 titik RT. 04 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	59	Pengadaan pemasangan penggantian lampu jalan di 2 titik RT. 11 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	60	Pengaspalan jalan RT. 11 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Junedi Singarimbun, SE	PDI - PERJUANGAN	61	Pembangunan drainase RT. 04 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPUPR
4	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	1	Pelatihan tenaga kerja yang lebih kreatif dan pembinaan wirausaha serta pengembangannya Jl. Lingkar Selatan II Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DTKKUKM
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	2	Tindak lanjut kewenangan zona sekolah SMA yang saat ini menjadi wewenang pemerintah Provinsi agar dapat diambil alih oleh pemerintah Kota Jambi.	DISDIK
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	3	Realisasi perbaikan pembangunan drainase panjang 120 meter RT. 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	4	Penyaluran bantuan beasiswa pelajar kurang mampu 3 orang RT. 38 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DISDIK
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	5	Pengadaan pemasangan LPJU 2 titik di Lr. Family RT. 38 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	6	Pengecoran jalan lanjutan sepanjang 8 meter tembusan ke arah RT. 28 di RT. 38 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	7	Pembangunan parit jalan 30 meter RT. 38 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	8	Perbaikan pembangunan drainase 80 meter RT. 26 dan RT. 38 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	9	Bantuan sarana dan prasarana PKK peralatan kursi, AC dan sound sistem Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	KECAMATAN
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	10	Bantuan peningkatan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan lahan kosong untuk ternak, pertanian dan perkebunan di RT. 16 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	11	Pembangunan pelebaran drainase SMK 2 Jl. Gelatik RT. 16 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	12	Pembangunan pelebaran jalan SMK 2 Jl. Gelatik RT. 16 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	13	Normalisasi perbaikan drainase SMP 6 Lr. Sepakat RT. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	14	Pengaspalan jalan lanjutan 200 meter RT. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	15	Insentif ibu-ibu PKK 28 orang Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	KECAMATAN
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	16	Pengaspalan jalan Lr. Harapan RT. 05 dan RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	17	Pembenahan kabel listrik RT. 05 dan RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	18	Normalisasi perbaikan drainase Lr. Harapan RT. 05 dan RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR

<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	19	Bantuan bedah rumah RT. 05 dan RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	20	Pembangunan pelebaran jalan lingkungan menuju SMA 2 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	21	Pembangunan drainase Masjid At-Taqwa dari RT. 13 dan RT. 14 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	22	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 titik RT. 03 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	23	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 titik RT. 14 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	24	Penambahan kuota gas subsidi RT. 18 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	25	Pemberian papan nama untuk ketua adat di masing-masing Kelurahan.	DPMPPA
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	26	Penyaluran dan sosialisasi beasiswa pelajar kurang mampu Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DISDIK
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	27	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 2 titik RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	28	Pembangunan drainase 450 meter RT. 18 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	29	Instalasi saluran air bersih RT. 06 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	30	Solusi penanggulangan banjir di RT. 06 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	31	Lampu jalan di 4 titik RT. 06 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	RR. Nully Kurniasih.K, SE	DEMOKRAT KEBANGSAAN	32	Penganggaran dana untuk pemilihan ketua RT se Kota Jambi	KECAMATAN

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
5	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	1	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 unit RT. 37 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	2	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 2 unit RT. 39 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	3	Pengecoran jalan panjang 100 meter lebar 3 meter RT. 46 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	4	Pengaspalan jalan RT. 37 Lr. Burung Gagak Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	5	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu bagi anak yang tidak menerima manfaat program PKH RT. 37 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DISDIK
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	6	Pendataan ulang penerima bantuan modal UMKM RT. 37 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DTKKUKM
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	7	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan umum 3 titik RT. 58 perbatasan dengan RT. 14 dan RT. 43 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	8	Pengecoran jalan sepanjang 300 meter Jl. Arjuna 1 RT. 37 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	9	Pengadaan pemasangan lampu jalan 2 titik Jl. Arjuna 1 dan 1 titik Jl. Sentosa RT. 37 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	10	Pengaspalan jalan sepanjang 200 meter Jl. Taruma III dan 50 meter Jl. Sentosa RT. 37 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	11	Peninggian box culvert saluran air untuk penanggulangan banjir SD 08 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	12	Pembangunan parit jalan dengan tutup sepanjang 350 meter Jl. Amanah RT. 37 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	13	Bantuan pembangunan musholla RT. 37 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	Bagian Kesra
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	14	Pengecoran jalan Lr. Anggrek III sepanjang 132 meter, Lr. Anggrek IV sepanjang 126 meter, Lr. Anggrek VI sepanjang 150 meter, Lr. Anggrek II A sepanjang 115 meter, Lr. Anggrek II B1 sepanjang 167 meter RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	15	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 titik antara Lr. Anggrek dan Lr. Baja, 4 titik antara Lr. Anggrek dan Lr. Teratai RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	16	Pengecoran jalan 800 meter RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	17	Pembangunan drainase 400 meter RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	18	Bantuan UMKM dan Usaha Mandiri dalam bentuk pinjaman lunak untuk 10 KK dan penyuluhan untuk menggalakan ekonomi rakyat RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DTKKUKM
	Martua Muda Siregar, SP	NASDEM	19	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 20 orang RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DISDIK
6	Hizbullah, S.Si	PKS	1	Pembangunan drainase 200 meter di Perum Bumi Citra Lestari 6 Jl. Liposos II RT. 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Hizbullah, S.Si	PKS	2	Pengaspalan jalan 400 meter Jl. TMMD Suka Damai Lr. Bunga Rambai 3 RT. 46 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Hizbullah, S.Si	PKS	3	Bantuan pengadaan baju seragam senam ibu-ibu RT. 21 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DISPORA
	Hizbullah, S.Si	PKS	4	Pembangunan parit/ drainase 1000 meter RT. 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Hizbullah, S.Si	PKS	5	Pembangunan drainase 200 meter di Perum Bumi Citra Lestari 6 Jl. Liposos II RT. 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Hizbullah, S.Si	PKS	6	Pengaspalan jalan 400 meter Jl. TMMD Suka Damai Lr. Bunga Rambai 3 RT. 46 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Hizbullah, S.Si	PKS	7	Bantuan pengadaan baju seragam senam ibu-ibu RT. 21 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DISPORA
	Hizbullah, S.Si	PKS	8	Pembangunan parit/ drainase 1000 meter RT. 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Hizbullah, S.Si	PKS	9	Bantuan pengadaan sarana dan prasarana bulu tangkis di Perum Paal Merah Indah blok E Taman Paal Merah Indah Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DISPORA
	Hizbullah, S.Si	PKS	10	Bantuan seragam dan sepatu senam 20 pcs Jl. Iswahyudi Lr. Teratai Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DISPORA
7	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	1	Pengadaan penambahan LPJU 5 titik di gang berkah dan gang Bidan Christina Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	2	Pengecoran jalan setapak di gang berkah dan gang Bidan Christina Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	3	Pengaspalan jalan sepanjang 150 meter depan langgar Al Muhazirin RT. 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	4	Perbaikan pengecoran jalan lingkungan RT. 09 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	5	Pengadaan pemasangan LPJU 15 titik di Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	6	Pengecoran jalan lingkungan Lr. Sersan RT. 52, RT. 40, RT. 54, dan RT. 17 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	7	Pengaspalan jalan lingkungan RT. 42 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	8	Pemasangan lampu jalan 2 titik gang puskesmas RT. 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	9	Perbaikan pengecoran jalan setapak RT. 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	10	Perbaikan pengecoran jalan gang berkah 175 meter RT. 11 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	11	Pembangunan parit kiri kanan RT. 09 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	12	Bantuan pengadaan sarana posyandu meja, timbangan dan alat ukur tinggi badan RT. 08, RT. 09 dan RT. 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DINKES

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	13	Pemasangan lampu penerangan jalan 6 buah Bumi Putra, Bumi Alit dan Bumi Ayu RT. 09 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	14	Bantuan pembinaan UMKM dan peralatan pembuatan kerupuk 1 unit RT. 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DTKKUKM
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	15	Penambahan tiang listrik RT. 12 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	16	Bantuan sarana pertanian handtraktor 1 unit, alat perontok 1 unit untuk kelompok tani Sumber Rukun RT. 25 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	17	Pengecoran jalan lingkungan lebar 3 meter panjang 150 meter RT. 25 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	18	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 5 buah RT. 25 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	19	Bantuan sarana pertanian alat penanam kangkung 50 buah untuk kelurahan Paal Merah dan Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan.	DPKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	20	Pengadaan tiang dan lampu jalan 50 batang Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	21	Pengaspalan jalan 300 meter di Lr. Salatiga RT. 34, Lr. Komplek Guru Beringin RT. 30, Lr. Melati RT. 20 dan Belakang Masjid Al-Ansor RT. 22 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	22	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 5 titik Lr. Salatiga RT. 34, Lr. Madrasah RT. 20, Lr. Beringin II RT. 21 dan Lr. Berkat RT. 11 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	23	Bantuan UMKM untuk 5 orang di RT. 15, RT. 34, RT. 28 dan RT. 22 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DTKKUKM
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	24	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 15 orang di RT. 34, RT. 22, Perum Perbabri RT. 32 dan RT. 28 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DISDIK
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	25	Pengaspalan jalan 150 meter di Jl. Serdang I RT. 28 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	26	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan di 6 titik Jl. Serdang II RT. 28 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	27	Pembangunan pembuatan parit sepanjang 150 meter di Jl. Serdang I RT. 28 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	28	Pengecoran jalan 50 meter RT. 22 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	29	Pengaspalan jalan setapak 150 meter di Jl. Beliwis I dan Jl. Taman Arconel 2 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	30	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 1 titik RT. 15 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	31	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 1 titik RT. 17 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	32	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 1 titik RT. 18 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	33	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 1 titik Lr. Beringin IV RT. 13 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	34	Pengaspalan jalan 250 meter di Perum Perbabri RT. 32, Lr. Kejuma RT. 19, Lr. Beringin IV RT. 13 dan RT. 10 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	35	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 3 titik Perum Perbabri RT. 32 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	36	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 3 titik Perum Lintoso RT. 30 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	37	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 3 titik RT. 19 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	38	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 3 titik RT. 35 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	39	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 3 titik RT. 10 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	40	Pengaspalan jalan 600 meter di Jl. Lettu Harhari RT. 23, RT. 35 dan RT. 11 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	41	Pengaspalan ulang jalan sepanjang 600 meter di Lr. Beringin I dan II RT. 21 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR



NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	42	Pembangunan parit jalan sepanjang 30 meter Lr. Beringin II dan III RT. 21 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	43	Pengaspalan jalan sepanjang 120 meter lebar 3 meter menuju langgar Miftahul Jannah Lr. Beringin IV RT. 13 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	44	Pengaspalan jalan sepanjang 720 meter di Komplek Pepabri RT. 31 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	45	Pembangunan parit jalan sepanjang 150 meter di Komplek Pepabri RT. 31 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	46	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan di 4 titik Komplek Pepabri RT. 31 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPRKP
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	47	Pengaspalan jalan sepanjang 125 meter lebar 3 meter di Lr. Ayam Ras RT. 35 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DPUPR
	Muhilli Amin, SH	GOLKAR	48	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu 20 orang RT. 35 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan	DISDIK
8	Naim, SH	PAN	1	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 6 unit di RT. 12 dan RT. 14 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Naim, SH	PAN	2	Pengecoran jalan lanjutan sepanjang 200 meter di Jl. Perjuangan Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Naim, SH	PAN	3	Pengadaan pemasangan LPJU di simpang Korem RT. 08 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Naim, SH	PAN	4	Pengadaan bazar pasar murah sembako RT. 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPP
	Naim, SH	PAN	5	Pembuatan pita kejut di depan masjid Nurul Iman Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	Bagian Kesra
	Naim, SH	PAN	6	Pengecoran jalan sepanjang 100 meter di Lr. Damai RT. 47 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Naim, SH	PAN	7	Pengecoran jalan sepanjang 100 meter di Jl. Melati RT. 27 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Naim, SH	PAN	8	Pengecoran jalan sepanjang 120 meter Lr. Swadaya RT. 44 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR
	Naim, SH	PAN	9	Pengecoran jalan Lr. Melati Perumahan Aster Biru RT. 27 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPUPR
	Naim, SH	PAN	10	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan RT. 09 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPRKP
	Naim, SH	PAN	11	Pengadaan bazaar pasar murah RT. 09 Kelurahan Lingkar Selatan.	DPP
	Naim, SH	PAN	12	Pengecoran jalan lingkungan 120 meter RT. 16 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Naim, SH	PAN	13	Pengecoran jalan lingkungan RT. 43 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Naim, SH	PAN	14	Pemasangan lampu penerangan jalan RT. 12 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Naim, SH	PAN	15	Senam pagi setiap minggu pagi RT. 57 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DISPORA
	Naim, SH	PAN	16	Bazar pasar murah RT. 15 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPP
	Naim, SH	PAN	17	Pemasangan lampu penerangan jalan di 3 titik RT. 14 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Naim, SH	PAN	18	Bantuan UMKM untuk ibu-ibu pelaku wirausaha rumah tangga RT. 53 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DTKKUKM
9	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	1	Pengadaan pemasangan LPJU 3 titik di Lr. Kenanga II RT. 27 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	2	Pengaspalan jalan 200 meter Lr. Kenanga II RT. 27 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	3	Pengaspalan jalan 150 meter Tanjung Lumut Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	4	Pengadaan pemasangan LPJU 3 titik RT. 26 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	5	Pengecoran jalan 200 meter RT. 26 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	6	Pembangunan drainase RT. 16 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	7	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan 3 unit Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	8	Pengaspalan jalan 150 meter RT. 06 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	9	Pengaspalan jalan 200 meter RT. 31 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	10	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 titik RT. 15 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	11	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 titik RT. 18 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	12	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 3 titik RT. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	13	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan RT. 15 dan RT. 18 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	14	Pembangunan pembuatan box culvert RT. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	15	Pembangunan pembuatan box culvert RT. 18 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	16	Pembangunan drainase RT. 10 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	17	Perbaikan pengecoran jalan RT. 06 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	18	Perbaikan pengecoran jalan RT. 30 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	19	Overlay jalan RT. 10 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	20	Bantuan pengadaan etalase an. Putri Melati Jl. Bangau III RT. 11 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	21	Bantuan pengadaan etalase an. Mardiansyah Jl. Bangau III Lr. Merah Putih RT. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	22	Bantuan pengadaan etalase an. Karyati Jl. Bangau III RT. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	23	Bantuan pengadaan etalase an. Mukhlis Jl. Bangau III RT. 15 No. 72 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	24	Bantuan pengadaan etalase jualan nasi gemuk an. Azumar Jl. Bangau III RT. 15 No. 14 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	25	Bantuan pengadaan etalase jualan gado-gado an. Komariyah Jl. Rajawali I RT. 18 No. 48 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	26	Bantuan pengadaan etalase jualan nasi gemuk an. Titin Suryani Jl. Rajawali I RT. 18 No. 25 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	27	Bantuan pengadaan etalase jualan lauk-pauk an. Ramani Jl. Rajawali I RT. 18 No. 48 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	28	Bantuan pengadaan etalase jualan an. Sony Saputra Jl. Rajawali I RT. 22 No. 01 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	29	Bantuan pengadaan etalase jualan gorengan an. Sucipto Jl. Punai II RT. 30 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	30	Bantuan pengadaan etalase jualan gorengan an. Dedi Suardi Jl. Punai I RT. 30 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	31	Bantuan pengadaan etalase jualan bubur an. Agus Salim Jl. Punai I RT. 30 No. 49 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	32	Bantuan pengadaan etalase jualan nasi gemuk an. Sarmi Jl. Barau-Barau RT. 31 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	33	Bantuan pengadaan etalase jualan pisang krispi an. Leni Marlina Lr. Madrasah RT. 31 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	34	Bantuan pengadaan etalase jualan tas an. Masril Jl. Barau-Barau Lr. Madrasah RT. 31 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
	Muhammad Redho Kurniawan, SH	PBRB	35	Bantuan pengadaan etalase an. Dini Agusti, etalase baju an. Hasan Basri dan etalase dinsum an. Nurdalifa Ramadhana Jl. Barau-Barau RT. 32 No. 77 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan	DPP
10	Ambo Lau, BE	PBRB	1	Pembangunan drainase di RT. 05 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	2	Pembangunan drainase di RT. 21 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	3	Pembangunan drainase di RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	4	Realisasi normalisasi saluran parit jalan Lawet Raya RT. 16 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	5	Pelebaran dan pendalaman aliran sungai RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	6	Pengadaan pemasangan lampu penerangan jalan 4 titik RT. 13 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DPRKP
	Ambo Lau, BE	PBRB	7	Pengadaan 1 unit gerobak sampah RT. 13 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung.	DLH
	Ambo Lau, BE	PBRB	8	Pengecoran jalan 730 meter Jl. Peltu Sipahutar RT. 14 dan RT. 12 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	9	Bantuan bedah rumah (4x6 meter) Jl. Jawa RT. 07 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	10	Pengecoran jalan 150 metet Lr. Dara RT. 10 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	11	Pengadaan pemasangan lampu jalan di 3 titik RT. 10 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Ambo Lau, BE	PBRB	12	Pengecoran jalan 100 meter Lr. Berkat RT. 07 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Ambo Lau, BE	PBRB	13	Bantuan UMKM 2 kelompok Lr. Berkat RT. 07 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DTKKUKM
	Ambo Lau, BE	PBRB	14	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu Lr. Berkat RT. 07 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DISDIK
	Ambo Lau, BE	PBRB	15	Pengaspalan jalan lanjutan 250 meter Lr. Tribrata Jl. Jawa RT. 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	16	Lampu jalan 3 titik Lr. Tribrata Jl. Jawa, Jalan Arena MTQ, Jalan Kapten Uda Sunaryo Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Ambo Lau, BE	PBRB	17	Bantuan UMKM RT. 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DTKKUKM
	Ambo Lau, BE	PBRB	18	Bantuan Kursi Roda Lumpuh 2 orang RT. 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DINKES
	Ambo Lau, BE	PBRB	19	Penyaluran beasiswa 15 orang RT. 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DISDIK
	Ambo Lau, BE	PBRB	20	Bantuan perbaikan Mushollah RT. 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah	Bagian Kesra
	Ambo Lau, BE	PBRB	21	Perbaikan pengecoran jalan 75 meter Lr. Nusantara Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Ambo Lau, BE	PBRB	22	Pengadaan tempat pembuangan sampah sementara RT. 09 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DLH
11	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	1	Instalasi city gas di RT. 21 dan RT. 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	2	Realisasi pengaspalan jalan Lr. Sepakat 300 meter dan lanjutannya RT. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	3	Pembangunan polongan atau gorong gorong tertutup depan SMP 6 RT. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	4	Pengaspalan jalan Lr. Simpati RT. 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	5	Pembangunan drainase Lr. Simpati RT. 20 dan RT. 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	6	Pengadaan pemasangan LPJU kearah masjid di RT. 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	7	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu jalan serta pembenahan kabel listrik yang kendur RT. 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	8	Pengaspalan jalan Lr. Keluarga I ,II, III sepanjang 250 meter lebar 2,5 meter RT. 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	9	Pembangunan gorong-gorong Lr. Keluarga II RT. 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	10	Pelatihan keterampilan memasak kue untuk warga Jl. AR Saleh Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DTKKUKM
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	11	Perbaikan jalan AR Saleh Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	12	Pembangunan drainase Jl. AR Saleh Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	13	Pembangunan perbaikan jalan RT. 44 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	14	Perbaikan pengecoran sepanjang 250 meter Jl. Soekarno Hatta RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	15	Pengadaan pemasangan lampu jalan 4 titik RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPRKP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	16	Instalasi city gas untuk 300 KK RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	17	Bantuan UMKM untuk 15 orang RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DTKKUKM
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	18	Pengaspalan jalan 300 meter Jl. Soekarno Hatta RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	19	Penyaluran bantuan PKH RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DINSOS

NO.	DAPIL/NAMA	FRAKSI	ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)		OPD
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	20	Penyaluran beasiswa pelajar kurang mampu RT. 06 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan.	DISDIK
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	21	Pengaspalan jalan 100 meter Jl. Abdul Muis Lr. Anggrek RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	22	Pembangunan peninggian parit jalan 100 meter Jl. Abdul Muis Lr. Anggrek RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	23	Pengecoran jalan Lr. Kembar Teratai sepanjang 150 meter RT. 04 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	24	Pengadaan pemasangan tiang dan lampu penerangan jalan di 3 titik RT. 04 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	25	Pemasangan lampu penerangan jalan tanpa tiang di 5 titik RT. 04 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPRKP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	26	Penyaluran beasiswa pelajar yang sekolah di swasta RT. 04 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DISDIK
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	27	Pengawasan serta tindak lanjut terhadap pendistribusian gas subsidi yang tidak merata dan tidak tepat waktu di RT. 04 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPP
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	28	Pembangunan perbaikan drainase di Perumahan Alamanda RT. 39 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	29	Penggantian tiang listrik beton di Perumahan Alamanda RT. 39 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Risko Elwindo Aljufri, SH, M.Kn	PBRB	30	Pengadaan pembuatan fasum dan posyandu RT. 39 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah	DINKES
12	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	1	Pengadaan lampu jalan 5 titik di RT. 09 Jl. Kopral Habali Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	2	Pengadaan lampu jalan 3 titik di RT. 09 Lrg. Falma Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	3	Pengadaan tiang listrik 3 unit di RT. 09 Lrg. Falma Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPRKP



<b>NO.</b>	<b>DAPIL/NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (Kegiatan yang diusulkan)</b>		<b>OPD</b>
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	4	Pembuatan parit 300 meter di RT. 09 Lrg. Falma Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	5	Pengadaan pangkalan gas subsidi 3 kg di Rt. 09 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPP
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	6	Pengaspalan jalan di Jl. Kenari 2 RT. 05 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	7	Pembangunan parit jalan 80 meter Farma 1 dan Farma 2 RT. 09 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	8	Pengaspalan jalan di Jl. Kenanga RT. 05 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	9	Pengaspalan jalan 300 meter Jl. Sersan Muslim RT. 12, RT. 09, RT. 07 dan RT. 13 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah.	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	10	Pengaspalan jalan RT. 37 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	11	Pengaspalan jalan RT. 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	12	Pengaspalan Lorong Mahkamah RT. 36 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	13	Pengaspalan Lorong Mulyo RT. 40 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR
	Sri Fatmawati, A.Md	PBRB	14	Pengaspalan Lorong Merpati RT. 37 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah	DPUPR

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah. Capaian IKU Kota Jambi sampai dengan tahun 2022 dijabarkan berdasarkan Visi dan Misi Kota Jambi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama Kota Jambi

No.	Indikator Sasaran	2021		2022		Target 2023	Target 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3.0	2.79	3.1	3.2
2	Nilai SAKIP	BB (70)	B (66.60)	BB (70)	B (67.37)	BB	BB
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)	4,205 (A- )	4.02 (B)	4.05 (B)
4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	81%	84%	91.30%	86%	88%
5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	56.38%	63.31%	63.77%	67.09%	70,99%
6	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9	42.5	40.05	40.2
7	Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76	88.09	80.78	80.8
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87	49.92	44.9	44.92
9	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79	77.5	80	84
10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%	14%	9%	9%
11	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M	744.785 M	523.37 M	575.70 M

No.	Indikator Sasaran	2021		2022		Target 2023	Target 2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.6	8.95	9.1	8.98
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.73	72.71	72.81	72.99	72.89	72.97
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.38	15.38	15.39	15.40
15	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	67.88	69.89	67.88 (2021)	69.92	68.50
16	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95	57.96	58	58.5

Tabel 6.2.  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,55
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,41%
	Laju Inflasi	3.50-5.00
	PDRB Perkapita	57,6 Juta
	Indeks Gini	0,34
	Kemiskinan	828
	Indeks Pembangunan Masyarakat	79,72
	Angka melek huruf	0,99
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,95
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,13
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	4,32
	Angka Harapan Hidup (UHH)	72,89
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66%
	Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	97,15%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	88%
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
	Opini BPK	WTP
	Skor Pola Pangan Harapan	91
<b>ASPEK DAYA SAING</b>		
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
	Pelayanan Urusan Wajib	
	Terkait Pelayanan Dasar	
<b>PENDIDIKAN</b>		
	Pendidikan dasar	

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD dan PNF	'APK PAUD usia 5-6 tahun 100 %, usia 3-5 75%, usia 0-3 50%
	Angka partisipasi kasar (APK) SD	114,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98,2%
	Angka Partisipasi SD	100,88%
	Rerata UAS SD	60,82%
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	'99,8%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	72,8%
	Angka Partisipasi SMP	84,4%
	Rerata UN SMP	51,65%
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	
	<b>KESEHATAN</b>	
	Meningkatkan status puskesmas yang terakreditasi	2 Puskesmas Paripurna
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah memenuhi kelengkapan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar minimal 85%.	60%
	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir	100%
	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kesehatan rujukan	A
	Persentase pelayanan penyakit menular dan tidak menular	100%
	Persentase Rumah Sakit pemerintah yang ter akreditasi	100%
	Persentase Puskesmas yang menjalankan pelayanan kesehatan tradisional	100%
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100%
	Persentase Pelayanan Imunisasi	100%
	Persentase pelayanan gizi masyarakat	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	100%
	Persentase pencapaian Keluarga berPHBS	95%
	Cakupan Kelurahan yang Melaksanakan STBM	100%
	Persentase pelayanan Kesehatan olah raga dan kesehatan kerja di puskesmas	100%
	Persentase Ketenagaan kesehatan sesuai dengan kompetensi	100%
	Persentase Peningkatan pelayanan kefarmasian	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	30.000 org
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.00
	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	85,79%
	Cakupan Pelayanan Air Minum	75,39%
	Cakupan Pelayanan Air Limbah	3,38%
	Cakupan jalan status kota dalam Kondisi Baik	100%
	Cakupan Bangunan dalam kondisi baik	85,18%
	Cakupan Kesesuaian Ruang	95.9%
	Cakupan jembatan dalam Kondisi Baik	100%

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
	Sistem Cakupan Jaringan Drainase/sungai dalam Kondisi Baik	68,42%
	Cakupan dokumen perencanaan yang diimplementasikan	100%
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
	Persentase penanganan Luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	87%
	Persentase Pemenuhan Rumah bagi MBR	100%
	Persentase Permukiman yang dilayani Utilitas Umum	100%
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MSAYARAKAT</b>	
	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	96%
	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%
	Cakupan Petugas perlindungan masyarakat	98%
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	98%
	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Jambi	98%
	Cakupan pelayanan kesiagaan dini	100%
	Cakupan Peningkatan Pelayanan kebakaran Dan Penyelamatan	100%
	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20%
	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	20%
	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%
	Persentase peningkatan peran forum kemasyarakatan dalam mengantisipasi sumber potensi konflik di daerah	100%
	<b>SOSIAL</b>	
	Persentase PMKS yang tertangani	85%
	Persentase pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar	100%
	Persentase pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
	Persentase pemberdayaan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani PMKS	100%
	Persentase peningkatan penangan jumlah keluarga miskin	100%
	<b>LAYANAN WAJIB NON DASAR</b>	
	<b>TENAGA KERJA</b>	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,65
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Indeks Pembangunan Gender	94.07
	Indeks Pemberdayaan Gender	68.50
	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	100%
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	66%
	Penurunan Ratio KDRT	0,017%
	Rasio Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	0,0197
	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	90%

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
	<b>PANGAN</b>	
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	3.200
		88
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	96,60%
	Penurunan Pangan segar yang Tercemar	3
	<b>PERTANAHAN</b>	
	Persentase luas lahan yang bersertifikat	
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	Indeks Kualitas Air	38,75
	Indeks Kualitas Udara	80,78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,50
	Persentase Jumlah Sampah yang ditangani	76,66%
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	14,23%
	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sudah Mengelola Lingkungan sesuai dengan Dokumen Lingkungan	180
	Persentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau Publik	20%
	<b>ADMINISTRASI PECAHANTAN SIPIL</b>	
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Sipil	100%
	Validitas Database Kependudukan	95%
	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	100%
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	66%
	Persentase Kelompok UEM yang Aktif	83%
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	70%
	Persentase Pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna	85%
	Usulan Sarana Prasarana Kelurahan yang Terakomodir	97%
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	97,15%
	<b>PERHUBUNGAN</b>	
	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	100%
	Cakupan yang terlayani angkutan umum	100%
	Pengurangan Jumlah Titik Kemacetan	0 Titik
	Persentase Pelayanan Perparkiran	100%
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,77
	Persentase Peningkatan ekosistem TIK	80%
	Cakupan akses dan kualitas informasi publik	90%
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,94%

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
	Persentase koperasi berkualitas	36,70%
	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	51,76%
	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	98,62%
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
	Realisasi Investasi	523.37 M
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
	Indeks Pembangunan Pemuda	52
	Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam organisasi	80%
	Persentase pembinaan cabang olahraga prestasi	80%
	<b>STATISTIK</b>	
	Tingkat ketersediaan data/informasi/statistik daerah	50%
	<b>PERSANDIAN</b>	
	Rasio Jumlah Informasi Milik Pemerintah yang diamankan	65%
	<b>KEBUDAYAAN</b>	
	Jumlah pelestarian, penyelenggaraan even seni dan budaya	6
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
	Jumlah Rata - Rata pengunjung Perpustakaan Pertahun	52.836 Pengunjung
	<b>KEARSIPAN</b>	
	Jumlah arsip yang terselamatkan	1.200
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	36
	<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>	
	<b>PARIWISATA</b>	
	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,41%
	Jumlah kunjungan wisatawan	700.000
	PAD sektor pariwisata	50 M
	Lama Kunjungan wisata	3 hari
	<b>PERTANIAN</b>	
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/ kapita/ hari)	3.200
		88
	<b>PERDAGANGAN</b>	
	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	100
	Cakupan Bina Perdagangan	100%
	<b>PERINDUSTRIAN</b>	
	Persentase Daya Saing Produk IKM	8,3
	Cakupan Bina IKM	8,3

No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>	
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	100%
	<b>KEUANGAN</b>	
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%
	Jumlah OPD yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Penganggaran, Pengendalian Keuangan Daerah Tepat Waktu dan sesuai aturan	40 OPD
	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	100%
	Jumlah OPD dan BLUD yang mneyajikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SAP dan SAK	40 OPD dan 22 BLUD
	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Data Barang Milik Daerah yang Akurat dan Tepat waktu	40 PD
	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	9%
	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%
	Persentase Keakuratan Basis Data dan Pelaporan Pajak	70%
	Persentase Penyelesaian Piutang Pajak	30%
	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
	Indeks Profesionalitas ASN	62%
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan	100%
	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	95%
	Persentase ASN yang mendapatkan pembinaan pengendalian	100%
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	87%
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	67%
	Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN	100%
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar perencanaan	100%
	<b>PENGAWASAN</b>	
	Indeks persepsi anti Korupsi	3,8
	Cakupan pelaksanaan pembinaan internal dan pengendalian kebijakan KDH	100%
	<b>SETWAN</b>	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	6 dok
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran untuk mengakomodir Program- program kerja DPRD	9dok
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Meningkatnya kinerja layanan keprotokolan	100%
	Jumlah telaah/rekomendasi staf ahli walikota terhadap kebijakan pemerintah daerah	3 Telaah rekomendasi
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah jabatan dan kantor Sekretariat Daerah	17,07%



No.	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Tahun 2024
	Ketepatan waktu Penyampaian LPPD	100%
	Persentase Ketersediaan Lahan Tanah Untuk Pelayanan Masyarakat	32%
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	11 Kec
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	20%
	Presentase penyelesaian perkara Pemerintah Daerah	27,27%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100%
	Persentase Kesepakatan bersama yang di tindaklanjuti	100%
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan Monitoring Bidang perekonomian	75%
	Rata-rata indeks pelayanan publik	20%
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%
	Persentase meningkatnya kualitas anjab dan ABK sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%
	Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	100%
	Rata-rata indeks pelayanan publik	A
	Persentase tindak lanjut pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kepemudaan	100%
	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	76,19%
	Persentase tertib administrasi pembangunan	100%
	Persentase Kinerja pengadaan barang/jasa	69,06%
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	98%
	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan	90%
	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir	80%
	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan	80%
	<b>ASPEK DAYA SAING</b>	
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>	
	Kemampuan Ekonomi	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	A
1.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,77
1.3	Nilai SAKIP	A
2.	Pertanian	
2.1	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (gram/kapita/hari)	
	Energi	3.200
	Protein	88

## **BAB VII PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2024 merupakan gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Jambi Tahun 2024 yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026. Selain itu RKPD Kota Jambi Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kota Jambi Tahun 2024;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Jambi Tahun 2024;3
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2024;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.

RKPD Kota Jambi Tahun 2024 ini, diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Jambi yang bertema **PENGUATAN STABILITAS EKONOMI, DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAERAH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN.**

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kota Jambi Tahun 2024, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, maka akan dilakukan

penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan RPKD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**WALIKOTA JAMBI**

**DR. H. SYARIF FASHA, ME**